



LAPORAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



KATA PENGANTAR

Dalam rangka implementasi Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang disampaikan kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2025, dan laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan kerja sama semua *stakeholder*, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian laporan ini disusun sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban Kepala Daerah yang mendapat kepercayaan dari segenap masyarakat Kabupaten Blitar.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seiring doa, semoga segala upaya kita dalam membangun Kabupaten Blitar senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT, Amin Ya Robbal Alamiin.

Blitar, 12 Maret 2026

Bupati Blitar,



Rijanto





DAFTAR ISI

Cover		
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Bab 1	Pendahuluan	1
1.1.	Latar Belakang	3
1.1.1.	Penjelasan Umum	3
1.1.2.	Perencanaan Pembangunan Daerah	17
1.1.3.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	71
Bab 2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	145
2.1.	Capaian Kinerja Makro	145
2.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	162
2.3.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	173
Bab 3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	471
3.1.	Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah	472
3.2.	Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah	472
3.3.	Permasalahan dan Kendala	472
3.4.	Saran dan Tindak Lanjut	472
Bab 4	Penetapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	473
4.1.	Urusan Pendidikan	473
4.2.	Urusan Kesehatan	477
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	506
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	513



4.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	516
4.6.	Urusan Sosial	543
4.7	Program dan Kegiatan	553
Bab 5	Penutup	567



BAB

1

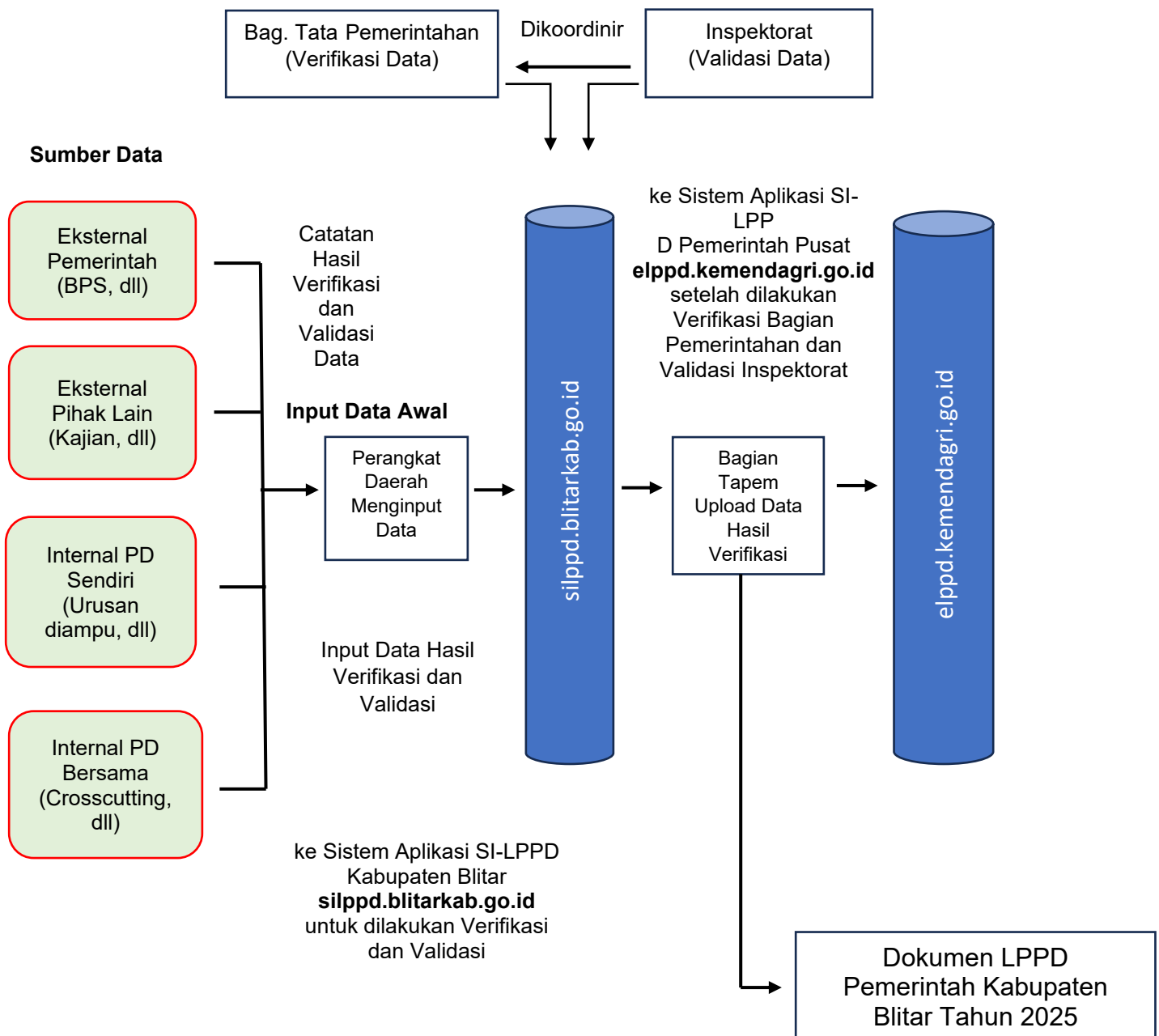
PENDAHULUAN

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dokumen LPPD memuat 5 bab yang merupakan rincian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD menjadi dokumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bahan pembinaan lanjutan bagi pemerintah daerah efektif dan akuntabel dalam mencapai keselarasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Maka, substansi LPPD yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Blitar adalah berupa laporan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pada tahun 2025 ini berupa capaian kinerja outcome, yang mendukung pencapaian visi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. LPPD mencakup 5 bagian yaitu pendahuluan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penutup. Kelima bab ini harus saling terkait dan memiliki data pendukung yang sinkron. LPPD disusun tahunan secara elektronik dan dokumen manual yang melibatkan seluruh perangkat sehingga memerlukan peta proses bisnis sistem verifikasi dan validasi data kinerja.



Gambar 1.1
Peta Proses Bisnis Penyusunan LPPD





1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Blitar Tahun 2025 meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025;
- 16) Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Blitar Tahun 2024-2026;
- 17) Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025;
- 18) Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 19) Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 20) Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. Data Geografis

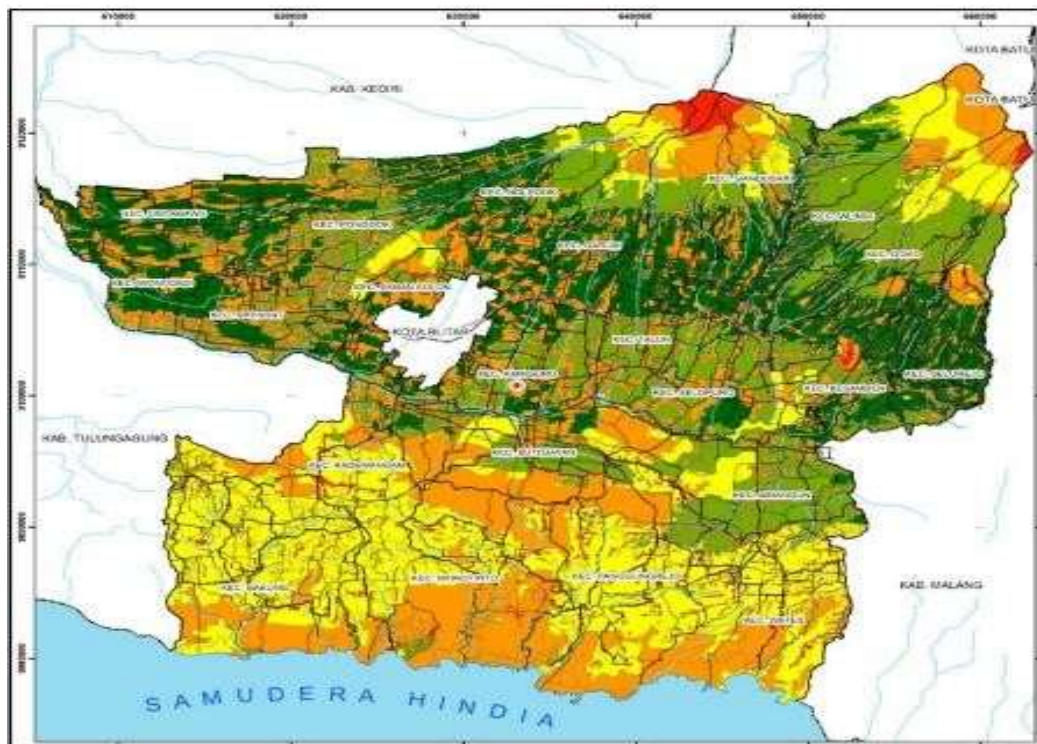
Kabupaten Blitar merupakan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara 111⁰40'-112⁰10' Bujur Timur dan 7⁰58' – 8⁰9'5" Lintang Selatan dan secara administratif memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur	: Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.





Gambar 1.2.
Peta Kabupaten Blitar



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau adalah 1.745,383 km² yang secara administratif Kabupaten Blitar terdiri atas 22 Kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Kabupaten Blitar terbagi menjadi dua bagian dengan adanya Sungai Brantas yang mengalir di Kabupaten Blitar. Kedua bagian tersebut terbagi menjadi Kabupaten Blitar Bagian Selatan meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutotojayan, dan Kademangan. Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Blitar Selatan tersebut berada di daerah pesisir dan pegunungan berbatu dengan ketinggian antara 105-349 meter dari permukaan laut. Sedangkan untuk wilayah bagian Blitar Utara meliputi Kecamatan Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu. Wilayah bagian Utara Kabupaten Blitar ini memiliki ketinggian 150-420 meter dari permukaan air laut. Wilayah Blitar bagian Utara merupakan perpaduan antara dataran tinggi dan



rendah serta memiliki struktur tanah yang subur yang keberadaannya di sekitar Gunung Kelud.

Topografi Kabupaten Blitar ditandai oleh ketinggian rata-rata yang berada di atas permukaan laut, dengan angka sekitar +100 meter. Klasifikasi wilayah menurut ketinggian memberikan gambaran yang lebih terperinci, dimana sekitar 36.4% kecamatan berada pada ketinggian antara 100 hingga kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut, 36.4% wilayah kecamatan memiliki ketinggian antara 200 hingga kurang dari 300 meter di atas permukaan air laut, dan 27.2% wilayah kecamatan terletak pada ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan air laut. Secara geografis, Kabupaten Blitar tergolong dalam daerah pegunungan, perbukitan, dan dataran. Daerah pegunungan terletak di bagian utara Kabupaten Blitar, yang mencakup Gunung Kombang, Gunung Kelud, dan Gunung Butak dengan ketinggian mencapai 167 hingga 2.800 meter di atas permukaan laut. Daerah ini terbentuk dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan lereng berkisar antara 2% hingga 40%. Wilayah pegunungan ini meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sementara itu morfologi perbukitan terdapat di bagian Selatan Kabupaten Blitar dengan ketinggian berkisar antara 100 hingga 350 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini umumnya terbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan lereng berkisar antara 20% hingga 40%. Wilayah perbukitan ini mencakup Kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Di bagian tengah Kabupaten Blitar terdapat morfologi dataran. yang umumnya ditempati oleh batuan hasil letusan gunung api dan endapan sungai Brantas. Kemiringan lereng di wilayah dataran ini bervariasi antara 0% hingga sekitar 20%. Wilayah dataran mencakup Kecamatan Wonodadi, sebagian Kecamatan Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro, dan Selorejo.

Secara klimatologis, Kabupaten Blitar memiliki iklim yang termasuk dalam tipe C.3. yang merupakan jenis iklim tropis. Ciri khas dari tipe iklim ini adalah adanya dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya berlangsung dari bulan November hingga April, sementara musim penghujan terjadi antara bulan Mei hingga September. Curah hujan rata-rata selama musim penghujan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4°C hingga





28,3°C dengan catatan bahwa tempat-tempat yang berdekatan dengan pesisir pantai cenderung memiliki suhu udara rata-rata yang sedikit lebih tinggi.

Kabupaten Blitar sebagai lokasi dengan struktur geologi yang kaya. menampilkan beragam jenis batuan yang membentuk komposisi geologisnya. Dalam konteks sejarah geologisnya. Kabupaten Blitar dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang memiliki variasi satuan batuan. termasuk batuan gamping, batuan vulkanik, dan batuan marin yang berasal dari periode Miosen. Penyusunan batuan-batuan ini menggambarkan kompleksitas geologi yang mengandung informasi tentang evolusi geologis wilayah tersebut. Satuan batuan gamping. sebagai salah satu komponen utama dalam struktur geologi Kabupaten Blitar. terutama terdiri dari batuan gamping terumbu. Batuan ini secara luas tersebar di wilayah selatan Kabupaten Blitar mencakup sebagian besar dari Kecamatan Bakung sebagian wilayah Wonotirto serta sebagian kecil wilayah Panggungrejo dan Wates. Keberadaan batuan gamping terumbu ini mempengaruhi hingga sekitar 20% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Blitar.

Selain itu, terdapat satuan batuan campuran yang terdiri dari endapan vulkanik seperti breks, tuva, dan lava, serta endapan marin seperti batu gamping, napal, serpik, batu pesisir, dan konlomerat. Distribusi satuan batuan campuran ini tersebar di beberapa wilayah mencakup Kecamatan Sutojayan, sebagian wilayah Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro, dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda sebagai komponen lain dalam struktur geologi Kabupaten Blitar meliputi lava lahar breksi dan lava andesit hingga basalt. Batuan ini terutama terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dan memiliki proporsi yang signifikan mencakup sekitar $\pm 50\%$ dari luas total Kabupaten Blitar. Struktur geologi Kabupaten Blitar menggambarkan keragaman geologi yang memberikan wawasan tentang sejarah geologis dan potensi sumber daya alam di Kabupaten Blitar.

Pembagian wilayah sungai di Kabupaten Blitar menunjukkan perbedaan pola aliran antara wilayah utara dan selatan. Wilayah utara, yang dialiri oleh Sungai Brantas menunjukkan pola aliran radial yang terpusat pada Gunung Kelud dan Gunung Butak. Anak sungai serta sungai-sungai utamanya tampaknya berasal dari titik pusat ini dan kemudian menjalar keluar menuju Sungai Brantas. Sementara itu. wilayah selatan ditandai oleh sungai-sungai yang sebagian besar bermuara langsung ke Samudera Indonesia. hanya sebagian kecil yang mengalir



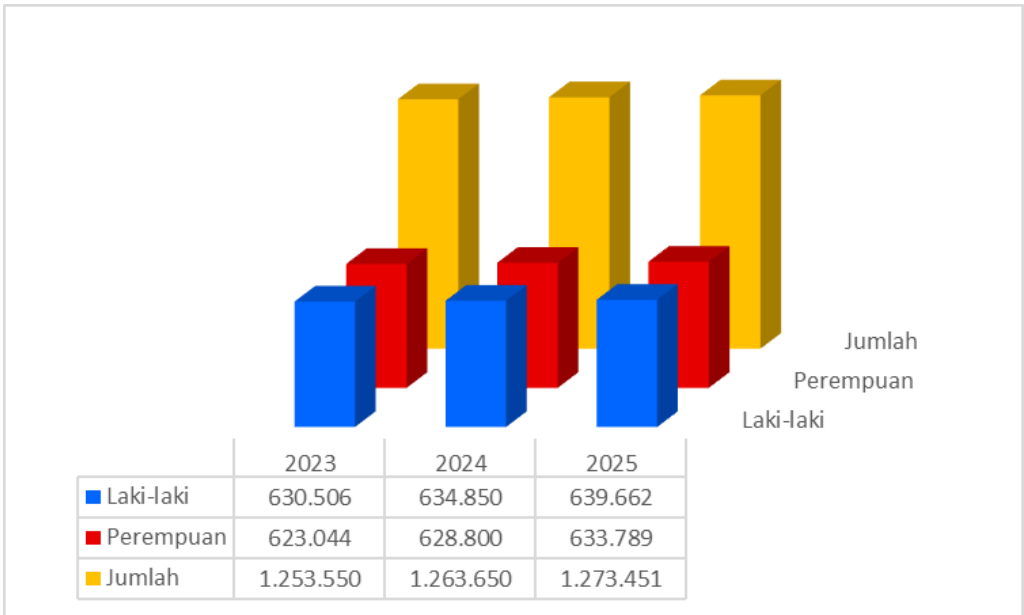


ke Sungai Brantas. terutama di sekitar Kecamatan Binangun. Sumber-sumber mata air utama dengan debit air yang signifikan terletak di beberapa wilayah seperti Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Di wilayah lainnya seperti Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan, dan Bakung, sumber air relatif kecil dengan debit rata-rata kurang dari 5 liter per detik dapat ditemukan.

c. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.268.369 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen, terdiri dari laki-laki sejumlah 639.927 jiwa dan perempuan sejumlah 631.442 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 1.745,383 km², maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar adalah 730 jiwa/km². Adapun *sex ratio* penduduk Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 100,93 yang artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki.

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 (jiwa)

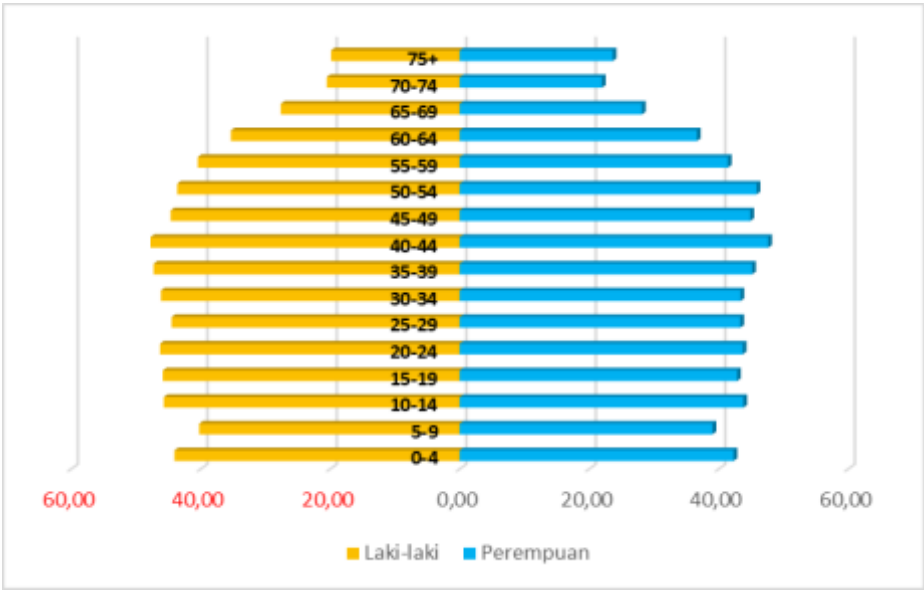


Sumber: BPS Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025.



Struktur dan komposisi penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2025 disajikan melalui piramida penduduk sebagaimana Gambar 1.3. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk semakin cembung di bagian tengah dan semakin sempit di bagian bawah, mengindikasikan bahwa jumlah penduduk muda semakin turun, sedangkan jumlah penduduk dewasa semakin meningkat. Badan piramida penduduk yang makin membesar menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Di sisi lain, peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah meningkatkan Usia Harapan Hidup sehingga bagian atas piramida penduduk lebih cembung, yang berarti proporsi penduduk usia lanjut yang masih cukup banyak.

Gambar 1.4
Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2025



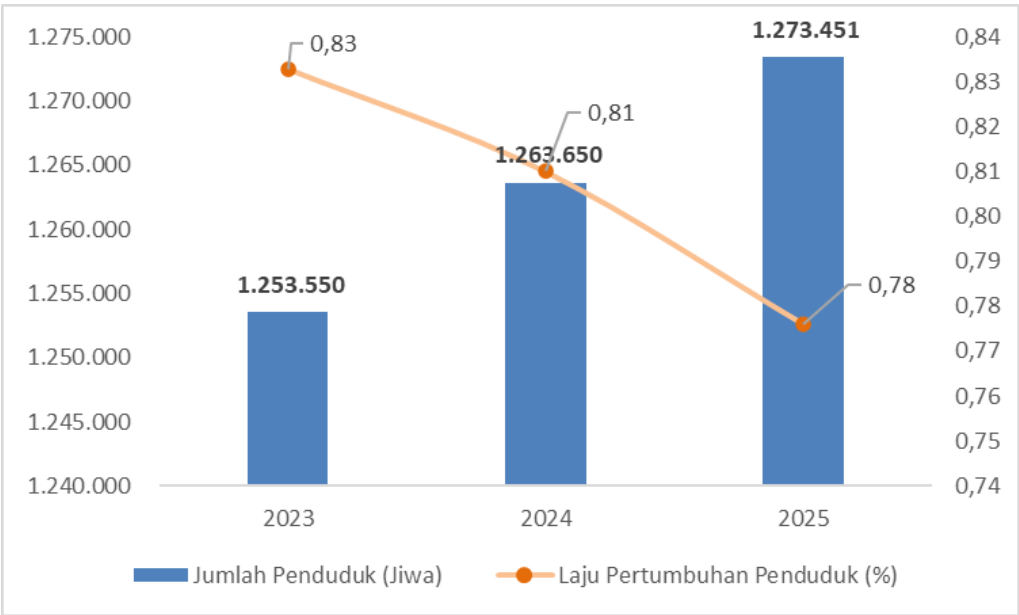
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.273.451 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen dengan laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,76%) dan laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,79%). Laju pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 pertumbuhan penduduk sebesar 0,81 persen.





Gambar 1.5
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar
Tahun 2023-2025



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026

d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau serta Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/315/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Blitar dapat diuraikan per kecamatan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan
se Kabupaten Blitar

No.	Kecamatan	Jumlah			
		Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT
1	Wonodadi	11	30	61	249
2	Udanawu	12	26	59	233
3	Srengat	16	41	89	344
4	Kademangan	15	45	117	424
5	Bakung	11	31	62	235
6	Ponggok	15	46	132	582
7	Sanankulon	12	37	81	292
8	Wonotirto	8	34	95	325
9	Nglegok	11	37	117	410





10	Kanigoro	12	38	118	401
11	Garum	9	35	108	317
12	Sutojayan	11	25	68	263
13	Panggunrejo	10	32	72	271
14	Talun	14	40	88	294
15	Gandusari	14	45	115	441
16	Binangun	12	33	83	332
17	Wlingi	9	43	91	262
18	Doko	10	39	97	308
19	Kesamben	10	36	115	433
20	Wates	8	22	54	221
21	Selorejo	10	25	76	270
22	Selorejo	8	26	69	249
Jumlah		248	766	1969	7156

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 Kecamatan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Wates dan Kecamatan Selorejo. Sedangkan untuk jumlah dusun/lingkungan yang paling sedikit ada di Kecamatan wates sebanyak 22 dusun/lingkungan.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah.

Jumlah Perangkat Daerah adalah pelaksana urusan yang ada di Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026. Pembentukan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar.

Tabel 1.2
Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar
Per 31 Desember 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Tipe	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	A	Perbup No. 94 Th 2022
2	Sekretariat DPRD	A	Perbup No. 95 Th 2022
3	Inspektorat	A	Perbup No. 96 Th 2022
4	Dinas Pendidikan	A	Perbup No. 99 Th 2022
5	Dinas Kesehatan	A	Perbup No. 98 Th 2022
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	Perbup No. 97 Th 2022





7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	A	Perbup No. 100 Th 2022
8	Dinas Sosial	A	Perbup No. 101 Th 2022
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	Perbup No. 102 Th 2022
10	Dinas Tenaga Kerja	A	Perbup No. 103 Th 2022
11	Dinas Lingkungan Hidup	A	Perbup No. 104 Th 2022
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A	Perbup No. 105 Th 2022
13	Dinas Peternakan dan Perikanan	A	Perbup No. 106 Th 2022
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	Perbup No. 107 Th 2022
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	Perbup No. 108 Th 2022
16	Dinas Perhubungan	A	Perbup No. 109 Th 2022
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	A	Perbup No. 110 Th 2022
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	A	Perbup No. 75 Th. 2025
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A	Perbup No. 112 Th 2022
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	Perbup No. 57 Th 2025
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	Perbup No. 114 Th 2022
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	Perbup No. 115 Th 2022
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	C	Perbup No. 116 Th 2022
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	A	Perbup No. 117 Th 2022
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	A	Perbup No. 118 Th 2022
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	A	Perbup No. 119 Th 2022
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	Perbup No. 120 Th 2022
28	Badan Pendapatan Daerah	A	Perbup No. 121 Th 2022
29	Kecamatan Selopuro	A	Perbup No. 122 Th 2022
30	Kecamatan Kesamben	A	Perbup No. 122 Th 2022
31	Kecamatan Doko	A	Perbup No. 122 Th 2022
32	Kecamatan Wlingi	A	Perbup No. 122 Th 2022





33	Kecamatan Gandusari	A	Perbup No. 122 Th 2022
34	Kecamatan Selorejo	A	Perbup No. 122 Th 2022
35	Kecamatan Wates	A	Perbup No. 122 Th 2022
36	Kecamatan Binangun	A	Perbup No. 122 Th 2022
37	Kecamatan Panggungrejo	A	Perbup No. 122 Th 2022
38	Kecamatan Sutojayan	A	Perbup No. 122 Th 2022
39	Kecamatan Kademangan	A	Perbup No. 122 Th 2022
40	Kecamatan Wonotirto	A	Perbup No. 122 Th 2022
41	Kecamatan Bakung	A	Perbup No. 122 Th 2022
42	Kecamatan Wonodadi	A	Perbup No. 122 Th 2022
43	Kecamatan Udanawu	A	Perbup No. 122 Th 2022
44	Kecamatan Srengat	A	Perbup No. 122 Th 2022
45	Kecamatan Ponggok	A	Perbup No. 122 Th 2022
46	Kecamatan Nglegok	A	Perbup No. 122 Th 2022
47	Kecamatan Sanankulon	A	Perbup No. 122 Th 2022
48	Kecamatan Garum	A	Perbup No. 122 Th 2022
49	Kecamatan Kanigoro	A	Perbup No. 122 Th 2022
50	Kecamatan Talun	A	Perbup No. 122 Th 2022

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah, Tahun 2025.

Tabel 1.3
Nama UPT Dinas/Badan Kabupaten Blitar
Per 31 Desember 2025

No	Perangkat Daerah	Nama UPT	Dasar Hukum
1	Dinas Pendidikan	UPT Satuan Pendidikan (687 Unit)	Perbup No. 99 Th 2022
2	Dinas Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Perbup No. 98 Th 2022
		UPT Instalasi Farmasi	
		UPT Puskesmas (25 Unit)	





3	Dinas Peternakan dan Perikanan	UPT Rumah Potong Hewan	Perbup No. 106 Th 2022
		UPT Pusat Kesehatan Hewan	
		UPT Pembenihan Ikan	
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Perbup No. 102 Th 2022

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah, Tahun 2025

Dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari segi kuantitas, dukungan sumber daya manusia dapat dilihat dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Blitar, per 31 Desember 2025 ASN di Kabupaten Blitar berjumlah 4.122 terdiri dari 1.743 PNS dan 2.379 PPPK. Berdasarkan golongan jumlah ASN di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Jumlah PNS Kabupaten Blitar berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	I b	1
2.	I d	5
3.	II a	17
4.	II b	42
5.	II c	167
6.	II d	161
7.	III a	286
8.	III b	390
9.	III c	240
10.	III d	443
11.	IV a	234
12.	IV b	110
13.	IV c	26
	Total	2.122

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025.

Berdasarkan data pada tabel 1.6 tersebut, dapat diketahui masih terdapat 5 orang PNS Golongan I, sedangkan untuk jumlah PNS yang paling banyak adalah PNS dari golongan III dengan jumlah terbanyak dari golongan IIID sebanyak 443 personil. Adapun untuk PPPK sebaran jumlah berdasarkan golongan dapat dilihat sebagai berikut.





Tabel 1.5
Jumlah PPPK Kabupaten Blitar berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	I	203
2.	V	483
3.	VII	171
4.	IX	266
5.	X	37
6.	Paruh Waktu	1.447
	Total	2.607

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS Kabupaten Blitar (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dapat disajikan sebagai berikut.

Gambar 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2025

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	390
2.	SMP	46
3.	SMA	1.521
4.	D-I	4
5.	D-II	6
6.	D-III	588
7.	D-IV	98
8.	S 1	1.626
9.	S 2	449
10.	S3	1
	Total	4.729

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah ASN Kabupaten Blitar terbanyak berlatar pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) sejumlah 1.626 orang dan strata pendidikan ASN di Pemerintah Kabupaten Blitar yang terendah adalah SD sejumlah 390 sedangkan yang tertinggi adalah S-3 yaitu sejumlah 1 orang PNS.





f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumlah pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Tahun Anggaran 2025 Anggaran yang bersumber dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.571.286.316.706,52 sedangkan anggaran yang bersumber dari Dana Transfer sebesar Rp. 2.035.437.089.859,09,00.

Tabel 1.7
Realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun 2025

Uraian	Ralisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	564.422.840.494,08	571.286.316.706,52	98,79
Dana Transfer	2.145.166.164.492,00	2.035.437.089.859,00	105,39
Pendapatan Daerah	2.709.589.004.986,00	2.606.723.406.565,52	103,94

Sumber : BPKAD Kab. Blitar, 2025

Adapun untuk realisasi belanja daerah tahun 2025, berdasarkan uraian belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Realisasi Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun 2025

Uraian	Ralisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi	1.869.361.259.201,97	2.014.890.620.601,99	92,77
Belanja Modal	164.481.287.972,16	278.089.543.836,61	59,14
Belanja Tak Terduga	575.570.738,07	6.482.318.000,00	8,87
Belanja Transfer	390.238.011.871,00	416.327.485.321,43	93,73
Jumlah Belanja	2.424.656.129.783,20	2.715.789.967.760,03	89,27

Sumber : BPKAD Kab. Blitar, 2025





1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Blitar terdiri dari 4 aspek yaitu geografi demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum.

Permasalahan	
Aspek Geografi Demografi	
1	Belum optimalnya pengurangan dan penanganan persampahan
2	Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan limbah
3	Belum optimalnya mitigasi bencana
4	Terjadinya krisis air bersih di beberapa wilayah karena kekeringan
5	Tidak stabilnya peringkat Indeks Ketahanan Pangan nasional, meskipun setiap tahun IKP meningkat
6	Komposisi penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Namun di sisi lain, profil tenaga kerja Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa mayoritas yang menyumbang tingkat pengangguran adalah penduduk usia produktif yang merupakan lulusan SLTA/SMK dan perguruan tinggi
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1	Masih adanya kesenjangan dan kemiskinan
2	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia
3	Belum optimalnya akses terhadap pemenuhan layanan dasar, termasuk adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur
4	Rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak sebagai akibat dari kurangnya kesempatan produktif
5	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja
6	Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dan terlatih
7	Belum optimalnya pelaksanaan program link and match ketenagakerjaan di mana jumlah penduduk usia kerja di kabupaten didominasi oleh lulusan SMA/SMK
8	Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah
9	Menurunnya produktivitas pertanian sebagai akibat dari menurunnya produksi pertanian tanaman pangan



10	Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan daerah karena belum optimalnya pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan manajemen destinasi pariwisata
11	Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
12	Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan karena belum optimalnya kegiatan perdagangan
13	Masih rendahnya daya saing produk daerah baik secara nasional, regional maupun internasional
14	Belum optimalnya pengelolaan pasar
15	Belum optimalnya pengembangan industri karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan hasil produk dan biaya produksi yang efisien
16	Rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah
17	Belum optimalnya digitalisasi pemasaran
18	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam kepemilikan legalitas usaha
19	Belum optimalnya perkembangan UMKM karena pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global
20	Terbatasnya pada akses permodalan
21	Belum optimalnya persaingan koperasi dengan lembaga keuangan dan/atau lembaga ekonomi lainnya
22	Belum optimalnya pengelolaan koperasi
23	Rendahnya pemanfaatan koperasi oleh masyarakat
24	Terbatasnya sumber daya finansial koperasi
25	Belum optimalnya pengembangan iklim investasi
26	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami peningkatan yang serius
Aspek Daya Saing Daerah	
1	Meningkatnya rasio ketergantungan
Aspek Pelayanan Umum	
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima
3	Belum optimalnya layanan pemerintahan berbasis digital (e-government)
4	Belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi secara spasial maupun non spasial
5	Belum optimalnya penerapan manajemen keamanan sistem informasi daerah
6	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku





7	Belum optimalnya manajemen kinerja ASN
8	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
9	Belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah
10	Belum optimalnya kinerja pengawasan internal daerah
11	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
12	Belum tuntasnya pemindahan gedung perkantoran sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar ke Kanigoro

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

b.1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Blitar mencerminkan aspirasi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang diutarakan dalam proses pemilihan. Sebagai pedoman strategis, visi ini menentukan arah pembangunan sekaligus menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan tercapai dalam lima tahun mendatang. Visi tersebut dirancang untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah dan menjawab isu strategis yang muncul dalam jangka menengah, dengan tetap berpedoman pada visi dan arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan visi yang terdefinisi dengan jelas, diharapkan dapat tercipta sinergi dan motivasi di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang direncanakan. Mengacu pada analisis terkait kondisi daerah, permasalahan pokok daerah, dan isu strategis yang telah diidentifikasi, rumusan visi Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2029 yaitu:

“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”

Visi Kabupaten Blitar mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Istilah "Kawentar," yang berasal dari bahasa Jawa dan bermakna masyhur, terkenal, serta terkemuka, mencerminkan harapan agar Kabupaten Blitar mampu berperan secara signifikan di kancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berlimpah. Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar



sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, semangat kebersamaan dalam pembangunan (collective actions) diharapkan dapat terwujud. Kolaborasi ini akan memperkuat potensi daerah, menjadikan Kabupaten Blitar lebih "Berdaya" dan pada akhirnya membawa kembali kejayaannya sebagai daerah yang maju dan terkemuka.

Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, serta RPJPN Nasional 2025-2045. Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, RPJMD Kabupaten Blitar harus mencerminkan hubungan yang jelas dengan RPJPD kabupaten dan RPJPN tingkat nasional. Selain itu, hubungan spesifik antara RPJPD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabupaten Blitar juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan dokumen perencanaan ini. Detail keterhubungan antara berbagai dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat dalam tabel yang disajikan berikut ini.

Gambar 1.6

Keterkaitan visi dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi



Selain itu juga terdapat agenda prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 "CATUR DHARMA" disusun dengan mengacu prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 "ASTA CITA". Berikut merupakan



penyelarasan agenda prioritas Kabupaten Blitar 2025-2029 dengan prioritas Jawa Timur dan Nasional 2025-2029.

Gambar 1.7
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2025-2029



Lebih lanjut, keterkaitan antara Visi, Misi, dan agenda prioritas Kabupaten Blitar dengan Prioritas Nasional 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.9
Keterkaitan Visi, Misi Kabupaten Blitar dengan Nasional Tahun 2025-2029

Visi	Misi	PRIORITAS NASIONAL 2025-2029 "ASTA CITA"
Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, Melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan





		generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat Maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
	Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani Serta Peka Terhadap	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan, dan pemberantasan korupsi,



	Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat	narkoba, judi, dan penyelundupan
	Menjamin Ketentraman, Ketertiban, Ketangguhan Bencana serta Kebebasan Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat, berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur	Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
		Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

b.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025– 2029, sejumlah misi pembangunan telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi tersebut. Misi ini berfungsi untuk menggambarkan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan. Proses perumusan misi bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang mencakup tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan, sekaligus menentukan langkah strategis yang relevan. Dalam penyusunannya, faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, dianalisis secara mendalam, termasuk melalui evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Dengan adanya rumusan misi ini, arah pembangunan Kabupaten Blitar menjadi lebih jelas dan terarah dalam mendukung realisasi visi yang telah ditetapkan.



Gambar 1.8
Misi RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029



Misi dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah, termasuk analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Penyusunan misi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam merealisasikan visi. Selain itu, perumusan misi juga mengacu pada janji politik kepala daerah yang tercermin dalam Catur Dharma Kabupaten Blitar, sehingga setiap misi yang ditetapkan berlandaskan prinsip tersebut. Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 didasarkan pada analisis mendalam terhadap permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi daerah. Kerangka logis penyusunan visi dan misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang direncanakan dapat mengatasi tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang yang muncul di masa depan. Selanjutnya, misi dirumuskan sebagai langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut, dengan mempertimbangkan isu strategis yang relevan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, dan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 | III-6 pemerataan pembangunan. Dengan demikian, visi dan misi yang disusun tidak hanya mencerminkan aspirasi pembangunan jangka panjang, tetapi



juga mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi serta mengantisipasi dinamika perubahan yang mungkin terjadi selama periode 2025-2029.

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.10
Perumusan dan Penjelasan Misi

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Inklusif, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas	Manusia adalah aktor utama dalam pembangunan, oleh karenanya manusia harus menjadi fokus utama pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi krusial agar memiliki karakter yang baik, kesehatan yang prima, serta tingkat pendidikan yang memadai. Dengan memastikan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang baik, serta lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan, Kabupaten Blitar ingin menciptakan masyarakat yang siap menghadapi tantangan masa depan, termasuk era Indonesia Emas 2045
2.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri	Fokus pembangunan ekonomi harus berorientasi pada produktivitas sektor unggulan dengan penyiapan kelembagaan ekonomi yang mantap dan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Penguatan ekonomi daerah menjadi kunci dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta industri kecil dan menengah (IKM). Dalam mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Blitar akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta menyiapkan pondasi menuju agroindustri
3.	Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan	Birokrasi yang sehat adalah salah satu sarana mempercepat pembangunan bukan tujuan pembangunan. Sebuah



	Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat	prasyarat yang harus dimiliki terlebih dahulu agar dapat melakukan pembangunan secara efektif dan efisien. Orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien
4.	Menjamin ketentraman, Ketertiban, ketangguhan bencana serta kebebasan Beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur	Ketenteraman, ketertiban, serta kebebasan masyarakat merupakan kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan. Terjaminnya keamanan, ketertiban, ketangguhan bencana dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang ada di masyarakat, menjadi modal awal bagi terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Blitar. Moderasi dalam menjalankan agama dan keyakinan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang guyub, rukun, tepa selira dan harmonis. Peran Pemerintah Daerah diperlukan dalam menciptakan tata kehidupan masyarakat dan menjaga harmonisasi sosial dalam rangka terselenggaranya roda pemerintahan dan pembangunan yang kondusif bagi seluruh masyarakat, serta menjamin kebebasan beragama bagi semua kelompok. Stabilitas sosial ini menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah



c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Proses penting dalam perumusan RPJMD salah satunya ialah merumuskan program pembangunan daerah sebagai bentuk upaya menghasilkan rencana Pembangunan yang konkrit dan berdasarkan prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Program prioritas Pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan secara umum terhadap penerjemahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun beberapa program prioritas Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 1.11
Linearitas Visi dan Misi terhadap Program Pembangunan Daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan
Visi- Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya			
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, Melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas	Mewujudkan SDM dan Generasi Muda yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Meningkatnya Kesenjangan Gender	• Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) • Program Perlindungan Khusus Anak • Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap,	Meningkatnya Kualitas Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Efektivitas Investasi	• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal





Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat Maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri			
		Meningkatnya Produktivitas Daerah	• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) • Program Pengembangan Ukm • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian



			• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Pengembangan Ekspor • Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	• Program Kawasan Permukiman • Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pengarusutaman Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Pengembangan Umkm • Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pengembangan Umkm • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani Serta Peka Terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat	Meningkatkan Kepuasan atas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kuantitas & Kualitas Infrastruktur	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penyelenggaraan Jalan





			• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	• Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Pengelolaan Persampahan
	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	• Program Pendaftaran Penduduk • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Penyelenggaraan Statistik Sektor • Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi • Program Pengelolaan Arsip • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Kepegawaian Daerah



			• Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Menjamin Ketenteraman, Ketertiban, Ketangguhan Bencana serta Kebebasan Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbudaya dan Berbudi Pekerti yang Luhur	Terciptanya Suasana Kehidupan yang Aman dan Kondusif	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	• Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat • Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan • Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	• Program Penanggulangan Bencana



d. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen Perencanaan Tahunan.

Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025 dan dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. RKPD tersebut kemudian direalisasikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



Tabel 1.12
Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	778.805.665.353,50
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	– Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama – Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD – Tingkat partisipasi	100% 100% 100% 93%	100% 100% 100% 93%	169.666.364.752,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar □ Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang Berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan local	100%	100%	380.222.200,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan	100%	100%	12.164.108.000,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		yang sesuai kebutuhan			
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Berizin OSS yang terfasilitasi	100%	100%	16.888.800,00
Jumlah					1.003.342.026.651
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	Dinas Kesehatan				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	196.184.455.287,54
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	– Persentase Keluarga Sehat – Persentase RS Rujukan – Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi – Rasio daya tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	13% 100% 1:1500 Rasio	13% 100% 1:1500 Rasio	91.879.157.570,50
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar	95%	95%	2.494.414.900,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	MANUSIA KESEHATAN				
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian berijin	100%	100%	450.114.400,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM aktif	81%	81%	554.147.008,00
Jumlah					291.562.289.166,04
	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	158.496.866.057,24
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	– Persentase Keluarga Sehat – Persentase RS Rujukan – Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi – Rasio daya tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	13% 100% 1:1500 rasio	13% 100% 1:1500 rasio	1.531.040.972,00
Jumlah					160.027.907.029,24



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	RSUD Srengat				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	69.640.265.979,74
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	– Persentase Keluarga Sehat - Persentase RS Rujukan – Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi – Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	13% 100% 1:1500 rasio	13% 100% 1:1500 rasio	5.000.000.000,00
Jumlah					74.640.265.979,74
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan	100%	100%	7.944.137.469,37



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		pemerintahan daerah			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	72,33%	72,33%	23.775.421.400,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan area pelayanan persampahan	22,92%	22,92%	250.981.000,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	74,89%	74,89%	50.331.258.169,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	75%	75%	8.186.344.900,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	10,47%	10,47%	103.191.200,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	69,34%	79,88%	83.697.638.736,93
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	5,36%	5,36%	107.946.000,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW	90%	90%	2.329.000.000,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	86,8%	86,8%	7.000.951.670,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk berakses air limbah domestik	72,8%	72,8%	4.568.652.940,00
Jumlah					188.295.523.485,30
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan				
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.932.660.530,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi	97,5%	97,5%	732.403.000,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	0,05%	0,05%	16.821.839.439,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	214.895.200,00
Jumlah					22.701.798.169,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman				
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang penanganannya dilakukan melalui mediasi	100%	100%	81.205.400,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	100%	100%	800.000.000,00
Jumlah					881.205.400,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada	90%	90%	7.949.488.425,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	program penunjang urusan pemerintahan daerah			
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	95%	2.827.798.884,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran	95%	95%	273.150.000,00
Jumlah					11.050.437.309,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	80%	80%	4.061.297.396,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana -Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1.141.363.037,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		-Persentase warga negara yang mem-peroleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
Jumlah					5.202.660.433,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	Dinas Sosial				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.856.858.064,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	100%	100%	970.252.650,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di Fasilitas	100%	100%	1.235.275,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100%	100%	1.384.758.900,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase penerima PKH	100%	100%	10.601.182.500,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	DAN JAMINAN SOSIAL	(Program Keluarga Harapan) PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan) dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi			
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	177.887.250,00
Jumlah					17.992.174.639,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	Dinas Tenaga Kerja				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.567.071.432,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	50%	50%	-
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	0,03%	0,03%	2.176.250.700,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	88%	88%	1.890.028.450,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	45%	45%	1.408.187.850,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
	Dinas Tenaga Kerja				
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Ditempatkan	65%	65%	80.845.150,00
Jumlah					10.122.383.582,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana				
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada	88%	88%	4.199.858.793,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	program penunjang urusan pemerintahan daerah			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	70,65 % 3,85 % 31,3 %	70,65 % 3,85 % 31,3 %	484.495.444,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk)	6,01 Rasio	6,01 Rasio	167.614.700,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	16%	16%	12.000.000,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Profil Gender dan Anak yang digunakan	100%	100%	13.114.006,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama	Utama	3.142.500,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100%	100%	356.166.800,00
Jumlah					5.236.392.243,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN				



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana				
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	21 Tahun	21 Tahun	633.240.000,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Age Specific Fertility Rate (ASFR) Unmet Need	9,05 % 7,89 %	9,05 % 7,89 %	6.574.367.000,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	52,42 Indeks	52,42 Indeks	6.456.800.000,00
Jumlah					13.664.407.000,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase infrastruktur kemandirian pangan aktif	40%	40%	10.350.100,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase ketersediaan	170,9%	170,9%	750.106.100,81



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	pangan			
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Daerah Rawan Pangan	18,95%	18,95%	40.080.100,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	100%	100%	20.453.000,10
Jumlah					820.989.300,91
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	90,14%	90,14%	24.390.315.950,09
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase peningkatan produksi tanaman pertanian	1,5%	1,5%	6.845.429.850,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Angka indeks pertanaman	1,81	1,81	7.911.858.488,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani	98%	98%	27.371.600,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase cakupan pembinaan kelompok tani	62%	62%	3.716.166.770,00
Jumlah					42.891.142.658,09
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	Dinas Lingkungan Hidup				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	10.579.139.701,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	5%	5%	1.149.830.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	10%	10%	1.517.720.980,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	16%	16%	1.829.625.000,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	3%	3%	7.062.500,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	BERACUN (LIMBAH B3)	Beracun (B3)			
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab.	25%	25%	44.173.815,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	10%	10%	257.731.044,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	5%	5%	16.300.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	70%	70%	20.076.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola	83%	83%	2.219.542.311,02
Jumlah					17.641.201.351,02
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN				



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	PENCATATAN SIPIL				
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	6.533.372.657,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non rentan	150 Dokumen	150 Dokumen	947.835.000,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	16250 Dokumen	16250 Dokumen	28.944.300,00
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	
		Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	100%	100%	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	2.094.212.585,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal			
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan	100%	100%	3.360.000,00
Jumlah					9.607.724.542,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	77%	77%	4.194.279.560,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa Kewenangan Desa	90%	90%	-
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Pertumbuhan desa yang melakukan kerja sama antar desa	30%	30%	341.249.000,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	94,76%	94,76%	10.599.044.700,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Yang Berkinerja Baik	80%	80%	349.676.900,00
Jumlah					15.484.250.160,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	Dinas Perhubungan				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-Laju pertumbuhan retribusi daerah -Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	1,6 % 84 %	1,6 % 84 %	11.298.964.025,90
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-Indeks konektivitas angkutan jalan -Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan	11,25 66,54 %	11,25 66,54 %	44.197.653.490,90
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks konektivitas sungai danau dan penyeberangan	70 Indeks	70 Indeks	4.931.000,20
Jumlah					55.501.548.517,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Dinas Komunikasi				



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	Informatika, Statistik dan Persandian				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	96%	96%	5.215.059.087,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	90%	90%	2.528.884.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK	90% 100%	90% 100%	4.857.392.050,00
Jumlah					12.601.335.137,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian				
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam	90%	90%	573.998.900,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah			
Jumlah					573.998.900,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	100%	100%	360.202.600,00
Jumlah					360.202.600,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.490.771.027,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekom yang diberikan/dikeluarkan dari total permohonan yang	100%	100%	89.656.450,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		masuk			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berstatus Dalam Pengawasan	2,84%	2,84%	137.799.700,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang tertib administrasi	56,7%	56,7%	157.486.200,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas nilai tambah akses pasar akses pembiayaan penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten / kota	20%	20%	1.117.181.100,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi	6%	6%	263.196.900,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro	17,5%	17,5%	1.258.889.750,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
Jumlah					7.514.981.127,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	6.724.047.505,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	0,02%	58.915.600,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	2 Sektor Usaha	116.736.600,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	5%	350.498.100,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	16200 Milyar	16200 Milyar	368.384.758,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100%	89.370.800,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	MODAL				
Jumlah					7.707.953.363,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga				
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2.714.665.687,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan	76,5%	76,5%	6.709.546.200,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	43%	43%	5.595.923.875,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Anggota Pramuka yang aktif	86,5%	86,5%	538.928.900,00
Jumlah					15.559.064.662,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jenis kebudayaan yang	52%	52%	1.288.720.000,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		dikembangkan			
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	68%	68%	243.590.000,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase aspek sejarah yang terbina	100%	100%	-
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	-
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan museum	13%	13%	736.918.500,00
Jumlah					2.269.228.500,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laju pertumbuhan retribusi daerah Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urus	10 % 100 %	10 % 100 %	7.082.774.751,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata Kabupaten yang dikembangkan	58%	58%	1.608.280.800,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan di	17%	17%	1.080.435.500,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		Kabupaten Blitar			
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi Pemanfaatan/ Perlindungan HAKI	69,28%	69,28%	208.450.000,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	75%	75%	1.848.855.000,00
Jumlah					11.828.796.051,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	3.856.156.400,50
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	0,07%	0,07%	1.221.115.042,00
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	1%	1%	56.820.000,00
Jumlah					5.134.091.442,50



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	79 %	79 %	824.898.223,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	83%	83%	6.300.000,00
Jumlah					831.198.223,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Dinas Peternakan dan Perikanan				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	10.445.160.807,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.935 Ton	2.935 Ton	81.397.200,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias	18523 Ton 23413590 2 Ekor	18523 Ton 234135902 Ekor	251.412.200,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase Peningkatan produksi PUD	5%	5%	3.729.900,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pengolahan produk perikanan	24%	24%	20.731.150,00
Jumlah					10.802.431.257,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	Dinas Peternakan dan Perikanan				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	0,3%	0,3%	852.591.975,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	75%	75%	380.643.800,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi Persentase penyakit hewan	32 87%	32 87%	321.755.925,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	VETERINER	menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap			
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	100%	100%	1.800.000,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Perijinan	20%	20%	2.999.900,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan peternak terampil	8%	8%	244.114.500,00
Jumlah					1.803.906.100,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	6 % 100 %	6 % 100 %	9.307.332.094,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100 %	100 %	3.520.000,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	92%	92%	999.037.500,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	75%	75%	44.693.600,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	30%	30%	667.389.250,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	75%	75%	289.299.244,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	75%	75%	17.800.000,00
Jumlah					11.329.071.688,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	1.689.572.283,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri	100%	100%	11.250.000,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
		yang diterbitkan			
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0,02%	0,02%	30.318.000,00
Jumlah					1.731.140.283,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
5.01	PERENCANAAN				
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	6.329.909.183,56
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah -Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah -Tingkat pemanfaatan data	6 Dokumen 90% 55%	6 Dokumen 90% 55%	1.863.282.750,44



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program PD yang tercapai	85%	85%	1.091.651.025,00
Jumlah					9.284.842.959,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	25%	25%	1.317.837.000,00
Jumlah					1.317.837.000,00
5.02	KEUANGAN				
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	13.490.022.162,04



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-Kesesuaian Program RKPD dengan APBD -Persentase SKPD yang Laporan Keuangannya tersusun secara Tepat Waktu dan sesuai SAP -Realisasi Belanja terhadap anggaran Belanja -Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan	100 % 98 % 98 % 100 %	100 % 98 % 98 % 100 %	432.986.478.379,70
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat bernilai baik dan wajar	90%	90%	1.332.726.654,00
Jumlah					447.809.227.195,74
5.02	KEUANGAN				
	Badan Pendapatan Daerah				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	85%	85%	11.734.964.927,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	15%	15%	14.130.631.633,00
Jumlah					25.865.596.560,00
5.03	KEPEGAWAIAN				



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	5.989.234.276,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	81	81	1.981.381.023,00
Jumlah					7.970.615.299,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.04.01	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	71%	71%	2.171.182.550,00
Jumlah					2.171.182.550,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	11.450.103.713,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Perangkat Daerah Desa dan unit kerja	90%	90%	1.585.330.500,00



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Target Perubahan 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)
	PENGAWASAN	yang akuntabel			
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB	75	75	620.839.900,00
Jumlah					13.656.274.113,00



1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat-masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan oemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pribadi. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabrkan dengan diterapkannya Peraturan Pemetintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar



Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementrian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1,2,3). SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indicator kinerja.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun pelanggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara



minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indicator kinerja. Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan public yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggungjawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan public yang prima dan *excellent*, maka Pemerintah Kabupaten Blitar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan Masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.



Tabel 1.13
Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perubahan Tahun 2025

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.164.108.000
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.549.300
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	16.949.300
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	148.950.000



5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	25.290.000
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104.411.200
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.197.200
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.568.960.000
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.199.300
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	199.760.000
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20.549.300



12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	71.520.000
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.839.650.000
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.560.095.480
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.549.300
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	500.000.000
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	76.894.800
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	41.998.600



19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesenjangan	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000
20	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	500.000.000
21	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	285.000.000
22	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesenjangan	179.868.750
23	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000
24	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan	19.015.600
25	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	16.011.145.000
26	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.568.960.000



27	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.164.108.000
28	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.549.300
29	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	16.949.300
30	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.767.385.000
31	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104.411.200
32	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.197.200



33	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	14.275.000
34	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	148.950.000
35	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	25.290.000
36	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.549.300
37	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	76.894.800
38	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	544.563.000
39	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	41.998.600



40	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.400.000
41	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kademangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.600.000
42	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Talun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.800.000
43	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Doko	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.720.000
44	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kanigoro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.280.000
45	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan	Puskesmas Srengat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.320.000



		Dasar		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
46	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gandusari	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.520.000
47	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kesamben	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.040.000
48	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sutojayan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.680.000
49	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sanankulon	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000
50	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wonotirto	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.240.000



51	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wlingi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.800.000
52	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Nglegok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.760.000
53	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Ponggok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.800.000
54	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Udanawu	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.400.000
55	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Boro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.000.000
56	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan	Puskesmas Bacem	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.400.000



		Dasar		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
57	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Bakung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.400.000
58	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Binangun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.520.000
59	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wonodadi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.520.000
60	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Panggungrejo	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.080.000
61	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Selopuro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.200.000



62	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Garum	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.000.000
63	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Slumbung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.800.000
64	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wates	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.520.000
65	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.199.112.750
66	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.008.320.000
67	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Puskesmas Talun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.800.000



68	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.160.000
69	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.160.000
70	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	68.850.000
71	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Kademangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
72	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Talun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.040.000



73	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Doko	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.700.000
74	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Kanigoro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.520.000
75	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Srengat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.360.000
76	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Gandusari	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.760.000
77	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Kesamben	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.840.000
78	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan	Puskesmas Sutojayan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	9.600.000



		jiwa berat		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berat	
79	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Sanankulon	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.520.000
80	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Wonotirto	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000
81	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Wlingi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
82	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Nglegok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.560.000
83	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Ponggok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.400.000



84	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Boro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	699.000
85	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Bacem	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000
86	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Bakung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
87	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Binangun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.760.000
88	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Wonodadi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	35.280.000
89	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Panggungrejo	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000



90	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Selopuro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.560.000
91	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Garum	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.520.000
92	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Slumbung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	960.000
93	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Wates	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
94	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	60.340.000



95	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Kademangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.640.000
96	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Doko	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.040.000
97	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Kanigoro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	36.480.000
98	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Srengat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.320.000
99	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Gandusari	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.345.000
100	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga	Puskesmas Kesamben	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.680.000



		tuberkulosis		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
101	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Sutojayan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.170.000
102	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Sanankulon	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.360.000
103	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Wonotirto	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.795.000
104	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Wlingi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.460.000
105	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Nglegok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.720.000



106	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Ponggok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.755.000
107	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Udanawu	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.080.000
108	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Boro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.600.000
109	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Bacem	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.100.000
110	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Bakung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.110.000
111	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga	Puskesmas Binangun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.405.000



		tuberkulosis		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
112	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Wonodadi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.120.000
113	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Pangungrejo	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.740.000
114	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Selopuro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.440.000
115	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Garum	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.690.000
116	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Slumbung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.680.000



117	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Wates	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.090.000
118	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	124.503.500
119	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	123.107.656
120	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kademangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	114.240.000
121	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Talun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.600.000



122	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Doko	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.250.000
123	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kanigoro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	156.600.000
124	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Srengat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	118.800.000
125	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gandusari	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.100.000
126	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kesamben	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67.500.000
127	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sutojayan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.225.000



				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
128	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sanankulon	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.400.000
129	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonotirto	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	116.640.000
130	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wlingi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.000.000
131	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Nglegok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.400.000
132	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ponggok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.000.000



133	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Udanawu	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.280.000
134	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Boro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.000.000
135	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bacem	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.875.000
136	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bakung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.460.000
137	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Binangun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.300.000
138	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonodadi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	178.200.000



139	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Panggungrejo	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67.500.000
140	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Selopuro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.300.000
141	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Garum	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.133.000
142	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Slumbung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.250.000
143	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wates	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.200.000



144	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.360.000
145	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.400.000
146	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	47.565.000
147	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.400.000
148	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kademangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.600.000
149	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Talun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.800.000



150	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Doko	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.720.000
151	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kanigoro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.280.000
152	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Srengat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.320.000
153	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gandusari	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.520.000
154	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kesamben	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.040.000



155	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sutojayan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.680.000
156	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sanankulon	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000
157	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wonotirto	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.240.000
158	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wlingi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.800.000
159	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Nglegok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.760.000
160	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Ponggok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.800.000



161	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Udanawu	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.400.000
162	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Boro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.000.000
163	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Bacem	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.400.000
164	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Bakung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.400.000
165	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Binangun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.520.000



166	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wonodadi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.520.000
167	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Panggungrejo	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.080.000
168	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Selopuro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.200.000
169	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Garum	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.000.000
170	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Slumbung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.800.000
171	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wates	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.520.000



172	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	123.107.656
173	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kademangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	114.240.000
174	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Talun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.600.000
175	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Doko	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.250.000
176	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kanigoro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	156.600.000



177	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Srengat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	118.800.000
178	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gandusari	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.100.000
179	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kesamben	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67.500.000
180	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sutojayan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.225.000
181	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sanankulon	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.400.000
182	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonotirto	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	116.640.000



183	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wlingi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.000.000
184	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Nglegok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.400.000
185	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ponggok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.000.000
186	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Udanawu	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.280.000
187	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Boro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.000.000



188	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bacem	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.875.000
189	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bakung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.460.000
190	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Binangun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.300.000
191	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonodadi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	178.200.000
192	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pangungrejo	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67.500.000
193	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Selopuro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.300.000



194	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Garum	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.133.000
195	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Slumbung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.250.000
196	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wates	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.200.000
197	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.199.112.750
198	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.008.320.000



199	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Puskesmas Talun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.800.000
200	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.160.000
201	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.160.000
202	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	68.850.000
203	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Kademangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
204	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Talun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.040.000



205	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Doko	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.700.000
206	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Kanigoro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.520.000
207	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Srengat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.360.000
208	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Gandusari	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.760.000
209	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Kesamben	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.840.000



210	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Sutojayan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
211	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Sanankulon	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.520.000
212	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Wonotirto	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000
213	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Wlingi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
214	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Nglegok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.560.000
215	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Ponggok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.400.000



216	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Boro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	699.000
217	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Bacem	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000
218	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Bakung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
219	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Binangun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.760.000
220	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Wonodadi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	35.280.000



221	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Panggungrejo	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
222	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Selopuro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.560.000
223	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Garum	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.520.000
224	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Slumbung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	960.000
225	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Wates	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000
226	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	60.340.000



227	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Kademangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.640.000
228	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Doko	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.040.000
229	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Kanigoro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	36.480.000
230	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Srengat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.320.000
231	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Gandusari	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.345.000



232	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Kesamben	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.680.000
233	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Sutojayan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.170.000
234	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Sanankulon	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.360.000
235	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Wonotirto	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.795.000
236	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Wlingi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.460.000
237	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga	Puskesmas Nglegok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.720.000



		tuberkulosis		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
238	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Ponggok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.755.000
239	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Udanawu	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.080.000
240	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Boro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.600.000
241	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Bacem	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.100.000
242	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Bakung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.110.000



243	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Binangun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.405.000
244	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Wonodadi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.120.000
245	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Panggungrejo	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.740.000
246	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Selopuro	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.440.000
247	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Garum	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.690.000
248	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Slumbung	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.680.000



249	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Wates	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.090.000
250	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	124.503.500
251	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.360.000
252	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.400.000



253	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	47.565.000
254	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.852.700.250
255	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.613.781.420
256	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	84.470.000
257	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.450.000.000
258	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	4.568.652.940



	Penataan Ruang	Limbah Domestik		dalam Daerah Kabupaten/Kota	(SPALD) Setempat	
259	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.852.700.250
260	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.613.781.420
261	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	84.470.000



262	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.450.000.000
263	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.568.652.940
264	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	517.404.000
265	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	171.560.000



266	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	517.404.000
267	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	171.560.000
268	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	341.909.000
269	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.700.000



270	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	48.683.601
271	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	15.000.000
272	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.780.000
273	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	640.000
274	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	388.396.440



275	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	6.700.000
276	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	63.180.000
277	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	17.980.000
278	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.200.000



279	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	23.390.000
280	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.320.000
281	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12.000.000



282	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	341.909.000
283	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.700.000
284	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	48.683.601
285	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	15.000.000



286	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.780.000
287	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	17.310.000
288	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	12.630.000
289	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000
290	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	216.000.000



291	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	640.000
292	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	388.396.440
293	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	6.700.000
294	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	63.180.000
295	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	17.980.000



296	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.200.000
297	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	23.390.000
298	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.320.000



299	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12.000.000
300	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	950.000
301	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.555.000



302	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	748.831.400
303	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.895.000
304	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	2.792.200
305	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	479.572.500



306	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	59.620.000
307	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	2.310.000
308	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	950.000



309	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.555.000
310	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	748.831.400
311	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.895.000
312	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	2.792.200



313	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	479.572.500
314	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	59.620.000
315	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	2.310.000



316	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	950.000
317	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.555.000
318	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	748.831.400
319	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.895.000



320	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	2.792.200
321	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	479.572.500
322	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	59.620.000



323	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	2.310.000
324	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	950.000
325	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.555.000
326	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan Pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	748.831.400



327	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.895.000
328	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	2.792.200
329	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	479.572.500



330	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	59.620.000
331	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	2.310.000
332	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	3.909.200



333	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	8.993.200
334	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	65.898.950
335	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	8.128.400



336	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	950.000
337	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.555.000
338	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	748.831.400



339	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.895.000
340	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	2.792.200
341	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	479.572.500



342	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	59.620.000
343	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	2.310.000
344	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	3.909.200



345	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	8.993.200
346	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	65.898.950
347	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	8.128.400

**BAB****2****CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH****2.1. Capaian Kinerja Makro**

Capaian Kinerja makro merupakan Capaian Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, presentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dan ketimpangan pendapatan. Capaian Kinerja Makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Blitar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	73,44	74,43	1,3480
2	Presentase Penduduk Miskin (%)	8,16	7,57	-7,2304
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,77	4,49	-5,8700
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44	5,06	13.9640
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	37.81	40,20	6,3211
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,353	0,351	-0,5666

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026.

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila kualitas manusianya meningkat. Kualitas masyarakat dapat ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan IPM ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun daya beli.



Indeks Pembangunan Manusia merupakan komposit dari tiga indeks yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran. Indeks Kesehatan diukur berdasarkan Usia Harapan Hidup (UHH). Indeks Pendidikan yang mencerminkan aspek pendidikan menunjukkan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas penduduk. Indeks Pendidikan dicerminkan melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama Sekolah (means-years of schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Tabel 2.2
Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2025

No.	Komponen	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia	74,43
2.	Umur Harapan Hidup (tahun)	75,63
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,01
4.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,83
5.	Pengeluaran per kapita (Ribu Rp)	12.633

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026

Capaian IPM Kabupaten Blitar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,35% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya tren positif dalam pembangunan di Kabupaten Blitar selama Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3
IPM Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Capaian
1.	2021	71,48
2.	2022	72,25
3.	2023	72,84
4.	2024	73,44
5.	2025	74,43

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025.

2.1.2. Presentase Penduduk Miskin

Berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar No. 10/08/3505/Th. X tanggal 12 September 2025, tahun 2025 presentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar mencapai nilai terendah sepanjang perhitungan kemiskinan. Beberapa capaian pada tahun 2025 antara lain:





1. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 mencapai 89,04 ribu jiwa, berkurang sebanyak 6,87 ribu jiwa dari tahun 2024;
2. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar pada Maret 2025 sebesar 7,57 persen, turun 0,59 poin persen jika dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 8,16 persen;
3. Garis Kemiskinan di Kabupaten Blitar pada bulan Maret 2025 sebesar Rp 417.158,- per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 8,759,- per kapita per bulan atau naik sebesar 2,15 persen bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2024 yang sebesar Rp 408.399,-;
4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Blitar pada Maret 2025 sebesar 1,21, mengalami kenaikan sebesar 0,41 poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 0,80; dan
5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Blitar pada Maret 2025 sebesar 0,27, mengalami kenaikan sebesar 0,15 poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 0,12.

Selama dua dekade, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar berhasil turun hampir 50 persen dibandingkan jumlah penduduk miskin pada 20 tahun yang lalu. Jika dibandingkan tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar secara absolut berkurang yaitu dari 95,91 ribu jiwa menjadi 89,04 ribu jiwa. Secara persentase, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2025 mengalami penurunan sebesar 0,59 poin persen yaitu dari 8,16 persen menjadi 7,57 persen. Persentase penduduk miskin tahun 2025 adalah yang terendah dalam kurun waktu dua dekade perhitungan kemiskinan makro.

Gambar 2.1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025.

Beberapa faktor yang menekan laju kemiskinan di Kabupaten Blitar selama periode Maret 2025 antara lain adalah :

- Pada Bulan Februari 2025, terjadi deflasi (y-o-y) sebesar 0,98%., dan terus berlanjut di Maret 2025, deflasi sebesar 0,04%. Dari Agustus 2024 - Maret 2025, pergerakan inflasi sangat terkendali dibawah 2 persen. Inflasi yang terkendali akan sangat berpengaruh dalam menekan laju kenaikan nilai Garis Kemiskinan sehingga kecepatan kenaikan garis kemiskinan tidak lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan masyarakat miskin;
- Laju pertumbuhan ekonomi TW-1 tahun 2025 Kabupaten Blitar mencapai 5,05 persen, sedikit diatas pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur. Sumber tertinggi dari pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pertumbuhan di sektor pertanian. Kenaikan produksi di sektor pertanian pada TW-I 2025 sedikit banyak membawa dampak positif pada kehidupan petani dan orang-orang yang berkecimpung didalamnya. Meskipun tidak selalu pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penurunan kemiskinan, namun dengan laju pertumbuhan yang positif dan meningkatkan pemerataan pendapatan, maka kemiskinan bisa ditekan;
- Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur pada bulan Februari 2025 sedikit menurun menjadi 110,90, dan kembali naik pada bulan Maret 2025 menjadi 111,61. Nilai NTP ini menggambarkan harga yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang harus dibayar oleh petani.



- d. Didalam Inpres No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, ditetapkan bahwa Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500,00,-/kg untuk Gabah Kering Panen dengan segala kualitas di tingkat petani. Berdasarkan hasil survei Harga Pedesaan (SHPed), rata-rata harga gabah kering giling di tingkat petani pada medio akhir 2024 stabil pada kisaran harga Rp. 7.200,-/kg sampai Rp. 7.500,-/kg. Sedangkan harga Gabah Kering Panen stabil pada kisaran harga Rp. 6.400,-/kg pada medio akhir 2024 dan mulai awal tahun 2025 naik di kisaran Rp. 6.500,-/kg. Perbaikan harga ditingkat petani ini berkontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan pedesaan, tetapi efeknya bergantung pada: proporsi net-seller di desa, volatilitas musiman panen, biaya input, dan program perlindungan sosial;
- e. Program intervensi kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial maupun jaminan sosial lainnya seperti jaminan sosial tenaga kerja yang mensasar pekerja disektor pertanian dan perkebunan dari pemerintah dengan berbasis data yang lebih akurat akan lebih efektif dampaknya dalam menekan jumlah penduduk miskin.

Secara umum, dalam periode 2005-2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Namun pada tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 mulai melanda Indonesia, trend kemiskinan kembali naik dan berhasil turun kembali pada tahun 2022 dan mengalami penurunan sampai pada level 7,57 persen pada tahun ini. Dalam dua dekade terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar berkurang sebesar 86,76 ribu jiwa, dari 175,80 ribu jiwa pada tahun 2005 menjadi 89,04 ribu jiwa pada tahun 2025. Jika dilihat persentasenya, berhasil turun sebesar 49,35 persen, atau berkurang sebesar 8,54 poin, menjadi 7,57 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.4
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Blitar

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2021	335.573,00	112,62	9,65
2022	355.511,00	101,94	8,71
2023	387.733,00	101,94	8,69



2024	408.399,00	95,91	8,16
2025	417.158,00	89,04	7,57

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Blitar pada Maret 2025 adalah sebesar Rp417.158,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp8.759,00 per kapita per bulan. Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebesar 3,84 anggota rumah tangga maka garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2025 untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp1.601.887,00 per rumah tangga per bulan.

Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan menurunkan jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode 2024-2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan sebesar 0,41 poin menjadi 1,21. Untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan sebesar 0,15 poin menjadi 0,27 pada tahun 2025. Selama periode 2005-2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Blitar memiliki kecenderungan menurun meskipun dalam lima tahun terakhir nilainya berfluktuatif. Semakin kecil nilai P1 menunjukkan selisih rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Blitar yang berada di bawah Garis Kemiskinan semakin kecil dan semakin mendekati Garis Kemiskinan. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Blitar, yang memiliki kecenderungan menurun meskipun dalam lima tahun terakhir nilainya berfluktuatif. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi rata-rata tingkat pengeluaran





per kapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Blitar, tidak terlalu besar. Berdasarkan perkembangan nilai P1 dan P2 tersebut dapat diperoleh dua informasi. Pertama, biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat cash transfer agar pengeluaran penduduk miskin bisa terangkat diatas Garis Kemiskinan menjadi lebih besar per rumah tangganya dibandingkan tahun sebelumnya (berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1). Selain itu agar program intervensi kemiskinan bisa lebih berdampak, diperlukan identifikasi sasaran terlebih dahulu guna memetakan jenis program yang tepat untuk setiap rumah tangga sasaran.

Tabel 2.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Blitar

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2021	0,850	0,140
2022	1,330	0,300
2023	1,210	0,240
2024	0,800	0,120
2025	1,210	0,270

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025.

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar No. 15/11/3505/Th. X tanggal 14 November 2025, keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blitar pada Agustus 2025 mencapai 773,43 ribu orang. Angka ini bertambah 42,73 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blitar mencapai 75,82 persen, naik 3,46 persen poin dibandingkan TPAK pada Agustus 2024;
2. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 738,73 ribu orang, naik sebanyak 42,89 ribu orang dari Agustus 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah dari sektor Pertanian yang mengalami pertambahan sebesar 18,73 ribu orang, diikuti sektor Jasa dan Industri dengan pertambahan masing-masing sebesar 16,79 ribu orang dan 7,37 ribu orang;



3. Pada Agustus 2025 sebanyak 32,04 persen bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 4,06 persen poin dibanding Agustus 2024;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 4,49 persen atau turun 0,28 persen poin dibandingkan Agustus 2024;
5. Lulusan Perguruan Tinggi memiliki TPT tertinggi di Kabupaten Blitar pada Agustus 2025, yaitu sebesar 6,97 persen disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki TPT sebesar 5,58 persen.

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Penduduk yang tergolong pengangguran adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; telah diterima bekerja atau siap berusaha tetapi belum mulai; serta mereka yang merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Indikator ini mencerminkan sejauh mana ketersediaan lapangan kerja mampu menampung tenaga kerja yang siap dan bersedia bekerja. Selain itu, TPT juga berfungsi sebagai ukuran penting dalam menilai efektivitas pembangunan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja serta menilai kualitas penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut, TPT dapat dianalisis menurut berbagai karakteristik seperti jenis kelamin, serta tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Analisis menurut karakteristik tersebut memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kelompok penduduk yang lebih rentan terhadap pengangguran dan membantu dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. TPT Kabupaten Blitar hasil pendataan Sakernas Agustus 2025 sebesar 4,49 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Blitar, terdapat sekitar 4 hingga 5 orang penganggur. Pada Agustus 2025, TPT secara umum mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin dibandingkan periode Agustus 2024.

TPT laki-laki pada periode ini sebesar 3,61 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang tercatat 5,64 persen. Jika dibandingkan dengan Agustus 2024, TPT laki-laki turun 1,11 persen poin, sedangkan TPT perempuan naik 0,79 persen poin. Perbedaan tingkat pengangguran antara



laki-laki dan perempuan ini menunjukkan adanya variasi karakteristik angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan di pasar kerja, ataupun mengindikasikan kondisi yang lebih baik atau lebih buruk bagi salah satu kelompok.

Tabel 2.6

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik, Agustus 2023 – Agustus 2025

Karakteristik	Agustus 2023 (%)	Agustus 2024 (%)	Agustus 2025 (%)	Perubahan Ags 24– Ags 25 (persen poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,91	4,77	4,49	-0,28
TPT Menurut Jenis Kelamin				
Laki-laki	4,98	4,72	3,61	-1,11
Perempuan	4,79	4,85	5,64	0,79

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar menunjukkan pola yang cukup berbeda sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2025. Dalam periode tersebut, terdapat perubahan kelompok dengan TPT tertinggi setiap tahunnya tetapi polanya menunjukkan bahwa pengangguran lebih banyak terjadi pada kelompok berpendidikan menengah hingga tinggi. Mulai dari Agustus 2023 hingga Agustus 2025 berturut-turut TPT tertinggi tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Diploma IV, S1, S2, S3 (Universitas). Pada Agustus 2025, TPT tertinggi adalah lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 (Universitas) sebesar 7,51 persen, menurun dari 10,54 persen pada Agustus 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi justru terjadi pada angkatan kerja terdidik. Sebaliknya, TPT terendah terus ditempati oleh kelompok berpendidikan SD ke bawah, yaitu 2,83 persen pada Agustus 2025, naik dari Agustus 2024 (1,04 persen poin), tetapi turun dari Agustus 2023 (0,06 persen poin). Rendahnya TPT pada kelompok ini umumnya disebabkan oleh banyaknya pekerja yang terserap di sektor informal dengan jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan formal tinggi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan TPT di hampir semua jenjang pendidikan, perbedaan antarjenjang masih cukup nyata. TPT cenderung lebih tinggi pada jenjang pendidikan menengah dan atas, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.



Secara umum, penurunan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi menunjukkan arah Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar menunjukkan pola yang cukup berbeda sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2025. Dalam periode tersebut, terdapat perubahan kelompok dengan TPT tertinggi setiap tahunnya tetapi polanya menunjukkan bahwa pengangguran lebih banyak terjadi pada kelompok berpendidikan menengah hingga tinggi. Mulai dari Agustus 2023 hingga Agustus 2025 berturut-turut TPT tertinggi tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Diploma IV, S1, S2, S3 (Universitas). Pada Agustus 2025, TPT tertinggi adalah lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 (Universitas) sebesar 7,51 persen, menurun dari 10,54 persen pada Agustus 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi justru terjadi pada angkatan kerja terdidik. Sebaliknya, TPT terendah terus ditempati oleh kelompok berpendidikan SD ke bawah, yaitu 2,83 persen pada Agustus 2025, naik dari Agustus 2024 (1,04 persen poin), tetapi turun dari Agustus 2023 (0,06 persen poin). Rendahnya TPT pada kelompok ini umumnya disebabkan oleh banyaknya pekerja yang terserap di sektor informal dengan jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan formal tinggi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan TPT di hampir semua jenjang pendidikan, perbedaan antarjenjang masih cukup nyata. TPT cenderung lebih tinggi pada jenjang pendidikan menengah dan atas, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Gambar 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (persen), Agustus 2023–Agustus 2025

3.2 TPT Menurut Pendidikan Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 9 Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Agustus 2025 BRS Nomor: 15/11/3505/Th. X, 14 November 2025 BRS Nomor: 15/11/3505/Th. X, 14 November 2025 perbaikan penyerapan pasar kerja, namun dinamika yang menyertainya mengungkap berbagai aspek yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait produktivitas, pemerataan, dan kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Dari sisi pendidikan, meskipun tingkat pengangguran terbuka pada lulusan pendidikan menengah hingga tinggi terus menurun dalam tiga tahun terakhir, kelompok ini masih menjadi perhatian



karena menghadapi tantangan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Isu kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh dari pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja (link and match) masih menjadi hal penting untuk diperkuat. Sementara itu, dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah serta tingginya angka penduduk bekerja di kegiatan informal juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun kegiatan informal mampu menyerap banyak tenaga kerja, karakteristik pekerjaan informal umumnya belum menjamin kestabilan dan perlindungan kerja yang memadai. Dari sisi jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perbedaan ini bisa jadi mensinyalkan kesenjangan antar jenis kelamin, namun bisa juga menggambarkan variasi pola partisipasi di pasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar masih dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan dalam memilih atau mendapatkan pekerjaan. Jika melihat trend data tahun 2023 sampai dengan 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk perempuan mengalami peningkatan. Selain mengindikasikan semakin banyak perempuan yang aktif di pasar kerja, juga mencerminkan bahwa perempuan masih lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal yang tidak memiliki jaminan keberlanjutan pekerjaan. Secara keseluruhan, capaian perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar menunjukkan sinyal positif, terutama dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka yang cukup signifikan. Namun, beragam isu seperti produktivitas kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, serta perbedaan karakteristik ketenagakerjaan antarwilayah dan antarjenis kelamin masih perlu mendapat perhatian.

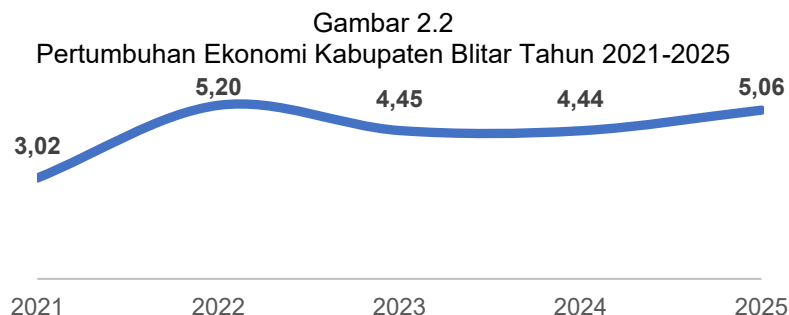
Tabel 2.7
Karakteristik Penduduk Bekerja, Agustus 2024–Agustus 2025

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2024		Agustus 2025		Perubahan 1 Tahun (Agustus 2025 - Agustus 2024)	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
SD ke Bawah	252,43	36,28	272,53	36,89	20,10	0,61
Sekolah Menengah Pertama	171,67	24,67	187,42	25,37	15,75	0,70
Sekolah Menengah Atas	105,26	15,13	99,65	13,49	-5,61	-1,64
Sekolah Menengah Kejuruan	98,15	14,11	99,11	13,42	0,96	-0,69
Diploma I/II/III	8,42	1,21	12,40	1,68	3,99	0,47
Universitas	59,93	8,61	67,63	9,15	7,70	0,54
Jumlah	695,85	100,00	738,73	100,00	42,89	
Lapangan Pekerjaan Utama						
Pertanian	285,76	41,07	304,49	41,22	18,73	0,15
Industri	120,02	17,25	127,39	17,24	7,37	-0,01
Jasa	290,06	41,68	306,85	41,54	16,79	-0,15
Jumlah	695,85	100,00	738,73	100,00	42,89	
Status Pekerjaan Utama						
Berusaha sendiri	163,99	23,57	150,59	20,38	-13,40	-3,18
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/tidak dibayar	122,57	17,61	130,98	17,73	8,41	0,12
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	24,56	3,53	25,80	3,49	1,24	-0,04
Buruh/karyawan/pegawai	226,64	32,57	210,86	28,54	-15,78	-4,03
Pekerja bebas	58,02	8,34	101,51	13,74	43,49	5,40
Pekerja keluarga/tidak dibayar	100,08	14,38	119,00	16,11	18,92	1,73
Jumlah	695,85	100,00	738,73	100,00	42,89	
Status Pekerjaan Formal/Informal						
Formal	251,20	36,10	236,66	32,04	-14,54	-4,06
Informal	444,65	63,90	502,07	67,96	57,43	4,06
Jumlah	695,85	100,00	738,73	100,00	42,89	

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Blitar tumbuh positif di tahun 2025 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,44 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian selama tahun 2025 mengalami perkembangan, namun capaian ini masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan Jawa Timur sebesar 5,33 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2026



Indikator penting lainnya terkait perekonomian daerah adalah tingkat inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga-harga komoditas pada rentang waktu tertentu. Kabupaten Blitar bukan merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur dan Kota Kediri merupakan *sister city* Kabupaten Blitar dalam perhitungan inflasi. Hal ini karena Kota Kediri secara geografis letaknya berdekatan dengan Kabupaten Blitar dan memiliki kemiripan struktur ekonomi, sehingga pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Blitar dan Kota Kediri tidak jauh berbeda, yang menyebabkan tingkat inflasi Kota Kediri menjadi acuan tingkat inflasi di Kabupaten Blitar.

Tingkat inflasi Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,95 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1,19 persen, dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,64 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya tekanan harga yang kembali menguat setelah pada tahun 2024 terjadi penurunan inflasi yang cukup signifikan. Secara komparatif, pada tahun 2025 tingkat inflasi Kabupaten Blitar berada sedikit di atas inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 2,93 persen dan inflasi Nasional sebesar 2,92 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 inflasi Kabupaten Blitar tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional, yang menunjukkan bahwa dinamika harga pada tahun 2025 mengalami peningkatan relatif lebih tinggi di tingkat daerah.

Perkembangan inflasi tersebut dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Kenaikan IHK pada kelompok pengeluaran dengan bobot besar, terutama makanan, minuman, dan tembakau, memberikan andil signifikan terhadap laju inflasi tahun 2025. Dengan demikian, peningkatan inflasi pada tahun 2025 tidak terlepas dari dinamika perubahan harga komoditas strategis yang memengaruhi struktur konsumsi rumah tangga.



Gambar 2.3
Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
dan Nasional Tahun 2023-2025



Sumber: BPS Kota Kediri, BPS Jawa Timur, BPS RI, 2026.

2.1.5. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Apabila dilihat dari lapangan usaha PDRB, maka Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,90 persen, disusul Jasa Perusahaan sebesar 7,79 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,22 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan positif setelah sebelumnya mengalami perlambatan pada tahun 2024. Kontributor terbesar PDRB adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,30 persen, disusul Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,08 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 15,72 persen.

Tabel 2.8
Distribusi PDRB ADHB dan Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB		Pertumbuhan PDRB ADHK	
	2024	2025	2024	2025
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.66	30.30	-0.28	6.22
B Pertambangan dan Penggalan	4.05	3.81	4.71	0.37
C Industri Pengolahan	15.46	15.72	6.62	6.41
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	1.98	3.32
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.03	0.03	2.60	-2.61
F Konstruksi	8.88	8.62	5.99	3.35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.27	19.08	5.52	4.24
H Transportasi dan Pergudangan	1.74	1.75	10.19	7.22

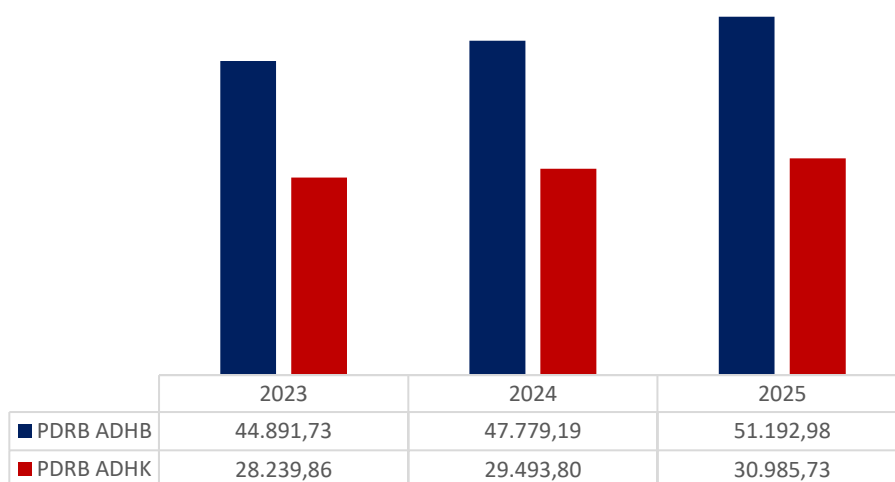


I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.09	1.12	7.14	8.90
J Informasi dan Komunikasi	5.90	5.86	6.36	6.26
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.24	2.20	5.02	4.12
L Real Estat	1.83	1.79	4.62	3.32
M,N Jasa Perusahaan	0.33	0.34	7.54	7.79
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.15	2.99	7.75	-0.23
P Jasa Pendidikan	3.93	3.90	6.44	5.46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.89	0.88	6.67	3.43
R,S,T,U Jasa Lainnya	1.49	1.54	8.05	7.17
Produk Domestik Bruto	100.00	100.00	4.44	5.06

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026.

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 naik 7,14 persen dibanding tahun 2024. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konsumen (ADHK) Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar
Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



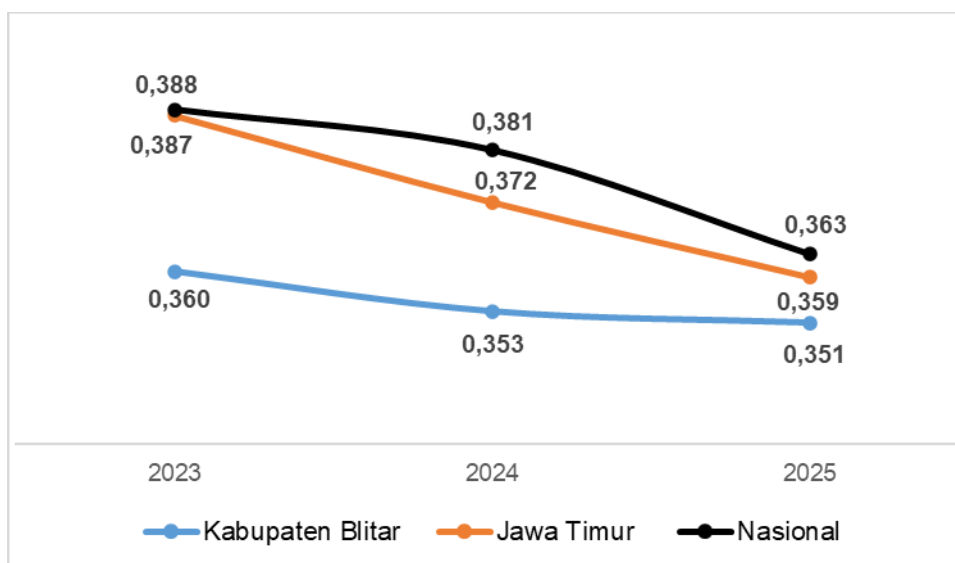
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya

kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah.

Gambar 2.5
Indeks Gini Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2023-2025



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS RI, 2026.

Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan tren penurunan yang mengindikasikan perbaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2023, Indeks Gini di Kabupaten Blitar tercatat sebesar 0,360 kemudian menurun menjadi 0,353 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 0,351 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Blitar semakin membaik dalam tiga tahun terakhir. Dengan nilai Indeks Gini berada di kisaran $0,3 \leq \text{Gini} \leq 0,5$ maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan Sedang. Apabila dibandingkan dengan



tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Indeks Gini di Kabupaten Blitar selama periode 2023-2025 berada pada level yang lebih rendah. Capaian Kabupaten Blitar tersebut menunjukkan kondisi distribusi pendapatan masyarakat yang relatif lebih merata. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pemerataan hasil pembangunan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: peningkatan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, program perlindungan sosial, serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut ini akan dijabarkan capaian urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan. Terdapat 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Pendidikan				
1.1		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	88,1867%	Dinas Pendidikan	
1.2		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,0145 %	Dinas Pendidikan	



1.3		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	42, 0414 %	Dinas Pendidikan	
1.4		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	35, 5031 %	Dinas Pendidikan	
1.5		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	36, 1298 %	Dinas Pendidikan	
2.	Urusan Kesehatan				
2.1		Persentase kematian ibu	0,0389 %	Dinas Kesehatan	
2.2		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	7,9681 %	Dinas Kesehatan	
2.3		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	95,0859 %	Dinas Kesehatan	
2.4		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	95,5225 %	Dinas Kesehatan	
2.5		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	95,1399 %	Dinas Kesehatan	
2.6		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,1890 %	Dinas Kesehatan	
2.7		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
2.8		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
2.9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,8385 %	Dinas Kesehatan	
2.10		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
2.11		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
2.12		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
2.13		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
2.14		Persentase pelayanan kesehatan orang	100 %	Dinas Kesehatan	



		dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar			
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1		Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	58,9467 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.2		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	80,6179 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.3		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	90,6769 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.4		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,8952 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.5		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bukan kewenangan
3.6		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bukan kewenangan
3.7		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	18,3007 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.8		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terdapat pengajuan
3.9		Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.10		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan	66,6667 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



		Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota			
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
4.1		Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
4.2		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	88,5228 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
4.3		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	3,9176 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
4.4		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak dilakukannya pembangunan psu pada perumahan yang telah diserahkan pada tahun pelaporan disebabkan kondisi PSU pada lokasi sasaran masih dalam keadaan layak dan memadai, sehingga tidak memerlukan penanganan atau pembangunan tambahan.
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5.1		Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33,3333 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.2		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
5.3		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	95,4545 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
5.4		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.5		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



		penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
5.6		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	59,5238 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
6.	Urusan Sosial				
6.1		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Dinas Sosial	
6.2		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Dinas Sosial	
6.3		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Dinas Sosial	
6.4		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Dinas Sosial	
6.5		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100 %	Dinas Sosial	
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	4,3026 %	Dinas Sosial	
7.	Urusan Tenaga Kerja				
7.1		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja	
7.2		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	15,3374 %	Dinas Tenaga Kerja	
7.3		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	99,7849 %	Dinas Tenaga Kerja	
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				



8.1		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana,	
8.2		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana,	
9.	Urusan Pangan				
9.1		Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
10.	Urusan Pertanahan				
10.1		Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
10.2		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	0 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
10.3		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	31,25 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
11.	Urusan Lingkungan Hidup				
11.1		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	72,7273 %	Dinas Lingkungan Hidup	
11.2		Persentase jumlah sampah yang tertangani	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
12.1		Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	98,5961 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12.2		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	65,1707 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12.3		Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



12.4		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99,4885 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12.5		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12.6		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12.7		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
13.1		Persentase pengentasan desa tertinggal	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
13.2		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
13.3		Persentase fasilitasi kerja sama desa	38,6139 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
14.1		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	94,3396 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
14.2		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	63,5763 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
14.3		Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	95,2941 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15.	Urusan Perhubungan				
15.1		Konektivitas Kabupaten/Kota	0,40	Dinas Perhubungan	
15.2		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,257	Dinas Perhubungan	
15.3		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem	0	Dinas Perhubungan	Penerbitan sertifikat bukan kewenangan pemda



		manajemen keselamatan			
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika				
16.1		Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
16.2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
16.3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75,9415 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
17.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
17.1		Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	(-19,7192) %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
17.2		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	37,0640 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
18.	Urusan Penanaman Modal				
18.1		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(-79,8068) %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Realisasi total terhadap target investasi	104,4342%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga				
19.1		Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,3022 %	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
19.2		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	24,9998 %	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
19.3		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	3.8571 %	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
19.4		Persentase jumlah atlet berprestasi	83,0769 %	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
20	Urusan Statistik				



20.1		Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	99,4342%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
21.	Urusan Persandian				
21.1		Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	84,8584 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
22.	Urusan Kebudayaan				
22.1		Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
22.2		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	71,1174	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
23.	Urusan Perpustakaan				
23.1		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	55,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
23.2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	21,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24.	Urusan Kearsipan				
24.1		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	79,32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
25.	Urusan Kelautan dan Perikanan				
25.1		Produksi perikanan tangkap dan budidaya	97,4338 %	Dinas Peternakan dan Perikanan	
25.2		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	18,38	Dinas Peternakan dan Perikanan	
26.	Urusan Pariwisata				
26.1		Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	0,0672 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
26.2		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	13,7395 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
26.3		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	15,5203 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
27.	Urusan Pertanian				
27.1		Peningkatan produksi tanaman pangan	10,6793 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
27.2		Peningkatan produksi hortikultura	2,7595 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
27.3		Peningkatan produksi komoditas peternakan	5,5027 %	Dinas Peternakan dan Perikanan	
27.4		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,5990 %	Dinas Peternakan dan Perikanan	

		(diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))			
28.	Urusan Perdagangan				
28.1		Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	35,61 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
29.	Urusan Perindustrian				
29.1		Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	98,46 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
29.2		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	0,2979 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
29.3		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	11,0310 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
29.4		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	13,4122 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan				
1.1		Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	



		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			
2	Keuangan				
2.1		Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	34,1933 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
2.2		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	20,8306 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
2.3		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	62,9922 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
2.4		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	32,7556 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan				
3.1		Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	58,6170%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	Penelitian dan Pengembangan				
4.1		Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	Fungsi Pengawasan				
5.1		Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5	Inspektorat	
5.2		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	4	Inspektorat	
5.3		Manajemen risiko Indeks	4	Inspektorat	
5.4		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	95,1533%	Inspektorat	
6	Fungsi Pengadaan				
6.1		Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

6.2		Pemanfaatan sistem pengadaan	24,09	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
6.3		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	22,76	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
7	Hubungan dengan Perwakilan Daerah				
7.1		Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
7.2		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	25 %	Bagian Hukum	
8	Pelayanan Publik				
8.1		Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	94,24	Bagian Organisasi	



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta Perubahan. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan dari Kepala Daerah periode 2021 - 2026 kepada Kepala Daerah periode 2025 - 2030. Sebagaimana kita ketahui bersama pada akhir Tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kepala Daerah se-Indonesia yang dilantik pada 20 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.



Sehubungan dengan adanya perubahan Kepala Daerah tersebut, maka pada tahun 2025 berlaku dua dokumen perencanaan yaitu RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029 yang tentunya membawa visi dan misi pembangunan yang berbeda sehingga sangat dimungkinkan adanya perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam laporan capaian kinerja ini disajikan analisis capaian kinerja dari dua dokumen tersebut berdasarkan Perjanjian Kinerja. Komitmen pencapaian kinerja tahun 2025 atas Dokumen RPJMD 2021-2026 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2025, sedangkan atas Dokumen RPJMD 2025-2030 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyesuaian pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 selain perubahan IKU juga penyesuaian target untuk IKU yang digunakan pada dua dokumen.

Berikut disampaikan perbandingan indikator beserta targetnya atas Perjanjian Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025:

Tabel 2.9
Perbandingan Indikator dan Target
Pada Perjanjian Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No.	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025	Target Perjanjian Kinerja Perubahan 2025
1.	Persentase PPKS	11,11	-
2.	Indeks Kesalehan Sosial	88	84,86
3.	Harapan Lama Sekolah	13,05	12,67
4.	Rata-rata Lama Sekolah	8,15	7,91
5.	Usia Harapan Hidup	75,30	75,56
6.	Indeks Pembangunan Pemuda	57,59	57,73
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,24	88,67
8.	Nilai SAKIP	80,01	69,16
9.	Indeks SPBE	3,95	3,90
10.	Indeks Sistem Merit	325	275
11.	Persentase Desa Mandiri	34,09	-
12.	Indeks Inovasi Daerah	72,25	72,84
13.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,17	4,76-4,65
14.	Pengeluaran Perkapita (000)	12.466	-
15.	Indeks Infrastruktur	74,53	80,09
16.	Indeks Risiko Bencana	130	156,32
17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	72,69
18.	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,58	1,25
19.	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,82	5,6
20.	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	8,11	-
21.	Jumlah Kunjungan Wisata	3.650.396	-
22.	ICOR	5,74	6,21
23.	Indeks Pembangunan Gender	-	93,85



No.	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025	Target Perjanjian Kinerja Perubahan 2025
24.	Persentase Penduduk Miskin	-	7,89 - 7,17
25.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	74,7

Sumber Data: Bagian Organisasi, 2025

Sebagai informasi dapat disampaikan bahwa dalam hal penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pemahaman terkait keselarasan antara RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD adalah terkait indikator dan target yang sama dengan setiap dokumen tersebut, sehingga dimungkinkan untuk ditemukan target yang lebih tinggi daripada realisasi tahun n-1. Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan upaya perbaikan pemahaman ini terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan seterusnya (Perjanjian Kinerja Tahun 2026), dalam penetapan target sudah dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun n-1.

Berikut analisis capaian kinerja pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025, berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025:

1. Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diukur melalui satu indikator yaitu Persentase PPKS. Definisi operasional dari indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori PPKS pada suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan total penduduk pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam bentuk persentase, dengan rumus perhitungan $\frac{\text{Jumlah PPKS tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk tahun } n} \times 100\%$.

Capaian kinerja sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah sebesar 131,95% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:



Tabel 2.10
Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	11,11	7,56	131,95%
Capaian Kinerja Sasaran					131,95%

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut jenis kebutuhan layanannya merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang mengalami permasalahan sosial tertentu dan memerlukan intervensi pelayanan kesejahteraan sosial sesuai karakteristik dan Tingkat kerentanannya. Jumlah Data PPKS di Kabupaten Blitar tahun 2025 adalah 96.244 orang dari 1.273.450 orang jumlah penduduk, sehingga persentase PPKS tahun 2025 diperoleh sebesar 7,56%. Berikut disajikan data PPKS tahun 2025.

Tabel 2.11
Data PPKS Kabupaten Blitar Tahun 2025

No	Jenis PPKS	Jumlah PPKS (Orang)	Jumlah PPKS yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya (Orang)
1	Keluarga Fakir Miskin	87.207	288
2	Anak Jalanan	2	0
3	Tuna Susila	0	0
4	Pengemis	11	0
5	Gelandangan	31	31
6	Balita Terlantar	0	0
7	Anak Terlantar	34	34
8	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	249	131
9	Penyandang Disabilitas (Anak)	594	16
	a) Fisik	189	-
	b) Mental	100	-
	c) Intelektual	135	-
	d) Sensorik	110	-
	e) Ganda	60	-
10	Anak Korban Tindak Kekerasan/yang Diperlakukan Salah	4	2
11	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2	1
12	Lanjut Usia Terlantar	93	0
13	Penyandang Disabilitas dan Penyakit Kronis	5.855	1.575
	a) Fisik	1.696	-
	b) Mental	2.481	-
	c) Intelektual	521	-
	d) Sensorik	941	-



No	Jenis PPKS	Jumlah PPKS (Orang)	Jumlah PPKS yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya (Orang)
	e) Ganda	216	-
14	Pemulung	24	0
15	Kelompok Minoritas	18	0
16	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	50	28
17	Orang Dengan HIV/AIDS	0	0
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	13	13
19	Korban Trafficking	1	0
20	Orang Korban Tindak Kekerasan / Diperlakukan Salah	5	5
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0
22	Korban Bencana Alam	270	0
23	Korban Bencana Sosial	0	0
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.781	0
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	270
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0
	Jumlah	96.244	4.175

Sumber: Dinas Sosial, 2025

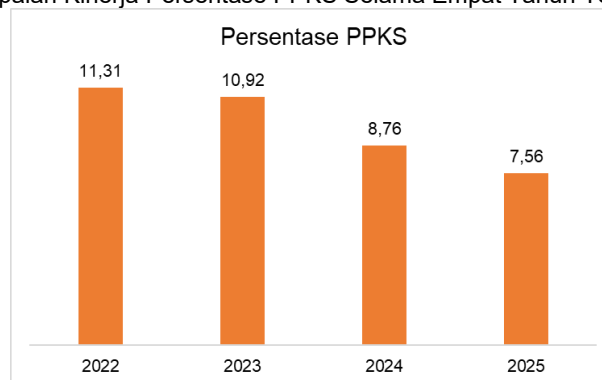
Realisasi kinerja pada indikator Persentase PPKS melampaui target dengan capaian sebesar 131,95% ini didorong oleh adanya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial kepada PPKS. Dengan penerapan teknologi yang lebih baik dalam pengumpulan data dan monitoring, seperti penggunaan aplikasi SIDAKSOS yang mulai diberlakukan sejak 2023, diharapkan lebih banyak PPKS yang dapat teridentifikasi dan mendapatkan akses pada layanan dasar dan sosial yang lebih optimal.

Selain itu, faktor penurunan kemiskinan sebagaimana tercatat dalam penurunan persentase kemiskinan dari angka 8,16% di tahun 2024 menjadi 7,57% di tahun 2025. Penurunan kemiskinan secara keseluruhan meningkatkan aksesibilitas PPKS terhadap kebutuhan dasar dan memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi sosialnya lebih baik.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial mengalami peningkatan

selama empat tahun terakhir dari 2022-2025. Peningkatan kinerja ini disebabkan oleh penguatan sistem validasi data (DTKS) yang lebih akurat dan optimalisasi layanan jemput bola melalui sinergi antara Dinas Sosial dengan pilar-pilar sosial seperti TKSK, PKH, dan relawan di tingkat desa. Hal ini didukung oleh perluasan jangkauan program rehabilitasi sosial, penyaluran bantuan alat bantu yang lebih masif, serta respons cepat melalui sistem rujukan terpadu yang memastikan setiap warga rentan yang teridentifikasi segera mendapatkan intervensi layanan pemerintah secara tepat sasaran. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Gambar 2.6
Capaian Kinerja Persentase PPKS Selama Empat Tahun Terakhir

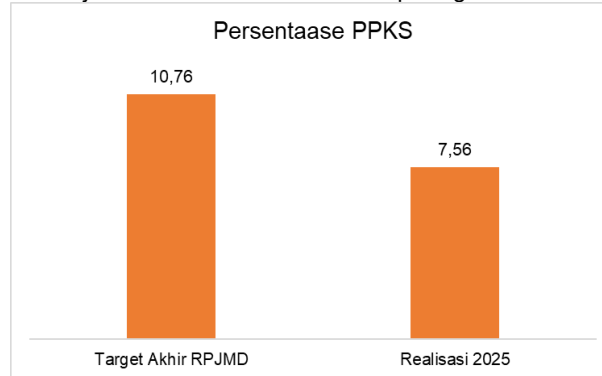


Sumber: Dinas Sosial, 2025

Capaian kinerja indikator Persentase PPKS tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode RPJMD 2021-2026, yang berarti telah tercapai 129,74% dari target tahun terakhir RPJMD. Tingginya realisasi kumulatif ini menunjukkan bahwa strategi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Blitar telah melampaui ekspektasi perencanaan jangka menengah. Hal ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan sosial yang lebih proaktif, perluasan cakupan intervensi bantuan sosial yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh efektivitas koordinasi antar Perangkat Daerah guna memastikan stabilitas kesejahteraan sosial daerah hingga masa akhir jabatan. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.



Gambar 2.7
Pencapaian Kinerja Persentase PPKS Terhadap Target Akhir RPJMD



Sumber: Dinas Sosial, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian persentase PPKS Kabupaten Blitar masih lebih tinggi. Kabupaten Blitar tercatat sebesar 7,56%, sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 2,12% dengan jumlah PPKS mencapai 894.466 jiwa. Meskipun terdapat penurunan Persentase PPKS dibandingkan tahun sebelumnya, namun kinerja tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Blitar masih relatif lebih besar dibandingkan tingkat provinsi, sehingga memerlukan upaya penanganan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.12
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	7,56	2,12

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Salah satu langkah utama yang Kabupaten Blitar melalui Dinas Sosial adalah



optimalisasi penggunaan aplikasi SIDAKSOS (Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang mulai diterapkan pada tahun 2023. Aplikasi ini menggantikan sistem sebelumnya yang mengandalkan data dari Kementerian Sosial yaitu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dengan SIDAKSOS, pengumpulan data menjadi lebih akurat dan terintegrasi, serta intervensi lebih tepat sasaran yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Blitar lebih cepat dalam mengidentifikasi PPKS yang membutuhkan layanan sosial.

Data yang lebih akurat ini mempermudah proses penyaluran bantuan, pelayanan sosial, dan pemenuhan pelayanan dasar kepada PPKS yang membutuhkan secara lebih tepat sasaran. Penggunaan teknologi dalam pengumpulan data ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target kesejahteraan sosial. Berikut disajikan data terkait rincian penerima Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penerima Manfaat tahun 2025.

Tabel 2.13
Rincian Penerima Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penerima Manfaat
Tahun 2025

No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Keterangan	Status
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Januari - Maret	45.452	KPM	APBN	Berhasil Salur
		April - Juni	39.090	KPM		Berhasil Salur
		April - Juni	3.913	KPM		Sudah Isi
		Juli - September	36.335	KPM		Berhasil Salur
		Juli - September	5.735	KPM		Sudah Isi
		Oktober - Desember	42.766	KPM		Sudah Isi
2	Program Sembako	Januari - Maret	83.807	KPM	APBN	Berhasil Salur
		April-Juni	63.480	KPM		Berhasil Salur
		April-Juni	14.309	KPM		Sudah Isi
		Juli-September	85.045	KPM		Sudah Isi
		Oktober-Desember	84.613	KPM		Belum SPM
3	Penebalan Program Sembako (Stimulus)	Juni-Juli	84.503	KPM	APBN	Sudah Isi
4	Penerima PBID	Januari	73.764	ORG	APBD	
		Februari	73.899	ORG		
		Maret	73.953	ORG		



No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Keterangan	Status
		April	74.182	ORG		
		Mei	74.232	ORG		
		Juni	73.273	ORG		
		Juli	74.764	ORG		
		Agustus	76.295	ORG		
		September	76.363	ORG		
5	Penerima PBIN	Januari	482.442	ORG	APBN	
		Februari	483.066	ORG		
		Maret	481.975	ORG		
		April	481.448	ORG		
		Mei	457.841	ORG		
		Juni	452.161	ORG		
		Juli	452.585	ORG		
		Agustus	450.552	ORG		
		September	448.536	ORG		
		Oktober	446.883	ORG		
		November	445.576	ORG		
6	Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan	April	8.107	ORG	APBD	
		Mei	8.106	ORG		
		Juni	8.106	ORG		
		Juli	8.105	ORG		
		Agustus	8.123	ORG		
		September	8.123	ORG		
		Oktober	7.892	ORG		
		November	7.417	ORG		
		Desember	7.417	ORG		
7	BLT DBHCHT	Juni	3.901	ORG	APBD	
		Juli	4.705	ORG		
		Agustus	4.810	ORG		
		September	4.908	ORG		
		Oktober	4.973	ORG		
		November	5.137	ORG		
8	Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Sosial	Oktober - Desember	159.980	KPM	APBN	SUDAH SI
9	KUBE KUBE Ajuna (Ngembul-Binangun) KUBE Mitra Sejahtera (Sumberarum-Wates) KUBE Dahayu Kusuma (Kaligambir-Panggungrejo)	Mei	3	KLM	APBD	
10	KIP JAWARA TA 2025	Desember	350	KPM	APBD Provinsi	

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Pemerintah Kabupaten Blitar juga fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dengan mengadakan pelatihan rutin bagi petugas sosial dan relawan. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan wawasan tentang kebutuhan dan karakteristik PPKS yang terus berkembang. Selain itu, pendampingan sosial bagi PPKS dilakukan secara lebih intensif



untuk memastikan mereka mendapatkan layanan yang optimal dan berkelanjutan, serta dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka PPKS yang belum tertangani dengan baik.

Untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan pelayanan social menjangkau seluruh PPKS di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Sosial melakukan kolaborasi, koordinasi, dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan memastikan bahwa tidak ada PPKS yang terlewat dari perhatian. Dengan adanya kerjasama yang baik, proses identifikasi dan penyaluran bantuan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Meskipun aplikasi SIDAKSOS telah diterapkan untuk memperbaiki proses pengumpulan data, namun masih ada tantangan dalam validasi data yang memadai, terutama terkait dengan akurasi dan kelengkapan data PPKS. Beberapa data yang tercatat mungkin tidak terupdate dengan baik atau kurang akurat, yang berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Terlebih, data PPKS yang bersumber dari lapangan harus melalui banyak tahapan verifikasi, yang bisa memperlambat waktu pemrosesan dan penanganan.

Salah satu kendala utama juga terletak pada keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang menangani program kesejahteraan sosial. Meskipun pelatihan rutin dilakukan, namun jumlah petugas sosial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah PPKS yang harus ditangani menyebabkan petugas sering kesulitan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Hal ini berdampak pada kecepatan dan cakupan layanan yang diberikan.

Saat ini, jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) yang tersedia sebanyak 380 orang, yang terdiri dari pendamping sosial



pasung, pekerja sosial masyarakat, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan penyuluh sosial. Jumlah tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Blitar yang mencapai 96.244 orang.

Perbandingan antara jumlah SDM Kesos dan jumlah PPKS menunjukkan rasio sekitar 1:253 yang artinya 1 SDM Kesos saat ini harus menangani sekitar 253 PPKS. Rasio ini menggambarkan beban kerja yang sangat tinggi dan tidak sebanding dengan kapasitas ideal untuk pelayanan sosial yang efektif, mengingat karakteristik PPKS yang membutuhkan pendekatan intensif, pendampingan berkelanjutan, serta asesmen berkala. Secara ideal, berbagai literatur dan praktik lapangan menunjukkan bahwa 1 SDM Kesos idealnya menangani sekitar 30–50 PPKS agar pendampingan dapat dilakukan secara lebih mendalam, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan rasio aktual yang mencapai lebih dari 250 PPKS per SDM, pelayanan menjadi kurang optimal, baik dari sisi kecepatan respons maupun cakupan layanan yang bisa diberikan.

Meskipun ada upaya untuk memperkuat koordinasi antar instansi, masih ada tantangan dalam hal sinkronisasi data dan kebijakan antara Dinas Sosial dengan Perangkat Daerah lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau pemerintah desa. Koordinasi yang tidak optimal ini dapat menghambat distribusi bantuan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang lebih jelas antar instansi terkait akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi program-program kesejahteraan sosial.

Permasalahan belum terdeteksinya Bayi Baru Lahir (BBL) dalam kepesertaan PBI-JKN akibat rendahnya kesadaran pelaporan administrasi kependudukan berdampak langsung pada capaian indikator PPKS. Ketidakaktifan status jaminan ini menghambat akses kelompok rentan terhadap layanan kesehatan standar, yang secara



administratif berpotensi menurunkan angka cakupan pelayanan PPKS balita.

Guna mempertahankan tren positif pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk memperkuat tata kelola penanganan PPKS melalui beberapa langkah strategis yang terintegrasi. Fokus utama akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan akurasi data melalui penguatan mekanisme verifikasi dan validasi (verivali) secara berkala serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIDAKSOS, yang didukung dengan peningkatan kapasitas petugas pendata melalui bimbingan teknis yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi tenaga sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) akan terus ditingkatkan melalui workshop tematik untuk menjamin profesionalitas pelayanan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Sosial juga akan melakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Pemerintah Desa melalui forum koordinasi rutin dan integrasi data terpadu. Terakhir, akselerasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan, khususnya pencatatan Bayi Baru Lahir (BBL), menjadi prioritas untuk memastikan kepesertaan aktif PBI-JKN dan mencegah terjadinya status non-aktif yang dapat menghambat akses layanan kesejahteraan sosial.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.14
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam	Meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial meningkatkan efektivitas penanganan PPKS.	Dinas Sosial

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
		pelayanan sosial sebesar 28,89%.		
	Program Rehabilitasi Sosial	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 26,37%	Pelaksanaan program didukung dengan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti dan juga didukung oleh kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DTSEN, PBI-JKN dan PPKS yang Divalidasi dan Diverifikasi sebesar 100%	Pelaksanaan program didukung dengan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Pemulihan dalam Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 100%	Pelaksanaan program didukung dengan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Masyarakat kesiapsiagaan bencana meliputi koordinasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana sebanyak 48 orang dan Kampung Siaga Bencana sebanyak 10 kampung.	Dinas Sosial
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Memberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat rentan melalui PBID secara tepat sasaran	Dinas Kesehatan
	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terdapat layanan administrasi kependudukan untuk penduduk rentan secara jemput bola, serta kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Primer maupun Rujukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
			dalam penerbitan Akta Kelahiran di Fasilitas Kesehatan (LAPAK MAINI)	
	Program Pengembangan Perumahan	Rehabilitasi Rumah Korban Terdampak Bencana	Membantu masyarakat terdampak bencana untuk kembali mendapatkan kebutuhan dasarnya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar rumah sehat layak huni warga miskin	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Penanggulangan Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana segera terlayani kedaruratan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyediaan akses sanitasi layak bagi warga miskin yang belum memiliki	Meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat miskin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah sebesar Rp. 138.759.993.305,50 dengan realisasi sebesar Rp. 123.992.626.017,30. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2.15
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan	131,95	Program Pemberdayaan Sosial	966.152.400,00	848.676.682,00	87,84
			Program Rehabilitasi Sosial	1.140.653.100,00	684.024.638,00	80,32



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kesejahteraan Sosial		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.601.182.500,00	10.114.264.200,00	95,47
			Program Penanganan Bencana	177.887.250,00	142.281.000,00	81,31
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.265.377.442,50	88.471.604.968,70	89,13
			Program Pendaftaran Penduduk	929.585.000,00	910.084.330,00	97,90
			Program Pengembangan Perumahan	814.063.000,00	212.705.404,00	26,13
			Program Kawasan Permukiman	19.273.119.566,00	18.552.870.476,00	96,26
			Program Penanggulangan Bencana	1.228.055.047,00	1.090.895.672,60	88,83
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95
			Total	138.759.993.305,50	123.992.626.017,30	89,36
			Tingkat efisiensi			42,59

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 131,95% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 89,36%, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 42,59. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan melebihi target, dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Hal ini mencerminkan adanya pengelolaan anggaran yang efektif dan hemat, tanpa mengurangi kualitas dan hasil kegiatan yang dilaksanakan. Dari



total anggaran sebesar Rp. 138.759.993.305,50 terealisasi sebesar Rp.123.992.626.017,30, maka terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 14.767.367.288,20 dengan persentase efisiensi sebesar 42,59.

2) Efisiensi SDM

Optimalisasi peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pilar-pilar sosial lainnya sebagai ujung tombak lapangan yang mampu menjalankan fungsi verifikasi, validasi, sekaligus pendampingan secara simultan, sehingga proses penanganan masalah sosial tidak lagi terkendala oleh birokrasi yang panjang. Dengan kapasitas personel yang mumpuni dalam mengoperasikan instrumen digital seperti aplikasi SIDAKSOS, koordinasi antar-petugas menjadi lebih ramping dan cepat, yang pada akhirnya memungkinkan satu individu SDM sosial mampu mengelola jangkauan sasaran PPKS yang lebih luas secara presisi tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

3) Efisiensi Waktu

Melalui integrasi data pada aplikasi SIDAKSOS, proses identifikasi hingga penyaluran intervensi yang sebelumnya membutuhkan waktu administratif yang panjang kini dapat diselesaikan secara lebih cepat karena data telah terverifikasi secara *real-time*. Kecepatan penanganan ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten Blitar melayani lebih banyak individu dalam kurun waktu yang sama, sehingga target tahunan dapat terlampaui lebih awal melalui mekanisme layanan jemput bola yang meminimalkan waktu tunggu masyarakat rentan dalam mendapatkan kepastian bantuan.



2. Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui 5 indikator yaitu Nilai SAKIP, Indeks SPBE, Indeks Sistem Merit, Persentase Desa Mandiri, dan Indeks Inovasi Daerah. Untuk pelaporan terkait dengan indikator Nilai SAKIP, Indeks SPBE, Indeks Sistem Merit, dan Indeks Inovasi Daerah akan dianalisa di bawah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sedangkan untuk indikator Persentase Desa Mandiri karena tidak lagi menjadi indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 maka akan dilaporkan sebagai berikut.

Definisi operasional dari Persentase Desa Mandiri adalah perbandingan jumlah desa mandiri dengan total jumlah desa di wilayah Kabupaten Blitar, dengan rumus $\frac{\sum \text{Desa Mandiri di Kab. Blitar}}{\sum \text{Desa di Kab. Blitar}} \times 100\%$. Sumber data penilaian desa mandiri didapatkan dari pengukuran dari Indeks Desa Tahun 2025 yang dilakukan pengukuran pertama kali sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk indikator Persentase Desa Mandiri adalah sebesar 174,68% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.16
Realisasi Kinerja Indikator Persentase Desa Mandiri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Desa Mandiri	34,09	59,55	174,68%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					174,68%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025



Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase Desa Mandiri dapat direalisasi sebesar 59,55% melebihi sebesar 25,46% dari target sebesar 34,09%. Jumlah desa mandiri tahun 2025 sebanyak 131 desa dari total seluruh desa di Kabupaten Blitar sebanyak 220 desa. Pencapaian ini didorong oleh ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, serta aksesibilitas transportasi yang semakin mudah bagi masyarakat desa. Faktor utama lainnya adalah penguatan tiga aspek penting dalam Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu ketahanan sosial melalui kelengkapan kelembagaan, ketahanan ekonomi melalui penyediaan sarana penunjang ekonomi masyarakat, serta ketahanan lingkungan yang kondusif.

Selain itu, akselerasi digitalisasi melalui Program Konektivitas Mandiri yang dikelola oleh BUMDes serta tata kelola pemerintahan desa yang dinilai sangat baik dan melayani menjadi katalisator utama dalam meningkatkan status kemandirian desa di Kabupaten Blitar. Koordinasi yang solid dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah juga berperan krusial dalam memastikan program-program pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian penghargaan desa berseri, dapat memotivasi desa-desa untuk terus meningkatkan kualitas tata kelolanya.

Realisasi kinerja tahun 2025 terus mengalami peningkatan pada 4 tahun terakhir ini. Dimana pada tahun 2024 jumlah desa mandiri sebanyak 111 desa atau 50,45%, tahun 2023 jumlah desa mandiri sebanyak 65 desa atau 29,09%, dan pada tahun 2022 jumlah desa mandiri sebanyak 42 desa atau 19,09 %. Peningkatan kinerja ini disebabkan oleh usaha dari berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan peran desa sebagai lokus utama Pembangunan. Para pemangku ini diantaranya dengan instansi vertikal, semua perangkat daerah, kecamatan, pihak swasta, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat pendamping desa juga banyak



asosiasi pemerintah desa. Kolaborasi ini sebagai wujud kesadaran bersama dalam membangun dimulai dari pemerintah desa. Sinergitas yang terjalin cukup baik dimulai dari pemerintah desa, kecamatan pemerintah daerah/provinsi hingga pemerintah pusat. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025.

Tabel 2.17
Perkembangan kinerja Indikator Persentase Desa Mandiri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Desa Mandiri	34,09	59,55	50,45	29,09	19,09

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Capaian kinerja pada indikator Persentase Desa Mandiri tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode RPJMD 2021-2026, yang berarti telah tercapai 595,5% dari target tahun terakhir RPJMD. Pencapaian yang melampaui ekspektasi ini mencerminkan keberhasilan masif dalam akselerasi kemandirian desa di Kabupaten Blitar, di mana jumlah desa yang naik kelas menjadi strata 'Mandiri' tumbuh jauh lebih cepat dari proyeksi awal tahun perencanaan. Kondisi ini didorong oleh efektivitas sinkronisasi program penguatan Indeks Desa Membangun (IDM), optimalisasi potensi ekonomi desa melalui BUMDes, serta ketersediaan infrastruktur dan layanan dasar yang semakin berkualitas di tingkat desa. Keberhasilan ini mengukuhkan dominasi status desa mandiri sebagai fondasi kuat dalam mendukung ketahanan ekonomi dan sosial daerah secara berkelanjutan. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.18
Pencapaian kinerja Indikator Persentase Desa Mandiri terhadap target akhir RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta	Persentase Desa Mandiri	10	59,55	595,5 %



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun n	Capaian
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian ini lebih rendah sebesar 1,53%. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun akselerasi kemandirian desa di Kabupaten Blitar telah berjalan sangat progresif, namun dinamika pembangunan desa di tingkat Provinsi Jawa Timur secara kolektif bergerak jauh lebih kompetitif. Selisih tipis ini menjadi indikator bahwa Kabupaten Blitar masih memiliki ruang pengembangan, khususnya dalam penguatan indikator ketahanan ekonomi dan lingkungan pada beberapa desa yang saat ini masih berstatus 'Maju' agar dapat segera bertransformasi menjadi 'Mandiri'. Hal ini sekaligus menjadi tantangan strategis untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola desa agar selaras dengan standar keunggulan yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur sebagai barometer nasional. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.19
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Desa Mandiri	59,55	61,08

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja Persentase Desa Mandiri, Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari penilaian indeks desa tahun sebelumnya dengan memasukkan pada perencanaan



pembangunan tahun berjalan. Strategi ini difokuskan pada penguatan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) melalui pemenuhan akses pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang melayani masyarakat. Dengan mengintegrasikan hasil evaluasi tersebut ke dalam dokumen perencanaan resmi, pemerintah memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan bersifat tepat sasaran dalam mengatasi hambatan sosial maupun ekonomi.

Selain itu dengan mendorong pelibatan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan desa, mulai dari bidan desa, penyuluh pertanian/KB, lembaga pendidikan, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai instrumen kunci untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel. Melalui forum inovatif seperti Musyawarah PENA INTAN, setiap elemen masyarakat diberikan ruang strategis untuk menyuarakan aspirasi sehingga program pembangunan yang disusun dalam dokumen perencanaan tahun berjalan menjadi lebih berkualitas dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Sinergi kolaboratif ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang inklusif, selaras dengan visi daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kemandirian lokal yang berkelanjutan.

Melakukan penguatan kapasitas bagi aparatur desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta pengelola BUM Desa/Bumdesma guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berkinerja tinggi. Fokus utama penguatan ini diarahkan pada akselerasi digitalisasi melalui Program Konektivitas Mandiri, di mana para pengelola BUMDes dibekali pelatihan teknis manajemen *bandwidth* dan model bisnis berbasis teknologi informasi untuk mengelola potensi wilayah secara mandiri. Selain itu, peningkatan kompetensi juga mencakup pembinaan bagi masyarakat dan lembaga desa dalam pemutakhiran data warga



berbasis SDGs serta pengelolaan administrasi desa melalui platform digital yang terintegrasi. Sinergi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan ekonomi ini menjadi fondasi penting bagi desa-desa di Kabupaten Blitar untuk bertransformasi menjadi desa mandiri yang memiliki ketahanan ekonomi lokal yang tangguh dan pelayanan publik yang prima.

Terahir yaitu dengan melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa juga tetap dilaksanakan guna meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang berkinerja baik.

Meskipun capaian Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang sangat positif, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala mendasar yang perlu menjadi perhatian strategis. Hambatan utama bersumber dari dinamisnya perubahan peraturan terkait tata kelola desa yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, sehingga menuntut penyesuaian regulasi daerah dan teknis implementasi di lapangan secara cepat dan terus-menerus. Di tingkat operasional, kinerja ini juga dipengaruhi oleh kurang tertibnya aparat pemerintah desa dalam pelaporan data secara periodik dan tepat waktu, yang mengakibatkan proses pemutakhiran indikator kemandirian desa seringkali mengalami keterlambatan.

Selain faktor administratif, aspek kolaborasi juga menjadi tantangan tersendiri dengan masih adanya ego sektoral di masing-masing desa yang menghambat pelaksanaan kerja sama antar-desa secara optimal. Hal ini berdampak pada sulitnya menciptakan program pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi. Terakhir, penguatan ekonomi desa belum berjalan maksimal akibat kurang sinerginya pengurus BUMDes maupun BUMDesma dalam pengelolaan tata kelola keuangan, sehingga kontribusi lembaga usaha milik desa terhadap peningkatan strata kemandirian desa belum sepenuhnya selaras dengan potensi riil yang dimiliki.



Guna mengatasi berbagai hambatan dalam pencapaian status Desa Mandiri, Pemerintah Kabupaten Blitar perlu mengambil langkah strategis yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan melalui akselerasi adaptasi regulasi dan digitalisasi sistem informasi desa. Pemerintah Kabupaten Blitar perlu meningkatkan intensitas bimbingan teknis untuk memastikan aparatur desa mampu merespons perubahan peraturan pusat secara cepat, sekaligus mengintegrasikan *platform* pelaporan data secara terpadu guna mengatasi kendala keterlambatan laporan periodik. Dengan terbangunnya sistem pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu, pemantauan terhadap indikator kemandirian desa dapat dilakukan secara *real-time*, sehingga intervensi terhadap desa-desa yang masih berada pada strata di bawah Mandiri dapat dilakukan secara lebih presisi.

Selanjutnya, penguatan kemandirian desa akan diarahkan pada penghapusan ego sektoral dan revitalisasi ekonomi desa melalui skema kolaborasi yang lebih inklusif. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi forum kerja sama antar-desa untuk membangun integrasi program berbasis kawasan perdesaan yang melampaui batas administratif masing-masing wilayah. Sejalan dengan itu, profesionalisme pengurus BUMDes dan BUMDesma menjadi prioritas melalui pendampingan manajemen keuangan yang transparan serta penguatan sinergi antara unit usaha milik desa dengan potensi unggulan daerah. Upaya kolektif ini diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi ekonomi perdesaan sebagai penggerak utama dalam mempertahankan dan meningkatkan persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar secara berkelanjutan.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:



Tabel 2.20
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Khususnya Pada Indikator Persentase Desa Mandiri

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Persentase Desa Mandiri)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kerjasama Desa yang telah Dilegalkan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) 16,36%	Mendorong kemandirian desa melalui kerjasama desa baik dengan desa sekitar, akademisi, swasta, dll	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Admistrasi Pemerintahan Desa	Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik 76,75%	Peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam tata kelola pemdes yang baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang Berkinerja Baik 25,54%	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pembinaan administrasi Desa melalui monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan, penganggaran dan Peraturan Desa	Kecamatan

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya pada indikator persentase desa mandiri adalah sebesar Rp. 11,658,685,456,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.969.225.776.,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada indikator Persentase Desa Mandiri.

Tabel 2.21
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Pada Indikator Persentase Desa Mandiri



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Persentase Desa Mandiri)	174,68	Program Peningkatan Kerjasama Desa	263.249.000,00	62.956.974,00	23,92
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.450.079.376,00	10.017.113.307,00	95,86
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	349.400.900,00	334.182.995,00	95,64
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	595.956.180	554.972.500	93,12
			Total	11,658,685,456,00	10.969.225.776,00	94,09
			Tingkat efisiensi			80,59

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada indikator Persentase Desa Mandiri. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 174,68% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 94,09%, sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar 80,59. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Dengan mengintegrasikan alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara presisi pada pemenuhan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang masih rendah, setiap rupiah yang dikelola desa menjadi lebih efektif dalam mendorong kenaikan strata kemandirian. Selain itu, optimalisasi anggaran juga tercapai melalui penguatan peran BUMDes dalam menciptakan pendapatan asli desa, sehingga program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat



dapat terlaksana secara masif tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

2) Efisiensi SDM

Terwujud melalui optimalisasi peran pendamping desa dan aparatur pemerintah daerah yang berfungsi sebagai fasilitator strategis, bukan sekadar administrator. Dengan penguatan kapasitas personel dalam memahami indikator Indeks Desa Membangun (IDM), satu tim kerja mampu memberikan asistensi yang presisi kepada banyak desa sekaligus untuk memetakan kelemahan spesifik di sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Transformasi SDM yang melek digital juga memungkinkan verifikasi data lapangan dilakukan secara kolektif dan cepat melalui sistem yang terintegrasi, sehingga rasio jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah desa yang didampingi tetap proporsional namun tetap menghasilkan lompatan status strata desa yang signifikan tanpa memerlukan penambahan personel secara besar-besaran.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui akselerasi sinkronisasi data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilakukan secara terpadu dan sistematis. Dengan memanfaatkan sistem pelaporan digital yang terintegrasi antara tingkat desa, kabupaten, hingga pusat, durasi pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator pemenuhan strata desa dapat dipangkas secara signifikan, sehingga potensi hambatan di lapangan dapat diidentifikasi dan diintervensi secara lebih dini. Kecepatan dalam proses verifikasi dan validasi data ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten Blitar merespons dinamika kebutuhan pembangunan desa dengan lebih tangkas, yang pada akhirnya mempercepat transisi status desa dari strata Maju menjadi Mandiri tanpa harus melalui proses administratif konvensional yang memakan waktu lama.



3. Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat diukur melalui 2 indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pengeluaran Perkapita. Untuk pelaporan terkait dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka akan dianalisa pada sub pembahasan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sedangkan untuk indikator Pengeluaran Perkapita karena tidak lagi menjadi indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 maka akan dilaporkan sebagai berikut.

Definisi operasional dari Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan per orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan rumus perhitungan

$$\frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Konsumsi Semua Anggota Rumah Tangga Selama Sebulan}}{\text{Banyaknya Anggota Rumah Tangga}}$$

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat untuk indikator Pengeluaran Perkapita (000) adalah sebesar 101,34% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.22
Realisasi Kinerja Indikator Pengeluaran Perkapita

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (000)	12.466	12.633	101,34%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					101,34%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel diatas, indikator Pengeluaran Perkapita (000) dapat direalisasi sebesar 12.633 melebihi sebesar Rp. 167.000,- dari target sebesar 12.466. Pencapaian kinerja ini didorong oleh beberapa faktor. Faktor utama yang mendorong pengeluaran riil masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi lokal yang bersumber pada sektor peternakan, pertanian, dan industri pengolahan yang menjadi potensi unggulan di Kabupaten Blitar.



Peningkatan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah yang berfokus pada upaya penurunan angka kemiskinan dimana jumlah penduduk miskin tercatat menurun menjadi 89,04 ribu jiwa pada Maret 2025 dari 95,91 ribu jiwa pada Maret 2024, sehingga meningkatkan kemampuan daya beli rumah tangga.

Selain itu, faktor penyesuaian Nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blitar 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.413.974 turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan pekerja formal, yang secara langsung berdampak pada pengeluaran konsumsi. Sektor UMKM yang produktif, terutama di sektor perdagangan dan industri kecil, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perputaran uang di masyarakat. Keberhasilan ini juga tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar tahun 2025 yang mencapai 74,43, menandakan membaiknya standar hidup masyarakat.

Melalui penguatan potensi ekonomi lokal dan kebijakan UMK yang inklusif, Kabupaten Blitar berhasil menekan tingkat kemiskinan sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Tren positif pengeluaran perkapita tahun 2022–2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23
Perkembangan kinerja Indikator Pengeluaran Perkapita (000)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (000)	12.466	12.633	12.020	11.499	11.001

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Realisasi pengeluaran perkapita Kabupaten Blitar pada tahun 2025 yang mencapai Rp12.633.000,- menunjukkan performa ekonomi yang sangat progresif, mengingat angka ini telah melampaui target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar Rp12.155.000,- dengan capaian kinerja sebesar 103,93%. Keberhasilan ini



mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, di mana distribusi pendapatan mampu menjangkau lapisan masyarakat secara lebih luas sehingga standar pengeluaran minimum penduduk meningkat signifikan di atas ekspektasi teknokratis.

Keberhasilan ini didorong oleh sinergi antara penguatan sektor basis, seperti pertanian dan UMKM, serta efektivitas program perlindungan sosial yang menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Stimulus ekonomi melalui penyederhanaan birokrasi investasi dan dukungan terhadap digitalisasi pasar lokal berperan penting dalam meningkatkan perputaran uang di tingkat daerah. Selain itu, terkendalinya laju inflasi daerah memastikan bahwa kenaikan pendapatan nominal masyarakat benar-benar diikuti oleh peningkatan kualitas konsumsi riil, yang pada akhirnya mengukuhkan posisi Kabupaten Blitar sebagai wilayah dengan ketahanan ekonomi yang tangguh menjelang akhir periode perencanaan. Berikut disajikan tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.24
Pencapaian kinerja Indikator Pengeluaran Perkapita (000) terhadap target akhir RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (000)	12.155	12.633	103,93%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian ini lebih rendah sebesar Rp. 877.000. Meskipun daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Blitar berada pada jalur pertumbuhan yang stabil, namun masih terdapat kesenjangan ekonomi dibandingkan dengan rata-rata akumulatif provinsi yang didorong oleh pusat-pusat pertumbuhan industri besar di wilayah lain. Selisih tersebut mengindikasikan perlunya akselerasi pada sektor-sektor strategis, terutama dalam



penguatan ekonomi kerakyatan melalui BUMDes dan UMKM, guna meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih intensif dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif serta memperluas lapangan kerja, sehingga gap pengeluaran perkapita ini dapat terus diperkecil menuju standar kemakmuran rata-rata Jawa Timur. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.25
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (000)	12.633	13.510

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pemerintah Kabupaten Blitar secara konsisten menempuh berbagai upaya untuk mendongkrak kinerja indikator Pengeluaran Perkapita. Upaya ini berfokus pada penguatan daya beli masyarakat melalui transformasi sektor unggulan, yakni pertanian, peternakan, dan UMKM. Dalam sektor pertanian dan peternakan, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan langkah konkret melalui program hilirisasi produk. Mengingat Blitar sebagai pusat telur nasional, pemerintah tidak hanya fokus pada produksi mentah, tetapi juga memfasilitasi peternak di wilayah seperti Ponggok dan Srengat untuk mengolah produk turunan seperti kue/snack/hidangan yang berbahan dasar telur, guna mendapatkan nilai tambah (*added value*). Selain itu, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dilakukan penguatan kemitraan antara petani tembakau di wilayah Blitar Selatan dengan industri besar. Pola kemitraan ini menjamin kepastian harga jual dan memangkas rantai tengkulak, sehingga pendapatan riil petani meningkat yang secara otomatis menaikkan standar pengeluaran rumah tangga.

Pada sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif, langkah nyata diwujudkan melalui kemudahan sertifikasi produk secara gratis,



mulai dari NIB hingga sertifikasi Halal. Produk-produk unggulan seperti kerajinan kendang dari Srengat dan batik khas Blitar dari Talun didorong masuk ke ekosistem digital dan *e-katalog* lokal. Dengan memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional, margin keuntungan pelaku usaha mikro meningkat. Pemerintah juga aktif menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan operasi pasar murah, yang bertujuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga global, sehingga alokasi pengeluaran masyarakat dapat dialihkan ke kebutuhan sekunder dan investasi pendidikan.

Peningkatan pengeluaran perkapita ini juga didukung secara struktural melalui pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi. Perbaikan jalan kabupaten yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, serta revitalisasi pasar tradisional menjadi lebih modern, telah menurunkan biaya logistik bagi pedagang dan petani. Selain itu, optimalisasi dana bagi hasil seperti DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) disalurkan secara konkret dalam bentuk bantuan tunai dan pelatihan keterampilan bagi buruh pabrik rokok. Sinergi antara perlindungan sosial dan penguatan ekonomi produktif ini menjadi kunci utama Kabupaten Blitar dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya strategis, pencapaian target kinerja pengeluaran perkapita masih dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural dan kondisional yang cukup kompleks. Tantangan ini bersumber dari karakteristik ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor primer.

Tantangan utama dalam meningkatkan pengeluaran perkapita di Kabupaten Blitar adalah tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian dan peternakan yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Sebagai pusat telur nasional, para peternak di wilayah



seperti Ponggok dan Srengat seringkali menghadapi situasi di mana harga pakan jagung melonjak tinggi sementara harga jual telur di tingkat peternak jatuh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Kondisi ini menyebabkan pendapatan riil masyarakat pedesaan tidak stabil, yang secara langsung menahan laju konsumsi atau pengeluaran rumah tangga mereka. Selain itu, hilirisasi produk unggulan yang belum merata menjadi kendala serius, sebagian besar peternak dan petani masih menjual komoditas dalam bentuk mentah karena keterbatasan akses teknologi pengolahan dan permodalan untuk mesin skala industri, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha di luar daerah.

Dari sisi pengembangan usaha, keterbatasan daya saing UMKM dalam menembus pasar modern dan ekspor masih menjadi hambatan yang nyata. Meskipun jumlah UMKM di Blitar sangat besar, banyak pelaku usaha di pelosok desa yang masih terkendala dalam pemenuhan standar sertifikasi internasional serta konsistensi kualitas produksi. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi digital dan akses terhadap pembiayaan formal bagi sebagian pelaku usaha mikro, yang menghambat mereka untuk melakukan ekspansi bisnis. Di sisi lain, hambatan geografis di wilayah Blitar Selatan seperti akses infrastruktur jalan yang menantang menuju sentra wisata dan pertanian, masih menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi. Tingginya biaya distribusi ini mengakibatkan margin keuntungan yang diterima masyarakat lokal menjadi tipis, sehingga daya beli dan kapasitas pengeluaran perkapita masyarakat di wilayah tersebut cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan wilayah Blitar bagian utara.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat pada Indikator Pengeluaran Perkapita (000), didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:



Tabel 2.26

Program Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat pada Indikator Pengeluaran Perkapita (000)

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat (Pengeluaran Perkapita (000))	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui penyediaan stok cadangan pangan, diversifikasi pangan dan pelatihan	Meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui pelatihan dan menjaga inflasi kebutuhan pokok	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan nelayan tangkap kecil, pemberian bantuan alat dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan	Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap baik secara pengetahuan maupun ketersediaan prasarana	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, pemberian bantuan alat dan pelatihan	Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan baik secara pengetahuan maupun ketersediaan prasarana	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan kualitas dan keamanan pangan produk serta fasilitasi perizinan	Meningkatkan daya saing produk untuk dapat dipasarkan lebih luas	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pelaksanaan Operasi Pasar dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Menjaga stabilitas harga dalam rangka mengendalikan inflasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pelatihan dan peningkatan kompetensi IKM, fasilitasi sertifikasi halal dan merk dagang, dll	Meningkatkan daya saing produk IKM supaya lebih maju dan berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Pengawasan industri dan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha	Meningkatkan daya saing produk IKM supaya lebih maju dan berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perlindungan	DTSEN, PBI-JKN dan PPKS	Penyediaan data kemiskinan	Dinas Sosial



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
	Dan Jaminan Sosial	yang Divalidasi dan Diverifikasi sebesar 100%	cakupan daerah Kabupaten/Kota, dan penyaluran bantuan langsung bagi kelompok rentan	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan bersertifikat bagi angkatan kerja	Meningkatkan daya saing angkatan kerja, meningkatkan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan job fair, Pelayanan Antar Kerja, Bimbingan dan fasilitasi bagi pencari kerja	Perluasan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja,	Meningkatkan penjaminan kesejahteraan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat, khususnya pada indikator Pengeluaran Perkapita (000) adalah sebesar Rp. 18.142.385.158,81 dengan realisasi sebesar Rp. 16.939.317.864,45 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat.

Tabel 2.27

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat pada indikator Pengeluaran Perkapita (000)

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat (Pengeluaran Perkapita (000))	101,34	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	750.106.100,81	657.689.828,75	87,68



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	81.397.200,00	80.407.500,00	98,78
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	251.412.200,00	187.995.728,00	74,78
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.731.150,00	20.224.000,00	97,55
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	26.893.730,00	26.855.000,00	99,86
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.583.149.483,00	1.571.627.668,00	99,27
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	8.015.000,00	7.995.000,00	99,75
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.594.182.500,00	10.113.964.200,00	95,47
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.952.357.995,00	1.483.406.346,00	75,98
			Program Penempatan Tenaga Kerja	1.560.858.450,00	1.513.360.400,70	96,96
			Program Hubungan Industrial	1.313.281.350,00	1.275.792.193,00	97,15
			Total	18.142.385.158,81	16.939.317.864,45	93,37
			Tingkat efisiensi			7,97

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya



dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat pada Indikator Pengeluaran Perkapita (000). Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 101,34% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 93,37%, sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar 7,97. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Diwujudkan melalui pengalihan alokasi belanja daerah ke sektor-sektor yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) tinggi terhadap pendapatan masyarakat. Dengan memprioritaskan anggaran pada penguatan infrastruktur ekonomi desa, pemberian stimulus bagi UMKM, serta optimalisasi rantai pasok sektor pertanian dan peternakan, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD mampu menstimulasi perputaran ekonomi lokal secara lebih produktif. Efisiensi ini tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong kenaikan daya beli masyarakat melalui program pemberdayaan yang tepat sasaran, sehingga peningkatan pengeluaran perkapita tidak bergantung pada besaran subsidi bantuan sosial semata, melainkan pada terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan.

2) Efisiensi SDM

Diwujudkan melalui transformasi peran aparatur sipil negara dan tenaga pendamping lapangan menjadi fasilitator ekonomi yang kompeten dan multifungsi. Dengan membekali SDM daerah melalui keahlian pendampingan bisnis dan literasi keuangan, petugas lapangan mampu memberikan bimbingan teknis yang berkualitas kepada pelaku usaha mikro dan kelompok tani tanpa memerlukan penambahan jumlah personel yang signifikan. Optimalisasi ini memastikan bahwa strategi peningkatan pendapatan masyarakat dapat dikelola secara presisi oleh SDM yang ada, di mana dengan tenaga kerja yang terampil mampu



menjangkau sasaran program pemberdayaan ekonomi secara lebih luas, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan daya beli masyarakat yang tercermin dalam angka pengeluaran perkapita daerah.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui percepatan siklus birokrasi perizinan dan digitalisasi akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal. Dengan memangkas durasi administratif dalam proses fasilitasi usaha serta pemanfaatan platform digital untuk promosi produk unggulan daerah, para pelaku usaha dan masyarakat luas dapat mengakselerasi aktivitas transaksi ekonomi mereka tanpa terhambat oleh kendala prosedur yang lama. Kecepatan dalam penyaluran stimulus ekonomi dan respons terhadap dinamika pasar ini memastikan bahwa perputaran modal di tingkat masyarakat bawah serta pelaku usaha mikro bergerak lebih dinamis, sehingga peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat dapat tercapai dalam kurun waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode pelayanan konvensional.

4. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah diukur melalui 5 indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan, Jumlah Kunjungan Wisata dan ICOR. Untuk pelaporan terkait dengan indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan ICOR akan dianalisa di bawah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sedangkan untuk indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata karena tidak lagi menjadi indikator



kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 maka akan dilaporkan sebagai berikut.

Definisi operasional dari Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan adalah peningkatan nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam periode waktu tertentu, dengan rumus perhitungan: $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$.

Definisi operasional dari Jumlah Kunjungan Wisata Adalah banyaknya orang (baik wisatawan nusantara maupun mancanegara) yang datang dan memasuki objek daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Blitar dalam kurun waktu satu tahun, yang dibuktikan melalui catatan registrasi pengunjung atau jumlah penjualan tiket (karcis) masuk di pintu gerbang utama destinasi wisata.

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah untuk indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata adalah sebesar 91,32% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.28
Realisasi Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	8,11	6,41	79,04%
		Jumlah Kunjungan Wisata	3.650.396	3.781.644	103,60%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					91,32%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2025

Berdasarkan tabel diatas, indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dapat direalisasi sebesar 6,41 tidak memenuhi target sebesar 1,7 dari 8,11. Pencapaian ini berada dibawah target dikarenakan struktur ekonomi Kabupaten Blitar yang masih sangat bergantung pada sektor primer, sehingga industri pengolahan lokal sangat rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga bahan baku pertanian serta peternakan. Sebagian besar pelaku usaha di sektor ini masih berada pada level industri kecil dan rumah tangga yang

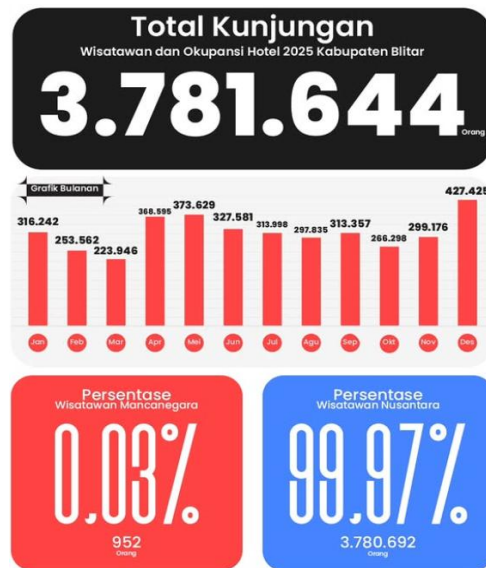


memiliki keterbatasan dalam adopsi teknologi pengolahan pasca-panen, sehingga nilai tambah produk yang dihasilkan belum mampu mendorong pertumbuhan secara signifikan. Selain itu, belum optimalnya integrasi antara sentra produksi bahan mentah dengan kawasan pengolahan mengakibatkan biaya logistik tetap tinggi, yang pada akhirnya menghambat akselerasi output industri manufaktur untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada indikator Jumlah Kunjungan Wisata pada tahun 2025 telah tercapai dan melebihi target. Dari target sebesar 3.650.396 wisatawan terealisasi sebesar 3.781.644 wisatawan, realisasi ini melebihi sebesar 131.268 wisatawan dari target dengan capaian sebesar 103,60%. Capaian kinerja ini didorong oleh beberapa faktor strategis, di antaranya adalah intensifikasi promosi wisata berbasis digital, penyelenggaraan berbagai *event* budaya dan festival berskala regional dan nasional yang mampu menarik minat wisatawan luar daerah, serta adanya pembenahan infrastruktur aksesibilitas menuju destinasi unggulan. Selain itu, optimalisasi potensi desa wisata dan peningkatan kualitas layanan sarana penunjang (amenitas) di sekitar objek wisata turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya tarik Kabupaten Blitar di mata wisatawan. Berikut disajikan rincian jumlah wisatawan dari kunjungan wisata di Kabupaten Blitar Tahun 2025.



Gambar 2.8
Grafik Kunjungan Wisatawan Kabupaten Blitar Tahun 2025



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025

10 TOP Daya Tarik Wisata berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Kampung Coklat
- 2) Pantai Serang
- 3) Sumur Amber
- 4) Blitar Park
- 5) Pendapa Ageng dan Rest Area Hand Asta Sih
- 6) Blitar Fantasy World
- 7) Candi Penataran
- 8) Pantai Pudak
- 9) Pantai Tambakrejo
- 10) Perkebunan Teh Sirah Kencong

Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Blitar meskipun belum mencapai target pada tahun 2025, namun secara tren dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir 2022-2025 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah mulai bergerak ke arah industrialisasi berbasis potensi lokal, di mana masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada



penjualan komoditas mentah hasil pertanian dan peternakan, tetapi sudah mulai melakukan proses pengolahan nilai tambah. Tren positif ini merupakan cerminan dari bangkitnya sektor IKM (Industri Kecil Menengah) pasca-pandemi, terutama pada subsektor pengolahan pangan seperti produk turunan cokelat, olahan susu, dan pakan ternak mandiri yang banyak tumbuh di wilayah pedesaan. Konsistensi kenaikan ini juga menandakan adanya peningkatan kepercayaan investasi lokal serta keberhasilan program standarisasi produk (PIRT, Halal, dan MD) yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga produk-produk olahan asli Kabupaten Blitar mampu menembus jejaring ritel modern dan pasar yang lebih luas.

Tren data jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Blitar dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi daerah yang semakin baik. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan keberhasilan strategi diversifikasi destinasi, penguatan *branding* daerah, serta efektivitas promosi digital yang dilakukan secara masif. Lebih jauh lagi, tren kenaikan ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dan minat wisatawan terhadap kualitas daya tarik wisata di Kabupaten Blitar. Berikut disajikan tren data kinerja Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata tahun 2022–2025.

Tabel 2.29
Perkembangan kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	8,11	6,41	6,62	5,35	10,75
		Jumlah Kunjungan Wisata	3.650.396	3.781.644	3.273.408	2.833.874	2.597.470

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2025



Realisasi kinerja pada indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 belum berhasil mencapai target akhir RPJMD 2021-2026 dengan capaian 85,81%. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara target pertumbuhan yang ditetapkan pada periode perencanaan dengan realitas kapasitas produksi IKM lokal yang masih terbatas secara teknologi. Kondisi riil menunjukkan bahwa hilirisasi produk unggulan seperti coklat dan olahan ternak belum mencapai skala industri masif, sehingga kontribusinya terhadap PDRB belum mampu menembus angka target akhir RPJMD.

Capaian indikator Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tinggi dengan melampaui target akhir RPJMD 2021-2026. Meskipun target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 3.029.584 wisatawan, realisasi kunjungan pada tahun 2025 mampu menembus angka 3.781.644 wisatawan, yang berarti telah melampaui target jangka menengah tersebut sebesar 752.060 wisatawan atau setara dengan capaian 124,82% terhadap target akhir periode. Berikut disajikan tabel perbandingan capaian kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.30
Pencapaian kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata terhadap target akhir RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun n	Capaian
1.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	7,47	6,41	85,81%
		Jumlah Kunjungan Wisata	3.029.584	3.781.644	124,82%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Blitar ini lebih tinggi sebesar 0,43 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi



Kabupaten Blitar memiliki basis industri pengolahan yang lebih adaptif dan mandiri karena berakar pada sektor kerakyatan. Di saat industri manufaktur besar di Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan impor, industri di Blitar justru tumbuh stabil berkat pemanfaatan bahan baku lokal, seperti pengolahan hasil perkebunan dan peternakan rakyat. Keunggulan poin ini mencerminkan bahwa ekosistem Industri Kecil Menengah (IKM) di Blitar telah mampu menciptakan rantai nilai yang efektif, sehingga percepatan nilai tambah yang dihasilkan di tingkat daerah bergerak lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan industri di tingkat provinsi.

Capaian kunjungan wisatawan Kabupaten Blitar sebesar 3.781.644 jiwa pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang stabil bagi destinasi berbasis wisata alam dan budaya, meskipun terdapat disparitas volume yang signifikan dibandingkan Kota Surabaya yang mencatatkan 25.487.271 kunjungan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh karakteristik Surabaya sebagai hub transportasi internasional dan pusat kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) yang mampu menyerap massa secara masif, sementara Kabupaten Blitar yang mengandalkan *niche market* wisata religi dan sejarah masih menghadapi tantangan aksesibilitas geografis. Guna merespons hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkomitmen untuk melakukan akselerasi inovasi produk dan penguatan konektivitas pada tahun mendatang demi meningkatkan daya saing serta memperkecil selisih pertumbuhan kunjungan antarwilayah di Jawa Timur.

Tabel 2.31
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur/Kota Surabaya
1.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	6,41	5,98
		Jumlah Kunjungan Wisata	3.781.644	Pemkot Surabaya 25.487.271

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2025



1) Indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Pemerintah Kabupaten Blitar secara konsisten mengakselerasi program hilirisasi produk unggulan daerah sebagai strategi utama meningkatkan nilai tambah sektor sekunder. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan sentra-sentra industri pengolahan berbasis potensi lokal, seperti optimalisasi pengolahan coklat di wilayah utara dan pengembangan industri pengolahan susu serta pakan ternak mandiri di sentra peternakan. Dengan mendorong para produsen bahan mentah untuk bertransformasi menjadi pelaku industri olahan, Pemkab Blitar berupaya memutus ketergantungan pada penjualan komoditas primer, sehingga margin ekonomi yang dihasilkan tetap berputar di wilayah daerah dan berkontribusi langsung pada kenaikan PDRB.

Selain fokus pada produksi, Pemkab Blitar juga melakukan intervensi melalui digitalisasi pemasaran dan standarisasi produk IKM (Industri Kecil Menengah). Melalui kolaborasi antar perangkat daerah, dilakukan pendampingan intensif untuk pengurusan sertifikasi Halal, PIRT, serta izin edar BPOM bagi produk olahan lokal agar mampu menembus jejaring ritel modern dan pasar ekspor. Pemanfaatan platform digital dalam promosi investasi dan pemasaran produk unggulan ini bertujuan untuk memperpendek rantai distribusi dan memperluas jangkauan pasar, yang secara riil berdampak pada peningkatan volume *output* industri pengolahan di tingkat pedesaan.

Dalam aspek pembangunan infrastruktur penunjang, Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya memperbaiki aksesibilitas menuju kawasan-kawasan peruntukan industri serta mempermudah iklim investasi melalui sistem perizinan yang terintegrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dibarengi dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana yang mendukung efisiensi distribusi bahan baku dan barang jadi.



Hambatan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2025 dalam memacu laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan adalah keterbatasan infrastruktur penunjang di kawasan peruntukan industri, terutama aksesibilitas jalan bagi kendaraan bertonase besar dan stabilitas pasokan energi. Hal ini menjadi kendala riil dalam menarik investasi manufaktur skala besar untuk masuk ke wilayah Blitar, sehingga pertumbuhan sektor ini masih sangat bergantung pada industri kecil dan menengah (IKM) yang memiliki kapasitas produksi terbatas. Akibatnya, program penguatan kawasan industri yang dicanangkan belum mampu beroperasi secara maksimal untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap angka PDRB, karena para investor masih mempertimbangkan tingginya biaya logistik akibat kondisi topografi dan konektivitas wilayah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan jalur distribusi utama Jawa Timur.

Selain masalah infrastruktur, kendala lainnya terletak pada rendahnya adopsi teknologi pengolahan modern dan standarisasi global di tingkat pelaku usaha lokal. Meskipun program pendampingan sertifikasi seperti Halal dan PIRT terus berjalan, banyak IKM pengolahan pangan dan hasil ternak di Blitar yang masih menggunakan peralatan tradisional, sehingga sulit untuk memenuhi permintaan pasar dalam skala masif atau kualitas ekspor. Fluktuasi harga bahan baku lokal, seperti jagung dan telur, juga sering kali mengganggu stabilitas biaya produksi industri pengolahan pakan dan makanan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer ini menyebabkan kinerja sektor industri pengolahan menjadi sangat sensitif terhadap anomali cuaca dan dinamika harga pasar komoditas, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Blitar akan memprioritaskan penguatan ekosistem hilirisasi melalui digitalisasi rantai pasok dan modernisasi sarana prasarana bagi



pelaku IKM. Program nyata yang akan diakselerasi adalah penyediaan bantuan teknologi tepat guna untuk standarisasi produk serta perluasan jangkauan pemasaran melalui platform digital daerah. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan seperti telur, susu, dan coklat dengan memfasilitasi kemudahan akses permodalan dan sertifikasi ekspor, sehingga produk olahan Kabupaten Blitar memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional.

Di sisi lain, perbaikan iklim investasi akan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di kawasan peruntukan industri serta penyederhanaan birokrasi perizinan melalui sistem yang terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan memperkuat sinergi antara sektor pertanian/peternakan dengan sektor industri melalui pengembangan pusat-pusat pengolahan di tingkat perdesaan untuk meminimalkan biaya logistik. Dengan menciptakan konektivitas yang lebih baik antara sentra bahan baku dan pabrik pengolahan, diharapkan efisiensi produksi dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan.

2) Jumlah Kunjungan Wisata

Dalam rangka mencapai target kinerja Jumlah Kunjungan Wisata yang telah ditetapkan pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar telah melaksanakan serangkaian langkah strategis dan program akselerasi yang melalui enam langkah. Langkah pertama dilakukan melalui Penguatan Promosi Terpadu, yang mengombinasikan strategi pemasaran *online* dan *offline*. Hal ini mencakup kampanye destinasi unggulan melalui media digital, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan (*influencer*), serta partisipasi aktif dalam ajang pameran pariwisata tingkat regional maupun nasional guna memperluas jangkauan pasar.



Sejalan dengan upaya pemasaran, dilakukan pula Pengembangan Event dan Atraksi Berbasis Budaya Lokal. Melalui penyelenggaraan festival budaya dan seni tradisi secara kontinyu, Pemerintah Daerah berupaya mengintegrasikan kalender *event* dengan paket wisata lokal untuk meningkatkan nilai tawar destinasi serta memperpanjang durasi kunjungan wisatawan. Upaya ini dibersamai dengan Peningkatan Kualitas Destinasi dan Amenitas, yang mencakup perbaikan sarana prasarana penunjang serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, termasuk Pokdarwis dan pelaku UMKM, guna menjamin standar pelayanan yang prima.

Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperkuat aspek operasional melalui Penguatan Kemitraan dan Jejaring Pemasaran dengan membangun sinergi lintas perangkat daerah, BUMDes, serta sektor swasta. Sinergi ini memicu lahirnya Inovasi Produk Wisata berupa paket wisata tematik (sejarah, religi, dan alam) yang memanfaatkan potensi ekonomi kreatif sebagai daya tarik tambahan. Sebagai penutup, seluruh program tersebut didukung oleh Penguatan Tata Kelola dan Monitoring Kinerja yang berbasis data kunjungan riil. Evaluasi berkala dilakukan secara sistematis untuk memastikan seluruh kebijakan promosi dan penyelenggaraan *event* berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai upaya strategis telah diimplementasikan sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih menghadapi sejumlah kendala dan hambatan yang memengaruhi optimalisasi pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara. Faktor utama yang menjadi tantangan adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, di mana kondisi jalan menuju beberapa destinasi serta minimnya transportasi umum langsung menuju objek wisata unggulan masih menjadi kendala bagi mobilitas wisatawan. Hal ini menjadi semakin kurang menunjang dengan belum meratanya



fasilitas penunjang seperti area parkir, toilet, dan *signage* di sejumlah titik destinasi.

Dari sisi manajerial dan pemasaran, keterbatasan alokasi anggaran promosi menyebabkan jangkauan pasar nasional dan internasional belum dapat tercapai secara maksimal, termasuk dalam hal pengelolaan media digital yang belum sepenuhnya profesional. Rendahnya daya saing destinasi juga menjadi catatan penting, mengingat beberapa objek wisata belum memiliki keunikan ikonik dibandingkan daerah tujuan wisata lain di Jawa Timur, yang diperlemah oleh kurangnya inovasi pada atraksi dan paket wisata tematik yang berkelanjutan. Di sisi lain, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, baik pada level Pokdarwis maupun pelaku UMKM, dinilai belum merata dalam hal standar pelayanan.

Hambatan operasional lainnya mencakup minimnya sinergi dengan pelaku industri serta jaringan pemasaran regional yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, faktor eksternal seperti fluktuasi kondisi ekonomi nasional, persaingan ketat antar-daerah, hingga anomali cuaca turut memberikan tekanan terhadap tingkat kunjungan. Terakhir, tantangan dalam aspek data ditandai dengan sistem pencatatan kunjungan yang belum terintegrasi secara digital, sehingga akurasi data sebagai basis perencanaan pembangunan pariwisata di masa mendatang masih perlu ditingkatkan.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.32
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah pada Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Capaian Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah (Laju)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri 100%	Melaksanakan pemetaan zona industri dan hilirisasi produk lokal yang siap dipasarkan secara kompetitif ke skala regional.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Capaian Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan 100%	Melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri lokal agar memenuhi syarat formal untuk masuk ke rantai pasok modern serta pasar ekspor.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri 100%	SIINas menyajikan data produksi yang akurat secara <i>real-time</i> , sehingga memperlancar rantai pasok dan memperluas akses pasar produk lokal ke jaringan ritel serta pengadaan barang/jasa.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Promosi Produk Ekspor melalui pameran dan pendampingan pelaksanaan ekspor	Mendorong peningkatan ekspor produk Kabupaten BLitar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan UMKM dan pendampingan melalui kemitraan, dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM baik terkait produk maupun pemasaran	Pendampingan Peningkatan Usaha dan Kualitas Produk UMKM	Dinas Koperasi dan UM
	Program Pengembangan UMKM	Pelatihan dan pendampingan usaha mikro dalam rangka peningkatan omzet usaha mikro	Pendampingan usaha mikro dalam rangka peningkatan omzet	Dinas Koperasi dan UM
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kebijakan insentif penanaman modal	Mendorong tumbuhnya investasi di Kabupaten Blitar	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Informasi potensi investasi di Kabupaten Blitar	Mendorong tumbuhnya investasi di Kabupaten Blitar	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan berusaha baik jemput bola ataupun di DPMPTSP dan sosialisasi	Memberikan kemudahan dalam urusan perizinan berusaha sehingga lebih terjangkau oleh seluruh pelaku usaha	DPMPTSP



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Capaian Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
		perizinan berusaha	mulai dari skala mikro hingga besar	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Sosialisasi, pendampingan pembinaan, dan pengawasan kelengkapan persyaratan dan pelaksanaan berusaha	Memberikan informasi dan pembinaan bagi pelaku usaha untuk mendorong tumbuhnya iklim investasi yang nyaman	DPMPSTP
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan sebesar 75,92%	Peningkatan daya Tarik destinasi wisata dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata melalui kampanye destinasi unggulan melalui media digital, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan (<i>influencer</i>), serta partisipasi aktif dalam ajang pameran pariwisata tingkat regional maupun nasional guna memperluas jangkauan pasar	Meningkatkan perjalanan wisatawan di Kabupaten Blitar sebesar 15,53%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi pemanfaatan/perindungan HAKI untuk ekonomi kreatif	Memberikan kepastian hukum kepada pelaku kegiatan ekonomi kreatif sehingga menumbuhkan kembangkan kegiatan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor ekonomi potensial	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan bimbingan teknis baik pengembangan sumber daya pariwisata maupun ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan ruas-ruas vital dan prioritas Kabupaten	Meningkatkan aksesibilitas ekonomi dan pariwisata	Dinas PUPR

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025



Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah pada indikator Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata adalah sebesar Rp. 145.888.256.641,93 dengan realisasi sebesar Rp. 55.154.112.844,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah pada indikator Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata.

Tabel 2.33

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah pada Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah (Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata)	91,32	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.583.149.483,00	1.571.627.668,00	99,27
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	8.015.000,00	7.995.000,00	99,75
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	29.498.000,00	28.980.508,00	98,25
			Program Pengembangan Ekspor	421.439.120,00	413.941.240,00	98,22
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	255.490.850,00	225.868.486,00	88,41
			Program Pengembangan UMKM	1.037.503.000,00	1.012.532.104,00	97,59
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	67.685.600,00	63.621.000,00	93,99
			Program Promosi Penanaman Modal	110.619.000,00	104.213.999,00	94,21



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Pelayanan Penanaman Modal	399.996.100,00	386.859.761,00	96,72
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	374.873.358,00	233.747.566,00	62,35
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.178.280.800,00	1.097.552.572,00	93,15
			Program Pemasaran Pariwisata	405.282.865,00	401.536.945,00	99,08
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	8.450.000,00	8.183.000,00	96,84
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.348.855.000,00	1.319.832.760,00	97,85
			Program Penyelenggaraan Jalan	138.659.118.465,93	48.277.620.235,00	34,82
			Total	145.888.256.641,93	55.154.112.844,00	37,81
			Tingkat efisiensi			53,51

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah pada Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Dan Jumlah Kunjungan Wisata. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 91,32% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 37,81%, sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar 53,51. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



1) Efisiensi Anggaran

Diwujudkan melalui strategi kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi belanja digital. Pemerintah Kabupaten Blitar menerapkan penganggaran integratif, di mana pembangunan infrastruktur jalan berfungsi ganda untuk akses distribusi industri sekaligus jalur wisata, sehingga menciptakan *multi-output* dari satu sumber pendanaan. Pergeseran promosi ke platform digital dan penguatan kemitraan dengan Pokdarwis serta sektor swasta berhasil menekan biaya operasional pemerintah namun tetap menghasilkan dampak ekonomi yang luas melalui peningkatan volume produksi manufaktur dan kedatangan wisatawan.

2) Efisiensi SDM

Diwujudkan melalui peningkatan kompetensi teknis dan optimalisasi peran tenaga kerja berbasis potensi lokal. Pada sektor industri, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan standarisasi produk dan pengoperasian teknologi tepat guna memungkinkan pelaku IKM bekerja lebih produktif dengan tingkat kesalahan yang minim, sehingga *output* nilai tambah industri meningkat secara signifikan. Sementara itu, pada sektor pariwisata, pengembangan SDM difokuskan pada profesionalisme pengelola destinasi dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam memberikan layanan prima serta penguasaan literasi digital untuk manajemen promosi mandiri. Sinergi kualitas SDM di kedua sektor ini menciptakan efisiensi operasional di mana tenaga kerja lokal mampu mengelola aset daerah secara mandiri dan inovatif, yang secara langsung berdampak pada penguatan struktur ekonomi industri serta daya tarik kunjungan wisatawan di Kabupaten Blitar.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik dan pemasaran digital yang terintegrasi. Pemangkasan durasi



perizinan serta sertifikasi IKM memungkinkan pelaku industri merespons permintaan pasar secara *real-time*, sementara penggunaan platform digital, *virtual tour*, dan sistem tiket elektronik mempercepat akses informasi destinasi unggulan bagi wisatawan. Sinergi ini secara kolektif memangkas hambatan administratif dan geografis, sehingga mampu mendorong perputaran ekonomi daerah yang lebih dinamis melalui peningkatan *output* manufaktur dan frekuensi kunjungan wisatawan secara signifikan.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan di atas, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.34
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	131,95%	131,95%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Desa Mandiri	174,68%	174,68%	Sangat Tinggi



3	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (000)	101,34%	101,34%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	79,04%	91,32%	Sangat Tinggi
		Jumlah Kunjungan Wisata	103,60%		

Sumber Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

B. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Berikut analisis capaian kinerja pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025, berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 yang merupakan indikator kinerja yang digunakan pada RPJMD periode 2021-2026 dan RPJMD periode 2025-2029. Analisis disajikan sesuai sasaran dalam RPJMD periode 2025-2029.

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. HLS umumnya dihitung untuk anak berusia 7 tahun ke atas. HLS dihitung dengan menjumlahkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun rata-rata yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung dengan cara membagi total lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan jumlah total penduduk pada kelompok usia tersebut.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat adalah sebesar 101,26% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.36

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,67	12,83	101,26%
		Rata-rata Lama Sekolah	7,91	8,01	101,26%
Capaian Kinerja Sasaran					101,26%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) berhasil terealisasi sebesar 12,83 tahun, melampaui target yang ditetapkan sebesar 12,67 tahun atau mencapai 101,26%. Pencapaian ini mengonfirmasi bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Blitar memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma I atau Diploma II, yang mencerminkan optimisme keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai angka 8,01 tahun, melebihi target sebesar 7,91 tahun atau mencapai 101,26%, yang menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas secara kolektif rata-rata menyelesaikan pendidikan formal setara kelas IX dan mulai memasuki jenjang pendidikan menengah atas. Selain melebihi target, kenaikan angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2026 juga merupakan kenaikan tertinggi dari 5 tahun terakhir yang rata-rata meningkat sebesar 0,05 poin. Realisasi Rata-rata lama sekolah dibandingkan realisasi tahun 2024 meningkat sebanyak 0,14 poin.

Keberhasilan pelampauan target pada kedua indikator tersebut didorong oleh akselerasi program wajib belajar melalui bantuan biaya pendidikan berupa bantuan keuangan siswa miskin (BKSM) dan seragam gratis, penguatan sarana prasarana sekolah, dan peningkatan aksesibilitas ke sekolah melalui program Bus Angkutan Pelajar Kabupaten Blitar (Bang Anjar). Selain itu, optimalisasi pendidikan non-formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program kesetaraan telah berhasil menjangkau penduduk usia dewasa untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kinerja ini secara keseluruhan menunjukkan



komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif, di mana peningkatan HLS dan RLS ini menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah secara agregat sekaligus memperkecil kesenjangan akses pendidikan bagi Masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Pada tahun 2025 juga dilaksanakan satu program yaitu pengembangan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Filial yang mendekatkan pelayanan pendidikan kesetaraan kepada masyarakat, dengan insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Program ini memberikan intervensi pada Rata-rata lama sekolah yang menghitung tingkat pendidikan penduduk di atas usia 25 tahun. Dengan mendekatkan pelayanan PKBM kepada masyarakat serta adanya insentif dari Pemerintah Kabupaten Blitar, diharapkan akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun sehingga dapat mendorong pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025 telah didirikan 15 PKBM Filial menambah jumlah PKBM yang sebelumnya hanya berjumlah 9 PKBM.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Peningkatan kinerja ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas aksesibilitas pendidikan serta keberhasilan dalam menekan angka putus sekolah melalui berbagai intervensi strategis. Tren positif ini juga merefleksikan penguatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, di mana masyarakat Kabupaten Blitar memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:



Tabel 2.37
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,67	12,83	12,67	12,65	12,64
		Rata-rata Lama Sekolah	7,91	8,01	7,87	7,83	7,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain itu, capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 99,615% dari target tahun terakhir RPJMD. Realisasi yang mendekati target akhir periode ini menunjukkan efektivitas akselerasi program pendidikan yang telah dilaksanakan, sekaligus memberikan fondasi yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencapai target jangka menengah lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Keberhasilan ini juga merefleksikan optimisme dalam peningkatan HLS dan RLS secara agregat, sehingga pada sisa tahun perencanaan, fokus kebijakan dapat diarahkan pada penguatan kualitas mutu serta pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar secara lebih komprehensif. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.38
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD

Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,74	12,83	100,71%
		Rata-rata Lama Sekolah	8,13	8,01	98,52%
Capaian Kinerja Sasaran					99,615%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja di Kabupaten Blitar masih



berada di bawah angka Provinsi. Kesenjangan capaian ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Blitar mengalami tren peningkatan secara internal, diperlukan akselerasi program dan inovasi kebijakan yang lebih masif untuk mengejar ketertinggalan terhadap standar capaian regional. Fokus kedepan perlu diarahkan pada penguatan integrasi program wajib belajar dan perluasan akses pendidikan tinggi guna memperkecil deviasi capaian pendidikan terhadap rata-rata Provinsi Jawa Timur. Berikut perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.39
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,83	13,44
		Rata-rata Lama Sekolah	8,01	8,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pemerintah Kabupaten Blitar secara konsisten menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama guna meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Upaya nyata ini diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang pro-rakyat, seperti penyaluran Bantuan Keuangan Siswa Miskin (BKSM) dan pemberian Seragam Gratis bagi peserta didik baru. Program-program ini secara signifikan berhasil meminimalisir angka putus sekolah yang disebabkan oleh kendala finansial, sehingga setiap anak di Kabupaten Blitar memiliki kesempatan yang sama untuk memulai dan melanjutkan pendidikan mereka tanpa terbebani biaya perlengkapan dasar.

Selain intervensi materiil, pemerintah daerah juga berfokus pada peningkatan sarana prasarana sekolah melalui pengoptimalan usulan kegiatan revitalisasi sekolah, aksesibilitas ke sekolah melalui penyediaan armada Bus Angkutan Pelajar gratis yang berjumlah 11 armada. Program ini bertujuan memberikan solusi transportasi yang



aman dan efisien bagi siswa, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan transportasi umum. Untuk mendorong angka RLS pada penduduk usia dewasa, pemerintah mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), yang memberikan kesempatan kedua bagi warga untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APKB juga memfasilitasi Forum Anak dalam rangka Peningkatan Kapasitas Peran Forum Anak dalam menjadi Pelopor dan Pelapor dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Selain itu, dalam Program Pemenuhan Hak Anak juga terdapat penyusunan Materi KIE berupa leaflet dengan tema “Stop Bullying” yang dibagikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Dalam rangka Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Blitar juga telah melaksanakan talkshow Inspiratif Jejak Anak dan Remaja Bersama Forum Anak Kabupaten Blitar dengan narasumber Psikolog Klinis yang pelaksanaannya disiarkan melalui Radio Persada FM.

Meskipun berbagai program unggulan telah berjalan, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan sosiokultural yang cukup kompleks, salah satunya adalah fenomena pernikahan dini di beberapa wilayah kecamatan yang sering kali menjadi penyebab utama terhentinya masa sekolah anak. Selain itu, tuntutan ekonomi keluarga terkadang memaksa lulusan pendidikan dasar untuk segera memasuki pasar kerja informal demi membantu keuangan keluarga. Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan motivasi masyarakat usia dewasa untuk kembali menempuh pendidikan formal maupun kesetaraan.

Dari sisi teknis dan geografis, luasnya wilayah Kabupaten Blitar menimbulkan tantangan dalam pemerataan jangkauan layanan pendukung pendidikan. Keterbatasan jumlah armada bus sekolah dibandingkan dengan luasnya area pelayanan menyebabkan



jangkauan layanan belum sepenuhnya menyentuh seluruh titik pemukiman secara menyeluruh. Selain itu, masih adanya stigma masyarakat yang menganggap pendidikan non-formal memiliki kualitas di bawah pendidikan formal turut menghambat efektivitas program kesetaraan dalam mendongkrak angka rata-rata lama sekolah secara cepat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk melakukan ekspansi dan penguatan program agar lebih tepat sasaran dengan melakukan transformasi pada program pendidikan kesetaraan yang diintegrasikan dengan aspek vokasi atau keterampilan praktis. Langkah ini diambil agar masyarakat tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga keahlian yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Selain itu, sistem validasi data penerima BKSM akan terus diperbarui secara berkala menggunakan pangkalan data kemiskinan terbaru untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang paling membutuhkan.

Pemerintah juga akan mengintensifkan sosialisasi lintas sektor tentang risiko pernikahan anak dan pentingnya pendidikan berkelanjutan melalui program "Gerakan Kembali Bersekolah". Langkah ini akan dibarengi dengan pengembangan kurikulum muatan lokal yang relevan dengan potensi ekonomi daerah, sehingga masyarakat melihat pendidikan sebagai investasi nyata yang mampu meningkatkan taraf hidup. Rencana penambahan armada Bus Angkutan Pelajar serta optimalisasi rute untuk menjangkau wilayah Blitar selatan dan utara untuk lebih mempermudah akses masyarakat menuju ke sekolah. Dengan memperkuat sinergi antara bantuan materiil dan penguatan kesadaran kolektif, diharapkan target HLS dan RLS pada periode RPJMD 2025-2029 dapat tercapai secara progresif dan berkelanjutan.

Gambar 2.9
Rencana Penambahan Armada Bang Anjar Tahun 2026



Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.40
Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Keberhasilan Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APM 5-6 tahun) 89,26. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM 7-12 tahun) 98,13. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (APM 13-15 tahun) 89,75. Tingkat partisipasi warga	Melalui peningkatan kualitas layanan, penyediaan sarana prasarana, serta upaya penurunan angka putus sekolah, program ini mendorong masyarakat untuk mengakses pendidikan lebih lama, sehingga berdampak langsung pada peningkatan HLS dan RLS secara berkelanjutan.	Dinas Pendidikan



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Keberhasilan Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
		negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS 7-18 kesetaraan) 38,79.		
	Program Pengembangan Kurikulum	Satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kearifan local 100%	Penyusunan kurikulum yang adaptif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Kurikulum yang menarik dan aplikatif mampu meningkatkan minat belajar, mengurangi angka putus sekolah, serta mendorong peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kebutuhan 97,22%.	Tenaga pendidik yang berkualitas, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, menekan angka putus sekolah, serta mendorong keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	Dinas Pendidikan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Satuan Pendidikan Berizin OSS yang terfasilitasi 100%.	Perizinan yang tertib dan terkontrol, keberadaan dan kualitas lembaga pendidikan dapat terjamin, sehingga	Dinas Pendidikan



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Keberhasilan Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
			masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Bis / Angkutan Sekolah	Meningkatkan akses anak menuju ke sekolah	Dinas Perhubungan
	Program Pemenuhan Hak Anak	Upaya mendorong terpenuhinya hak anak	Memastikan anak-anak terpenuhi hak-haknya terutama dalam memperoleh pendidikan	Dinas PPPAPPKB
	Program Perlindungan Khusus Anak	Pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Memastikan anak-anak terlindungi dan tetap terpenuhi hak-haknya meskipun dalam kondisi tertentu (menikah usia anak dan/atau anak berhadapan dengan hukum)	Dinas PPPAPPKB
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pelaksanaan KIE terkait perlindungan anak dan kesetaraan gender	Memberikan edukasi kepada keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh di lingkungan yang mendukungnya	Dinas PPPAPPKB

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat adalah sebesar Rp. 212.911.496.288,29 dengan realisasi sebesar Rp. 199.426.653.184,75. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.



Tabel 2.41
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	101,26	Program Pengelolaan Pendidikan	163.307.554.221,39	152.297.755.926,17	93,26
			Program Pengembangan Kurikulum	328.022.200,00	321.597.567,00	98,04
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	7.739.514.060,00	7.684.487.988,00	99,29
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	16.888.800,00	14.248.800,00	84,37
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	41.148.207.706,90	38.805.872.494,58	94,31
			Program Pemenuhan Hak Anak	28.414.300,00	11.734.500,00	41,30
			Program Perlindungan Khusus Anak	333.242.400,00	282.294.609,00	84,71
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	9.652.600,00	8.661.300,00	89,73
			Total	212.911.496.288,29	199.426.653.184,75	93,67
			Tingkat efisiensi			7,59

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 101,26% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 93,67%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,59. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Dengan pagu sebesar Rp. 212.911.496.288,29 dapat terealisasi sebesar Rp. 199.426.653.184,75 atau sebesar 93,67%. Hal ini dikarenakan dengan adanya pemanfaatan era digitalisasi ini,



maka salah satunya dapat menekan biaya pertemuan serta peralatan dan perlengkapan pendukung dalam kegiatan pertemuan.

2) Efisiensi SDM

Efisiensi SDM dilaksanakan melalui optimalisasi peran pendidik dan tenaga kependidikan, diantaranya:

- a. Pengawas dan Penilik tidak hanya menjalankan supervisi administratif tapi juga *coaching* maupun pembinaan akademik dan kelembagaan pada satuan pendidikan.
- b. Efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi dan informasi antara satuan pendidikan dengan dinas pendidikan melalui penunjukkan Koordinator Wilayah dan penempatan Tenaga Pranata Komputer pada masing-masing kecamatan.
- b. Pemerataan/Redistribusi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan SD dan SMP sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembelajaran.

3) Efisiensi Waktu

- a. Efisiensi waktu melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan (Dapodik), Dinas Pendidikan melalui kegiatan Dapodik Silaturahmi melakukan pelayanan ke wilayah/Lembaga sehingga lebih dekat ke pengguna, dalam hal ini operator data.
- b. Penggunaan Aplikasi “Anyaman Dispendik” sebagai wadah komunikasi dan konsultasi pelayanan bagi satuan Pendidikan secara online, sehingga meningkatkan respon time tanpa harus tatap muka. Layanan ini lebih mudah diakses, cepat, dan responsif sehingga dapat meningkatkan kualitas data pendidikan.



2. Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Usia Harapan Hidup. Usia Harapan Hidup (UHH) Adalah rata-rata perkiraan tahun yang dapat dijalani oleh seorang bayi yang baru lahir, dengan asumsi pola angka kematian berdasarkan usia pada tahun tersebut berlaku sepanjang hidupnya. Perhitungan UHH dilakukan dengan memanfaatkan data dari sensus penduduk dan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat adalah sebesar 100,09% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.42
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,56	75,63	100,09%
Capaian Kinerja Sasaran					100,09%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan tabel diatas, Capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Blitar pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang melampaui ekspektasi pembangunan kesehatan daerah. Dengan target yang ditetapkan sebesar 75,56 tahun, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mencapai realisasi sebesar 75,63 tahun atau tercapai sebesar 100,09%. Capaian ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 memiliki prospek untuk hidup hingga usia 75-76 tahun, yang sekaligus mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pencapaian kinerja yang melampaui target ini didorong oleh serangkaian intervensi strategis di bidang kesehatan dan sosial, antara lain:



- 1) Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan: efektivitas program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan keberhasilan perluasan jangkauan layanan kesehatan dasar melalui optimalisasi Puskesmas dan RSUD, seperti implementasi inovasi *Wlingi Emergency Medical Services* (WINGS) yang merupakan layanan ambulans gawat darurat gratis 24 jam untuk meningkatkan respons cepat kegawatdaruratan di Kabupaten Blitar, yang berfokus pada penanganan kecelakaan, persalinan, dan medis darurat, serta terintegrasi dengan tim medis kompeten.
- 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi: Intensifikasi program kesehatan ibu dan anak (KIA) serta pemenuhan gizi seimbang yang secara langsung berkontribusi pada ketahanan hidup sejak usia dini. Tercatat bahwa di Tahun 2025 ini jumlah kematian ibu sejumlah 4 kematian dengan AKI sebesar 38.87 per 100.000 KH, jumlah ini turun dari tahun 2024 yang tercatat jumlah kematian ibu sebanyak 13 kasus dengan AKI sebesar 120,83 per 100.000 KH. Penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blitar menjadi langkah nyata dalam pemenuhan gizi seimbang yang secara langsung berkontribusi pada ketahanan hidup sejak usia dini. Melalui asupan nutrisi yang terjamin bagi anak sekolah, program ini efektif memperkuat sistem imun dan kecerdasan siswa sebagai fondasi jangka panjang untuk meningkatkan angka Usia Harapan Hidup di daerah.
- 3) Perbaikan Kualitas Lingkungan dan Sanitasi: Keberhasilan program penyediaan air minum dan sanitasi layak yang mampu menekan angka penyakit menular di lingkungan pemukiman.

Gambar 2.10
Kegiatan Pengambilan sampel dan pemeriksaan kualitas air di Masyarakat



Sumber: Dinas Kesehatan, 2005

Kinerja ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar berada pada jalur yang tepat. Peningkatan UHH ini tidak hanya sekadar angka statistik, namun merupakan manifestasi dari keberhasilan pembangunan yang inklusif, di mana masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap nutrisi, layanan medis, dan lingkungan hidup yang sehat.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Peningkatan kinerja ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola derajat kesehatan masyarakat secara komprehensif melalui perbaikan akses layanan kesehatan dan kualitas lingkungan hidup. Hal ini juga menjadi cerminan dari meningkatnya standar kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Blitar, di mana intervensi gizi seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan fasilitas kesehatan dasar telah mampu menciptakan ketahanan fisik penduduk yang lebih baik sejak usia dini.

Selain itu, tren positif ini menunjukkan efektivitas kebijakan preventif dan promotif dalam menekan angka kematian ibu dan bayi serta pengendalian penyakit tidak menular. Secara makro, peningkatan UHH yang berkelanjutan ini menegaskan bahwa



Kabupaten Blitar berada pada jalur yang tepat dalam membangun fondasi kependudukan yang berkualitas. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.43
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,56	75,63	75,32	75,12	74,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 98,54% dari target tahun terakhir RPJMD. Tingginya persentase capaian di awal periode ini memberikan optimisme bahwa target jangka menengah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk dapat terpenuhi lebih cepat. Realisasi sebesar 75,63 tahun ini menunjukkan bahwa fondasi layanan kesehatan, jaminan kesehatan semesta, serta intervensi nutrisi gizi sudah berjalan secara efektif dan berada pada jalur yang tepat untuk mendekati standar ideal di akhir tahun RPJMD. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.44
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	76,75	75,63	98,54%
Capaian Kinerja Sasaran					98,54%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja Usia Harapan Hidup di



Kabupaten Blitar berada di atas angka Provinsi dengan selisih angka sebesar 0,27 poin. Capaian yang melampaui rata-rata regional ini menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan dan standar hidup masyarakat di Kabupaten Blitar memiliki performa yang sangat kompetitif di tingkat Jawa Timur. Keunggulan angka ini menjadi indikator penting bahwa Kabupaten Blitar berhasil mengelola faktor-faktor penentu panjang umur penduduk, seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar, secara lebih progresif. Dengan posisi yang berada di atas rata-rata provinsi, Kabupaten Blitar telah memantapkan perannya sebagai daerah yang mampu memberikan jaminan kualitas hidup yang lebih baik. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.45
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,63	75,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menjalankan langkah-langkah komprehensif untuk memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang bermuara pada capaian UHH sebesar 75,63 tahun. Upaya utama difokuskan pada penguatan layanan kesehatan dasar melalui optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai garda terdepan preventif dan kuratif. Melalui pemenuhan sarana medis yang modern serta ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten hingga ke tingkat desa, masyarakat dapat memperoleh akses penanganan medis secara cepat dan tepat, sehingga risiko fatalitas akibat penyakit dapat ditekan secara signifikan.

Intervensi gizi menjadi pilar kedua yang sangat krusial melalui implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan. Program ini bertujuan untuk memutus rantai masalah kesehatan sejak dini dengan



memastikan asupan nutrisi seimbang, yang secara langsung berkontribusi pada penguatan sistem imun tubuh dan penurunan angka *stunting*. Dengan terpenuhinya kebutuhan makro dan mikro nutrisi secara konsisten, ketahanan fisik masyarakat meningkat, yang dalam jangka panjang menjadi faktor determinan dalam memperpanjang Usia Harapan Hidup penduduk.

Selain sektor kesehatan murni, Pemerintah Kabupaten Blitar juga melakukan pembangunan infrastruktur penunjang kesehatan lingkungan melalui perluasan akses sanitasi layak dan air minum bersih. Program ini diintegrasikan dengan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara masif di tingkat rumah tangga guna mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Keberhasilan dalam menyediakan lingkungan pemukiman yang sehat ini terbukti mampu menurunkan angka kesakitan, sehingga kualitas hidup masyarakat tetap terjaga hingga usia senja.

Pemerintah Kabupaten Blitar juga melakukan terobosan dalam percepatan layanan darurat melalui penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang terintegrasi dengan layanan ambulans desa dan puskesmas keliling. Optimalisasi *response time* atau kecepatan penanganan medis pada kasus-kasus kritis seperti serangan jantung dan kecelakaan menjadi fokus utama untuk menekan angka kematian mendadak di masyarakat. Dengan dukungan armada yang tersebar secara strategis di seluruh wilayah kabupaten, risiko fatalitas akibat keterlambatan penanganan medis dapat diminimalisir.

Dari sisi pembiayaan, keberhasilan pencapaian UHH tahun 2025 didukung oleh perluasan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) yang menjamin seluruh warga, terutama masyarakat miskin, mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa kendala finansial. Melalui integrasi data kemiskinan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didanai APBD, pemerintah memastikan tidak ada warga yang terhambat dalam mendapatkan



pengobatan kuratif maupun rehabilitatif. Perlindungan kesehatan yang inklusif ini memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, yang pada akhirnya memperpanjang masa hidup produktif dan usia senja mereka.

Dalam proses pencapaian target, terdapat beberapa kendala sosiokultural dan teknis yang masih dihadapi, salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular (PTM). Budaya masyarakat yang cenderung baru memeriksakan kesehatan saat sudah bergejala berat mengakibatkan penanganan medis sering kali terlambat dilakukan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menurunkan angka kematian pada kelompok usia produktif dan lanjut usia akibat penyakit degeneratif seperti diabetes dan hipertensi.

Secara teknis, tantangan geografis di beberapa wilayah Kabupaten Blitar yang memiliki kontur perbukitan terkadang menyulitkan akses mobilitas pasien darurat menuju fasilitas kesehatan rujukan. Meskipun puskesmas pembantu telah tersedia, namun ketersediaan armada ambulans dan infrastruktur jalan yang memadai masih memerlukan perhatian lebih agar waktu tanggap (*response time*) penanganan medis dapat dipercepat. Kendala ini menjadi salah satu faktor yang membatasi optimalisasi layanan kesehatan di wilayah-wilayah pelosok.

Selain itu, transisi pola konsumsi masyarakat menuju makanan cepat saji dengan kandungan gula dan garam tinggi menjadi ancaman baru bagi ketahanan gizi yang tengah diperjuangkan pemerintah. Meskipun program MBG telah berjalan, pengaruh lingkungan di luar sekolah yang kurang mendukung pola makan sehat dapat mendistorsi hasil dari intervensi nutrisi yang telah diberikan. Hambatan ini menuntut adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan keluarga dalam menjaga konsistensi pola makan bergizi di luar lingkungan program pemerintah.



Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan transformasi layanan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan digital (*e-health*) untuk mempermudah pemantauan kesehatan penduduk secara individu dan berkala. Fokus ke depan akan diarahkan pada penguatan skrining kesehatan mandiri di tingkat Posyandu dan RT/RW, sehingga deteksi dini penyakit dapat dilakukan lebih proaktif. Integrasi data kesehatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran akurat untuk pengambilan kebijakan kesehatan yang lebih presisi dan tepat sasaran di tiap kecamatan.

Peningkatan sektor sanitasi dan air bersih berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan kualitas lingkungan, dengan harapan menjadi investasi kesehatan jangka panjang. Selain itu dengan penguatan literasi kesehatan akan diintensifkan melalui kampanye kreatif di media sosial dan pelibatan tokoh masyarakat untuk mengubah paradigma masyarakat dari kuratif menjadi preventif. Pemerintah Kabupaten Blitar juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur akses kesehatan, termasuk penambahan unit layanan keliling bagi wilayah yang sulit dijangkau. Sinergi antara teknologi, penguatan gizi, dan pemerataan akses ini diharapkan dapat membawa capaian UHH melampaui target akhir RPJMD.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.46
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Sasaran	Program	Output	Dukungan terhadap Pencapaian Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.Peningkatan Indeks kepuasan Masyarakat pada Faskes 2.Peningkatan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)	1. Pelayanan yang sesuai standar, alur pelayanan yang jelas, serta kepastian waktu layanan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan Masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo RSUD Srengat



Sasaran	Program	Output	Dukungan terhadap Pencapaian Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
			2. Ketersediaan ruang pelayanan, peralatan medis, obat dan bahan medis habis pakai yang memadai mendukung kelancaran pelayanan dan berdampak positif pada persepsi kualitas layanan. 3. Implementasi SPM kesehatan serta pemenuhan standar akreditasi fasilitas kesehatan mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan. 4. Mekanisme penanganan pengaduan yang responsive dan transparan membantu perbaikan layanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Penunjang keberhasilan pencapaian: 1. Kebijakan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai dengan analisis beban kerja 2. kerja sama dengan institusi pendidikan dan pemerintah dalam pemenuhan formasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penunjang kegagalan pencapaian: 1. belum meratanya distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan 2. keterbatasan formasi pengadaan dan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo RSUD Srengat
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan	Cakupan unit sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman sesuai standar	1. penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap unit pengelola sediaan farmasi,	Dinas Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo RSUD Srengat



Sasaran	Program	Output	Dukungan terhadap Pencapaian Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
	Minuman		alat kesehatan, dan makanan minuman 2. penerapan regulasi dan standar teknis yang jelas	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rumah Tangga Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan oleh tenaga kesehatan dan kader 2. Dukungan lintas sektor dan peran aktif masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat rumah tangga 3. Adanya kebijakan dan pedoman pelaksanaan PHBS sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan promosi kesehatan di masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Dan Pembagian Sistem Air Limbah	Peningkatan rumah tangga berakses air limbah domestik layak dan aman 99,81%	Sistem pengelolaan air limbah yang baik, risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit dapat ditekan, sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rumah tangga berakses air minum layak dan aman 90,72%.	Ketersediaan air bersih yang memadai mampu menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan infeksi lainnya, sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Dinas PUPR
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah	Dinas PUPR
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Advokasi Program Bangga Kencana	Mewujudkan keluarga berkualitas, sehat, dan sejahtera melalui tiga pilar utama: pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan KB & kesehatan reproduksi	Dinas PPPAPPKB
	Program Pemberdayaan Dan	Sosialisasi dan pengadaan kelompok	Meningkatkan ketahanan keluarga	Dinas PPPAPPKB



Sasaran	Program	Output	Dukungan terhadap Pencapaian Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
	Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	ketahanan keluarga melalui SOTH, Genre, BKB, BKR, BKL, PPKS, dan PIK-R		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	KIE kepada masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat adalah sebesar Rp. 127.508.070.864,50 dengan realisasi sebesar Rp. 111.849.010.742,70. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.

Tabel 2.47
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	100,09	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.265.377.442,50	88.471.604.968,70	89,13
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.494.414.900	2.299.707.040	92,19
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	556.533.300	487.135.401	87,53



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	558.397.008,00	525.454.508,00	94,10
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.665.951.670,00	6.018.683.500,00	90,29
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	250.981.000,00	238.157.000,00	94,89
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.574.367.000,00	5.319.069.171,00	80,91
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.456.800.000,00	5.202.770.508,00	80,58
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	321.330.544,00	321.210.000,00	99,96
			Total	127.508.070.864,50	111.849.010.742,70	87,72
			Tingkat efisiensi			12,37

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100,09% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 87,72%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12,37. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



1) Efisiensi Anggaran

Dengan pagu sebesar Rp. 127.508.070.864,50 dapat terealisasi sebesar Rp. 111.849.010.742,70 atau sebesar 87,72%. Angka efisiensi ini merupakan hasil dari manajemen belanja yang selektif serta optimalisasi penggunaan sumber daya dalam setiap program kesehatan yang dijalankan. Penghematan anggaran sebesar 12,28% ini berasal dari beberapa faktor teknis, antara lain efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa kesehatan, penghematan biaya operasional melalui sistem digitalisasi layanan, serta optimalisasi rute dan biaya pemeliharaan armada pendukung Kesehatan.

2) Efisiensi SDM

Pencapaian UHH sebesar 100,09% mencerminkan efisiensi tinggi SDM kesehatan melalui optimalisasi peran tenaga fungsional dan kader posyandu yang mampu menjalankan fungsi promotif-preventif secara masif. Transformasi digital dalam sistem pelaporan kesehatan telah memangkas beban administrasi nakes, sehingga fokus pelayanan dialihkan sepenuhnya pada peningkatan kualitas tindakan medis dan pemantauan kesehatan lingkungan. Sinergi lintas sektor antara petugas lapangan dengan perangkat desa memastikan intervensi kesehatan menjangkau wilayah pelosok secara tepat sasaran, yang secara kolektif meningkatkan ketahanan hidup masyarakat Kabupaten Blitar dengan rasio personel yang tetap produktif.

3) Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu dalam pencapaian indikator UHH di Kabupaten Blitar tercermin dari percepatan *response time* layanan kesehatan darurat dan digitalisasi sistem rujukan yang memangkas birokrasi penanganan pasien. Implementasi rekam medis elektronik dan integrasi data kesehatan antar fasilitas pelayanan kesehatan memungkinkan diagnosis serta intervensi



medis dilakukan lebih dini, sehingga risiko kematian akibat keterlambatan penanganan dapat ditekan secara signifikan. Optimalisasi jadwal pemantauan kesehatan keliling yang terstruktur juga memastikan deteksi dini penyakit tidak menular menjangkau masyarakat tepat waktu, yang secara kolektif mempercepat upaya peningkatan kualitas hidup penduduk hingga melampaui target tahun 2025.

3. Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia yang setara antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Pengukuran IPG didasarkan pada tiga dimensi dasar IPM, yang diterapkan secara spesifik untuk laki-laki dan Perempuan.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender adalah sebesar 100,53% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.48
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	93,85	94,35	100,53%
Capaian Kinerja Sasaran					100,53%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 94,35 melampaui target yang ditetapkan sebesar 93,85, atau mencapai 100,53%. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melalui penguatan kebijakan pengarusutamaan gender di seluruh perangkat



daerah. Selain itu, peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi produktif turut berkontribusi signifikan terhadap capaian tersebut. Sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender yang lebih baik di Kabupaten Blitar.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Peningkatan kinerja ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mempersempit kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi dasar pembangunan. Peningkatan ini mencerminkan adanya pemerataan akses yang lebih baik bagi perempuan terhadap layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, serta peluang ekonomi yang setara. Secara lebih dalam, tren positif ini membuktikan efektivitas implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di seluruh Perangkat Daerah, yang memastikan bahwa setiap sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan telah mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.49
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	93,85	94,35	93,65	93,40	93,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain itu, capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 99,47% dari target tahun terakhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam



upaya memperkecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan sejak awal periode perencanaan. Meskipun angka tersebut hampir mendekati target akhir, Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan program-program pengarusutamaan gender guna memastikan konsistensi capaian hingga akhir tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.50
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,85	94,35	99,47%
Capaian Kinerja Sasaran					99,47%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Blitar lebih unggul sebesar 1,06 poin dari Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Blitar berjalan lebih progresif dibandingkan rata-rata capaian daerah lain di Jawa Timur. Keunggulan ini mencerminkan efektivitas kebijakan lokal dalam memperkecil kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi perempuan secara lebih inklusif. Konsistensi Kabupaten Blitar dalam menjaga angka paritas yang tinggi menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan pembangunan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.51
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,35	93,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender, Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2025 menjalankan serangkaian program konkrit yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di wilayah perdesaan serta penguatan peran strategis perempuan dalam struktur pembangunan daerah. Salah satu langkah fundamental adalah penguatan program "Desa Peduli Buruh Migran" (Desbumi), mengingat Kabupaten Blitar merupakan salah satu basis pengirim PMI terbesar. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten memberikan pendampingan hukum serta pelatihan kewirausahaan bagi perempuan purna-PMI agar mereka memiliki kemandirian ekonomi di desa asal. Selain itu, optimalisasi program P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) terus digalakkan di desa-desa sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Blitar juga melakukan kegiatan sosialisasi bertema Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di tiga desa/kelurahan. Program ini menjadi upaya nyata pemerintah dalam mendorong terciptanya lingkungan perdesaan yang inklusif, aman, dan adil gender bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas (difabel).

Komitmen inklusivitas ini diperluas melalui program perlindungan sosial bagi kelompok rentan lainnya, yakni lansia dan penyandang disabilitas (difabel). Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan sosialisasi SIDAYA (Lanjut Usia Berdaya), Tujuh Dimensi Lansia Tangguh, dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia. Pemerintah Kabupaten Blitar terus mendorong penguatan berbagai layanan ramah lansia, mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin melalui Posyandu Lansia, pendampingan keluarga,

hingga edukasi melalui sekolah lansia, serta pemberian bantuan stimulan ekonomi bagi lansia potensial agar tetap produktif dan mandiri.

Gambar 2.11
Kegiatan Sosialisasi Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia (Sidaya)



Pemerintah Kabupaten Blitar secara aktif mengembangkan konsep desa inklusi untuk memberdayakan penyandang disabilitas, ODGJ, dan meningkatkan kesejahteraan melalui ekosistem keuangan. Beberapa lokasi percontohan mencakup Kampung Inklusi Rumah Kinasih (Kesamben), Desa Banggle (sekolah inklusi), Desa Balerejo (toleransi), serta Desa Krenceng dan Kemloko (ekosistem keuangan inklusif/EKI). Di mana penyandang disabilitas diberikan akses prioritas dalam layanan administrasi kependudukan serta pelatihan keterampilan khusus (seperti menjahit atau kerajinan tangan) yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan lansia dan perempuan difabel mendapatkan perlindungan ganda serta akses yang setara terhadap manfaat pembangunan.

Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Blitar secara masif memfasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan teknologi pengolahan hasil ternak guna meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi perempuan di sektor agraris.



Kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dilaksanakan melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan organisasi perempuan serta peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai forum pembangunan. Upaya ini diperkuat melalui peringatan Hari Ibu ke-97, sebagai bagian dari penguatan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan pemberdayaan perempuan dengan tema Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah dan Legalitas Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Blitar. Keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi diperlukan untuk menciptakan pembangunan inklusif, adil, dan sejahtera, karena perempuan sering tertinggal akibat diskriminasi, sehingga perlu akses setara dalam pengambilan keputusan, perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, modal, dan pasar, untuk mewujudkan keadilan gender, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan kebijakan publik responsif gender.

Upaya-upaya tersebut diperkuat dengan penguatan kelembagaan melalui Dinas P3APKB Kabupaten Blitar. Sebagai landasan regulasi yang kokoh, telah ditetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Peraturan ini menjadi pedoman utama implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah guna memastikan seluruh kebijakan bersifat responsif gender. Selain itu, sebagai langkah monitoring, telah dilaksanakan rapat koordinasi Tim Penggerak PUG dalam rangka persiapan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PUG Tahun 2025.

Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar menunjukkan capaian yang sangat tinggi sebesar 99,79%, namun dalam implementasinya pada tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala strategis yang perlu menjadi perhatian serius.



Pertama, dari sisi manajerial birokrasi, belum seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar mengintegrasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara maksimal. Hal ini menyebabkan beberapa program pembangunan belum sepenuhnya memiliki keberpihakan yang terukur terhadap kebutuhan spesifik gender.

Kedua, tantangan sosial yang masih cukup berat adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta tingginya angka permohonan rekomendasi pernikahan anak (dispensasi nikah) dengan data tercatat sebanyak 126 pasang calon pengantin. Kondisi ini menjadi hambatan besar dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan secara berkelanjutan, khususnya pada dimensi pendidikan dan kesehatan. Ketiga, dari sisi infrastruktur pendukung, masih terbatasnya lembaga anak serta fasilitas ruang publik ramah anak yang representatif dan sesuai standar di berbagai wilayah kecamatan.

Keempat, terdapat kendala pada kemandirian anggaran di tingkat desa. Hingga saat ini, belum seluruh Desa di Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan strategis seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Sekolah Lansia Tangguh (Selantang), serta Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Keterbatasan komitmen anggaran di tingkat desa ini menyebabkan upaya penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan kelompok rentan (lansia dan anak) belum dapat terakselerasi secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Blitar.

Menindaklanjuti berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pondasi pengarusutamaan gender dan perlindungan kelompok rentan pada masa mendatang. Pertama, dalam aspek administratif dan manajerial, pemerintah akan mengoptimalkan



pelaksanaan bimbingan serta menghimbau seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk secara disiplin menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Hal ini bertujuan agar setiap rupiah anggaran pembangunan memiliki dampak yang terukur bagi kesetaraan gender di Kabupaten Blitar.

Kedua, terkait aspek perlindungan, fokus utama diarahkan pada penguatan lembaga perlindungan perempuan guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadi pelaku kekerasan. Masyarakat didorong untuk berperan aktif sebagai pelopor dan pelapor melalui peningkatan advokasi, promosi, serta pelatihan intensif agar mampu mengenali, menangani, hingga melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus meningkatkan peran dan kompetensi Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PMPA) agar lebih responsif dalam menangani pengaduan di tingkat akar rumput.

Ketiga, dalam upaya jangka panjang menekan angka pernikahan anak dan masalah kependudukan, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APKB akan melakukan advokasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar. Kerjasama ini bertujuan untuk mengintegrasikan isu kependudukan sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum pendidikan, sehingga kesadaran akan perencanaan keluarga sehat dapat tertanam sejak usia sekolah.

Keempat, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen meningkatkan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor (*Pentahelix*) yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, media, dan komunitas. Sinergi ini ditujukan untuk mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara menyeluruh. Salah satu aksi nyatanya adalah melakukan advokasi berkelanjutan kepada Pemerintah Desa agar mengalokasikan dana desa guna



memfasilitasi kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Program ini menjadi instrumen krusial dalam memberikan pembelajaran pengasuhan bagi orang tua balita sebagai upaya preventif yang efektif dalam mencegah stunting serta menciptakan ketahanan keluarga yang tangguh di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.52
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Pencapaian Kinerja Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 18,77%. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 4,80 (tahun 2024). Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 27,31% (tahun 2024).	Melalui integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Melalui penguatan peran serta akses perempuan di berbagai sektor, program ini mendorong terwujudnya kesetaraan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Meskipun pada indikator program ini belum semua Perangkat Daerah memasukkan anggaran responsif gender ke dokumen PPRG.	Dinas PPPAPPKB
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk) 4,40	Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dengan terciptanya rasa aman,	DPPAPPKB



			peningkatan akses terhadap layanan, serta penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor, program ini mendorong kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, sehingga berkontribusi pada peningkatan IPG.	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data Sektoral terpilah yang Valid 100	Penyediaan data yang akurat, terpilah, dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan yang responsif gender. Dengan ketersediaan data yang valid, perencanaan dan intervensi pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesetaraan gender	DPPPAPPKB
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak sebesar 28,71%	Penguatan peran keluarga sebagai unit dasar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Melalui peningkatan kapasitas dan kesejahteraan keluarga, serta pembagian peran yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, program ini mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara seimbang	DPPPAPPKB
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kategori KLA Nindya	Optimalisasi Adanya lembaga anak dan fasilitas ruang public	DPPPAPPKB



			ramah anak yang belum terstandarisasi	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani secara komprehensif dengan total 100%	Perlindungan yang optimal bagi anak perempuan dan laki-laki, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, program ini mendukung terciptanya kesetaraan kesempatan sejak dini.	DPPPAPPKB
	Program Pengendalian Penduduk	MUKP 21,6	Melalui penguatan perencanaan keluarga dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara seimbang. Melalui pengendalian jumlah dan jarak kelahiran serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial.	DPPPAPPKB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	ASFR 17,3 Unmet Need 8,1	perencanaan keluarga yang responsif gender serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dengan pembinaan KB yang optimal, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk	DPPPAPPKB

			berpartisipasi dalam pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga 66,3	Penguatan kapasitas ekonomi dan sosial keluarga secara inklusif dan responsif gender. Melalui peningkatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif serta penguatan ketahanan keluarga, program ini mendorong kesetaraan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan.	DPPPAPPKB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD/Puskesmas	Pemerataan akses pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup dan kluster spesifik, serta peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas/ sesuai standar	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan UMKM melalui pelatihan dan fasilitasi pemasaran	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Dinas Koperasi dan UM



	Program Pengembangan UMKM	Pelatihan bagi UMKM khususnya untuk wanita (Bang SAPRI / Pengembangan Usaha Wanita Mandiri)	Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan	Dinas Koperasi dan UM
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster dan Unit Kompetensi	Perluasan akses kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan kapasitas PMI purna penempatan agar tetap berdaya pasca kepulangan	Dinas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dan Pengupahan, Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Memastikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja industri melalui penetapan upah minimum regional dan pengesahan Peraturan Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Mengintegrasikan isu kependudukan sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum pendidikan	Menanamkan pentingnya perencanaan keluarga sehat sejak usia sekkolah	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sosial	Pemberian bantuan dan pemberdayaan PPKS	Meningkatkan kesejahteraan PPKS	Dinas Sosial
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan dan pemberian jaminan sosial	Pemberian jaminan sosial secara tepat sasaran	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan	Pembinaan/ pelatihan dan pemberdayaan masyarakat	Memberikan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup



	Penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat	dalam rangka pengelolaan sampah		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan perencanaan dan penganggaran desa	Memastikan desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan IPM (pendidikan, kesehatan, ekonomi) desa secara merata dan responsif gender	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan perencanaan dan penganggaran desa	Memastikan desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan IPM (pendidikan, kesehatan, ekonomi) desa secara merata dan responsif gender	Kecamatan

Sumber, Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender adalah sebesar Rp. 432.151.443.907,89 dengan realisasi sebesar Rp. 401.203.354.309,57. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender.

Tabel 2.53
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	99,79	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	266.995.444,00	211.364.928,00	79,16
			Program Perlindungan Perempuan	167.614.700,00	138.370.436,00	82,55
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	13.114.006,00	13.070.400,00	99,67



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	9.652.600,00	8.661.300,00	89,73
			Program Pemenuhan Hak Anak	28.414.300,00	11.734.500,00	41,30
			Program Perlindungan Khusus Anak	333.242.400,00	282.294.609,00	84,71
			Program Pengendalian Penduduk	633.240.000,00	580.865.108,00	91,73
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.574.367.000,00	5.319.069.171,00	80,91
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.456.800.000,00	5.202.770.508,00	80,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	124.993.638,641	119.185.304,305	95,35
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.265.377.442,50	88.471.604.968,70	89,13
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	558.397.008,00	525.454.508,00	94,10
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	255.490.850,00	225.868.486,00	88,41
			Program Pengembangan UMKM	1.037.503.000,00	1.012.532.104,00	97,59
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.952.357.995,00	1.483.406.346,00	75,98
			Program Penempatan Tenaga Kerja	1.560.858.450,00	1.513.360.400,70	96,96
			Program Hubungan Industrial	1.313.281.350,00	1.275.792.193,00	97,15



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Pengelolaan Pendidikan	163.307.554.221,39	153.728.947.826,17	94,13
			Program Pengembangan Kurikulum	328.022.200,00	321.597.567,00	98,04
			Program Rehabilitasi Sosial	1.133.973.700,00	684.024.638,00	60,32
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.594.182.500,00	10.113.964.200,00	95,47
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat	321.330.544,00	321.210.000,00	99,96
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.450.079.376,00	10.017.113.307,00	95,86
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	595.956.180,00	554.972.500,00	93,12
			Total	432.151.443.907,89	401.203.354.309,57	92,84
			Tingkat efisiensi			6,95

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 99,79% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 92,84%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,95. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Diwujudkan melalui implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang terintegrasi dalam setiap dokumen PPRG di Perangkat Daerah. Dengan mengedepankan prinsip *value for money*, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan pengalokasian dana secara presisi pada program-program berdampak ganda,



seperti pengintegrasian layanan SOTH dan Selantang dengan program pencegahan stunting dan kemandirian ekonomi desa, sehingga satu sumber pendanaan mampu menjawab berbagai isu gender sekaligus. Selain itu, kolaborasi anggaran melalui mekanisme advokasi Dana Desa untuk program inklusif seperti DRPPA serta kemitraan lintas sektor (*Pentahelix*) berhasil meminimalisir tumpang tindih pembiayaan, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan akses, partisipasi, dan manfaat yang adil bagi perempuan, lansia, serta difabel secara optimal dan berkelanjutan.

2) Efisiensi SDM

Diwujudkan melalui penguatan kompetensi teknis aparatur dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta optimalisasi peran kader komunitas sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa. Strategi ini mengintegrasikan fungsi birokrasi dengan kekuatan jaringan relawan, seperti Satgas PMPA, pengurus GOW, serta kader Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan Lansia Tangguh, guna menjangkau wilayah pelosok secara ramping namun tetap memiliki daya jangkau tinggi. Dengan mengandalkan manajemen kolaboratif lintas sektor (*Pentahelix*) dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelopor serta pelapor, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil memastikan bahwa setiap program pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan, dan pencegahan stunting terlaksana secara tepat sasaran, efektif, dan efisien tanpa bergantung sepenuhnya pada kuantitas personel formal.

3) Efisiensi Waktu

Percepatan integrasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui sinkronisasi perencanaan anggaran yang dilakukan secara simultan di seluruh PD sebelum dokumen APBD ditetapkan. Dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor



115 Tahun, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil memangkas birokrasi koordinasi melalui sistem pelaporan digital dan rapat koordinasi Tim Penggerak PUG yang terjadwal secara presisi untuk pengisian LKE PUG yang juga dilakukan secara digital. Selain itu, efisiensi waktu juga dicapai melalui pemanfaatan kanal respons cepat Satgas PMPA dan forum-forum desa seperti DRPPA yang memungkinkan penanganan kasus kekerasan serta sosialisasi program strategis seperti SOTH dilakukan secara langsung di titik sasaran tanpa melalui prosedur birokrasi yang berbelit, sehingga intervensi terhadap isu pernikahan anak dan perlindungan kelompok rentan dapat dieksekusi secara tepat waktu dan berdampak luas.

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan pemuda secara komprehensif di suatu wilayah. Pengukuran IPP didasarkan pada lima domain utama yang mencakup 15 indikator penyusun, yaitu: 1) Domain Pendidikan dan Pelatihan: Rata-rata lama sekolah pemuda, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Menengah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi; 2) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan: Angka kesakitan pemuda, Persentase pemuda korban kejahatan, Persentase pemuda merokok, Persentase remaja perempuan yang sedang hamil; 3) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja: Persentase pemuda wirausaha, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda; 4) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan: Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat



dalam rapat; dan 5) Domain Gender dan Diskriminasi: Angka perkawinan usia anak, Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas, Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. IPP dihitung sebagai rata-rata dari nilai indeks lima domain penyusun tersebut.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda adalah sebesar 101,59% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.54
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,73	58,65	101,59%
Capaian Kinerja Sasaran					101,59%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

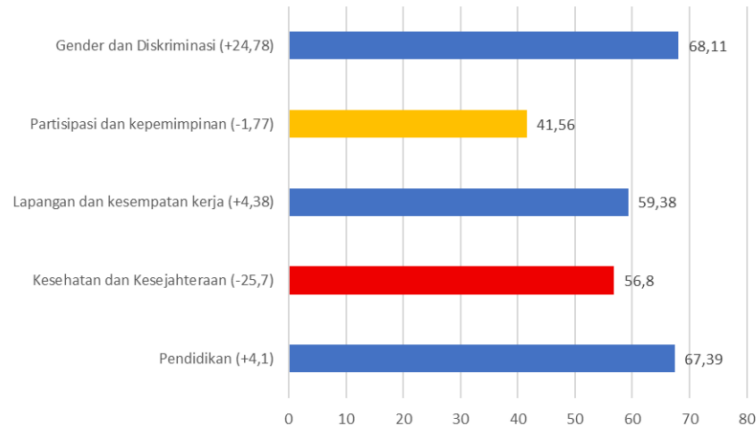
Capaian kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan realisasi sebesar 58,65. Capaian ini berhasil melampaui target sebesar 57,73, dengan capaian sebesar 101,59%. Peningkatan ini didorong oleh kuatnya komitmen daerah dalam menyediakan ruang ekspresi dan akses ekonomi bagi pemuda perdesaan, yang tercermin dari angka pengangguran terbuka pemuda serta partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa. Pada tahun 2025 partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 18,02%, angka ini turun sebesar 0,07% dari tahun 2024 sebesar 18,09%. Capaian ini terlihat turun tetapi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) meningkat dari 263.636 orang pada tahun 2024 menjadi 265.952 orang pada tahun 2025.

Keberhasilan IPP ini mengindikasikan bahwa intervensi program Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kualitas hidup pemuda yang mencakup domain pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja,



partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi telah berjalan pada jalur yang tepat, meskipun terdapat beberapa yang belum maksimal. Berikut disajikan grafik capaian Indeks Pembangunan Pemuda dari setiap domainnya.

Gambar 2.12
Capaian Setiap Domain Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2025



Sumber: Dinas Kepemduaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan data domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Blitar tahun 2025, capaian realisasi sebesar 58,65 didorong oleh performa signifikan pada domain Gender dan Diskriminasi yang mencatatkan nilai tertinggi sebesar 68,11 dengan pertumbuhan pesat mencapai +24,78. Peningkatan positif juga terlihat pada domain Pendidikan (67,39) dan Lapangan serta Kesempatan Kerja (59,38) yang masing-masing tumbuh sebesar +4,1 dan +4,38, mengindikasikan keberhasilan kebijakan Pemkab Blitar dalam memperluas akses kompetensi dan kemandirian ekonomi bagi pemuda. Namun, tantangan besar masih terlihat pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan yang mengalami penurunan tajam sebesar -25,7 dengan nilai 56,8, serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang berada pada titik terendah yaitu 41,56 dengan penurunan -1,77. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aspek kesetaraan dan intelektualitas pemuda meningkat, diperlukan evaluasi mendalam dan intervensi kebijakan yang lebih agresif untuk memperbaiki kualitas kesehatan mental/fisik serta memperkuat



keterlibatan aktif pemuda dalam forum pengambilan keputusan publik di Kabupaten Blitar.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Tren peningkatan kinerja ini menunjukkan bahwa berbagai program pengembangan kepemudaan yang diimplementasikan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan komitmen instansi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kompetensi, karakter, serta partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.55
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,73	58,65	57,48	56,67	54,17

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Selain itu, capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 96,97% dari target tahun terakhir RPJMD. Capaian yang hampir mendekati target akhir tersebut membuktikan bahwa strategi dan intervensi yang dilakukan sejak awal periode sangat efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas generasi muda secara berkelanjutan. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.56
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	Indeks Pembangunan Pemuda	60,48	58,65	96,97%
Capaian Kinerja Sasaran					96,97%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2025



Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Blitar masih dibawah Provinsi Jawa Timur dengan data capaian tahun 2024, dengan selisih sebesar 2,35 poin. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa dinamika pemberdayaan pemuda di tingkat lokal Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam menyelaraskan kecepatan serapan tenaga kerja muda dan partisipasi aktif dalam organisasi dengan standar capaian rata-rata wilayah Jawa Timur. Meskipun tren pertumbuhan pemuda di Kabupaten Blitar menunjukkan grafik yang stabil, diperlukan penguatan integrasi program lintas sektor guna mengakselerasi indikator-indikator krusial yang masih tertinggal agar disparitas angka capaian tersebut dapat diperkecil secara signifikan pada tahun mendatang. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.57
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

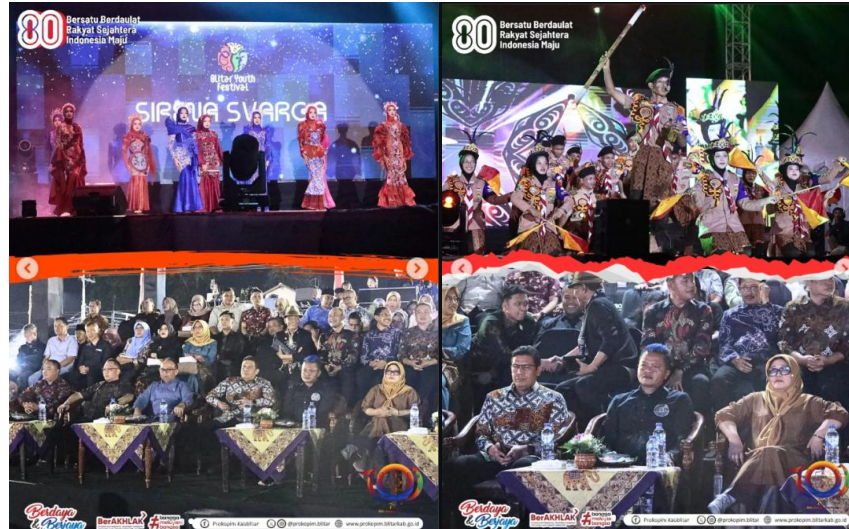
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	Indeks Pembangunan Pemuda	58,65	61,00*

* Data tahun 2024

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan langkah strategis untuk mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2025 melalui penguatan Domain Lapangan Kerja dan Kewirausahaan. Program unggulan seperti *Blitar Youth Festival* (BYF) 2025 diimplementasikan sebagai pusat inkubasi bisnis kreatif yang mempertemukan inovasi pemuda dengan akses permodalan. Upaya ini disinergikan dengan pelatihan literasi keuangan dan digital guna mencetak wirausaha muda mandiri, sehingga diharapkan mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan pemuda sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Gambar 2.13
Malam Puncak Blitar Youth Festival Tahun 2025



Pada Domain Pendidikan dan Kesehatan, pemerintah daerah merealisasikan program Bantuan Pendidikan Mahasiswa yang menasar sebanyak 1.706 mahasiswa pada tahun 2025 yang termasuk mahasiswa berprestasi sebanyak 1.548 dan 158 mahasiswa kurang mampu, guna memastikan keberlanjutan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Selain dukungan finansial, Pemerintah Kabupaten Blitar juga aktif menyelenggarakan edukasi kesehatan reproduksi dan mental melalui kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka prevalensi merokok serta perilaku berisiko pada remaja. Langkah preventif ini menjadi kunci dalam membangun fondasi pemuda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik dan psikis sebagai modal dasar pembangunan manusia.

Sementara itu, penguatan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan dioptimalkan melalui peningkatan keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan (seperti Karang Taruna dan KNPI) serta organisasi sosial kemasyarakatan hingga tingkat desa. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 47.923 yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dari total pemuda di Kabupaten Blitar sebanyak

265.952, atau tercapai sebesar 18,02%. Pemerintah daerah membuka ruang aspirasi yang lebih luas agar pemuda aktif dalam pengambilan keputusan publik, sekaligus mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Melalui pendampingan kelompok usaha pemuda produktif, generasi muda diarahkan untuk tidak lagi sekadar mencari kerja, melainkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui kreativitas dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu wujud nyata penguatan partisipasi fisik dan pelestarian nilai sejarah, Pemerintah Kabupaten Blitar menyelenggarakan kegiatan Gerak Jalan Tradisional Bakung Lodoyo (BALOD) 2025. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang olahraga massal untuk meningkatkan ketahanan fisik pemuda, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memupuk jiwa korsa, disiplin, dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Keterlibatan aktif pemuda dalam kepanitiaan maupun sebagai peserta dalam rute bersejarah Bakung-Lodoyo ini menunjukkan semangat kolaborasi dan kepemimpinan lapangan yang kuat, sekaligus memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui partisipasi pelaku UMKM muda di sepanjang rute kegiatan tersebut.

Gambar 2.14
Gerak Jalan Bakung Lodoyo Tahun 2025



Dalam upaya meningkatkan kesehatan fisik dan karakter kompetitif, Pemerintah Kabupaten Blitar fokus pada peningkatan

prestasi olahraga melalui revitalisasi sarana prasarana serta pembinaan atlet muda berbakat. Pada Tahun 2025, realisasi prestasi olahraga sebanyak 102 medali, yang berasal dari berbagai ajang kompetisi termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX tahun 2025 dan Kejuaraan NPCI (National Paralympic Committee Indonesia). Raihan medali tersebut terdiri atas medali emas, perak, dan perunggu dari atlet Kabupaten Blitar, yang mencerminkan keberlanjutan dan efektivitas pembinaan atlet baik pada cabang olahraga prestasi maupun olahraga disabilitas. Penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi dan kemasyarakatan secara rutin diharapkan mampu menjaring bibit unggul yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Blitar di kancah regional maupun nasional. Integrasi antara prestasi olahraga, kemandirian ekonomi, dan keaktifan berorganisasi ini menjadi strategi komprehensif untuk memastikan seluruh dimensi pembangunan pemuda di Kabupaten Blitar berkembang secara seimbang dan progresif pada tahun 2025.

Gambar 2.15
Penyerahan Reward dan Pembubaran Kontingen Kabupaten Blitar dalam Porprov IX Jawa Timur 2025



Terakhir, pada Domain Gender dan Diskriminasi, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen menciptakan lingkungan yang inklusif melalui pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan kepemudaan. Upaya ini dilakukan dengan memberikan akses yang setara bagi pemuda perempuan untuk menduduki posisi strategis di organisasi kemasyarakatan serta memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marjinal. Melalui sosialisasi



anti-diskriminasi dan perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta komunitas, pemerintah berupaya memastikan tidak ada pemuda yang tertinggal karena hambatan gender, sehingga keadilan sosial dapat terwujud dalam seluruh aspek pembangunan pemuda di Kabupaten Blitar.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan berbagai program strategis, pencapaian target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2025 masih dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu kendala terletak pada Domain Lapangan Kerja, di mana masih terdapat ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan pendidikan muda dengan kebutuhan *riil* dunia kerja dan industri di daerah. Keterbatasan akses terhadap modal usaha dan ekosistem kewirausahaan yang belum merata hingga ke pelosok desa menyebabkan banyak pemuda lebih memilih untuk bermigrasi ke kota besar atau menjadi pekerja migran, sehingga potensi pemuda produktif untuk membangun ekonomi lokal belum teroptimalisasi secara maksimal.

Selain itu, hambatan signifikan muncul pada Domain Kesehatan dan Partisipasi, terkait tingginya angka pernikahan usia anak yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah kecamatan. Kondisi ini secara langsung berdampak negatif pada capaian indikator gender dan kesehatan dalam IPP, serta membatasi kesempatan pemuda perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau berkarier secara profesional. Di sisi lain pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, rendahnya minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi formal seperti Karang Taruna atau KNPI karena pergeseran pola interaksi ke arah digital, menyebabkan program-program pemberdayaan masyarakat seringkali sulit menjangkau kelompok sasaran secara efektif dan berkelanjutan.

Kendala terakhir berkaitan dengan kerusakan infrastruktur olahraga pascabencana di Stadion Gelora Penataran serta belum terpenuhinya standar teknis fasilitas yang ada, sehingga membatasi



ruang pembinaan atlet dan pemenuhan indikator kesehatan fisik pemuda. Secara manajerial, kendala muncul dari perubahan sistem OSS yang menyulitkan pendataan agregat kewirausahaan pemuda untuk pengukuran ekonomi mandiri secara akurat, yang diperburuk oleh minimnya ruang kreasi serta ruang koordinasi representatif bagi pengembangan inovasi kepemudaan lintas sektor.

Sebagai langkah prioritas dalam mengatasi hambatan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan penguatan koordinasi pendataan kewirausahaan pemuda secara lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan sistem OSS. Langkah ini diwujudkan melalui pengembangan basis data mandiri yang terintegrasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro guna memetakan potensi wirausaha muda secara akurat. Bersamaan dengan itu, dilakukan pemanfaatan ruang alternatif milik pemerintah daerah maupun ruang publik sebagai pusat inovasi dan *co-working space* sementara. Ruang-ruang ini akan dioptimalkan untuk mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan inkubasi ide-ide kreatif pemuda sehingga keterbatasan ruang fisik tidak lagi menjadi penghambat pengembangan inovasi kepemudaan.

Penguatan program pencegahan perkawinan anak yang lebih masif guna menjamin keberlanjutan pendidikan dan karier pemuda perempuan. Menghadapi tantangan pergeseran pola interaksi digital, pemerintah akan mendorong revitalisasi Karang Taruna dan KNPI melalui transformasi program yang lebih adaptif terhadap teknologi. Melalui sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah akan memastikan bahwa pemberdayaan organisasi formal tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi wadah aktif bagi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri dan pengarusutamaan gender di tingkat desa hingga kabupaten.

Terkait hambatan fisik, fokus utama akan diarahkan pada penanganan dan pemulihan sarana olahraga pascabencana,



khususnya pada perbaikan tribun Stadion Gelora Penataran agar dapat kembali difungsikan secara aman. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pemenuhan sarana dan prasarana olahraga secara bertahap dengan menyesuaikan pada standar teknis nasional dan ketersediaan anggaran daerah. Revitalisasi fasilitas ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik pascabencana, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang layak guna mendukung pembinaan atlet berprestasi dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam aktivitas olahraga yang memenuhi standar kesehatan fisik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.58
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelatihan dan forum pengembangan kapasitas, serta keaktifan pemuda dalam berorganisasi kepemudaan	Meningkatkan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pengembangan pemuda melalui kegiatan kepramukaan	Meningkatkan kapasitas pemuda melalui aktifitas kegiatan berorganisasi, meningkatkan ketrampilan, dan kegiatan sosial	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan atlet, cabang olah raga dan peningkatan sarpras olahraga, menyelenggarakan kejuaraan tingkat nasional,	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan telah berhasil meningkatkan jumlah cabang olahraga yang dibina dari 44 menjadi 46 peningkatan jumlah organisasi olahraga yang	Dinas Pemuda dan Olah Raga



			dibina dari 2 menjadi 3 organisasi, dan pembinaan olahraga rekreasi	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup dan kluster spesifik, serta peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas/ sesuai standar	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Hak Anak	Pendampingan terhadap pemenuhan Hak Anak	Memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang baik dan terpenuhi hak-haknya sehingga menjadi SDM berkualitas	Dinas PPPAPPKB
	Program Perlindungan Khusus Anak	Perlindungan terhadap anak dalam permasalahan	Memastikan anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan	Dinas PPPAPPKB
	Pemberdayaan Sosial	Pembinaan Karang Taruna	Melibatkan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Dinas Sosial
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster dan Unit Kompetensi	Perluasan akses kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Penyelenggara n Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan , Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan kapasitas PMI purna penempatan agar tetap berdaya pasca kepulangan	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	Peningkatan UMKM melalui pelatihan dan fasilitasi pemasaran	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Dinas Koperasi dan UM



	Usaha Mikro (UMKM)			
	Program Pengembangan UMKM	Pelatihan bagi UMKM khususnya untuk wanita (Bang SAPRI / Pengembangan Usaha Wanita Mandiri)	Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan	Dinas Koperasi dan UM

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Generasi Muda adalah sebesar Rp.275.718.715.658,89 dengan realisasi sebesar Rp. 254.521.021.123,77. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Generasi Muda.

Tabel 2.59

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Generasi Muda

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	101,59	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.384.584.200,00	1.378.461.358,00	99,56
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	528.673.900,00	525.736.400,00	99,44
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.098.506.500,00	5.053.347.443,20	99,11
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.265.377.442,50	88.471.604.968,70	89,13
			Program Pengelolaan Pendidikan	163.307.554.221,39	153.728.947.826,17	94,13
			Program Pemenuhan Hak Anak	28.414.300,00	11.734.500,00	41,30
			Program Perlindungan Khusus Anak	333.242.400,00	282.294.609,00	84,71



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Pemberdayaan Sosial	966.152.400,00	833.726.682,00	86,29
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.952.357.995,00	1.483.406.346,00	75,98
			Program Penempatan Tenaga Kerja	1.560.858.450,00	1.513.360.400,70	96,96
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	255.490.850,00	225.868.486,00	88,41
			Program Pengembangan UMKM	1.037.503.000,00	1.012.532.104,00	97,59
			Total	275.718.715.658,89	254.521.021.123,77	92,31
			Tingkat efisiensi			9,28

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 101,59% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 92,31%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,28. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Realisasi belanja sebesar Rp 254.521.021.123,77 atau mencapai 92,31% dari total pagu Rp 275.718.715.658,89. Tingginya persentase serapan ini mengindikasikan pengelolaan anggaran yang sangat akuntabel dan presisi dalam mengeksekusi program-program strategis kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil menerapkan prinsip *value for money* dengan mengonversi anggaran tersebut secara efektif untuk mendanai multidomain IPP. Efisiensi ini juga terlihat dari kemampuan daerah dalam mengoptimalkan output kegiatan



berskala besar, seperti BALOD 2025, di tengah tantangan pemulihan infrastruktur pascabencana, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan indeks pembangunan pemuda secara berkelanjutan.

2) Efisiensi SDM

Keterbatasan jumlah personel mampu diatasi melalui sistem kerja kolaboratif dan lintas sektor. Meskipun harus melayani populasi 265.952 pemuda, SDM yang ada terbukti efektif dalam menggerakkan partisipasi aktif organisasi sebesar 18,02% serta menyelenggarakan kegiatan besar seperti BALOD 2025 dengan sukses.

3) Efisiensi Waktu

Ketepatan jadwal pelaksanaan program yang sangat tinggi, di mana realisasi anggaran sebesar 99,23% berhasil dituntaskan tepat waktu sesuai siklus tahunan. Kecepatan respons aparatur dalam menangani pemulihan sarana olahraga pascabencana serta percepatan koordinasi lintas sektor untuk kegiatan BALOD 2025 membuktikan bahwa manajemen waktu operasional telah berjalan efektif.

5. Sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu ICOR. ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar tambahan modal atau investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit tambahan *output* atau produksi dalam suatu perekonomian. ICOR digunakan sebagai indikator efisiensi investasi. ICOR dihitung dengan membandingkan tambahan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dengan tambahan *output* (Produk Domestik Bruto /PDB) pada periode tertentu.



Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi adalah sebesar 99,68% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.60
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Efektivitas Investasi	ICOR	6,21	6,23*	99,68%
Capaian Kinerja Sasaran					99,68%

*Data tahun 2024

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Capaian kinerja ICOR Kabupaten Blitar pada tahun 2025 masih menggunakan data realisasi pada tahun 2024 karena angka realisasi tahun 2025 belum rilis. Capaian kinerja ICOR Kabupaten Blitar dengan menggunakan angka tahun 2024 menunjukkan hasil yang berada di bawah target dengan realisasi sebesar 6,23 dari target yang ditetapkan sebesar 6,21, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 99,68%. Hal ini artinya, efisiensi investasi di Kabupaten Blitar sedikit lebih rendah dari yang direncanakan, di mana diperlukan penambahan modal yang sedikit lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi. Selisih tipis sebesar 0,02 poin ini mengindikasikan adanya beberapa kendala teknis dalam optimalisasi aset modal, seperti adanya proyek infrastruktur yang masih dalam tahap penyelesaian sehingga belum memberikan dampak ekonomi secara maksimal pada tahun berjalan. Meskipun angka efisiensi belum menyentuh angka ideal yang ditargetkan, capaian yang hampir mendekati totalitas ini tetap menunjukkan bahwa iklim investasi daerah masih berada pada tren yang stabil dan produktif.

Sektor unggulan yang menjadi prioritas investasi di Kabupaten Blitar berdasarkan data tahun 2024 antara lain : 1) Transportasi dan Pergudangan; dan 2) Jasa lainnya. Sektor tersebut jika dilakukan investasi tidak hanya efisien meningkatkan *output* pada tahun yang sama melainkan efisien meningkatkan *output* beberapa tahun



berikutnya. Hal ini disebabkan karena kedua sektor tersebut mempunyai dampak berganda (*multiplier effect*) yang tinggi terhadap perekonomian daerah. Infrastruktur transportasi yang baik, misalnya, akan mempermudah distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah, sehingga mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, dan pertanian.

Sementara itu, sektor Jasa Lainnya yang bersifat padat karya dan berbasis pelayanan masyarakat (seperti jasa kebersihan, perawatan, keamanan, hingga jasa rumah tangga) akan menciptakan lapangan kerja langsung dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara cepat. Kedua sektor ini juga cenderung mempunyai respon yang fleksibel terhadap permintaan pasar, sehingga investasi yang masuk akan cepat menghasilkan output (short-term impact) sekaligus membangun kapasitas jangka panjang (long-term impact)

Capaian ICOR di Kabupaten Blitar selama periode 2020 hingga 2024 mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020 nilai ICOR minus 11,64 yang artinya pada tahun tersebut terdapat investasi namun output yang dihasilkan justru menurun drastis minus Rp584,625 miliar. Hal ini disebabkan karena dampak awal pandemi Covid-19 yang mengganggu seluruh aktivitas ekonomi yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi mengalami kontraksi meskipun belanja modal tetap dilakukan. Sehingga dikatakan bahwa investasi yang dilakukan di Kabupaten Blitar tidak efisien menghasilkan output pada tahun 2020.

Tahun berikutnya, ada perbaikan efisiensi investasi tetapi masih tergolong tidak efisien bahkan nilai ICOR mulai tahun 2023 hingga 2024 cenderung meningkat mencapai 6,23 pada tahun 2024. Nilai ICOR yang relatif tidak efisien tentunya akan berdampak terhadap minat investor untuk menanamkan investasi di Kabupaten Blitar. Jika dilihat nilai ICOR berdasarkan time lag 2 dan 3 cenderung



stabil artinya investasi yang dilakukan di Kabupaten Blitar baru menunjukkan hasil setelah 2-3 tahun kedepan.

Tabel 2.61
Nilai ICOR Agregat Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	ΔPDRB (Miliar Rupiah)	PMTB (Miliar Rupiah)	Time Lag 0	Time Lag 1	Time Lag 1	Time Lag 3
2019	25.530,090						
2020	24.945,465	-584,625	6.802,410	-11,64	9,02	5,09	5,66
2021	25.700,019	754,554	6.920,030	9,17	5,17	5,75	5,52
2022	27.037,331	1.337,312	7.253,560	5,42	6,03	5,78	
2023	28.239,919	1.202,588	7.447,500	6,19	5,94		
2024	29.493,800	1.253,881	7.816,400	6,23			
Akumulasi				9,14	6,25	5,53	5,59
Standar				3,08	6,54	5,54	5,59

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020-2025:

Tabel 2.62
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Meningkatnya Efektivitas Investasi	ICOR	6,21	6,23*	6,23	6,19	5,42	9,17	-11,64

*Data tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Selain itu, capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 87,34% dari target tahun terakhir RPJMD. Capaian tersebut merupakan sinyal positif atas keberhasilan langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien dan akuntabel. Keberhasilan ini didorong oleh implementasi program nyata seperti kemudahan layanan perizinan terintegrasi melalui gerai pelayanan publik dan percepatan sistem penanaman modal yang lebih responsif. Selain itu, optimalisasi kawasan peruntukan industri dan penguatan hilirisasi produk unggulan daerah—khususnya pada sektor pertanian dan peternakan—telah mulai menunjukkan hasil dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi per unit modal yang ditanamkan. Upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi



infrastruktur strategis juga menjadi kunci penting agar arus modal tidak hanya masuk, tetapi juga mampu beroperasi dengan biaya logistik yang lebih rendah, sehingga efisiensi investasi dapat terus terjaga hingga akhir periode perencanaan. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.63
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Efektivitas Investasi	ICOR	5,53	6,23*	87,34%
Capaian Kinerja Sasaran					87,34%

*Data tahun 2024

Sumber: Dinas Kominfo, 2025

Angka ICOR Kabupaten Blitar sebesar 6,23 masih berada di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,65, yang mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi investasi di tingkat kabupaten memerlukan akselerasi lebih lanjut untuk menyamai standar produktivitas regional. Selisih angka tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi yang sama, Kabupaten Blitar membutuhkan penambahan modal yang relatif lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik struktur ekonomi daerah yang mungkin masih didominasi sektor padat modal dengan masa pengembalian investasi yang lebih lama atau adanya kendala infrastruktur penunjang di wilayah tertentu. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.64
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Efektivitas Investasi	ICOR	6,23*	5,65*

* Data tahun 2024

Sumber: Dinas Kominfo, 2025

Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan akselerasi efisiensi investasi melalui penguatan infrastruktur dasar dan penunjang

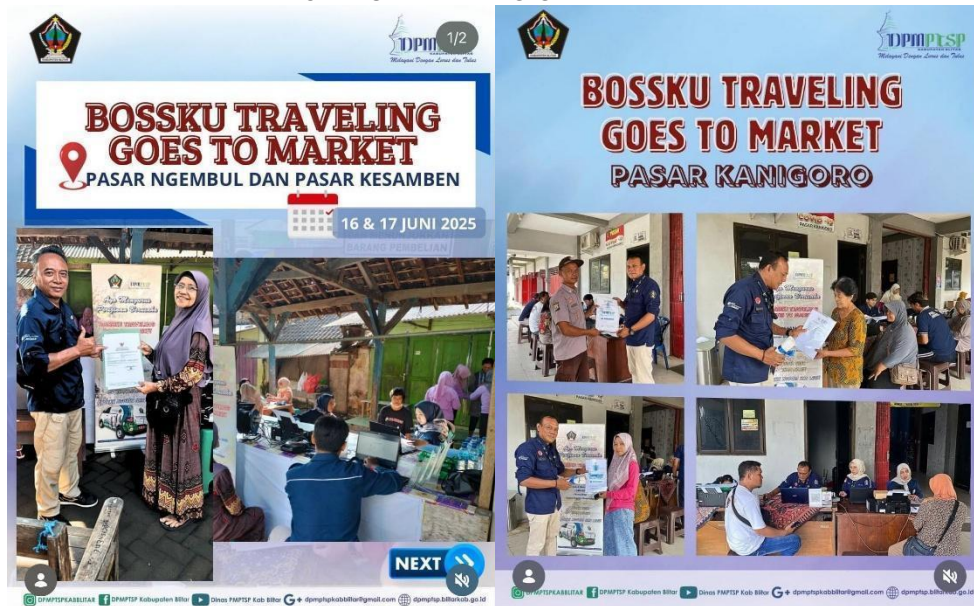


ekonomi untuk menekan biaya logistik di tingkat produsen. Upaya ini diwujudkan melalui program Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Kabupaten serta pembangunan jembatan strategis yang menghubungkan wilayah produksi pertanian dengan pusat distribusi. Dengan infrastruktur yang lebih mantap, mobilitas barang dan jasa menjadi lebih cepat dan biaya operasional kendaraan dapat ditekan, sehingga setiap modal fisik yang dimiliki pelaku usaha dapat memberikan output ekonomi yang maksimal. Langkah ini menjadi kunci penting dalam menurunkan angka ICOR karena efisiensi distribusi secara langsung meningkatkan produktivitas kapital di wilayah tersebut.

Selain infrastruktur fisik, Pemerintah Kabupaten Blitar fokus pada Transformasi Digital Layanan Perizinan melalui optimalisasi sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi dengan layanan mandiri di tingkat kecamatan. Program nyata seperti jemput bola pelayanan perizinan bagi pelaku UMKM yang ada di pasar, pusat keramaian, atau kecamatan berupa *Bossku Traveling* (Blitar OSS Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Traveling) *Goes To Market*, bertujuan untuk menghilangkan hambatan birokrasi dan memangkas ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Dengan proses perizinan yang lebih transparan dan cepat, para investor dan pelaku usaha lokal dapat segera mengeksekusi rencana investasinya tanpa tertunda oleh kendala administrasi, sehingga jeda waktu antara penanaman modal dan penghasilan *output* (*gestation period*) dapat diminimalisir secara signifikan.



Gambar 2.15
BOSSKU TRAVELING Goes To Market



Sumber: Dinas PMPTSP, 2025

Selain itu Pemerintah Kabupaten Blitar juga secara proaktif menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala guna mendiseminasi informasi tata cara pelaporan realisasi investasi kepada para pelaku usaha. Melalui program ini, para investor diberikan pemahaman mendalam mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko serta kewajiban pelaporan berkala agar data investasi yang masuk tercatat secara akurat dan tepat waktu dalam sistem nasional. Selain bimbingan teknis, dilakukan pula pengawasan terpadu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi investasi dengan komitmen yang telah dinyatakan. Dengan data pelaporan yang valid dan tertib administrasi, pemerintah daerah dapat memetakan efektivitas modal secara lebih presisi, sehingga setiap kendala investasi di lapangan dapat segera diintervensi melalui kebijakan yang tepat guna.

Selain penguatan kapasitas SDM, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan lompatan inovasi melalui pengembangan dan pemeliharaan sistem SIDATIZ PEDAS dan SIAPNLOSS sebagai pilar utama digitalisasi investasi. Sistem SIDATIZ PEDAS (Sistem



Informasi Data Investasi Perizinan Terintegrasi) berperan krusial dalam menyediakan basis data investasi yang akurat dan *real-time*, sehingga pemerintah dapat memantau sebaran modal secara presisi di setiap wilayah. Sementara itu, aplikasi SIAPNLOSS (Sistem Aplikasi Perizinan Non Layanan *Online Single Submission*) memperkuat ekosistem perizinan yang tidak di fasilitasi dalam OSS seperti Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), izin sewa aset daerah, dan lain-lain dengan mempermudah akses bagi pelaku usaha untuk mengurus administrasi secara mandiri dan transparan. Integrasi kedua sistem ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga meminimalisir potensi ekonomi biaya tinggi. Dengan proses yang lebih cepat dan data yang terintegrasi, efisiensi waktu dan modal dapat tercapai,

Salah satu hambatan utama dalam menekan angka ICOR adalah adanya jeda waktu antara penanaman modal dengan hasil ekonomi yang nyata (*gestation period*), terutama pada proyek pembangunan infrastruktur strategis. Banyaknya program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan serta pengembangan kawasan industri di wilayah selatan memerlukan waktu konstruksi dan adaptasi pasar yang tidak singkat sebelum benar-benar mampu menurunkan biaya logistik secara masif. Hal ini menyebabkan angka investasi sudah tercatat besar di awal, namun kontribusinya terhadap peningkatan PDRB belum terlihat secara instan pada tahun yang sama, sehingga secara statistik angka ICOR cenderung terkoreksi lebih tinggi dan efisiensi modal terlihat belum optimal dalam jangka pendek.

Kendala selanjutnya terletak pada belum meratanya literasi digital dan kepatuhan administratif pelaku usaha terkait pelaporan realisasi investasi. Meskipun telah dikembangkan sistem inovatif seperti SIDATIZ PEDAS dan SIAPNLOSS, masih ditemukan banyak pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dan kemitraan lokal, yang



belum tertib dalam memperbarui data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini mengakibatkan terjadinya *under-reporting* atau data investasi yang tidak terpotret secara utuh dalam sistem nasional. Ketidakkuratan data ini menyulitkan pemerintah daerah dalam memetakan produktivitas modal secara presisi, sehingga intervensi kebijakan untuk efisiensi seringkali terhambat oleh disparitas antara kondisi riil di lapangan dengan data administratif yang tersedia.

Hambatan teknis yang sangat krusial bersumber dari ketergantungan penuh pada stabilitas sistem Online Single Submission (OSS) Nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat. Seringkali terjadi sinkronisasi data yang tidak sempurna atau gangguan teknis pada *server* pusat yang menyebabkan proses pelayanan perizinan di tingkat Kabupaten Blitar terhenti secara total tanpa adanya kendala lokal. Kondisi hambatan sistemis ini mengakibatkan ketidakpastian bagi investor dalam hal durasi pengurusan izin, yang secara otomatis memperpanjang masa tunggu operasional perusahaan. Terhentinya pelayanan akibat faktor eksternal ini menjadi salah satu penyebab inefisiensi waktu, di mana modal yang sudah disiapkan tidak dapat segera diputar untuk menghasilkan output ekonomi, sehingga memberikan tekanan negatif pada angka ICOR daerah.

Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen meningkatkan efisiensi investasi melalui penguatan layanan pendampingan dan konsultasi penggunaan aplikasi OSS guna meminimalisir kendala teknis di masyarakat. Upaya ini dibarengi dengan peningkatan koordinasi intensif bersama pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan gangguan sistem nasional serta penguatan kompetensi aparatur pelayanan agar lebih responsif dan transparan. Melalui pengembangan sistem SIDATIZ PEDAS dan SIAPNLOSS yang terintegrasi, pemerintah daerah berupaya menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha yang mampu memangkas



ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), sehingga modal yang masuk dapat segera terkonversi menjadi output ekonomi yang produktif.

Selain aspek pelayanan, Pemkab Blitar secara rutin melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan penanaman modal untuk memastikan diseminasi tata cara pelaporan realisasi investasi (LKPM) berjalan akurat. Langkah ini dikolaborasikan dengan pembangunan infrastruktur strategis dan program hilirisasi produk unggulan daerah di sektor pertanian serta peternakan. Dengan data pelaporan yang valid dan dukungan distribusi logistik yang lancar, pemerintah dapat menekan angka ICOR menuju level yang lebih efisien di bawah 6,23. Sinergi antara ketertiban administrasi dan produktivitas sektor riil ini diharapkan mampu menutup celah efisiensi agar selaras dengan standar regional Provinsi Jawa Timur dan mencapai target akhir RPJMD secara tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Blitar akan memperkuat integrasi antara pembangunan infrastruktur fisik dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memperpendek masa tenggang investasi. Langkah tindak lanjut ini diwujudkan melalui sinkronisasi program Peningkatan Jalan Kabupaten dengan akses menuju kawasan industri dan destinasi wisata unggulan. Dengan memastikan konektivitas yang mulus dari hulu ke hilir, biaya logistik dapat ditekan secara signifikan sehingga setiap investasi modal fisik dalam bentuk sarana transportasi dan distribusi dapat menghasilkan output ekonomi yang lebih cepat.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.65
Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap	Perangkat Daerah Pengampu

			Pencapaian Sasaran	
Meningkatnya Efektivitas Investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan	Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan melalui sistem informasi yang terintegrasi	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n) sebesar 2093 M	Memastikan realisasi investasi berjalan sesuai target dan meminimalkan hambatan birokrasi, sehingga modal yang ditanamkan dapat segera beroperasi secara efektif untuk menghasilkan output ekonomi yang maksimal.	DPMPTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Meningkatkan minat investasi di kabupaten Blitar	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyediaan informasi potensi investasi di Kabupaten Blitar	Kemudahan informasi terkait investasi potensial bagi investor	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data Penanaman Modal	Ketersediaan materi evaluasi dan perencanaan pengembangan penanaman modal	DPMPTSP
	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan kabupaten yang mantab	Pemangkasan biaya logistik dan meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi, sehingga investasi modal menjadi lebih efisien dalam menghasilkan pertumbuhan output daerah	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pemanfaatan Ruang Sesuai Perencanaan Tata Ruang	Sinkronisasi lokasi investasi dengan zona peruntukan yang efisien dan penyediaan kepastian hukum tata ruang, sehingga mencegah	Dinas PUPR

			inefisiensi modal akibat konflik pemanfaatan lahan serta mempercepat realisasi output ekonomi yang produktif.	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	Mempercepat legalitas operasional dan memberikan kepastian berusaha, sehingga mengurangi masa tunggu modal menganggur (<i>idle capital</i>) agar dapat segera dikonversi menjadi output ekonomi yang produktif secara lebih efisien.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pemberian Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Kemudahan bagi investasi sektor Agro untuk mendapatkan rekomendasi pangan segar asal tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan berusaha fasilitas kesehatan	Kemudahan investasi sektor kesehatan dan penjaminan pemenuhan NSPK	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan berusaha bidang kefarmasian	Kemudahan investasi sektor kesehatan dan penjaminan pemenuhan NSPK	Dinas Kesehatan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan berusaha bidang pendidikan	Kemudahan investasi sektor pendidikan dan penjaminan pemenuhan NSPK	Dinas Pendidikan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai	Kemudahan investasi sektor perikanan dan penjaminan pemenuhan NSPK	Dinas Peternakan dan Perikanan



		skala usaha dan risiko		
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada sub sektor Peternakan	Kemudahan investasi sub sektor peternakan dan penjaminan pemenuhan NSPK	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan bagi pelaku usaha	Menumbuhkan kesadaran terhadap ketaatan terhadap pemenuhan NSPK izin lingkungan untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi adalah sebesar 241.947.507.931,53 dengan realisasi sebesar Rp. 140.053.984.033,7. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi.

Tabel 2.66
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Efektivitas Investasi	99,68	Program Pelayanan Penanaman Modal	399.996.100,00	386.859.761,00	96,72
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	374.873.358,00	233.747.566,00	62,35
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	67.685.500,00	63.621.000,00	93,99
			Program Promosi Penanaman Modal	110.619.000,00	104.213.999,00	94,21
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	88.460.600,00	87.208.500,00	98,58



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Penanaman Modal			
			Program Penyelenggaraan Jalan	138.659.118.465,93	48.277.620.235,00	34,82
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.298.000.000,00	1.820.562.163,00	79,22
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	20.453.000,10	18.729.800,00	91,57
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.265.377.442,50	88.471.604.968,70	89,13
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	556.533.300,00	487.135.401,00	87,53
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	16.888.800,00	14.248.800,00	84,37
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.731.150,00	20.224.000,00	97,55
			Program Perizinan Usaha Pertanian	2.999.900,00	2.999.400,00	99,98
			Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	62.251.315,00	61.688.440,00	99,10
			Total	241.947.507.931,53	140.053.984.033,7	57,89
			Tingkat efisiensi			41,79

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 99,68% sedangkan



realisasi anggaran diperoleh sebesar 57,89%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 41,79. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Dilakukan dengan memprioritaskan pendanaan pada program-program strategis yang memiliki daya ungkit tinggi, seperti pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi dan pemeliharaan sistem digital SIDATIZ PEDAS, yang secara sistematis mampu menurunkan biaya transaksi bagi investor.

2) Efisiensi SDM

Diwujudkan melalui pengoptimalan kompetensi aparatur pelayanan di DPMPTSP agar memiliki keahlian teknis yang mumpuni dalam mengoperasikan regulasi yang dinamis serta memberikan layanan konsultasi yang solutif bagi pelaku usaha. Di sisi lain, pemerintah juga fokus pada pemberdayaan SDM lokal melalui berbagai pelatihan teknis dan bimbingan tata cara pelaporan investasi (LKPM), sehingga masyarakat dan pelaku usaha mampu mengelola modal secara lebih profesional dan produktif.

3) Efisiensi Waktu

Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya mengoptimalkan efisiensi waktu sebagai instrumen kunci dalam menekan angka ICOR melalui percepatan transisi antara fase penanaman modal hingga tahap produksi komersial. Upaya ini dilakukan dengan memangkas *gestation period* melalui penyederhanaan prosedur birokrasi dan penyediaan layanan konsultasi proaktif yang memastikan setiap permohonan perizinan melalui sistem OSS tidak tertahan oleh kendala administratif yang berlarut-larut. Dengan mempercepat waktu tunggu operasional bagi pelaku usaha, aset modal yang ditanamkan dapat segera menghasilkan *output* ekonomi dengan lebih cepat.



6. Sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, dan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan adalah persentase perubahan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dihitung dengan menggunakan data PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atas dasar harga konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi, dengan rumus perhitungan $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$.

Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan adalah persentase perubahan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam suatu periode, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengukuran ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga mencerminkan pertumbuhan riil sektor tersebut. Sektor perdagangan dihitung dari kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan rumus perhitungan $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar kontribusi sektor akomodasi dan mamin terhadap total perekonomian di Kabupaten Blitar, dengan rumus perhitungan $\frac{PDRB \text{ Sektor Akomodasi dan Mamin}}{\text{Total PDRB Daerah}} \times 100\%$.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah adalah sebesar 225,35% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:



Tabel 2.67
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,25	6,22	497,6%
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,6	4,24	75,71%
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	1,09-1,15	1,12	102,75% (Pembagi menggunakan target rentang bawah)
Capaian Kinerja Sasaran					225,35%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Blitar pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan mencapai angka 6,22%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1,25%, maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 497,60%. Lonjakan pertumbuhan ini mencerminkan penguatan signifikan pada stabilitas hasil panen di subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan; subsektor peternakan dan hasilnya yaitu produksi telur susu dan daging; serta optimalisasi potensi perikanan darat dan tangkap yang secara kolektif meningkatkan nilai tambah ekonomi makro Kabupaten Blitar.

Tingginya realisasi pertumbuhan yang melampaui target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan strategis. Pertama, adanya kondisi iklim yang sangat kondusif sepanjang tahun 2025 yang mendukung pola tanam serentak dan meminimalisir risiko gagal panen. Kedua, efektivitas intervensi pemerintah daerah melalui penyediaan sarana prasarana pertanian yang modern serta kemudahan akses permodalan bagi para peternak dan nelayan. Selanjutnya terkait dengan implikasi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produktivitas baik dalam subsektor pertanian, peternakan dan

perikanan. Guna memberikan gambaran yang lebih detail mengenai kontribusi fisik dari setiap lini, berikut disajikan tabel capaian produksi pada masing-masing subsektor penyusun PDRB tersebut:

Tabel 2.68
Capaian produksi Subsektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan Tahun 2025

Sub Sektor	Jenis	Jumlah Produksi	Satuan
Pertanian	Padi	2.562.435	Kw
	Cabai	521.225	kw
	Tebu	1.009,18	ribu ton
	Kelapa	8,46	ribu ton
	Kopi	1,89	ribu ton
Peternakan	Daging	12.882.404	ton
	Telur	167.338.944	kg
	Susu	42.355.945	ton
Perikanan	Tangkap	2.571,7	ton
	Budidaya (Konsumsi)	17.736.425	ton
	Budidaya (Non Konsumsi)	205.230.494	ekor

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Gambar 2.16
Panen Raya Padi dan Jagung



Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,24%. Jika disandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 5,60%, maka capaian kinerja pada sektor ini adalah sebesar 75,71%. Meskipun pertumbuhan tetap berada di angka positif yang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang terus berkembang, namun realisasi tersebut belum mampu mencapai target yang diproyeksikan di awal



tahun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Blitar masih berada dalam fase stabilisasi, di mana daya beli masyarakat dan aktivitas distribusi barang jasa mengalami pertumbuhan yang moderat namun tetap memerlukan penguatan kebijakan stimulan untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih progresif.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target ini antara lain adalah adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju transaksi digital yang sangat dinamis, serta fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang mempengaruhi volume perdagangan di tingkat lokal. Selain itu, optimalisasi infrastruktur perdagangan dan penguatan konektivitas distribusi barang antardaerah masih menghadapi tantangan dalam upaya menekan biaya logistik. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mendorong pemulihan kinerja sektor ini melalui penguatan kapasitas UMKM perdagangan dan fasilitasi digitalisasi pasar guna memacu aktivitas transaksi yang lebih luas dan efisien di tahun-tahun mendatang

Realisasi Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,12 pada tahun 2025 memiliki korelasi linear yang sangat kuat dengan performa sektor pariwisata Kabupaten Blitar yang tumbuh progresif. Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Blitar berhasil menarik kunjungan wisatawan sebanyak 3.781.644 orang, yang mana angka ini melampaui target tahunan sebesar 3.650.396 orang. Lonjakan jumlah wisatawan ini menjadi katalisator utama bagi tingginya keterisian akomodasi dan peningkatan *omzet* usaha makan minum di sekitar destinasi wisata. Keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi promosi wisata dan penyelenggaraan *event* daerah telah efektif dalam menciptakan *multiplier effect* terhadap ekonomi masyarakat melalui belanja wisatawan di sektor jasa perhotelan dan kuliner.



Posisi rasio di rentang target 1,09 - 1,15 juga mencerminkan kesiapan infrastruktur pendukung pariwisata dalam merespons meningkatnya jumlah pengunjung. Sinergi antara peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata dengan standarisasi kualitas pelayanan pada unit-unit penyedia akomodasi memastikan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan dibarengi dengan nilai tambah ekonomi yang berkualitas (bukan sekadar jumlah kunjungan). Kondisi ini memberikan sinyal positif bagi para investor di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata untuk terus mengembangkan usahanya di Kabupaten Blitar, mengingat daya serap pasar yang stabil dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang akomodatif terhadap pengembangan sektor jasa.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatkan Produktivitas Daerah mengalami perubahan yang fluktuatif selama 4 tahun terakhir, kecuali untuk indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin yang terus mengalami peningkatan. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.69
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,25	6,22	-0,28	1,68	0,85
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,6	4,24	5,52	6,10	6,68
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	1,09-1,15	1,12	1,09	1,06	1,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang sangat fluktuatif selama periode empat tahun terakhir (2022–2025). Berdasarkan data historis, sektor ini mengawali pertumbuhan yang moderat pada tahun 2022 sebesar 0,85%, yang kemudian mengalami penguatan tipis pada tahun 2023 menjadi 1,68%. Namun, pada tahun 2024, sektor ini sempat menghadapi tantangan



berat yang menyebabkan kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -0,28%. Penurunan di tahun 2024 tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim yang tidak menentu dan fluktuasi harga komoditas global yang menekan produktivitas sektor basis daerah.

Memasuki tahun 2025, terjadi anomali positif yang sangat signifikan di mana sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berhasil melakukan akselerasi luar biasa dengan tumbuh mencapai 6,22%. Lompatan tajam ini menandakan keberhasilan fase pemulihan (*recovery*) sekaligus ekspansi produktivitas yang jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh integrasi kebijakan strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkatkan permintaan makanan pokok seperti beras, buah, sayur dan protein hewani secara masif, serta didukung oleh kondisi iklim yang sangat kondusif bagi subsektor tanaman pangan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor primer rentan terhadap faktor eksternal, namun fondasi ekonomi pertanian Kabupaten Blitar memiliki resiliensi tinggi untuk bangkit secara progresif.

Penurunan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan selama 4 (empat) tahun terakhir ini secara teknis dipengaruhi oleh transisi pola konsumsi masyarakat yang semakin beralih ke platform digital, sehingga nilai transaksi di pasar-pasar fisik daerah mengalami stagnasi. Selain itu, kenaikan biaya logistik dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok turut menekan margin keuntungan pedagang lokal, yang pada akhirnya memperlambat pertambahan nilai bruto sektor ini.

Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Blitar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam empat tahun terakhir, dengan capaian yang bertahap naik dari 1,04 pada tahun 2022 hingga mencapai 1,12 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan jasa boga telah bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang



semakin dominan dan kontributif terhadap struktur PDRB daerah di Kabupaten Blitar.

Selain itu, capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 174,02% dari target tahun terakhir RPJMD. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.70
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,75	6,22	355,43%
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,2	4,24	68,39%
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	1,14-1,61	1,12	98,25% (Pembagi menggunakan target rentang bawah)
Capaian Kinerja Sasaran					174,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan melebihi target akhir RPJMD terlampaui sebesar 355,43%. Capaian yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa sektor basis primer memiliki resiliensi dan daya dorong yang luar biasa melampaui ekspektasi perencanaan awal. Hal ini mencerminkan keberhasilan transformasi sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan optimalisasi sektor perikanan yang mampu memberikan kontribusi riil terhadap struktur ekonomi daerah. Momentum pertumbuhan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor perdesaan secara berkelanjutan.

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan belum mencapai target akhir RPJMD, masih sebesar 68,39%. Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi kebijakan untuk mengatasi tren



pelambatan serta penguatan strategi digitalisasi pasar guna memacu aktivitas transaksi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor perdagangan memerlukan intervensi lebih lanjut dalam revitalisasi sarana dan peningkatan daya saing usaha agar mampu mengejar sisa target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tercapai 98,25% dari target akhir RPJMD. Capaian yang mendekati target ini menunjukkan pemulihan yang stabil dan tren positif pada sektor pariwisata serta jasa kuliner daerah. Meskipun belum sepenuhnya melampaui angka 100%, performa ini mencerminkan tingginya aktivitas kunjungan wisatawan dan geliat konsumsi masyarakat yang terus menguat. Optimisme ini didukung oleh peningkatan kualitas sarana akomodasi dan diversifikasi produk kuliner lokal yang semakin kompetitif, sehingga diharapkan pada periode mendatang sektor ini mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap struktur ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah di Kabupaten Blitar melampaui kinerja Provinsi Jawa Timur untuk indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar memiliki basis ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan regional. Keunggulan pada sektor pertanian menunjukkan efektivitas peran Blitar sebagai lumbung pangan nasional khususnya pada komoditas ternak seperti telur dan susu, dan hortikultura seperti cabai yang didukung oleh rantai pasok lokal yang mandiri. Sementara itu, performa sektor perdagangan yang melampaui provinsi mengindikasikan tingginya aktivitas transaksi barang hasil bumi dan efektivitas digitalisasi UMKM dalam memperluas jangkauan pasar hingga ke luar daerah.



Sedangkan untuk indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin kinerja Kabupaten Blitar berada jauh dibawah realisasi Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa pariwisata dan pendukungnya di Kabupaten Blitar masih didominasi oleh skala usaha mikro dan informal yang nilai tambahnya secara makro belum optimal dibandingkan pusat-pusat pertumbuhan industri pariwisata mapan di Jawa Timur. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah kunjungan wisata tinggi, lama menginap wisatawan di Blitar masih relatif singkat dan pengeluaran rata-rata pengunjung pada sektor kuliner serta penginapan formal masih terbatas, sehingga kontribusi sektor akomodasi terhadap total PDRB daerah belum seprogresif wilayah metropolitan atau kawasan wisata nasional lainnya di Jawa Timur. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.71
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,22	4,98
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,24	3,99
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	1,12	6,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

1) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pemerintah Kabupaten Blitar memacu laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian melalui strategi Luas Tambah Tanam (LTT) padi yang dioptimalkan dengan mempercepat jadwal tanam dan memperluas areal produksi. Langkah ini didukung penuh oleh distribusi bantuan benih unggul serta penerapan manajemen perlindungan tanaman yang presisi melalui penggunaan pestisida alami dan kimia secara tepat sasaran, guna, dan waktu. Untuk menjamin keberlanjutan produktivitas,

kapasitas kelembagaan petani di tingkat kecamatan dan desa terus ditingkatkan, selaras dengan penguatan kompetensi penyuluh pertanian sebagai ujung tombak transformasi teknologi di lapangan.

Gambar 2.17
Penyerahan Alsintan oleh Bupati Blitar kepada Kelompok Tani



Di sektor peternakan, fokus diarahkan pada penyediaan sarana berkualitas melalui pelayanan Inseminasi Buatan (IB) untuk perbaikan genetika, pengawasan pakan, serta obat hewan yang terstandarisasi. Aspek kesehatan masyarakat veteriner diperketat melalui pengawasan produk ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan optimalisasi operasional Rumah Potong Hewan (RPH) serta Pasar Hewan Terpadu. Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui vaksinasi dan surveilans aktif menjadi prioritas guna menekan risiko kerugian peternak, yang didukung dengan pendampingan teknis intensif untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan daerah.

Sementara itu, pada subsektor perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dilakukan melalui fasilitasi sarana prasarana penangkapan dan pelatihan pengembangan garam dan budidaya ikan guna meningkatkan volume tangkapan secara berkelanjutan. Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap untuk memastikan kepatuhan perizinan dan mencegah praktik penangkapan yang



merusak lingkungan. Upaya hilirisasi turut menjadi kunci melalui optimalisasi pengolahan dan penguatan akses pasar hasil perikanan, sehingga nilai tambah produk meningkat dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir serta kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

Gambar 2.18
Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Bioflok



Dalam upaya mencapai target laju pertumbuhan PDRB, Pemerintah Kabupaten Blitar menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Pada sektor pertanian, kendala utama terletak pada fluktuasi iklim yang tidak menentu yang sering mengganggu akurasi kalender tanam, serta tingginya laju konversi lahan produktif yang mengancam konsistensi Luas Tambah Tanam (LTT). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) petani dalam pemanfaatan sistem e-RDKK mengakibatkan sebagian pelaku usaha belum terakomodasi secara penuh dalam sistem pembinaan. Untuk sementara waktu, petani tersebut digabungkan ke kelompok tani lain agar tetap mendapatkan pendampingan sembari menunggu peningkatan kapasitas digital dan perbaikan pendataan secara menyeluruh.



Hambatan ini diperberat dengan masih tingginya harga sarana produksi pertanian serta serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang sulit diprediksi.

Di sektor peternakan, tantangan signifikan muncul dari potensi penyebaran penyakit hewan menular strategis yang dipicu oleh tingginya mobilitas ternak antarwilayah serta lemahnya penerapan biosekuriti pada sebagian peternakan rakyat. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kesadaran peternak dalam melakukan pelaporan dini terhadap gejala penyakit, sehingga upaya pengendalian dan pemutusan rantai penularan belum dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah. Faktor-faktor tersebut berisiko menurunkan populasi ternak produktif dan menghambat kontribusi sektor peternakan terhadap struktur ekonomi daerah.

Sementara itu, pada sektor perikanan, volume produksi sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya intensitas gelombang laut serta ketidakpastian waktu melaut, sehingga menghambat aktivitas nelayan tangkap. Selain itu, masih adanya praktik *illegal fishing* di Perairan Umum Darat (PUD), seperti penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, menyebabkan berkurangnya populasi ikan dan kerusakan ekosistem perairan. Permasalahan ini, ditambah dengan tingginya biaya pakan pabrikaan pada sektor budidaya, menjadi hambatan utama dalam menjaga stabilitas produksi perikanan.

Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen memperkuat sektor pertanian melalui percepatan digitalisasi data petani guna memastikan seluruh pelaku usaha terakomodasi dalam sistem e-RDKK. Langkah tindak lanjut ini dibarengi dengan intensifikasi program Luas Tambah Tanam (LTT) melalui penguatan sarana dan prasarana pertanian, seperti pembangunan jaringan irigasi tersier, penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) modern, serta



pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah distribusi hasil panen. Selain itu, penggunaan varietas benih unggul yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan peningkatan bimbingan teknis pengendalian hama terpadu menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani secara berkelanjutan.

Pada sektor peternakan, langkah strategis difokuskan pada penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap penyakit hewan menular melalui optimalisasi peran pusat kesehatan hewan (Puskeswan) dan penyuluh di lapangan. Pemerintah daerah akan memperketat pengawasan lalu lintas ternak antarwilayah serta memasifkan edukasi biosekuriti pada peternakan rakyat. Di sisi hilir, optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi standar higienis dan sertifikasi halal terus didorong agar produk asal hewan dari Blitar memiliki nilai tawar lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar ritel yang lebih luas.

Sementara itu, untuk sektor perikanan, tindak lanjut utama dilakukan melalui peningkatan pengawasan perairan umum darat secara kolaboratif bersama masyarakat untuk memberantas praktik *illegal fishing*. Fasilitasi bantuan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan modern bagi nelayan kecil juga akan ditingkatkan guna memitigasi dampak cuaca ekstrem terhadap volume tangkapan. Selain itu, pengembangan hilirisasi melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan dan penguatan akses permodalan menjadi kunci agar komoditas perikanan tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan sebagai produk olahan bernilai tambah tinggi yang kompetitif di pasar regional.

2) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Dalam rangka pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Blitar



secara aktif menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten guna menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. Langkah ini diperkuat dengan program revitalisasi pasar rakyat seperti di pasar Kesamben untuk menciptakan sarana perdagangan yang lebih bersih, nyaman, dan representatif bagi pedagang maupun konsumen. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah mengimplementasikan gerakan Langkah ini terintegrasi dengan upaya penguatan struktur industri melalui pengembangan serta peningkatan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar memiliki daya saing yang lebih kuat. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah mengimplementasikan gerakan Bela Beli Produk Blitar, yang salah satunya diwujudkan melalui kebijakan wajib bagi seluruh ASN untuk berbelanja di pasar setiap tanggal 17.

Di sisi lain, perluasan jangkauan pasar dilakukan secara komprehensif, mulai dari fasilitasi promosi dan akses pasar ekspor hingga pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha yang berorientasi global. Upaya ini didukung dengan modernisasi sarana perdagangan melalui penerapan aplikasi digital untuk pemantauan harga harian guna menjamin transparansi bagi pedagang maupun konsumen. Guna memperlancar arus barang, pemerintah juga memperluas kerja sama dengan penyedia layanan logistik untuk mempermudah distribusi dari sentra produksi ke pasar grosir, sehingga likuiditas terjaga.

Tantangan utama dalam akselerasi sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Blitar terletak pada keterbatasan kapasitas serta daya saing pelaku usaha dan IKM. Sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam hal standarisasi kualitas produk, pemenuhan sertifikasi



internasional, serta pemahaman teknis terhadap prosedur ekspor dan legalitas usaha yang kompleks. Kondisi ini menyebabkan penetrasi produk lokal ke pasar global masih terbatas, sehingga berdampak pada lambatnya peningkatan nilai ekspor dan belum optimalnya kontribusi industri pengolahan terhadap struktur PDRB kabupaten.

Selain aspek kapasitas pelaku usaha, tantangan signifikan muncul dari fluktuasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Perubahan harga dan ketersediaan barang di pasar sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak menentu, gangguan pada rantai distribusi, serta tekanan kondisi ekonomi eksternal. Meskipun demikian, melalui koordinasi intensif antar-instansi, stabilitas harga secara umum telah berhasil dikendalikan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terjaganya angka inflasi daerah dalam rentang sasaran serta efektifnya intervensi pasar yang dilakukan untuk meredam lonjakan harga pada komoditas strategis di tingkat pedagang pasar maupun konsumen.

Langkah tindak lanjut yang diambil adalah percepatan pembangunan infrastruktur penunjang logistik, termasuk optimalisasi Jalur Lintas Selatan (JLS) guna membuka akses pasar baru ke wilayah luar daerah secara lebih efektif. Pemerintah daerah juga akan menguatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai agregator atau penyangga stok pangan lokal untuk menstabilkan harga di pasar grosir dan memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Kebijakan dukungan lokal dan operasi pasar akan terus dievaluasi cakupannya guna memastikan dampak ekonominya terasa merata bagi seluruh pelaku usaha.



Selain itu, pendampingan intensif melalui Klinik UMKM dan IKM akan difokuskan pada pemenuhan standar ekspor agar lebih banyak produk lokal yang layak masuk ke skala perdagangan internasional. Pemkab Blitar juga berencana mengembangkan sistem informasi pasar digital yang terintegrasi dengan data transportasi untuk memudahkan pelaku usaha mencari armada angkut dengan biaya yang lebih efisien. Dengan sinergi antara kebijakan dukungan lokal, perluasan akses ekspor, dan penguatan kapasitas industri kecil, diharapkan laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dapat tumbuh secara signifikan pada tahun 2025.

3) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin

Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya meningkatkan rasio sektor akomodasi dan mamin melalui program diversifikasi destinasi dan standarisasi layanan usaha jasa pariwisata. Upaya nyata dilakukan dengan memfasilitasi transformasi *homestay* rakyat di sekitar destinasi unggulan, seperti Pantai Serang dan Kebun Teh Sirah Kencong, agar memenuhi standar kelayakan industri perhotelan. Melalui pendampingan teknis terkait manajemen manajerial dan pelayanan prima, Pemerintah Kabupaten Blitar mendorong penyedia jasa akomodasi lokal untuk tidak hanya menyediakan tempat menginap, tetapi juga paket pengalaman wisata yang terintegrasi, sehingga mampu memperpanjang durasi tinggal wisatawan di Kabupaten Blitar.

Selain itu, penguatan sektor makan minum dilakukan melalui program hilirisasi kuliner berbasis produk unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar aktif menyelenggarakan festival kuliner dan mendorong pusat-pusat jajanan tradisional untuk mengadopsi standar higienitas serta sertifikasi Halal bagi UMKM pangan. Dengan mengintegrasikan sentra kuliner ke dalam peta perjalanan wisata digital, pemerintah berupaya meningkatkan volume belanja wisatawan pada sektor mamin.



Langkah ini diharapkan dapat mengubah pola kunjungan dari sekadar wisata harian menjadi kunjungan yang memberikan dampak ekonomi lebih besar pada sektor jasa penyediaan akomodasi dan makanan.

Hambatan utama yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini adalah masih dominannya wisatawan harian yang tidak memerlukan jasa penginapan karena aksesibilitas Blitar yang dekat dengan daerah asal wisatawan di sekitar Jawa Timur. Hal ini menyebabkan okupansi hotel berbintang dan *homestay* belum optimal meskipun jumlah kunjungan wisata secara total mengalami kenaikan. Selain itu, keterbatasan jumlah hotel skala besar atau akomodasi dengan fasilitas pertemuan (*MICE - Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) menjadi kendala dalam menarik segmen pasar korporasi maupun instansi yang memiliki daya beli lebih tinggi pada sektor mamin dan penginapan.

Kendala lainnya terletak pada masalah standarisasi dan pencatatan data transaksi. Banyak pelaku usaha akomodasi rakyat dan warung makan skala kecil yang belum terdaftar secara formal atau tidak melakukan pelaporan data transaksi secara tertib, sehingga kontribusi nyata mereka terhadap PDRB sering kali tidak terekam secara maksimal. Fluktuasi harga bahan baku pangan lokal juga kerap menjadi beban operasional bagi pengusaha mamin, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan daya saing harga produk kuliner Blitar dibandingkan dengan daerah wisata pesaing di sekitarnya.



Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Blitar akan mengakselerasi program pengembangan paket wisata malam dan *event* tahunan yang berkelanjutan. Dengan menciptakan atraksi wisata malam hari dan festival budaya yang berlangsung lebih dari satu hari, diharapkan terdapat urgensi bagi wisatawan untuk bermalam. Secara administratif, pemerintah akan memperkuat sistem pendataan melalui digitalisasi pelaporan pajak daerah dan retribusi yang terintegrasi, sehingga kontribusi dari sektor akomodasi dan mamin, termasuk dari pelaku usaha mikro, dapat tercatat secara akurat dalam struktur PDRB.

Di sisi lain, perbaikan iklim investasi akan difokuskan pada pemberian insentif bagi investor yang bersedia membangun fasilitas akomodasi eksklusif atau hotel berbintang yang terintegrasi dengan pusat konvensi. Pemkab juga berencana memperluas kemitraan antara pengelola destinasi wisata dengan asosiasi perhotelan dan restoran untuk menciptakan paket *bundling* wisata yang kompetitif. Melalui sinergi ini, diharapkan rasio PDRB sektor akomodasi dan mamin tidak hanya tumbuh secara kuantitas kunjungan, tetapi juga meningkat secara kualitas nilai ekonomi yang ditinggalkan oleh wisatawan di Kabupaten Blitar.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.72
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Produktivitas Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Optimalisasi pelaksanaan program pemerintah terkait Luas	Mendorong peningkatan produktivitas dan luas panen.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



		Tambah Tanam (LTT) padi dan bantuan benih unggul		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1) perencanaan pengembangan prasarana pertanian yang disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan hasil identifikasi kondisi wilayah, 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala	Memastikan kegiatan tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan ketentuan teknis dan target yang telah ditetapkan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanggulangan bencana pertanian	Program berjalan efektif dengan dukungan penggunaan pestisida alami dan kimia yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Pembinaan kelompok tani	Program berjalan efektif dengan dukungan pelaksanaan peningkatan Kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, serta penyediaan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Fasilitasi pengisian 1 unit LPM dengan pemberian bantuan mesin jahit karung dan sosialisasi tentang Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Peningkatan persentase Infrastruktur kemandirian pangan aktif	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberian bantuan bibit sayuran dan greenhouse; pemantauan stok pangan; pemantauan harga dan	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



		pasokan pangan; penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); kerjasama dengan Bulog untuk pengadaan dan penyimpanan beras; pelaksanaan sosialisasi penganekaragaman pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi (genius)		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan keamanan pangan	Bahan pangan segar aman konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	Pemanfaatan SDG membantu menjaga keanekaragaman genetik ternak, mendukung peningkatan kualitas dan ketahanan ternak terhadap penyakit, Pengawasan pakan ternak memastikan kualitas pakan dan ketersediaan hijauan, mendukung pertumbuhan ternak optimal dan kualitas produk yang lebih baik.	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pemeliharaan prasarana mendukung kelancaran kegiatan produksi, dan	Memelihara Prasarana Peternakan Layak Fungsi	Dinas Peternakan dan Perikanan



		pemasaran ternak		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Upaya penjaminan kesehatan ternak sehingga produktivitas terjaga, Mencegah masuknya penyakit hewan, dan menjaga kualitas produk ternak; Pengawasan kesmavet memastikan produk ternak aman dan layak edar.	Penyakit hewan Menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Upaya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	Memastikan produksi ternak tidak terganggu.	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Fasilitasi dan pembinaan Perijinan sub sektor peternakan	Meningkatkan daya saing produk peternakan Kabupaten Blitar	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Penyuluhan Pertanian	Upaya pendampingan langsung membantu peternak menerapkan manajemen ternak yang baik.	Peningkatan peternak terampil	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Fasilitasi pengelolaan penangkapan ikan melalui restocking mendukung produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Darat (PUD); pemberdayaan Meningkatkan kemampuan teknis dan akses sarana usaha nelayan kecil, Optimalisasi fungsi TPI sebagai pusat pelelangan untuk meningkatkan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan



		penyerapan dan distribusi hasil tangkapan		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil meningkatkan kemampuan pembudidaya,	Mendorong peningkatan produksi ikan budidaya.	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan untuk mencegah praktik penangkapan yang merusak dan ilegal, untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan.	Peningkatan Produksi PUD	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai penunjang peningkatan produksi perikanan	Memastikan bahwa hasil tangkapan dan budidaya memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sehingga dapat diterima pasar.	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Rekomendasi ijin, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha	Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di daerah.	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemeliharaan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan	Memastikan tersedianya sarana distribusi yang memadai, tertata, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pelaksanaan pemantauan pasar barang kebutuhan pokok pada hari-hari menjelang Hari Raya, Bulan Ramadhan, dll	Menjaga stabilitas harga dan tersedianya stok bahan pokok dan barang penting dalam keadaan cukup bagi masyarakat,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan fasilitasi produk-produk potensial ekspor	Meningkatkan laju pertumbuhan perdagangan besar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan kegiatan kemetrolagian dan movev keamanan	Meningkatkan kepercayaan (<i>trust</i>) antara penjual dan pembeli,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



		pangan produk dalam kemasan	sehingga dapat berpengaruh terhadap PDRB Perdagangan	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Upaya mendorong pemasaran produk dalam negeri	Meningkatkan serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pemetaan zona industri dan hilirisasi produk lokal yang siap dipasarkan secara kompetitif ke skala regional.	Meningkatkan PDRB Perdagangan dengan menjamin ketersediaan komoditas unggulan yang bernilai tambah tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Rekomendasi teknis perizinan industri serta pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha.	Program ini meningkatkan PDRB Perdagangan dengan memberikan kepastian hukum dan legalitas usaha, yang memungkinkan produk industri lokal memenuhi syarat formal untuk masuk ke rantai pasok modern serta pasar ekspor yang lebih luas.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan informasi industri	Program SIINas meningkatkan PDRB Perdagangan dengan menyajikan data produksi yang akurat secara <i>real-time</i> , sehingga memperlancar rantai pasok dan memperluas akses pasar produk lokal ke jaringan ritel serta pengadaan barang/jasa.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya tarik destinasi wisata	Meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Blitar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata melalui kampanye destinasi unggulan melalui media digital, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan (<i>influencer</i>), serta partisipasi aktif dalam ajang pameran pariwisata tingkat regional maupun nasional guna memperluas jangkauan pasar	Meningkatkan perjalanan wisatawan di Kabupaten Blitar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Pemanfaatan/ Perlindungan HAKI pada sub sektor ekonomi kreatif fokus pada sub sektor prioritas	Perlindungan hak Cipta bagi pelaku ekonomi kreatif meningkatkan kepercayaan diri dan pertumbuhan industri ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan bimbingan teknis baik pengembangan sumber daya pariwisata maupun ekonomi kreatif	Meningkatkan pertumbuhan industri ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Blitar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan	Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan melalui sistem informasi yang terintegrasi	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Berusaha	Meningkatkan kondusifitas iklim investasi serta pemenuhan persyaratan dan pelaporan berusaha	DPMPTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Meningkatkan minat investasi di kabupaten Blitar	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyediaan informasi potensi investasi di Kabupaten Blitar	Kemudahan informasi terkait investasi potensial bagi investor	DPMPTSP
	Program Pengembangan	Pelatihan wirausaha muda	Meningkatkan pengembangan	Dinas Pemuda dan Olah Raga



	Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	dan forum pengembangan kapasitas pemuda	kapasitas daya saing pemuda di sektor ekonomi	

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Produktivitas Daerah adalah sebesar Rp. 29.855.268.309,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.210.185.925,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Produktivitas Daerah.

Tabel 2.73
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatkan Produktivitas Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Produktivitas Daerah	225,35	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.760.615.450,00	5.079.021.535,00	88,17
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.361.858.488,00	7.194.619.001,00	97,73
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	19.612.000,00	18.455.700,00	94,10
			Program Penyuluhan Pertanian	3.246.166.770,00	2.549.928.157,00	78,55
			Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	10.350.100,00	9.818.000,00	94,86
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	750.106.101,00	657.689.829,00	87,68
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.080.100,00	39.429.220,00	98,38
			Program Pengawasan	20.453.000,00	18.729.800,00	91,57



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Keamanan Pangan			
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	456.460.975,00	394.412.367,00	86,41
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	263.758.050,00	234.309.032,00	88,83
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	351.755.925,00	339.025.031,00	96,38
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
			Program Perizinan Usaha Pertanian	2.999.900,00	2.999.400,00	99,98
			Program Penyuluhan Pertanian	81.397.200,00	80.407.500,00	98,78
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	251.412.200,00	187.995.728,00	74,78
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3.729.900,00	3.687.500,00	98,86
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.731.150,00	2.0224.000,00	97,55
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.574.787.500,00	3.052.747.158,00	85,40
			Program Stabilisasi Harga Barang	26.893.730,00	26.855.000,00	99,86



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
			Program Pengembangan Ekspor	421.439.120,00	413.941.150,00	98,22
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	271.751.244,00	263.658.680,00	97,02
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.583.149.483,00	1.571.627.668,00	99,27
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	8.015.000,00	7.995.000,00	99,75
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	29.498.000,00	28.980.508,00	98,25%
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.178.280.800,00	1.097.552.572,00	93,15
			Program Pemasaran Pariwisata	405.282.865,00	401.536.945,00	99,08
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	8.450.000,00	8.183.000,00	96,84
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.348.855.000,00	1.319.832.760,00	97,85
			Program Pelayanan Penanaman Modal	399.996.100,00	386.859.761,00	96,72
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	374.873.358,00	233.747.566,00	62,35



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	67.685.600,00	63.621.000,00	93,99
			Program Promosi Penanaman Modal	110.619.000,00	104.213.999,00	94,21
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.384.584.200,00	1.378.461.358,00	99,56
			Total	29.855.268.309,00	27.210.185.925,00	91,14
			Tingkat efisiensi			134,21

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 225,35% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 91,14%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 134,21. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Perdagangan, serta Rasio Akomodasi dan Mamin di Kabupaten Blitar tercermin dari optimalisasi penyerapan dana yang sangat terukur, di mana dari total alokasi sebesar Rp 29.855.268.309,00, realisasi belanja tercatat sebesar Rp 27.210.185.925,00. Dengan tingkat serapan yang mencapai 90,90%, pemerintah daerah berhasil menciptakan penghematan tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja melalui strategi kolaborasi lintas sektor dan penggunaan teknologi tepat guna yang tepat sasaran. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa produktivitas di sektor unggulan seperti peternakan telur dan hortikultura, peningkatan volume transaksi perdagangan digital, serta penguatan sarana akomodasi



pariwisata tetap berjalan maksimal meskipun terdapat efisiensi belanja sisa tender dan rasionalisasi biaya operasional. Efektivitas fiskal ini membuktikan bahwa manajemen anggaran di Kabupaten Blitar mampu menghasilkan dampak ekonomi yang luas (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat dengan penggunaan sumber daya keuangan yang lebih hemat dan efisien.

2) Efisiensi SDM

Diwujudkan melalui peningkatan kompetensi teknis dan kemandirian tenaga kerja lokal. Melalui pelatihan teknologi tepat guna dan literasi digital, para petani, peternak, serta pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan mengelola manajemen pemasaran secara mandiri dengan tingkat kesalahan yang minim. Penguatan kapasitas Pokdarwis dalam standarisasi layanan pariwisata juga menciptakan operasional yang lebih ramping dan profesional, sehingga mampu mendorong nilai tambah ekonomi daerah secara optimal tanpa ketergantungan pada pendampingan fisik yang intensif.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui akselerasi digitalisasi birokrasi dan pemangkasan rantai distribusi. Penerapan sistem perizinan terpadu dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) mempercepat legalitas usaha bagi pelaku IKM dan pengelola wisata, sehingga operasional bisnis dapat dimulai lebih awal tanpa hambatan administratif yang berkepanjangan. Di sektor lapangan, pemanfaatan teknologi informasi dalam memonitor stok komoditas pertanian dan integrasi *marketplace* lokal memperpendek waktu transaksi antara produsen dan konsumen, yang secara langsung meningkatkan kecepatan perputaran uang di sektor perdagangan. Percepatan durasi layanan ini memastikan setiap potensi ekonomi daerah dapat terserap secara *real-time*, sehingga mampu mendorong



pertumbuhan nilai tambah sektor primer dan jasa pariwisata secara lebih progresif.

7. Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, dengan rumus perhitungan

$$\frac{\sum \text{Pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%.$$

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah sebesar 105,67% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.74
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,76-4,65	4,49	105,67% (Pembagi menggunakan target rentang bawah)
Capaian Kinerja Sasaran					105,67%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebesar 105,67%, dengan realisasi sebesar 4,49 melebihi dari rentang target 4,76-4,65. Pencapaian kinerja ini artinya Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil menekan angka pengangguran lebih rendah dari batas bawah yang diproyeksikan, yang dalam indikator bersifat *negative outcome* menunjukkan keberhasilan yang sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja di pasar lokal. Tercatat bahwa jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebanyak 34.701 orang dari total jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 773.434 orang. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur ekonomi daerah memiliki



ketahanan yang kuat dalam menjaga stabilitas lapangan kerja, di mana angkatan kerja baru dapat terserap secara optimal ke dalam berbagai sektor produktif.

Capaian kinerja yang melebihi target ini disebabkan karena masifnya pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang menjadi motor utama penyerap tenaga kerja di Kabupaten Blitar. Selain itu, efektivitas program pelatihan vokasi dan standarisasi kompetensi SDM yang selaras dengan kebutuhan industri lokal, penguatan kemandirian UMKM melalui digitalisasi pemasaran, serta adanya penyelenggaraan *Job Fair* di Kabupaten Blitar telah menciptakan peluang kerja mandiri yang signifikan. Sinergi antara pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi dengan kemudahan perizinan usaha juga turut mendorong ekspansi sektor swasta, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru yang melampaui ekspektasi perencanaan awal daerah.

Keberhasilan ini juga diperkuat secara signifikan melalui pemanfaatan aplikasi Sang Kapten (Sistem Informasi Magang, Kerja, dan Pelatihan Tenaga Kerja) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja. Aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan digital yang mempercepat pertemuan antara penyedia lapangan kerja (perusahaan) dengan pencari kerja secara *real-time*, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan adanya fitur informasi pelatihan kerja yang terintegrasi, Sang Kapten terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal melalui peningkatan *link and match* antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan spesifik pasar kerja di Kabupaten Blitar.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja mengalami peningkatan kinerja selama 4 (empat) tahun terakhir. Tren peningkatan kinerja ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah berhasil mengimplementasikan strategi penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan dan adaptif terhadap



dinamika ekonomi regional. Keberhasilan ini mengindikasikan semakin kuatnya sinergi antara program pelatihan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, serta tumbuhnya ekosistem kewirausahaan yang mampu menciptakan lapangan kerja mandiri secara konsisten. Kondisi tersebut juga mencerminkan efektivitas transformasi digital dalam sistem rekrutmen dan perluasan investasi di sektor-sektor unggulan yang secara langsung berdampak pada penurunan angka pengangguran secara gradual dan terukur. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.75
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,76-4,65	4,49	4,77	4,91	5,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Selain itu, capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 93,35% dari target tahun terakhir RPJMD. Capaian yang hampir mendekati target akhir tersebut membuktikan bahwa perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar memiliki tingkat akurasi dan efektivitas yang sangat tinggi sejak awal periode. Kondisi riil menunjukkan bahwa integrasi antara sektor pendidikan vokasi dengan ekosistem industri pengolahan produk turunan ternak dan hortikultura telah berjalan secara organik, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak lagi bergantung sepenuhnya pada proyek pemerintah, melainkan pada kekuatan pasar lokal yang mandiri. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.76
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian



1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,21-4,10	4,49	93,35% (Pembagi menggunakan target rentang bawah)
Capaian Kinerja Sasaran					93,35%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blitar masih dibawah Provinsi Jawa Timur dengan selisih sebesar 0,61 poin. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar masih memiliki tantangan struktural yang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan rata-rata capaian provinsi. Angka ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan angkatan kerja baru di Kabupaten Blitar belum sepenuhnya sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja di sektor formal maupun penguatan kemandirian ekonomi di sektor informal. Kondisi ini menuntut adanya akselerasi program pelatihan kerja yang lebih spesifik dan perluasan investasi yang padat karya guna memperkecil gap pengangguran tersebut agar selaras dengan tren penurunan pengangguran di tingkat regional Jawa Timur. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.77
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,49	3,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja mengoptimalkan pencapaian target TPT salah satunya melalui inovasi Sang Kapten, yang menjadi motor penggerak dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Melalui program ini, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dilakukan secara terpadu dengan prinsip *link and match* untuk



menjawab kebutuhan nyata dunia usaha dan industri. Pelatihan yang difokuskan pada sektor potensial daerah, baik formal maupun informal, kini dilengkapi dengan uji kompetensi dan sertifikasi profesional. Dengan dukungan teknologi informasi yang kuat, kualitas informasi pasar kerja terus ditingkatkan agar penyediaan data lowongan kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses, sehingga mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja secara efektif.

Dalam aspek penempatan, inovasi Sang Kapten memperkuat layanan penempatan tenaga kerja melalui pemutakhiran data, fasilitasi rekrutmen, serta penyelenggaraan *job fair* yang melibatkan berbagai mitra strategis. Pemkab Blitar juga memperluas jangkauan peluang kerja hingga ke tingkat nasional dan internasional melalui layanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) serta Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Kerja sama intensif dengan perusahaan, asosiasi pengusaha, dan lembaga pelatihan kerja terus diperkuat untuk memperoleh informasi kebutuhan tenaga kerja secara aktual, sekaligus mendorong komitmen dunia usaha dalam memberikan prioritas penyerapan bagi tenaga kerja lokal Kabupaten Blitar.

Melengkapi strategi tersebut, perluasan kesempatan kerja diwujudkan melalui kegiatan padat karya produktif dan fasilitasi bagi wirausaha baru guna menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat yang belum terserap di sektor formal. Keberhasilan upaya ini didukung oleh iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan dan perlindungan hubungan industrial yang harmonis serta mediasi perselisihan yang efektif.

Gambar 2.19
Pelaksanaan Job Fair Tahun 2025



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2025

Gambar 2.20
Pendidikan dan Pelatihan “Pemeliharaan Dan Perbaikan Elektronika Rumah Tangga” dan “Make Up Artis” Sang Kapten



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2025



Dalam pencapaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka, Pemerintah Kabupaten Blitar menghadapi hambatan struktural berupa ketidakseimbangan antara *supply* (ketersediaan) dan *demand* (permintaan) tenaga kerja. Kesenjangan kompetensi menjadi pemicu utama, di mana kualifikasi lulusan pendidikan formal sering kali belum memenuhi standar spesifik dan pengalaman praktis yang dibutuhkan oleh industri. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan alokasi anggaran APBD dan tingginya biaya mandiri untuk sertifikasi keahlian, yang merupakan syarat krusial bagi penempatan kerja, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar sesuai dengan standar internasional. Minimnya skema pembiayaan terintegrasi serta kurangnya dukungan pusat dan swasta menyebabkan banyak calon tenaga kerja sulit memenuhi syarat formal, yang berpotensi meningkatkan angka PMI non-prosedural dan kerentanan mereka di negara tujuan.

Di sisi lain, penyelenggaraan *Job Fair* atau Bursa Kerja dinilai belum mencapai efektivitas maksimal dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah ini. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan jumlah serta variasi lowongan pekerjaan yang tersedia, yang sering kali tidak selaras dengan profil dan ekspektasi para pencari kerja lokal. Kendala teknis muncul saat kualifikasi pendaftar tidak memenuhi kriteria spesifik yang ditetapkan perusahaan, sementara di sisi pencari kerja terdapat fenomena sikap selektif terhadap besaran upah, lokasi kerja, serta jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, banyak posisi strategis yang ditawarkan oleh dunia usaha tetap tidak terisi (lowongan kosong) meskipun peluang telah dibuka secara luas.

Selain kendala pada sisi kompetensi dan penempatan, tantangan besar juga ditemukan pada optimalisasi sistem informasi pasar kerja yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Rendahnya kesadaran perusahaan swasta dalam melaporkan lowongan pekerjaan secara mandiri dan berkala mengakibatkan data informasi



pasar kerja di Kabupaten Blitar tidak tercermin secara *real-time*. Keterbatasan akses informasi digital di wilayah pelosok juga menghambat distribusi peluang kerja secara merata, sehingga proses pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja sering kali mengalami hambatan administratif dan komunikasi. Hal ini menuntut adanya penguatan infrastruktur digital dan regulasi yang lebih tegas agar basis data ketenagakerjaan dapat menjadi rujukan akurat dalam pengambilan kebijakan penurunan angka pengangguran.

Pemerintah Kabupaten Blitar akan memprioritaskan transformasi paradigma pencari kerja dari pola pikir "mencari kerja" menjadi "mencipta kerja" melalui peningkatan pelatihan wirausaha baru secara masif. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sehingga mampu membuka lapangan kerja mandiri sebagai alternatif utama di luar sektor formal. Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja akan mengintensifkan program bimbingan karier dan pemberian informasi pasar kerja yang lebih efektif. Upaya ini dirancang untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai peluang kerja di berbagai sektor serta memotivasi angkatan kerja agar aktif mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal yang terus berkembang.

Untuk mengatasi ketimpangan antara ketersediaan dan permintaan tenaga kerja, Pemkab Blitar akan memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai perusahaan, baik di skala lokal maupun nasional. Sinergi ini bertujuan untuk memperkaya variasi lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga tidak hanya terpaku pada sektor-sektor tertentu. Selain itu, optimalisasi kemitraan akan diwujudkan dalam bentuk program pendidikan praktik kerja bagi siswa maupun pencari kerja potensial. Melalui skema ini, calon tenaga kerja dapat memahami secara langsung standar kebutuhan industri saat ini, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun format



penyelenggaraan *Job Fair* yang lebih tepat sasaran dan berdaya serap tinggi.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.78
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi sebesar 25%	Peningkatan kompetensi, keterampilan, dan daya saing tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan tenaga kerja yang lebih siap dan produktif, peluang untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan usaha mandiri semakin meningkat	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari Kerja yang telah ditempatkan 65%	Melalui fasilitasi penyaluran tenaga kerja ke dunia usaha dan industri sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja secara lebih efektif, program ini mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 76,48%	Penciptaan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dengan kondisi hubungan industrial yang kondusif, stabilitas usaha dapat terjaga, risiko perselisihan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat diminimalkan, serta iklim investasi	Dinas Tenaga Kerja



			menjadi lebih baik, sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Transmigran Yang Ditempatkan sebesar 16,67%	Melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah transmigrasi. Dengan terbukanya peluang kerja dan usaha di kawasan tersebut, program ini mendorong penyerapan tenaga kerja serta mengurangi tekanan pengangguran di daerah asal.	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelatihan wirausaha muda dan forum pengembangan kapasitas pemuda	Meningkatkan pengembangan kapasitas daya saing pemuda di sektor ekonomi	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi pemanfaatan/pelindungan HAKI untuk ekonomi kreatif	Memberikan kepastian hukum kepada pelaku kegiatan ekonomi kreatif sehingga menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor ekonomi potensial	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan bimbingan teknis baik pengembangan sumber daya pariwisata maupun ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan UMKM melalui pelatihan dan fasilitasi pemasaran	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Dinas Koperasi dan UM
	Program Pengembangan UMKM	Pelatihan bagi UMKM khususnya untuk wanita (Bang SAPRI / Pengembangan Usaha Wanita Mandiri)	Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan	Dinas Koperasi dan UM

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2025



Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah sebesar Rp. 8.934.517.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.308.599.112,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja.

Tabel 2.79
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	105,67	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.952.357.995,00	1.483.406.346,00	75,98
			Program Penempatan Tenaga Kerja	1.560.858.450,00	1.513.360.401,00	96,96
			Program Hubungan Industrial	1.313.281.350,00	1.275.792.193,00	97,15
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	73.136.855,00	67.262.464,00	91,97
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.384.584.200,00	1.378.461.358,00	99,56
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	8.450.000,00	8.183.000,00	96,84
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.348.855.000,00	1.343.732.760,00	99,62
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	255.490.850,00	225.868.486,00	88,41
			Program Pengembangan UMKM	1.037.503.000,00	1.012.532.104,00	97,59



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Total	8.934.517.700,00	8.308.599.112,00	92,99
			Tingkat efisiensi			12,68

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 105,67% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 92,99%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12,68. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Dengan total pagu anggaran sebesar Rp 8.934.517.700,00 dan realisasi sebesar Rp 8.308.599.112,00, terdapat penghematan atau sisa anggaran sebesar Rp 625.918.588,00 atau sekitar 7,01%. Efisiensi ini menunjukkan bahwa program-program ketenagakerjaan seperti pelatihan berbasis kompetensi, bursa kerja, maupun pemberdayaan wirausaha dapat dilaksanakan secara efektif tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi dana, sehingga prinsip *value for money* tetap terjaga dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

2) Efisiensi SDM

Optimalisasi peran Petugas Pengantar Kerja yang kini mampu bekerja lebih produktif dan menjangkau sasaran lebih luas. Dengan adanya sistem digitalisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (SIAPkerja) yang diintegrasikan dengan aplikasi SANG KAPTEN, seorang petugas pengantar kerja kini dapat memproses penempatan jauh lebih banyak pencari kerja dibandingkan sistem manual sebelumnya. Digitalisasi ini mengotomatisasi tahapan pemetaan bakat, kurasi lowongan, hingga verifikasi dokumen di LTSA, sehingga beban administratif



petugas berkurang dan mereka dapat lebih fokus pada fungsi strategis seperti konseling karier yang mendalam. Sinergi sistem pusat dan daerah ini memastikan bahwa kapasitas SDM aparatur dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja menjadi lebih efektif, yang secara riil mempercepat penurunan angka pengangguran melalui pengisian pos-pos pekerjaan secara masif dan akurat.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui percepatan proses penyelarasan (*link and match*) antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar industri. Melalui digitalisasi layanan pada aplikasi SANG KAPTEN, durasi birokrasi dalam pencarian kerja, pendaftaran magang, dan akses pelatihan vokasi dapat dipangkas secara signifikan, sehingga angkatan kerja baru tidak perlu menunggu waktu lama untuk terserap ke sektor produktif. Selain itu, integrasi data lowongan kerja yang bersifat *real-time* memungkinkan Pemerintah Kabupaten Blitar merespons dinamika ketenagakerjaan dengan lebih lincah, meminimalkan durasi pengangguran friksional, dan memastikan setiap potensi sumber daya manusia dapat terdistribusi ke sektor pertanian, perdagangan, maupun jasa secara lebih cepat dan tepat sasaran.

8. Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penduduk Miskin. Persentase penduduk miskin adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Pengukuran ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar dengan pendekatan kebutuhan dasar. Artinya, seseorang dikategorikan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya,



baik makanan maupun non-makanan. Persentase penduduk miskin dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan total penduduk, lalu dikalikan 100%.

Capaian kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan adalah sebesar 104,06% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.80
Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,89-7,17	7,57	104,06% (Pembagi menggunakan target rentang bawah)
Capaian Kinerja Sasaran					104,06%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian kinerja dalam upaya Menurunnya Tingkat Kemiskinan yang diukur melalui indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar menunjukkan hasil yang positif. Realisasi angka kemiskinan sebesar 7,57% berhasil berada dalam rentang target yang telah ditetapkan, menandakan bahwa strategi dan program pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pada tahun 2025, tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar sebanyak 89,04 ribu jiwa dari total populasi sebesar 1.268.369 jiwa. Kondisi ini dipengaruhi oleh penetapan Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp 417.158 per kapita per bulan, yang mengalami kenaikan sebesar 2,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai GK tersebut merupakan instrumen pengukur yang merepresentasikan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) guna mencerminkan standar pengeluaran minimum penduduk di wilayah Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Blitar didorong oleh efektivitas program perlindungan sosial yang tepat sasaran serta sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat



dan daerah. Pada tahun 2025, integrasi bantuan sosial ini terbukti memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan hidup masyarakat, di mana dari 87.207 jiwa keluarga fakir miskin, terdapat 288 jiwa yang secara spesifik telah berhasil memenuhi standar kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri. Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan pemberian jaminan kesehatan gratis melalui program JKN-KIS, terutama bagi masyarakat yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah (PBID). Cakupan kesehatan semesta ini secara signifikan mampu menekan beban pengeluaran non-makanan rumah tangga miskin, sehingga risiko guncangan ekonomi akibat biaya kesehatan dapat diminimalisir.

Selain intervensi sosial, faktor krusial lainnya adalah keberhasilan pengendalian inflasi daerah, terutama pada komoditas pangan unggulan lokal seperti beras, telur ayam ras, dan cabai. Melalui koordinasi aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), stabilitas harga di pasar-pasar tradisional terjaga dengan baik sehingga daya beli masyarakat berpendapatan rendah tetap terlindungi dari fluktuasi harga pasar. Kondisi ini didukung oleh pemulihan sektor pertanian dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi Kabupaten Blitar melalui peningkatan produktivitas serta perluasan akses permodalan bagi petani dan peternak milenial. Sinergi antara perbaikan infrastruktur jalan poros desa untuk kelancaran distribusi hasil bumi dengan pelatihan digital bagi pelaku UMKM telah berhasil menciptakan lapangan kerja mandiri, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan riil masyarakat perdesaan secara berkelanjutan.

Kinerja dari Persentase Penduduk Miskin secara tren 4 (empat) tahun terakhir di tahun 2022-2025 berhasil turun. Tren peningkatan kinerja ini yang berhasil menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan strategis dengan eksekusi program di lapangan yang semakin adaptif terhadap potensi lokal. Penurunan yang



berkelanjutan ini membuktikan bahwa penguatan pada sektor-sektor unggulan, seperti peternakan ayam petelur dan pertanian hortikultura, telah mampu menciptakan stabilitas pendapatan bagi masyarakat di perdesaan. Hal ini didukung pula oleh integrasi bantuan sosial yang lebih akurat dan perluasan akses kesehatan gratis. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.81
Perkembangan kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,89-7,17	7,57	8,16	8,69	8,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian kinerja pada sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 90,29% dari target tahun terakhir RPJMD. Dengan capaian yang hampir mendekati target akhir tersebut diharapkan kondisi pada akhir RPJMD dapat terpenuhi dan kantong-kantong kemiskinan di wilayah perdesaan dapat terhapuskan sepenuhnya, sehingga penduduk miskin dapat dientaskan dan memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan melalui diversifikasi usaha mikro dan akses permodalan yang lebih inklusif. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.82
Pencapaian kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	6,90-6,08	7,57	90,29% (Pembagi menggunakan target rentang bawah)
Capaian Kinerja Sasaran					90,29%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar berada di atas Provinsi Jawa Timur dengan selisih sebesar 1,93%. Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Blitar memiliki kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih stabil di atas garis kemiskinan dibandingkan kondisi makro provinsi secara umum. Selain itu, struktur ekonomi masyarakat di Kabupaten Blitar memiliki kemandirian yang lebih kuat terhadap potensi gejolak inflasi maupun perubahan harga komoditas pangan yang ada. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.83
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,57	9,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan langkah-langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di tahun 2025 hingga berhasil tercapai 7,57%. Strategi utama yang dijalankan fokus pada tiga pilar penting, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan warga, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan di tingkat desa.

Dalam pilar pengurangan beban pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Blitar secara konsisten menyalurkan bantuan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar, mulai dari Bantuan Kebutuhan Siswa Miskin (BKSM) untuk jenjang SD hingga mahasiswa, bantuan seragam sekolah guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, program jaminan kesehatan bagi pekerja informal dan penyaluran bantuan pangan serta tunai dari dana desa menjadi bantalan ekonomi krusial saat nilai Garis Kemiskinan naik menjadi Rp417.158. Intervensi ini memastikan agar masyarakat



rentan tidak terperosok lebih dalam di bawah garis kemiskinan akibat fluktuasi harga komoditas pokok.

Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui optimalisasi sektor unggulan daerah, khususnya penguatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan UMKM melalui kemudahan akses permodalan serta pelatihan manajerial. Pemerintah Kabupaten Blitar secara intensif melakukan sinkronisasi data melalui pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar pemberian bantuan alat kerja dan modal usaha tepat sasaran bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperbaiki Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,21 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,27, sehingga jarak pengeluaran antar penduduk miskin semakin mengecil dan kelompok masyarakat di lapisan terbawah memiliki daya ungkit ekonomi yang lebih kuat untuk melewati ambang batas Garis Kemiskinan secara mandiri.

Terakhir, perbaikan infrastruktur pemukiman menjadi fokus untuk menghilangkan kantong kemiskinan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak di 19 desa prioritas. Pemerintah Kabupaten Blitar juga mendorong kolaborasi dengan Pemerintah Desa untuk mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru melalui dana pemberdayaan.

Hambatan utama dalam akselerasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Blitar adalah tingginya ketergantungan struktur ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian dan peternakan rakyat, khususnya komoditas unggas yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pakan serta harga jual di tingkat produsen. Kondisi ini menciptakan kerentanan ekonomi bagi masyarakat di sentra-sentra produksi, di mana penduduk kategori "rentan miskin" sangat mudah kembali jatuh ke bawah Garis Kemiskinan Rp 417.158 akibat gejolak



pasar yang tidak menentu. Tekanan inflasi pada komoditas pangan pokok di pasar lokal turut menjadi faktor determinan yang secara langsung menggerus daya beli masyarakat desil terbawah, sehingga sebagian besar pendapatan masyarakat habis terserap hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar.

Secara geografis, topografi wilayah Blitar bagian selatan yang berbukit serta keterbatasan sumber daya air pada musim tertentu menjadi kendala signifikan dalam upaya pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Disparitas infrastruktur di wilayah ini mengakibatkan tingginya biaya logistik dan terbatasnya aksesibilitas masyarakat menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dalam angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,21. Kondisi lahan yang kurang produktif di wilayah tersebut membatasi ruang diversifikasi penghasilan bagi petani, sementara kebutuhan pengeluaran ekstra untuk akses air bersih dan sanitasi layak menambah beban ekonomi rumah tangga, yang pada akhirnya memperlambat laju penurunan kemiskinan dari perspektif non-pendapatan.

Selain kendala ekonomi dan fisik, tantangan sosiologis muncul dari rendahnya kesadaran masyarakat penerima manfaat untuk mengakses layanan standar, baik di sektor kesehatan maupun jaminan sosial. Kurangnya literasi dan informasi yang diterima masyarakat mengenai jenis serta mekanisme layanan yang disediakan Pemerintah Daerah mengakibatkan cakupan layanan tidak mencapai 100%, sehingga penanganan terhadap masyarakat miskin menjadi kurang optimal. Hal ini menyebabkan upaya penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada angka 0,27 cenderung berjalan lambat, karena intervensi pemerintah seringkali terkendala oleh hambatan komunikasi dan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat yang berada di lapisan paling bawah.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan penguatan strategi intervensi melalui konvergensi



program penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi antar-Perangkat Daerah. Fokus utama diarahkan pada stabilitas daya beli masyarakat melalui penguatan lumbung pangan desa dan pengendalian inflasi daerah secara mikro, khususnya di wilayah sentra produksi pertanian dan peternakan. Selain itu, pemerintah akan memperluas cakupan perlindungan sosial bagi kelompok non-potensial seperti lansia tunggal dan disabilitas berat guna memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara berkelanjutan tanpa terpengaruh fluktuasi ekonomi.

Upaya perbaikan kualitas kemiskinan juga dilakukan dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Blitar bagian selatan guna menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Langkah nyata yang diambil meliputi peningkatan akses air bersih, sanitasi layak, serta perbaikan konektivitas jalan desa untuk memangkas biaya logistik masyarakat pelosok menuju pusat pasar. Secara paralel, pemerintah akan melakukan transformasi sistem informasi kemiskinan daerah yang lebih adaptif dan *real-time* untuk memitigasi *inclusion* dan *exclusion error*, sehingga pemberian bantuan modal usaha serta alat produksi dapat menyasar kelompok desil terendah secara lebih presisi.

Untuk mengatasi hambatan sosiologis, Pemerintah Kabupaten Blitar akan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi publik melalui penguatan peran fasilitator desa dan digitalisasi informasi layanan hingga ke tingkat RT/RW. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan standar dan jaminan sosial, sehingga cakupan pelayanan untuk masyarakat miskin dapat mencapai target maksimal. Melalui sinergi komunikasi yang lebih efektif, diharapkan seluruh lapisan masyarakat miskin mendapatkan informasi yang utuh mengenai hak-hak layanan mereka, yang pada akhirnya akan mempercepat penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menuju angka yang lebih inklusif dan merata.



Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.84
Program Penujangan Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti dan juga didukung oleh kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten	Penyediaan data DTSEN, PBI-JKN dan PPKS valid dan update untuk ketepatan sasaran program	Dinas Sosial
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berkualitas, sesuai standar dan terjangkau	Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk masyarakat kurang mampu melalui jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Promosi Kesehatan kepada Rumah Tangga untuk Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat rumah tangga kepada seluruh	Dinas Kesehatan



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
			golongan masyarakat	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa miskin serta pendidikan kesetaraan	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan RLS dan HLS serta penuntasan wajib belajar	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberian bantuan bibit sayuran dan greenhouse; melakukan pemantauan stok pangan; pemantauan harga dan pasokan pangan; penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); kerjasama dengan Bulog untuk pengadaan dan penyimpanan beras; pelaksanaan sosialisasi penganeekaragaman pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); adanya program provinsi jatim gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi (genius) di wilayah Kabupaten Blitar	Peningkatan ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan dan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pangan agar tetap terjangkau	Dinas Pertanian
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan	Mitigasi terhadap kejadian rawan pangan pada wilayah- wilayah rentan rawan pangan	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	pendampingan langsung membantu peternak menerapkan manajemen	Peningkatan kapasitas peternak agar kegiatan usaha peternakannya berkelanjutan	Dinas Peternakan dan Perikanan



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
		ternak yang baik, dan sosialisasi perizinan sektor peternakan	dan berdaya saing sehingga menjaga ketersediaan lapangan kerja sektor peternakan	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Fasilitasi pengelolaan penangkapan ikan melalui restocking mendukung produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Darat (PUD); pemberdayaan Meningkatkan kemampuan teknis dan akses sarana usaha nelayan kecil, Optimalnya fungsi TPI sebagai pusat pelelangan meningkatkan penyerapan dan distribusi hasil tangkapan.	Peningkatan kapasitas bagi nelayan kecil baik PUD ataupun nelayan	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil meningkatkan kemampuan pembudidaya, sehingga mendorong peningkatan produksi ikan budidaya.	Peningkatan kapasitas bagi pembudidaya ikan kecil agar berkembang dan tidak masuk dalam posisi rentan miskin	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan mencegah praktik penangkapan yang merusak dan ilegal, sehingga menjaga ketersediaan sumber daya ikan.	Menjaga kelestarian perikanan darat dan laut agar dapat menjadi sumber mata pencaharian berkelanjutan bagi nelayan kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan	Pembinaan mutu dan keamanan hasil	Meningkatkan daya saing	Dinas Peternakan dan Perikanan



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
	Pemasaran Hasil Perikanan	perikanan berperan sebagai penunjang peningkatan produksi perikanan karena memastikan bahwa hasil tangkapan dan budidaya memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sehingga dapat diterima pasar.	produk olahan hasil perikanan	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelolaan, peningkatan, pemeliharaan dan revitalisasi sarana distribusi (pasar daerah) yang memadai, tertata, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Menjaga perputaran ekonomi di wilayah dengan mewujudkan sarana distribusi perdagangan yang nyaman dan memadai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pemantauan harga dan stok barang penting pada pasar rakyat, dan operasi pasar	Menciptakan stabilitas harga dan tersedianya stok bahan pokok dan barang penting dalam keadaan cukup dan tetap terjangkau bagi masyarakat.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Pendampingan dan pembinaan produk potensial ekspor	Meningkatkan laju pertumbuhan perdagangan besar sehingga menjaga/ meningkatkan ketersediaan lapangan kerja	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelatihan Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Promosi bagi UMKM/IKM	Meningkatkan omset UMKM dan IKM agar sustainable dan menjaga /meningkatkan ketersediaan lapangan kerja	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan	Penyusunan dokumen	Mendorong pertumbuhan	Dinas Perindustrian

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
	Dan Pembangunan Industri	rencana pengembangan industri (RPIK), dan pelatihan industri pengolahan makanan bagi IKM, pelatihan manajerial IKM, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal, merk dagang, uji kandungan tar dan nikotin,	industri yang siap dipasarkan secara kompetitif ke skala regional dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar	dan Perdagangan
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pendataan yang akurat, penguatan kemitraan, kemudahan perizinan usaha, penguatan kelembagaan, serta koordinasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada usaha mikro termasuk usaha yang dilakukan oleh perempuan	Peningkatan omzet usaha mikro dan kapasitas manajemen usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah Domestik Layak Dan Aman	Sebagai penunjang/ mendukung tercapainya rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air limbah secara layak dan aman	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Peningkatan jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Dan Aman	Sebagai penunjang/ mendukung tercapainya rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui	Dinas PUPR



Sasaran	Program	Output	Dukungan Program Terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
			SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan jaringan jalan	Peningkatan akses antar wilayah sebagai sarana penunjang ekonomi	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Perumahan	Rehabilitasi dan pembangunan Rumah terdampak bencana	Pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Pemenuhan kebutuhan dasar warga rentan/tidak mampu	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Mediasi dan fasilitasi redistribusi lahan hutan melalui PPTPKH dan eks perkebunan	Memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan hutan dan eks perkebunan bagi warga penggarap	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah) 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan adalah sebesar Rp. 453.249.787.907,82 dengan realisasi sebesar Rp. 335.924.773.144,91. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan.

Tabel 2.85
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1		104,06%	Program Rehabilitasi Sosial	1.140.653.100,00	684.024.638,00	80,32



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.601.182.500,00	10.114.264.200,00	95,47
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.265.377.442,50	88.471.604.968,70	89,13
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	558.397.008,00	525.454.508,00	94,10
			Program Pengelolaan Pendidikan	163.307.554.221,39	152.297.755.926,17	93,26
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	750.106.101,00	657.689.829,00	87,68
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.080.100,00	39.429.220,00	98,38
			Program Penyuluhan Pertanian	173.682.200,00	160.172.700,00	92,228
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	81.397.200,00	80.407.500,00	98,78
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	251.412.200,00	187.995.728,00	74,78
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3.729.900,00	3.687.500,00	98,86
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.731.150,00	20.224.000,00	97,55
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.574.787.500,00	3.052.747.158,04	85,40
			Program Stabilisasi Harga Barang	26.893.730,00	26.855.000,00	99,86



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
			Program Pengembangan Ekspor	421.439.120,00	413.941.240,00	98,22
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.583.149.483,00	1.571.627.668,00	99,27
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	255.490.850,00	225.868.486,00	88,41
			Program Pengembangan UMKM	1.037.503.000,00	1.012.532.104,00	97,59
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum	6.665.951.670,00	6.018.683.500,00	90,29
			Program Penyelenggaraan Jalan	138.659.118.465,93	48.277.620.235,00	34,82
			Program Pengembangan Perumahan	814.063.000,00	212.705.404,00	26,13
			Program Kawasan Permukiman	19.273.119,566,00	18.552.870,476,00	96,26
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	365.750.400,00	337.092.510,00	92,16
			Total	453.249.787.907,82	335.924.773.144,91	74,11
			Tingkat efisiensi			29,95

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 101,59% sedangkan realisasi



anggaran diperoleh sebesar 74,11%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 29,95. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Diwujudkan melalui strategi konvergensi anggaran lintas sektor yang memastikan tidak adanya tumpang tindih alokasi dana untuk sasaran penerima manfaat yang sama. Hal ini diimplementasikan dengan mensinkronkan berbagai sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, Dana Desa, maupun bantuan Pemerintah Pusat, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih terukur terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, efisiensi dilakukan dengan mengalihkan beban biaya operasional administratif yang bersifat seremonial ke dalam program intervensi langsung seperti bantuan modal usaha dan perbaikan RTLH, yang secara teknis mampu menekan angka kemiskinan.

2) Efisiensi SDM

Diwujudkan melalui pola kerja kolaboratif antar-Perangkat Daerah dalam wadah TKPK yang mampu mengonvergensi program tanpa ego sektoral, didukung optimalisasi tenaga pendamping lapangan yang menjalankan fungsi verifikasi data P3KE secara multitugas. Pemanfaatan sistem informasi terpadu juga berhasil memangkas jalur birokrasi sehingga beban kerja administratif berkurang, sementara aparatur di tingkat kecamatan diberdayakan sebagai fasilitator sosial mandiri yang merangkap peran sebagai penyebar informasi layanan sekaligus motivator akses jaminan sosial bagi masyarakat.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui percepatan siklus pemutakhiran data dan integrasi layanan birokrasi yang memangkas durasi intervensi terhadap masyarakat rentan. Hal ini diimplementasikan melalui



penggunaan sistem basis data terpadu yang memungkinkan validasi data P3KE dilakukan secara *real-time* dari tingkat desa, sehingga jeda waktu antara identifikasi masalah lapangan dengan penyaluran bantuan sosial maupun modal usaha menjadi jauh lebih singkat. Selain itu, penerapan mekanisme koordinasi satu pintu dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menghilangkan prosedur birokrasi yang repetitif antar-instansi, yang berdampak pada akselerasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan memastikan target penurunan angka kemiskinan.

9. Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Infrastruktur. Indeks Infrastruktur adalah ukuran yang mengevaluasi kondisi dan kinerja infrastruktur di suatu wilayah, seperti akses terhadap fasilitas dasar, kualitas fisik, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks infrastruktur dihitung dengan menghitung rata-rata dari capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan sarana prasarana jalan, jalan kondisi mantab, irigasi kondisi baik, cakupan air bersih, dan cakupan sanitasi.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur adalah sebesar 97,23% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.86
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	80,09	77,87	97,23%
Capaian Kinerja Sasaran					97,23%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Blitar pada tahun 2025 mencapai angka 77,87 dari target yang ditetapkan sebesar



80,09. Angka ini merupakan hasil komposit dari berbagai indikator teknis, di mana cakupan air bersih (90,72%) dan cakupan sanitasi (90,45%) menjadi kontributor utama yang telah mencapai level sangat tinggi, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat. Pada sektor konektivitas, jalan kondisi mantap telah menyentuh angka 80,62%, yang didorong oleh percepatan jalur Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Brongkos–Ngembul dan sinkronisasi akses Jalur Lintas Selatan (JLS). Namun, capaian indeks secara keseluruhan tertahan oleh tingkat pemenuhan sarana prasarana jalan yang berada di angka 69,91% serta irigasi kondisi baik sebesar 57,63%, yang dipengaruhi oleh kendala topografi ekstrem di Blitar bagian selatan serta dampak anomali cuaca yang menghambat optimalisasi fisik di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan infrastruktur melalui strategi pemeliharaan rutin yang terintegrasi dengan aksesibilitas fasilitas publik seperti RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan pusat-pusat agribisnis. Tidak tercapainya target Indeks Infrastruktur ini dipengaruhi oleh pergeseran fokus anggaran untuk mendukung lonjakan sektor pariwisata yang mencapai 3,7 juta kunjungan, sehingga prioritas penanganan dialihkan untuk memastikan keamanan jalur-jalur wisata utama. Meskipun kinerja irigasi dan sarana prasarana jalan masih memerlukan akselerasi, tingginya capaian pada sektor air minum dan sanitasi memberikan fondasi kesehatan masyarakat yang kuat.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dengan indikator Indeks Infrastruktur mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2022-2024. Hal ini dikarenakan adanya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur yang berfokus pada konektivitas akses wisata dan sentra ekonomi, serta keberhasilan akselerasi pemenuhan layanan dasar melalui peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi yang secara konsisten melampaui standar pelayanan



minimal di tingkat desa. Namun, pada tahun 2024 ke 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh tingginya beban pemeliharaan infrastruktur akibat dampak iklim yang tidak menentu serta pergeseran fokus fiskal untuk mendukung operasional layanan publik skala besar. Meskipun sektor air bersih dan sanitasi memiliki kontribusi nilai yang tinggi, penurunan nilai komposit dipicu oleh belum optimalnya pemulihan infrastruktur pengairan yang hanya mencapai 57,63% kondisi baik, serta ketertinggalan penyediaan sarana prasarana jalan seperti marka dan penerangan yang belum sebanding dengan laju pertumbuhan jalan mantap. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.87
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	80,09	77,87	79,99	79,10	74,03

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Selain itu, capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 96,39% dari target tahun terakhir RPJMD. Meskipun pada awal tahun perencanaan di tahun 2025 capaian Indeks Infrastruktur belum mencapai target, namun capaian 96,39% terhadap capaian akhir RPJMD ini termasuk tinggi. Tingginya angka capaian di awal periode ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan infrastruktur Kabupaten Blitar telah berjalan sangat progresif untuk menuntaskan target jangka menengah lebih cepat dari jadwal. Kondisi ini dipicu oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pemenuhan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah strategis pada tahun pertama. Meskipun secara akumulasi telah mendekati target akhir, fokus ke depan tetap diperlukan untuk menyempurnakan kualitas fungsional pada sektor pengairan dan



perlengkapan jalan guna memastikan seluruh dimensi infrastruktur mencapai kinerja yang tinggi di akhir periode RPJMD. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.88
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	80,79	77,87	96,39%
Capaian Kinerja Sasaran					96,39%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kabupaten Kota Lain seperti di Kota Kediri, capaian kinerja Indeks Infrastruktur di Kabupaten Blitar lebih unggul sebesar 1,12 poin dari Kota Kediri yang mencapai indeks sebesar 76,75. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mencapai kinerja infrastruktur yang lebih kompetitif meskipun memiliki tantangan geografis dan luas wilayah yang jauh lebih kompleks daripada wilayah perkotaan seperti di Kota Kediri. Keunggulan ini membuktikan bahwa strategi pemerataan pembangunan yang diterapkan mampu menjangkau wilayah pelosok secara efektif, sehingga disparitas layanan infrastruktur antara pusat pemerintahan dan wilayah pelosok desa dapat diminimalisir. Kondisi ini mempertegas posisi Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola infrastruktur yang baik dan berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan publik yang unggul di tingkat regional. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan Kota Kediri.

Tabel 2.89
Perbandingan capaian kinerja dengan Kota Kediri

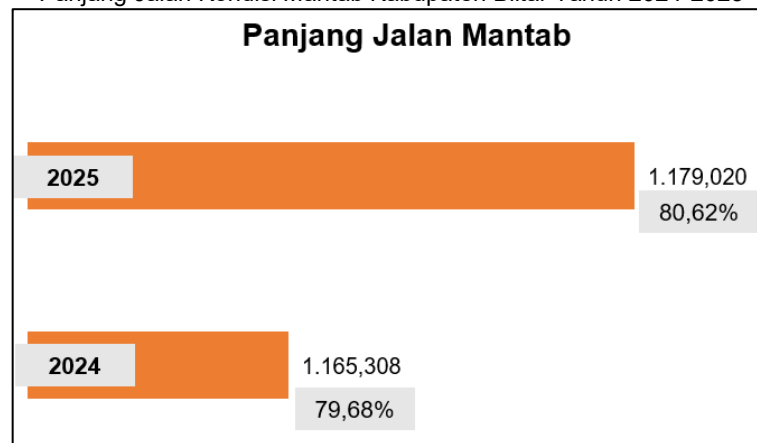
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kota Kediri
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	77,87	76,75

Sumber: Bappedalitbang, 2025



Dalam rangka pencapaian kinerja Indeks Infrastruktur, Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan akselerasi signifikan pada sektor konektivitas wilayah dengan memprioritaskan peningkatan jalan kondisi mantap melalui sinergi pendanaan antara APBD dan anggaran pusat. Upaya ini difokuskan pada jalur-jalur strategis ekonomi dan akses pariwisata guna memastikan distribusi logistik berjalan lancar. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan panjang jalan mantap dari tahun 2024 sebesar 13,71 Km. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan guna memudahkan operasional transportasi masyarakat.

Gambar 2.21
Panjang Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025



Pembangunan fisik jalan tersebut juga diintegrasikan dengan pemenuhan sarana prasarana jalan, seperti pemasangan marka, rambu, dan penerangan jalan umum, demi menjamin standar keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan di wilayah Kabupaten Blitar. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan aksesibilitas publik diwujudkan melalui penyediaan Prasarana Transportasi berupa Terminal Tipe C yang representatif serta pembangunan Halte sebagai sarana pendukung pelayanan Bus Angkutan Pelajar. Kehadiran infrastruktur pendukung ini bertujuan untuk memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat serta menjamin layanan transportasi pendidikan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi para pelajar di wilayah Kabupaten Blitar.



Pada sektor layanan dasar, pemerintah daerah berkomitmen memperluas cakupan air bersih dan cakupan sanitasi melalui pembangunan infrastruktur berbasis komunitas serta perluasan jaringan distribusi hingga ke wilayah desa. Program ini dijalankan dengan mengedepankan pola padat karya untuk memastikan akses air minum layak dan sistem pembuangan limbah yang sehat menjangkau kawasan padat penduduk dan wilayah perdesaan. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung program penurunan angka stunting melalui penyediaan lingkungan yang higienis.

Sebagai pilar pendukung ketahanan pangan daerah, upaya optimalisasi jaringan irigasi kondisi baik dilakukan melalui rehabilitasi saluran primer dan sekunder secara berkala. Pemerintah memastikan distribusi air ke lahan-lahan pertanian produktif tetap stabil untuk mendukung produktivitas sektor pertanian yang menjadi unggulan daerah. Penguatan infrastruktur pengairan ini secara langsung berdampak pada peningkatan indeks pertanaman dan efisiensi biaya produksi di tingkat petani, sehingga ketahanan sektor agribisnis tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim.

Tantangan utama dalam pemenuhan target infrastruktur bersumber dari kondisi geografis wilayah Kabupaten Blitar yang sangat beragam, terutama di area perbukitan bagian selatan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana longsor. Faktor alam ini diperparah dengan adanya anomali cuaca berupa intensitas curah hujan ekstrem yang sering kali mengganggu linimasa pengerjaan fisik di lapangan serta mempercepat kerusakan dini pada struktur jalan yang sedang dalam masa pemeliharaan. Kondisi ini menuntut perencanaan teknis yang lebih kompleks dan durasi pengerjaan yang lebih fleksibel, yang terkadang sulit disinkronkan dengan target waktu yang ketat.

Dari sisi manajerial dan fiskal, keterbatasan ruang anggaran daerah menjadi hambatan dalam mengakomodasi seluruh usulan



pembangunan infrastruktur yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Luasnya jangkauan wilayah pelayanan berbanding terbalik dengan ketersediaan dana, sehingga pemerintah daerah harus melakukan skala prioritas melalui analisis dampak ekonomi yang tajam. Dampaknya, beberapa program pemeliharaan rutin pada ruas jalan pemukiman serta jaringan irigasi tersier belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan serentak di seluruh wilayah, yang menuntut manajemen ekspektasi publik yang lebih intensif.

Selain itu, hambatan teknis muncul pada proses sinkronisasi utilitas dan pembebasan hambatan di lapangan, seperti pemindahan jaringan kabel atau pipa eksisting yang berhimpitan dengan lokasi pelebaran jalan atau saluran irigasi. Koordinasi lintas instansi penyedia layanan utilitas sering kali memakan waktu dalam tahap sinkronisasi jadwal pengerjaan, sehingga pengerjaan fisik konstruksi tidak dapat langsung dipacu secara maksimal. Hal yang sama terjadi pada perluasan layanan dasar, di mana tantangan teknis dalam mencari sumber air baku di wilayah kering serta penanaman jaringan perpipaan pada karakteristik lahan yang berbatu memerlukan biaya dan waktu koordinasi lapangan yang jauh lebih besar.

Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan percepatan pemenuhan sarana prasarana jalan secara terintegrasi melalui sinkronisasi program antara pembangunan fisik jalan dengan kelengkapan fasilitas keselamatan. Tindak lanjut utama difokuskan pada pengadaan dan pemasangan marka jalan, rambu lalu lintas, serta optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada ruas-ruas jalan yang telah mencapai kondisi mantap. Melalui penerapan sistem lelang dini dan penyusunan kalender kerja yang adaptif terhadap anomali cuaca, pemerintah memastikan bahwa kelengkapan sarpras ini berjalan beriringan dengan perbaikan aspal, sehingga fungsi jalan tidak hanya optimal secara teknis tetapi juga memberikan standar keamanan yang tinggi bagi seluruh pengguna jalan.



Selain penguatan fisik jalan, tindak lanjut diarahkan pada digitalisasi pemeliharaan aset dan penguatan fungsi prasarana transportasi melalui optimalisasi operasional Terminal Tipe C. Pemerintah daerah akan mengembangkan sistem pemetaan infrastruktur berbasis GIS (*Geographic Information System*) guna memantau kondisi jalan dan perlengkapan jalan secara *real-time* agar alokasi anggaran pemeliharaan menjadi lebih presisi. Langkah ini dibarengi dengan penyusunan standar pelayanan minimum dan penguatan koordinasi lintas sektoral guna memastikan seluruh aset prasarana transportasi memiliki status hukum yang jelas serta didukung oleh manajemen utilitas yang baik di lapangan.

Terakhir, untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah berkomitmen melakukan diversifikasi sumber pembiayaan dan penguatan pengawasan partisipatif. Upaya ini mencakup penguatan usulan dana transfer pusat serta optimalisasi kolaborasi dengan sektor swasta untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang di jalur logistik dan strategis. Di tingkat layanan dasar, perluasan jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah desa akan dipacu melalui inovasi teknologi tepat guna yang mampu mengatasi kendala geografis, sehingga pemerataan infrastruktur yang berkualitas dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Blitar.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.90
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan, dan	Meningkatkan mobilitas barang dan orang menjadi lebih efisien, mendukung	Dinas Perhubungan



		pengelolaan terminal Tipe C	konektivitas antar wilayah, serta meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur secara keseluruhan.	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Pengelolaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan serta sarana transportasi air yang aman, efisien, dan andal.	Dengan tersedianya layanan pelayaran yang baik, konektivitas antarwilayah dan distribusi barang serta jasa dapat berjalan lancar	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi	Peningkatan kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah Domestik Layak Dan Aman	Peningkatan kecukupan/ pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses air limbah secara layak dan aman	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Peningkatan jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Dan Aman	Peningkatan kecukupan/ pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Dinas PUPR
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur persampahan	Meningkatkan rasio infrastruktur persampahan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase jalan	Meningkatkan kondisi jalan mantap	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan, pemeliharaan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan	Dinas PUPR



		dan peningkatan jalan	jumlah panjang jalan mantap	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pemenuhan dan pemeliharaan PSU	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Progra Kawasan Permukiman	Pembangunan drainase dan jalan di kawasan permukiman kumuh	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur adalah sebesar Rp. 247.668.960.852,83 dengan realisasi sebesar Rp. 141.565.464.609,88. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur.

Tabel 2.91
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	97,23	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	41.152.876.106,90	38.810.531.744,58	94,31
			Program Pengelolaan Pelayaran	4.668.400,00	4.659.250,00	99,80
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.202.881.400,00	9.804.497.836,30	60,51
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum	6.665.951.670,00	6.018.683.500,00	90,29
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	250.981.000,00	238.157.000,00	94,89



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,74
			Program Penyelenggaraan Jalan	138.659.118.465,93	48.277.620.235,00	34,82
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	212.229.875.00	31.902.600,00	15,03
			Progra Kawasan Permukiman	19.273.119.566,00	18.552.870.476,00	96,26
			Total	247.668.960.852,83	141.565.464.609,88	57,16
			Tingkat efisiensi			40,07

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 97,23% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 57,16%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 40,07. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Diwujudkan melalui strategi prioritas penanganan titik kritis dan optimalisasi pemeliharaan rutin yang terpadu. Pemerintah Daerah berhasil menekan biaya pembangunan dengan menyinkronkan anggaran daerah dan pusat untuk percepatan jalur strategis (IJD dan akses JLS), sekaligus memaksimalkan program padat karya pada sektor layanan dasar (air bersih dan sanitasi). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan daya ungkit maksimal terhadap konektivitas wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan ruang fiskal.



2) Efisiensi SDM

Diwujudkan melalui optimalisasi fungsi pengawasan fungsional yang dilakukan secara kolaboratif oleh tim teknis lintas perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pola ini mengedepankan pembagian peran yang efektif antara tenaga perencana, pelaksana, dan pengawas dalam mengawal proyek strategis seperti peningkatan jalan dan jaringan air bersih, sehingga pengerjaan fisik tetap presisi dan tepat waktu. Dengan memaksimalkan kompetensi internal yang ada untuk menjangkau pengawasan hingga ke wilayah desa, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil menjaga kualitas infrastruktur tetap kompetitif tanpa bergantung pada penambahan jumlah personel di lapangan.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui akselerasi tahapan pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan secara *online* dan sinkronisasi jadwal pelaksanaan konstruksi sejak awal tahun anggaran. Strategi ini memungkinkan pengerjaan proyek strategis, seperti peningkatan kemantapan jalan dan jaringan air bersih, dapat dimulai lebih dini guna mengantisipasi kendala anomali cuaca serta kompleksitas geografis di wilayah desa. Dengan meminimalkan jeda administratif dan mengoptimalkan monitoring progres mingguan yang ketat, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil memastikan seluruh target fisik tuntas tepat waktu, sehingga manfaat infrastruktur dapat segera dirasakan oleh masyarakat tanpa tertunda oleh siklus birokrasi yang panjang.

10. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang menggambarkan kondisi



kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. IKLH tersusun dari beberapa indeks komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pengukuran IKLH pada level Kabupaten hanya menggunakan komponen IKA, IKU dan IKTL, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH dihitung dengan menggabungkan nilai indeks komponen menggunakan rumus pembobotan yang telah ditetapkan. Dengan rumus $IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKTL \times 0,219)$.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 98,27% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.92
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	71,43	98,27%
Capaian Kinerja Sasaran					98,27%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Capaian IKLH Kabupaten Blitar tahun 2025 dengan realisasi 71,43 dari target 72,69 menunjukkan kinerja yang baik meskipun belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Rendahnya angka Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 60,35 merupakan implikasi langsung dari masifnya alih fungsi lahan di wilayah penyangga, terutama konversi lahan hutan dan perkebunan menjadi kawasan permukiman serta tegalan di wilayah Blitar bagian utara dan selatan. Tekanan penduduk dan kebutuhan lahan pertanian yang tinggi menyebabkan luas tutupan vegetasi permanen berkurang, sehingga meskipun program penghijauan terus dilakukan, kecepatan pemulihan ekosistem belum mampu mengimbangi laju pembukaan lahan yang terjadi sepanjang tahun berjalan.



Pada aspek perairan, capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 75,09 mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan limbah domestik dan peternakan yang menjadi karakteristik ekonomi utama Kabupaten Blitar. Sebagai sentra peternakan unggas dan sapi perah nasional, aliran sungai di beberapa titik pantau sering kali terkontaminasi oleh limbah organik yang belum terolah sempurna, terutama pada musim penghujan di mana beban pencemaran meningkat akibat aliran permukaan. Kondisi ini diperberat dengan masih adanya aktivitas penambangan pasir tradisional di sepanjang aliran sungai yang berasal dari lereng Gunung Kelud, yang secara periodik memengaruhi parameter kekeruhan dan total padatan tersuspensi (TSS) dalam air sungai.

Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 74,03 dipengaruhi oleh peningkatan volume kendaraan bermotor di jalur utama penghubung Malang-Blitar-Tulungagung serta aktivitas industri pengolahan hasil pertanian. Meskipun kualitas udara secara umum masih dalam kategori baik berkat sirkulasi udara yang terbuka di wilayah pedesaan, konsentrasi polutan cenderung meningkat di pusat-pusat kecamatan yang padat aktivitas ekonomi.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2023-2025, sedangkan dari tahun 2022 ke 2023 sedikit mengalami penurunan capaian. Tren ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan lingkungan di Kabupaten Blitar telah melewati fase kritis dan kini berada dalam tren pemulihan yang stabil. Penurunan pada tahun 2022-2023 menjadi sinyal adanya tekanan tinggi dari aktivitas ekonomi pasca-pandemi, namun kenaikan konsisten selama tiga tahun terakhir (2023-2025) membuktikan efektivitas penguatan pengawasan limbah peternakan dan program rehabilitasi lahan yang dijalankan secara masif. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:



Tabel 2.93
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	71,43	64,64	64,27	66,80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 97,73% dari target tahun terakhir RPJMD. Capaian yang hampir mendekati target akhir tersebut membuktikan bahwa perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar sangat akurat dan program yang dijalankan memiliki daya ungkit yang cepat. Realisasi sebesar 97,73% di awal periode menunjukkan bahwa kebijakan eksisting, seperti pengawasan limbah peternakan dan konservasi lahan, telah memberikan dampak yang masif dan terukur. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fokus pada penguatan kualitas dan keberlanjutan fungsi lingkungan di sisa periode RPJMD. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.94
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,09	71,43	97,73%
Capaian Kinerja Sasaran					97,73%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur dengan selisih sebesar 2 poin. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan dan pelestarian ekosistem di Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan yang lebih kompleks



dibandingkan rata-rata capaian di tingkat regional. Selisih 2 poin tersebut mengindikasikan perlunya akselerasi pada kebijakan pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan yang lebih terintegrasi. Meskipun pada level Kabupaten terdapat tren perbaikan, akselerasi pertumbuhan industri dan intensitas aktivitas pertanian di Kabupaten Blitar memberikan beban ekologis yang signifikan, sehingga menuntut adanya penguatan pengawasan terhadap limbah serta perluasan kawasan ruang terbuka hijau guna mengejar keteringgalan standar kualitas lingkungan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.95
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,43	73,43

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dalam Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Blitar tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai Upaya. Dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap penanggung jawab usaha, khususnya pada sektor peternakan sapi perah dan unggas yang merupakan komoditas unggulan daerah. Langkah ini diperkuat dengan inovasi Getar Kasih (Gerakan Terpadu Kali Bersih) yang mengintegrasikan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha untuk lebih disiplin dalam mengelola limbah domestik maupun limbah peternakan. Selain itu dilaksanakan uji kualitas air secara berkala guna menjamin akurasi data, sehingga beban pencemaran dari aktivitas peternakan dapat dikendalikan demi menjaga kualitas sumber daya air.

Terkait Indeks Kualitas Udara (IKU), pemerintah daerah melakukan pembinaan intensif terhadap pelaku usaha agar menaati



standar pengelolaan lingkungan sebagai langkah preventif terhadap pencemaran udara ambien. Pemerintah Kabupaten Blitar juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas titik pengambilan sampel dalam pengukuran kualitas udara secara berkala. Penambahan titik pantau ini memastikan data yang terhimpun semakin representatif dan akurat dalam menggambarkan kondisi udara wilayah, sehingga intervensi kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dalam menjaga kualitas udara tetap sehat.

Guna mendongkrak Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dilakukan akselerasi rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kewajiban pemegang IPPKH jalur Lintas Selatan (JLS), termasuk perawatan tanaman dan pelaksanaan *geotagging* untuk memastikan keberlangsungan vegetasi. Upaya ini diperkuat dengan penanaman pohon di sepanjang Pansela dan IJD Brongkos–Ngembul, serta penataan taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui inovasi Balitaron (Bayi Lahir Tanam Pohon). Melalui kombinasi rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan sisi jalan, pemerintah berupaya menciptakan keserasian ekosistem sekaligus mengurangi dampak pemanasan global melalui peningkatan luasan tutupan lahan secara masif.

Meskipun Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif, terdapat beberapa hambatan signifikan yang memengaruhi pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025. Hambatan utama dalam pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) terletak pada tingginya beban pencemaran organik yang berasal dari sektor peternakan rakyat, khususnya sapi perah dan unggas, yang belum seluruhnya terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah (IPAL) yang standar. Banyak peternak skala kecil yang masih memiliki keterbatasan modal dan lahan untuk membangun instalasi pengolahan, sehingga pada saat intensitas hujan tinggi, limbah seringkali hanyut ke aliran sungai dan menyebabkan fluktuasi



parameter kualitas air. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah domestik ke badan air di wilayah pemukiman padat masih menjadi tantangan yang memerlukan edukasi berkelanjutan secara masif.

Pada aspek Indeks Kualitas Udara (IKU), hambatan muncul seiring dengan meningkatnya volume kendaraan bermotor di sepanjang jalur utama yang menghubungkan Blitar dengan wilayah sekitarnya seperti Malang dan Kediri. Peningkatan mobilitas logistik dan ekonomi ini memicu kenaikan emisi gas buang, sementara jumlah titik pantau kualitas udara ambien masih perlu diperluas jangkauannya agar dapat mencakup seluruh zona industri dan pemukiman secara lebih representatif. Keterbatasan alat pemantau otomatis yang dapat memberikan data secara *real-time* juga menyebabkan respon terhadap penurunan kualitas udara di titik-titik tertentu terkadang mengalami keterlambatan.

Hambatan paling krusial dirasakan pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), di mana laju alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian semusim dan kawasan permukiman di wilayah Blitar bagian selatan masih terus terjadi. Kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi menyebabkan tingkat keberlangsungan hidup pohon yang ditanam melalui program seperti Balitaron belum sepenuhnya optimal tanpa pengawasan intensif. Selain itu, proses sinkronisasi data *geotagging* untuk lahan rehabilitasi DAS seringkali terkendala oleh keterbatasan sinyal komunikasi di daerah pelosok, sehingga validasi luasan tutupan lahan secara digital memerlukan waktu koordinasi yang lebih lama.

Sebagai langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun langkah tindak lanjut yang berfokus pada penguatan integrasi dan keberlanjutan program. Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Pemerintah



Kabupaten Blitar akan mengintensifkan inovasi Getar Kasih melalui pembangunan demplot IPAL komunal yang lebih luas di sentra peternakan sapi perah dan unggas guna memberikan contoh nyata pengelolaan limbah yang efektif bagi peternak rakyat. Penegakan hukum dan pengawasan teknis terhadap kepatuhan pembuangan limbah industri maupun domestik akan diperketat dengan melibatkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas sungai. Selain itu, digitalisasi sistem pemantauan kualitas air akan dikembangkan agar data pencemaran dapat dideteksi secara lebih cepat dan akurat sebagai dasar intervensi lapangan.

Pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU), tindak lanjut akan difokuskan pada perluasan titik pantau udara ambien di wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas transportasi dan industri baru. Pemerintah daerah berencana menambah frekuensi uji emisi kendaraan bermotor secara jemput bola di tingkat kecamatan serta mendorong pelaku usaha untuk memasang alat pengendali emisi yang lebih modern pada cerobong pabrik. Peningkatan luasan sabuk hijau di sepanjang koridor jalan utama juga akan dipercepat sebagai filter alami polutan udara guna menjamin kualitas udara tetap berada pada kategori sangat baik bagi kesehatan publik.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Pemerintah Kabupaten Blitar akan memperkuat pengawasan terhadap keberlangsungan hidup tanaman di area rehabilitasi DAS dan jalur infrastruktur strategis seperti JLS melalui optimalisasi teknologi *geotagging* yang terintegrasi dengan basis data spasial daerah. Inovasi Balitaron akan diekspansi dengan memperluas kemitraan bersama sektor swasta dan komunitas lokal dalam pemeliharaan bibit pohon di lahan kritis, guna memastikan setiap penanaman berkontribusi nyata pada luasan vegetasi permanen. Selain itu, pemerintah berkomitmen memperketat regulasi izin penggunaan lahan untuk menekan laju alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian semusim, sekaligus



mengakselerasi penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan demi terciptanya keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.96
Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran	Program	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan dan monitoring evaluasi Perencanaan lingkungan hidup (Jakstrada)	Adanya dokumen Jakstrada mempermudah penentuan target pengurangan dan penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Gerakan Terpadu Kali Bersih, pengujian kualitas air dan laut, Kampanye peringatan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas air dan udara di Kab Blitar	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan RTH publik	Menjaga RTH tetap lestari berfungsi sebagai paru-paru Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jasa pengangkutan dan pengolahan LB3 oleh pihak ketiga berizin serta pengelolaan aplikasi sistem pengolahan LB3 secara daring untuk efisiensi pengawasan	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	Pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan pemenuhan izin lingkungan,	Peningkatan ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan dampak kegiatan usaha mengelola	Dinas Lingkungan Hidup



	Lingkungan Hidup (PPLH)	izin PPLH dan PUU LH	limbahnya dengan baik	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan melalui pendampingan dan pembinaan kampung Proklam	Pemberdayaan masyarakat dalam hal kepedulian lingkungan untuk optimalisasi program pelestarian lingkungan melalui sinergi pemerintah dan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Motivasi bagi kelompok masyarakat untuk menjadi pegiat lingkungan, sekolah adiwiyata dan lembaga lain dalam aksi lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan pencemaran lingkungan	Sebagai salah satu media komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sarana Persampahan dan pengelolaan sampah di TPA/TPST/SPA	Upaya menjaga kelestarian lingkungan dari pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penyelenggaraan n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyelenggaraan n Car Free Day, penyelenggaraan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor	Pengurangan polusi udara	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan fasilitas persampahan (TPA)	Penyediaan infrastruktur pengelolaan persampahan	Dinas PUPR

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 50.052.000.356,90 dengan



realisasi sebesar Rp. 46.836.494.912,58. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.97
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	98,27	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.149.830.00 0,00	1.050.530.00 0,00	79,31
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.362.328.48 0,00	2.249.180.04 1,00	95,21
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.986.475.00 0,00	1.963.240.29 8,00	98,83
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	7.062.500,00	7.062.307,00	100,00
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	62.251.315,0 0	61.688.440,0 0	99,10
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	321.330.544, 00	321.210.000, 00	99,96
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	18.915.500,0 0	18.699.354,0 0	98,86
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.076.000,0 0	19.925.500,0 0	99,25
			Program Pengelolaan Persampahan	2.724.542.31 1,00	2.100.929.47 8,00	77,11
			Program Penyelenggaraan	41.148.207.7 06,90	38.805.872.4 94,58	94,31



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	250.981.000,00	238.157.000,00	94,89
			Total	50.052.000.356,90	46.836.494.912,58	93,58
			Tingkat efisiensi			4,69

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 98,27% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 93,58%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,69. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Realisasi belanja sebesar Rp 46.836.494.912,58 dari total pagu Rp 50.052.000.356,90 dimana terdapat penghematan anggaran sebesar Rp 3215505444,32 ini berhasil dicapai tanpa mengurangi kualitas output di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan capaian fisik IKLH yang tetap tinggi meskipun belum mencapai target melalui optimalisasi program swadaya masyarakat seperti Getar Kasih dan Balitron yang mampu menggerakkan partisipasi publik secara masif, sehingga beban biaya operasional yang ditanggung APBD menjadi lebih ringan namun tetap memberikan dampak ekologis yang nyata bagi kelestarian wilayah Kabupaten Blitar.

2) Efisiensi SDM

Dicapai melalui digitalisasi fungsi pengawasan yang mengubah pola kerja padat karya menjadi padat teknologi. Dengan mengintegrasikan sistem Geotagging, satu orang verifikator kini



mampu memvalidasi ribuan titik koordinat tanaman secara akurat dari meja kerja, menghilangkan kebutuhan akan tim survei lapangan dalam jumlah besar. Transformasi ini tidak hanya memangkas beban kerja fisik aparatur, tetapi juga memastikan kompetensi SDM terfokus pada analisis data strategis, sehingga target IKLH tetap tercapai secara optimal meski dengan jumlah personil yang terbatas.

3) Efisiensi Waktu

Penggunaan teknologi Geotagging dan sistem pelaporan *real-time* memungkinkan proses validasi data lapangan, yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu secara manual, kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari dengan akurasi yang lebih tinggi. Efisiensi waktu juga tercapai melalui sinkronisasi jadwal pengujian kualitas udara ambien dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pelaksanaan uji kualitas air yang terintegrasi dengan pihak ketiga, sehingga pengambilan sampel dan keluarnya hasil laboratorium dapat dilakukan secara simultan. Percepatan ini memastikan bahwa intervensi kebijakan, seperti penanganan pencemaran limbah peternakan maupun pemeliharaan pohon di jalur JLS, dapat diputuskan lebih dini sebelum terjadi kerusakan lingkungan yang lebih luas,

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM adalah Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta Sarana dan prasarana. IKM Pemerintah Kabupaten Blitar didapat dari rata-rata IKM dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah sebesar 101,04% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.98
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67	89,59*	101,04%
Capaian Kinerja Sasaran					101,04%

**Data sementara diambil dari <https://portalrb.menpan.go.id/>
Sumber: Bagian Organisasi, 2025*

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 yang menyentuh angka 89,59 menunjukkan performa yang sangat baik, melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,67. Angka 89,59 tersebut merupakan angka sementara yang diperoleh dari <https://portalrb.menpan.go.id/>. Rilis resmi melalui surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait IKM Kabupaten Blitar Tahun 2025 masih belum turun.

Keberhasilan yang melebihi target ini disebabkan oleh konsistensi transformasi digital dan penyederhanaan birokrasi yang mampu memangkas alur pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penguatan inovasi pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan spesifik masyarakat, baik melalui pengembangan aplikasi layanan mandiri maupun jemput bola ke wilayah-wilayah



terpencil. Integrasi berbagai inovasi ini, yang didukung oleh peningkatan standar perilaku petugas serta penyediaan sarana prasarana yang inklusif, terbukti efektif membangun kepercayaan publik yang lebih kuat melalui kepastian biaya dan waktu layanan di seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Blitar.

Berikut disajikan beberapa contoh inovasi pelayanan publik yang memberikan dampak terhadap capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Blitar pada tahun 2025.

Tabel 2.99
Daftar Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Blitar

No	Inovasi	Definisi	Inovator
1	SIGAB (Servis Gawat Darurat Blitar)	Aplikasi <i>emergency button</i> (tombol darurat) yang digunakan untuk memperoleh bantuan medis yang sifatnya gawat darurat. Melalui aplikasi ini masyarakat akan mendapatkan bantuan pre-hospital dengan cepat, tepat, cermat, dan profesional.	Dinas Kesehatan
2	SI LAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil Bersalin dan Nifas)	Inovasi layanan terintegrasi yang memprioritaskan pendaftaran <i>online</i> maupun <i>offline</i> bagi ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Inovasi ini bertujuan mempermudah akses, mengurangi antrean, serta memberikan pelayanan komprehensif bagi ibu dan bayi baru lahir.	RSUD "NGUDI WALUYO" Wlingi
3	TAS PELAJAR (Tuntas Pelayanan Laka Jasa Raharja)	Inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pengurusan administrasi pembiayaan korban kecelakaan lalu lintas. Program ini menjembatani pasien dengan jasa raharja dan polres.	RSUD Srengat
4	SI JARAN IJO (Inovasi Jemput Bola Rentan Admindak Iso Jujuk Omah)	Pemberian pelayanan administrasi kependudukan khususnya perekaman ktp-el bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori penduduk rentan, seperti penduduk terlantar, terpencil, orang dalam gangguan jiwa, disabilitas, dan penduduk lanjut usia.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5	LAPAK SARAH (Layanan Pengajuan Admindak untuk Desa/Kelurahan)	Pelayanan admindak cukup diajukan melalui desa/ kelurahan setempat bertujuan agar mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6	LAPAK MAINI (Layanan Pengajuan Admindak Melalui Instansi Lain)	Kerjasama pelayanan admindak dengan rumah sakit, puskesmas, kemenag dan pengadilan agama.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	BANG ANJAR (Bus Angkutan Khusus Pelajar Kabupaten Blitar)	Program layanan transportasi sekolah gratis yang diluncurkan oleh pemerintah kabupaten blitar untuk memfasilitasi antar-jemput pelajar guna menekan angka kecelakaan lalu lintas, meningkatkan keselamatan,	Dinas Perhubungan



No	Inovasi	Definisi	Inovator
		serta mendukung kenyamanan belajar.	
8	BOSS KU TRAVELLING (Blitar Online Single Submission Kemudahan Pelayanan Terpadu Traveling ke Destinasi Wisata Unggulan Kabupaten Blitar)	Layanan jemput bola perizinan di tempat wisata dan pusat keramaian.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir dari tahun 2022-2025. Peningkatan kinerja ini menunjukkan adanya konsistensi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan transformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Tren positif ini merupakan output dari penguatan ekosistem pelayanan publik yang semakin adaptif terhadap teknologi digital, penyederhanaan prosedur layanan yang memangkas waktu tunggu, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang solutif. Keberhasilan mempertahankan tren kenaikan ini juga membuktikan bahwa mekanisme evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah berfungsi secara efektif sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) bagi setiap unit kerja pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.100
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67	89,59*	88,42	85,61	84,59

*Data sementara diambil dari <https://portalrb.menpan.go.id/>

Sumber: Bagian Organisasi, 2025

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 99,63% dari target



tahun terakhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan akselerasi yang sangat progresif pada awal periode perencanaan, di mana kualitas pelayanan publik di Kabupaten Blitar hampir mendekati standar ideal yang ditetapkan untuk akhir tahun RPJMD. Realisasi tersebut mengindikasikan bahwa fondasi transformasi birokrasi dan digitalisasi layanan yang telah dibangun sebelumnya memiliki daya ungkit yang kuat terhadap kepuasan masyarakat. Kondisi ini memberikan sinyal positif bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk dapat menetapkan standar pelayanan yang lebih tinggi atau melakukan pengayaan inovasi pada tahun-tahun berikutnya, guna memastikan keberlanjutan kualitas layanan yang tidak hanya mengejar angka kuantitatif, tetapi juga kedalaman kualitas dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.101
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,92	89,59*	99,63%
Capaian Kinerja Sasaran					99,63%

*Data sementara diambil dari <https://portalrb.menpan.go.id/>
Sumber: Bagian Organisasi, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Blitar masih dibawah Provinsi Jawa Timur 1,66 poin. Meskipun Kabupaten Blitar menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, masih terdapat ruang akselerasi yang cukup besar untuk menyamai standar kualitas pelayanan publik di tingkat regional. Selisih sebesar 1,66 poin tersebut mengindikasikan bahwa tuntutan dan ekspektasi masyarakat di tingkat provinsi secara umum berkembang lebih cepat, terutama dalam hal integrasi teknologi informasi dan standarisasi layanan yang lebih kompleks. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk terus meningkatkan nilai tambah pada setiap unsur pelayanan, melakukan



pembenahan pada aspek-aspek yang masih memiliki skor rendah, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi guna mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.102
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,59	91,25

**Data sementara diambil dari <https://portalrb.menpan.go.id/>
Sumber: Bagian Organisasi, 2025*

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan penguatan pada unsur Persyaratan, Prosedur, dan Waktu Pelayanan melalui percepatan digitalisasi birokrasi. Persyaratan dan Prosedur dilakukan melalui upaya penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang komprehensif. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan secara terbuka di setiap unit kerja dan kanal digital untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, penerapan sistem antrean *online* dan pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE) pada dokumen administrasi kependudukan melalui aplikasi E-SIAP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah berhasil mereduksi waktu tunggu secara signifikan, memastikan setiap output layanan memiliki durasi penyelesaian yang terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Maklumat Pelayanan.

Terkait dengan unsur Biaya/Tarif dan Produk Spesifik Jenis Pelayanan, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen penuh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar layanan wajib di Kabupaten Blitar, seperti pengurusan izin usaha skala mikro dan administrasi kependudukan, telah diselenggarakan dengan biaya nol rupiah



(gratis) guna meringankan beban ekonomi masyarakat. Transformasi ini juga dibarengi dengan standardisasi produk layanan yang lebih variatif dan adaptif terhadap kebutuhan warga, seperti inovasi SI JARAN IJO (Inovasi Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujuk Omah), BOSS KU TRAVELLING (Blitar Online Single Submission Kemudahan Pelayanan Terpadu Traveling ke Destinasi Wisata Unggulan Kabupaten Blitar), yang memastikan produk layanan menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dengan kualitas yang sama baiknya dengan layanan di pusat kota.

Peningkatan pada unsur Kompetensi dan Perilaku Pelaksana diwujudkan melalui penguatan budaya kerja ASN yang berorientasi pelayanan (BerAKHLAK). Pemerintah Kabupaten Blitar menyelenggarakan bimbingan teknis *Service Excellence* bagi petugas garda depan (*frontliner*) untuk menanamkan budaya kerja yang ramah, solutif, dan bebas dari praktik pungutan liar. Perilaku pelaksana ini dimonitor secara ketat melalui evaluasi internal berkala, di mana setiap aparatur didorong untuk tidak hanya memiliki pemahaman teknis yang kuat, tetapi juga empati dalam menangani kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga interaksi pelayanan publik di Kabupaten Blitar berjalan lebih humanis dan profesional.

Terakhir, optimalisasi unsur Sarana Prasarana serta Penanganan Pengaduan diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang inklusif dan responsif. Pemerintah Kabupaten Blitar terus melakukan renovasi ruang pelayanan dengan standar ramah disabilitas, penyediaan ruang laktasi, dan pojok bermain anak guna meningkatkan kenyamanan pengguna layanan. Di sisi lain, kanal pengaduan masyarakat telah terintegrasi secara *real-time* melalui platform SP4N-LAPOR! dan media sosial Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang dikelola secara aktif. Setiap keluhan maupun saran yang masuk dikelola untuk dilakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan, memastikan bahwa suara masyarakat



menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten Blitar terus berkomitmen untuk mendorong terciptanya berbagai inovasi pelayanan publik yang adaptif dan solutif. Pengembangan inovasi ini diarahkan pada transformasi digital maupun perbaikan tata kelola non-teknologi dengan tujuan utama menciptakan proses pelayanan yang jauh lebih mudah, efektif, dan efisien. Melalui budaya inovasi yang terlembagakan di setiap UPP, Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya memangkas hambatan birokrasi dan mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata yang memudahkan kehidupan warga secara menyeluruh

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pemerintah Kabupaten Blitar masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satunya adalah belum meratanya kualitas pelayanan publik di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kompetensi petugas layanan, serta pemahaman terhadap standar pelayanan yang berlaku. Pada beberapa unit layanan, masih ditemukan petugas yang belum optimal dalam memberikan pelayanan prima, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun sikap pelayanan, sehingga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik juga menjadi faktor penghambat dalam peningkatan IKM. Beberapa unit layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar masih menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti ruang tunggu yang kurang representatif, sistem antrean yang belum



se penuhnya berbasis digital, serta infrastruktur teknologi informasi yang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien dan kurang nyaman bagi masyarakat, terutama pada unit layanan dengan tingkat kunjungan yang tinggi. Di samping itu, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar juga belum memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi. Ketiadaan MPP ini mengakibatkan masyarakat masih harus mengakses layanan secara terpisah di berbagai UPP, sehingga kurang efektif dari sisi waktu dan kemudahan akses layanan.

Mekanisme pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat yang belum berjalan secara optimal dan terintegrasi juga menjadi salah satu permasalahan dalam pencapaian kinerja IKM. Meskipun Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyediakan berbagai kanal pengaduan, pemanfaatannya oleh masyarakat masih belum maksimal akibat kurangnya sosialisasi dan literasi masyarakat terhadap mekanisme penyampaian pengaduan. Selain itu, sistem pengelolaan pengaduan yang ada belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh sehingga pemantauan dan evaluasi terhadap penyelesaian pengaduan belum dapat dilakukan secara komprehensif. Hal ini berdampak pada belum optimalnya perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, yang pada akhirnya turut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Kendala lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang belum berjalan secara optimal. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa UPP yang belum secara konsisten melaksanakan SKM serta menyusun laporan hasil SKM sesuai ketentuan. Kondisi ini mengakibatkan ketersediaan data dan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan menjadi



belum komprehensif. Dengan belum tersedianya gambaran yang utuh mengenai persepsi masyarakat, maka aspek-aspek pelayanan yang belum optimal berpotensi tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga tindak lanjut perbaikan pelayanan menjadi kurang tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan penguatan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP). Upaya ini dilakukan melalui penyampaian pemberitahuan resmi kepada UPP untuk melaksanakan SKM secara periodik minimal setiap triwulan serta menyusun laporan hasil SKM secara konsisten. Selain itu, akan disusun pedoman pelaksanaan SKM dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai acuan baku bagi seluruh UPP, sehingga pelaksanaan SKM dapat berjalan lebih terarah, seragam, dan berkelanjutan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan SKM dengan mendorong penggunaan aplikasi SKM online yang disediakan oleh Kementerian PANRB sebagai instrumen pengukuran tingkat kepuasan masyarakat. Untuk mendukung implementasi tersebut, juga akan dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh UPP agar pelaksanaan SKM dapat berjalan lebih optimal, terstandar, dan berbasis teknologi.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan komitmen UPP dalam menindaklanjuti hasil SKM sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan. Setiap unit pelayanan diharapkan mampu mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan serta menyusun langkah perbaikan secara konkret dan berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, diharapkan kualitas



pelayanan publik dapat semakin meningkat dan berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Blitar juga merencanakan peningkatan dukungan fasilitas pelayanan publik serta pengembangan sistem layanan yang lebih terpadu. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sarana pendukung pelayanan secara bertahap serta penguatan integrasi layanan antar perangkat daerah, termasuk rencana pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP). Dengan adanya peningkatan fasilitas dan integrasi layanan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan nyaman, sehingga turut mendorong peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada dasarnya didukung oleh seluruh program kerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Meski demikian, tabel berikut menyajikan program-program yang bersentuhan langsung secara intensif dengan pelayanan publik.

Tabel 2.103
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha	Pemberian pelayanan perizinan secara terintegrasi melalui sistem informasi pusat (OSS) maupun daerah (SIAP N LOSS)	DPMPTSP
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan baik primer ataupun rujukan	1. Pelayanan yang sesuai standar, alur pelayanan yang jelas, serta kepastian waktu layanan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD



			dalam mengakses fasilitas kesehatan 2. Ketersediaan ruang pelayanan, peralatan medis, obat dan bahan medis habis pakai yang memadai mendukung kelancaran pelayanan dan berdampak positif pada persepsi kualitas layanan. 3. Implementasi SPM kesehatan serta pemenuhan standar akreditasi fasilitas kesehatan mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan. 4. Mekanisme penanganan pengaduan yang responsif dan transparan membantu perbaikan layanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan layanan pendidikan dasar dan kesetaraan	Menjamin tersedianya layanan pendidikan dasar dan kesetaraan yang terjangkau	Dinas Pendidikan
	Program Pendaftaran Penduduk	Penerbitan dokumen kependudukan	Layanan sesuai standar dan responsif gender	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Rehabilitasi Sosial	Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS di luar panti	Peningkatan pemenuhan kebutuhan PPKS	Dinas Sosial
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Updating data Fakir Miskin	Penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial secara tepat sasaran	Dinas Sosial
	Penanganan Bencana	Pemenuhan kebutuhan dasar	Respon cepat dalam	Dinas Sosial



		korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	penanganan korban bencana	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Respon cepat pada saat kejadian kebakaran dan non kebakaran, serta pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Satpol PP dan Damkar
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan penanganan pasca bencana	Respon cepat pelayanan pada saat kejadian bencana dan pasca bencana	BPBD
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja berbasis klaster dan unit kompetensi	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyediaan Informasi Pasar kerja, Layanan Terpadu Calon Pekerja Migran	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat dan perlindungan PMI Pra dan Purna penempatan	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pelatihan dan pendampingan pelaku usaha mikro	Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Pelatihan dan pendampingan pelaku usaha mikro	Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
	Program Penyelenggara n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyelenggara n pelayanan uji berkala kendaraan bermotor, pelayanan angkutan pelajar	Menyediakan layanan sektor perhubungan yang diperlukan masyarakat	Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pencegahan penyebaran penyakit bersumber dari hewan, pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner, pengawasan peredaran hewan dan produk hewan,	Pencegahan wabah penyakit disebabkan oleh hewan, penjaminan kesehatan hewan yang keluar dan masuk Kab Blitar, jaminan produk asal hewan yang Aman, Sehat,	Dinas Peternakan dan Perikanan



		fasilitasi penerbitan NKV	Utuh dan Halal (ASUH)	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelayanan publik yang sesuai dengan standar, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat	Mendekatkan pelayanan publik sampai ke tingkat kecamatan sesuai kewenangan	Kecamatan

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 323.956.455.287,79 dengan realisasi sebesar Rp. 299.416.145.111,75. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.104
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	101,04	Program Pelayanan Penanaman Modal	399.996.100,00	386.859.761,00	96,72
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.265.377.442,50	88.471.604.968,70	89,13
			Program Pengelolaan Pendidikan	163.307.554.221,39	153.728.947.826,17	94,13
			Program Pendaftaran Penduduk	929.585.000,00	910.084.330,00	97,90
			Program Rehabilitasi Sosial	1.133.973.700,00	684.024.638,00	60,32
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.594.182.500,00	10.113.964.200,00	95,47
			Penanganan Bencana	174.995.450,00	140.743.500,00	80,43
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	288.054.000,00	199.165.353,00	69,14



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Penanggulangan Bencana	1.228.055.047,00	1.090.895.672,60	88,83
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.952.357.995,00	1.483.406.346,00	75,98
			Program Penempatan Tenaga Kerja	1.560.858.450,00	1.513.360.400,70	96,96
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	255.490.850,00	225.868.486,00	88,41
			Program Pengembangan UMKM	1.037.503.000,00	1.012.532.104,00	97,59
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	41.148.207.706,90	38.805.872.494,58	94,32
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	351.755.925,00	339.025.031,00	96,38
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	328.507.900,00	309.790.000,00	94,30
			Total	323.956.455.287,79	299.416.145.111,75	92,42
			Tingkat efisiensi			8,62

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 101,04% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 92,42%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,62. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Diwujudkan melalui strategi optimalisasi belanja teknologi informasi yang mereduksi biaya operasional layanan



konvensional. Dengan mengalokasikan anggaran pada pengembangan sistem layanan terintegrasi dan digitalisasi dokumen, Pemerintah Daerah mampu memangkas biaya pengadaan alat tulis kantor, pemeliharaan fisik ruang tunggu, serta biaya distribusi logistik administratif yang sebelumnya membebani APBD secara repetitif. Investasi pada infrastruktur digital ini menciptakan nilai manfaat yang lebih tinggi, di mana serapan anggaran yang lebih presisi mampu menghasilkan jangkauan layanan yang lebih luas dan responsif, sehingga kepuasan masyarakat tetap meningkat secara konsisten meskipun di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

2) Efisiensi SDM

Diwujudkan melalui optimalisasi kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem layanan digital yang terintegrasi. Penataan pola kerja yang lebih ramping dan berorientasi pada hasil sehingga jumlah personil yang ada mampu menangani volume layanan yang lebih besar dengan tingkat akurasi yang tetap terjaga. Melalui penguatan kapasitas teknis dan budaya kerja BerAKHLAK, pegawai tidak lagi terjebak pada beban administrasi manual yang repetitif, melainkan lebih fokus pada fungsi konsultatif dan penyelesaian masalah publik secara cepat, yang secara langsung berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pelayanan serta peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui inovasi transformasi digital yang memangkas rantai birokrasi menjadi jauh lebih pendek dan efisien. Dengan mengalihkan prosedur konvensional ke dalam sistem layanan mandiri berbasis aplikasi, tahapan administratif yang sebelumnya bersifat repetitif dan memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan secara *real-time*, sehingga mereduksi durasi penyelesaian layanan (SLA) secara signifikan.



Integrasi teknologi ini tidak hanya menghilangkan hambatan jarak dan waktu tunggu fisik, tetapi juga memberikan kepastian layanan yang lebih transparan bagi publik.

12. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu SPBE, Indeks Sistem Merit, Skor SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperoleh dari hasil evaluasi SPBE terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Blitar. Nilai Indeks SPBE akan menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Blitar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Merit adalah suatu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Indeks Sistem Merit (ISM) adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Penilaian penerapan sistem merit dilakukan berdasarkan penerapan aspek-aspek dengan bobot:

- a. Perencanaan kebutuhan (20%);
- b. Pengadaan (10%);
- c. Pengembangan karier (25%);



- d. Promosi dan mutasi (10%);
- e. Manajemen kinerja (15%);
- f. Penggajian, penghargaan dan disiplin (10%);
- g. Perlindungan dan pelayanan (5%); dan
- h. Sistem informasi (5%).

Nilai SAKIP adalah nilai yang diperoleh atas hasil evaluasi implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan terhadap komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, yang menilai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan enam dimensi. Pengukuran IPKD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah. Nilai IPKD dihitung dengan menjumlahkan nilai dari keenam dimensi. Enam dimensi dan bobotnya:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15%);
- b. Kualitas anggaran belanja dalam APBD (20%);
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah (15%);
- d. Penyerapan anggaran (20%);



- e. Kondisi keuangan daerah (15%);
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD (15%).

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Pengukuran IID dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. IID menilai variabel-variabel inovasi yang mencakup berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; Inovasi Pelayanan Publik; dan Inovasi Daerah Lainnya. Indikator IID:

- a. Tingkat Kematangan Inovasi;
- b. Kemanfaatan Inovasi;
- c. Ketersediaan Regulasi;
- d. Dampak dan Keberlanjutan; dan
- e. Kualitas dan Validitas Data:

Penilaian IID dihitung dengan menjumlahkan nilai pada setiap indikator.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien adalah sebesar 97,37% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.105
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	SPBE	3,90	3,88	99,49
		Indeks Sistem Merit	275	272*	98,91
		Skor SAKIP	69,16	66,95	96,80
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,7	67,38*	90,20
		Indeks Inovasi Daerah	72,84	73,91	101,47
Capaian Kinerja Sasaran					97,37

*Data menggunakan tahun 2023, 2024

Sumber: Dinas Kominfo, BKPSDM, BPKAD, Bappedalitbang 2025



Capaian kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dengan raihan indeks realisasi sebesar 3,88. Meskipun selisih sedikit 0,02 poin dari target yang ditetapkan sebesar 3,90, angka ini mengukuhkan posisi dalam predikat "Sangat Baik". Kekuatan utama capaian ini didorong oleh Domain Kebijakan SPBE yang mencapai skor sangat tinggi yakni 4,70 dan Domain Layanan SPBE sebesar 4,26. Sementara itu, aspek Domain Tata Kelola SPBE mencatatkan nilai 3,30 dan Domain Manajemen SPBE berada di angka 3,09, yang menunjukkan bahwa meskipun fondasi dasar sudah terbentuk, masih terdapat ruang akselerasi pada tata kelola infrastruktur dan manajemen TIK untuk mencapai keseimbangan nilai yang lebih tinggi.

Keberhasilan capaian indeks SPBE yang mendekati target ini didukung oleh komitmen kuat dalam penyusunan regulasi dan arsitektur SPBE yang kokoh, serta peluncuran inovasi strategis seperti program SI RIZKI (Sarana Internet Gratiz Kabupaten Blitar). Program yang menyediakan internet gratis di 351 titik strategis mulai dari desa, puskesmas, hingga fasilitas umum menjadi faktor pendukung utama dalam memperluas aksesibilitas layanan digital dan meningkatkan literasi teknologi masyarakat. Optimalisasi kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mengintegrasikan berbagai platform layanan publik melalui dukungan infrastruktur SI RIZKI secara langsung meningkatkan efisiensi birokrasi, sehingga Kabupaten Blitar mampu mempertahankan standar pelayanan digital yang berkualitas tinggi dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Capaian kinerja Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar untuk tahun 2025 tetap mengacu pada basis data penilaian tahun 2023 sebesar 272, mengingat tidak adanya siklus penilaian mandiri maupun eksternal pada periode 2024 hingga 2025. Meskipun realisasi tersebut masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 275, namun nilai ini mencerminkan stabilitas manajemen ASN yang



berada pada kategori Baik. Capaian nilai ini menunjukkan bahwa instrumen tata kelola kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga perlindungan dan sistem informasi, telah terlembagakan dengan cukup kuat, meskipun diperlukan akselerasi lebih lanjut pada aspek pengembangan kompetensi dan manajemen kinerja untuk melampaui target yang ditetapkan.

Faktor pendukung utama dalam mempertahankan capaian indeks ini adalah komitmen terhadap implementasi kebijakan promosi dan mutasi yang semakin transparan, serta penerapan kualifikasi dan kompetensi sebagai pertimbangan utama dalam penempatan jabatan. Selain itu, optimalisasi sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi mempermudah pengawasan terhadap rekam jejak pegawai. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari penguatan peran Tim Penilai Kinerja yang secara rutin melakukan monitoring terhadap disiplin dan capaian sasaran kinerja individu melalui aplikasi E-Kinerja dari Badan Kepegawaian Negara, sehingga meskipun penilaian formal tidak dilakukan pada dua tahun terakhir, budaya kerja berbasis meritokrasi tetap terjaga konsistensinya di seluruh Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 mencatatkan realisasi skor sebesar 66,95 dari target yang ditetapkan sebesar 69,16, sehingga secara kualitatif masih mempertahankan predikat "B" (Baik) namun belum berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Berikut disajikan rincian hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dari setiap komponen pembentuknya.

Tabel 2.106
Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Komponen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	22,02
2	Pengukuran Kinerja	19,20
3	Pelaporan Kinerja	10,61
4	Evaluasi Internal	15,12
	Total	66,95

Sumber: Kementerian PANRB, 2025



Secara keseluruhan, kendala utama SAKIP Kabupaten Blitar tahun 2025 berakar pada lemahnya sinkronisasi antara perencanaan strategis dan operasional, di mana penetapan tujuan belum sepenuhnya berbasis isu strategis daerah dan pohon kinerja pada Perangkat Daerah masih terjebak pada aspek administratif yang belum berorientasi pada hasil (*outcome*). Pada komponen pengukuran kinerja indikator kinerja yang belum memenuhi standar SMART, penetapan target yang tidak spesifik, serta belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIYAKIN untuk pengukuran kinerja berkala yang didukung mekanisme *reward and punishment*. Pada komponen pelaporan kinerja, laporan akuntabilitas yang disusun kurang informatif karena minimnya analisis penyebab kegagalan, efisiensi sumber daya, dan *benchmarking* data, sementara evaluasi internal masih cenderung bersifat formalitas pemenuhan dokumen tanpa pemantauan progres perbaikan yang konsisten di seluruh Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 67,38, yang menggunakan basis data penilaian tahun 2024 dikarenakan hasil evaluasi periode 2025 belum dirilis secara resmi. Realisasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berada pada kategori Perlu Perbaikan karena masih terpaut cukup jauh dari target yang ditetapkan sebesar 74,7. Meskipun secara administratif proses penganggaran dan pelaporan tetap berjalan sesuai siklus tahunan, kesenjangan nilai sebesar 7,32 poin ini mengindikasikan bahwa akselerasi kualitas belanja dan sinkronisasi dokumen perencanaan keuangan masih memerlukan penguatan yang lebih intensif di seluruh perangkat daerah. Berikut disajikan rincian dari penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atas penilaian tahun 2024.

Tabel 2.107
Rincian Nilai IPKD Tahun 2024

Komponen	Bobot	Nilai
Indeks Dimensi Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD	15	12,3333



Komponen	Bobot	Nilai
Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	12,3611
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	15	4,6875
Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	20	20
Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	20	8
Opini BPK	10	10
Total	100	67,3819

Sumber: BPKAD, 2025

Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya target tersebut adalah rendahnya kesesuaian antara dokumen perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (KUA-PPAS), serta belum optimalnya serapan anggaran pada triwulan awal yang menyebabkan penumpukan belanja di akhir tahun. Selain itu, keterbatasan dalam penyajian data keuangan berbasis digital yang terintegrasi secara *real-time* juga menghambat penilaian pada dimensi transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, terdapat faktor pendukung yang menjaga stabilitas nilai ini, yakni keberhasilan Kabupaten Blitar dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta ketepatan waktu dalam penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, yang menjadi modal penting untuk meningkatkan skor IPKD pada periode penilaian selanjutnya.

Capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan skor realisasi sebesar 73,91. Angka ini berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 72,84, sekaligus mengukuhkan posisi Kabupaten Blitar dalam kategori daerah yang Sangat Inovatif. Keberhasilan melampaui target sebesar 1,07 poin ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan maupun dalam bentuk inovasi pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Tercatat sebanyak 77



inovasi yang berhasil dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar.

Faktor pendukung utama keberhasilan capaian ini adalah adanya regulasi yang kuat dalam memberikan perlindungan dan insentif bagi inovator di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat umum. Selain itu, peningkatan partisipasi aktif Perangkat Daerah dalam kompetisi inovasi tingkat nasional dan daerah menjadi katalisator dalam mendokumentasikan serta mereplikasi terobosan-terobosan baru yang efisien. Sinergi yang baik dalam pengumpulan data pendukung (eviden) inovasi melalui sistem informasi yang terintegrasi juga memastikan setiap tahapan inovasi, mulai dari uji coba hingga penerapan penuh, terukur secara objektif dan memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien mengalami capaian kinerja yang fluktuatif selama 4 tahun terakhir dari tahun 2022-2025 dari setiap indikatornya. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.108
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	SPBE	3,90	3,88	3,77	3,63	2,61
		Indeks Sistem Merit	275	272*	272	272	210,50
		Skor SAKIP	69,16	66,95	67,16	68,37	69,02
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,7	67,38*	67,38	72,71	71,46
		Indeks Inovasi Daerah	72,84	73,91	72,59	61,42	55,51

***Data menggunakan tahun 2023, 2024*

Sumber: Dinas Kominfotiksan, BKPSDM, BPKAD, Bappedalitbang 2025

Capaian kinerja SPBE Kabupaten Blitar mengalami peningkatan kinerja yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2025, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam



melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Berdasarkan data tahun 2025, realisasi indeks SPBE berhasil mencapai angka 3,88 dengan predikat Sangat Baik, sebuah lompatan besar dari raihan tahun 2022 yang berada di angka 2,61. Keberhasilan ini didorong oleh nilai yang sangat dominan pada Domain Kebijakan SPBE (4,70) dan Domain Layanan SPBE (4,26), yang membuktikan bahwa fondasi regulasi serta kualitas layanan digital kepada masyarakat telah terimplementasi dengan sangat matang dan terintegrasi di seluruh perangkat daerah.

Capaian kinerja Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar mencatatkan tren pertumbuhan positif dari skor 210,50 pada tahun 2022 menjadi 272 pada periode 2023-2025, yang mengukuhkan posisi manajemen ASN daerah dalam kategori predikat Baik meskipun penilaian formal tidak dilakukan pada dua tahun terakhir.

Meskipun tetap berada dalam kategori predikat Baik, capaian skor SAKIP Kabupaten Blitar yang terus menurun dalam empat tahun terakhir dari realisasi sebesar 67,11 pada tahun 2022 menjadi 66,95 pada tahun 2025 menunjukkan adanya gejala stagnasi dalam transformasi birokrasi, sehingga target kinerja sebesar 69,16 belum berhasil terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh nilai pada setiap komponen mengalami penurunan.

Capaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang fluktuatif, di mana sempat mengalami kenaikan pada periode 2022-2023, namun kemudian mengalami penurunan pada periode 2023-2025 dengan realisasi skor sebesar 67,38 dari target sebesar 74,7. Meskipun tetap berada dalam kategori yang memerlukan penguatan, penurunan skor ini mengindikasikan adanya kendala dalam konsistensi kualitas belanja daerah dan sinkronisasi dokumen perencanaan keuangan di seluruh perangkat daerah.

Capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Blitar menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan peningkatan



signifikan selama periode 2022-2023, yang kemudian berhasil melampaui target tahun 2025 dengan realisasi skor sebesar 73,91 dari target 72,84. Capaian ini didorong oleh kuatnya komitmen pimpinan dalam menciptakan budaya kerja kreatif di lingkungan perangkat daerah, serta adanya payung hukum yang menjamin keberlanjutan setiap inisiatif baru melalui penyediaan insentif bagi para inovator. Selain itu, peningkatan kualitas dokumentasi bukti dukung (*eviden*) yang lebih valid dan sistematis, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif dalam mereplikasi inovasi pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 88,64% dari target tahun terakhir RPJMD. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.109
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	SPBE	4,38	3,88	88,58
		Indeks Sistem Merit	290	272*	93,79
		Skor SAKIP	80,16	66,95	83,52
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	84,7	67,38*	79,55
		Indeks Inovasi Daerah	75,59	73,91	97,78
Capaian Kinerja Sasaran					88,64

**Data menggunakan tahun 2023, 2024

Sumber: Dinas Kominfo, BKPSDM, BPKAD, Bappedalitbang 2025

Capaian kinerja SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,88 dengan predikat Sangat Baik, yang berarti telah mencapai 88,58% dari target akhir RPJMD sebesar 4,38. Meskipun target akhir belum terpenuhi sepenuhnya di tahun pertama periode ini, skor 3,88 merupakan landasan yang sangat kuat mengingat adanya peningkatan signifikan pada Domain Kebijakan



SPBE dan Domain Layanan SPBE yang sudah terimplementasi secara matang di seluruh perangkat daerah.

Capaian kinerja Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 272 dengan predikat Baik, yang berarti telah mencapai 93,79% dari target akhir RPJMD sebesar 290. Meskipun terdapat selisih 18 poin untuk mencapai target ideal di akhir periode perencanaan, skor 272 ini menunjukkan stabilitas manajemen ASN yang sangat kuat, terutama dalam aspek pengisian jabatan dan sistem informasi kepegawaian yang telah terstandarisasi. Dengan capaian awal yang sudah mendekati angka 290, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki fondasi yang sangat kokoh untuk melakukan akselerasi pada aspek pengembangan kompetensi dan retensi talenta guna mencapai predikat Sangat Baik sebelum akhir periode RPJMD.

Capaian kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 66,95 dengan predikat "B" (Baik), yang berarti baru terealisasi sebesar 83,52% dari target akhir RPJMD sebesar 80,16. Meskipun tetap bertahan dalam kategori Baik, selisih skor sebesar 13,21 poin ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam melakukan lompatan kualitas akuntabilitas kinerja guna mencapai predikat "A" di akhir periode perencanaan.

Capaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 67,38 dengan kategori predikat Perlu Penguatan, yang berarti telah mencapai 79,55% dari target akhir RPJMD sebesar 84,7. Meskipun terdapat selisih skor sebesar 17,32 poin untuk mencapai target ideal di akhir periode perencanaan, realisasi 67,39 ini menunjukkan adanya stabilitas dalam ketaatan pelaporan keuangan dan ketepatan waktu penetapan APBD sebagai fondasi tata kelola keuangan daerah.

Capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 73,91 dengan predikat Sangat Inovatif, yang berarti telah terealisasi sebesar 97,77% dari target



akhir RPJMD sebesar 75,59. Realisasi ini menunjukkan progres yang sangat signifikan dan mendekati target ideal di akhir periode perencanaan, mencerminkan ekosistem inovasi daerah yang sudah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan selisih sebesar 1,68 poin menuju target akhir, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki peluang sangat besar untuk melampaui target RPJMD lebih awal melalui perluasan replikasi inovasi unggulan di seluruh Perangkat Daerah dan peningkatan kolaborasi dengan sektor non-pemerintah.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien untuk seluruh indikator di Kabupaten Blitar masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blitar masih memerlukan akselerasi yang lebih masif untuk mengejar standar kualitas birokrasi di tingkat regional. Meskipun Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif secara internal, kesenjangan nilai dengan Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa instrumen transformasi birokrasi baik dari sisi digitalisasi (SPBE), manajemen SDM (Sistem Merit), akuntabilitas kinerja (SAKIP), kualitas pengelolaan keuangan (IPKD), hingga ekosistem inovasi (IID) belum mencapai titik optimal dalam mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang kompetitif di level Provinsi. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap hambatan struktural maupun teknis pada setiap indikator, agar kebijakan yang diambil ke depan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas kelembagaan. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.110
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1		SPBE	3,88	4,79



Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Indeks Sistem Merit	272*	383*
	Skor SAKIP	66,95	84,19*
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	67,38*	86,195*
	Indeks Inovasi Daerah	73,91	90,84

**Data menggunakan tahun 2023, 2024

Sumber: Dinas Kominfo, BPS, BPKAD, Bappedalitbang 2025

1. SPBE

Pemerintah Kabupaten Blitar secara konsisten melakukan penguatan tata kelola SPBE melalui koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dan pemenuhan dokumen kebijakan strategis. Dokumen ini mencakup Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, serta standar layanan berbasis elektronik yang menjadi fondasi transformasi digital daerah. Mengingat kompleksitas substansi dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah, kegiatan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dilaksanakan secara bertahap melalui skema *multi-years*, di mana Tahap I direalisasikan pada tahun 2025 dan dilanjutkan pada Tahap II tahun 2026. Langkah ini diambil guna menjamin kualitas dokumen yang akurat, komprehensif, dan selaras dengan mandat regulasi nasional.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi proses bisnis birokrasi, dilakukan percepatan integrasi aplikasi dan layanan digital untuk mereduksi duplikasi sistem serta ego sektoral antar unit kerja. Salah satu inovasi strategis yang dikembangkan adalah Aplikasi Portal Pelayanan Publik, yang berfungsi sebagai kanal tunggal bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan mengajukan permohonan layanan secara transparan. Melalui optimalisasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan penguatan aplikasi umum SPBE, Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya menciptakan ekosistem kerja yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan dampak langsung pada kualitas pelayanan publik.



Guna memastikan transformasi digital menyentuh seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blitar mengimplementasikan program SI RIZKI (Sarana Internet Gratiz Kabupaten Blitar) sebagai instrumen perluasan aksesibilitas digital. Hingga saat ini, telah tersedia layanan internet gratis di 351 titik strategis yang tersebar di wilayah Kabupaten, mencakup 33 titik fasilitas umum/sosial, 11 titik di Perangkat Daerah, 22 titik di tingkat Kecamatan, 28 titik di Kelurahan, 220 titik di tingkat Desa, serta layanan kesehatan dan pendidikan melalui 24 titik di Puskesmas dan 46 titik di UPT SMP. Komitmen penyediaan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi digital, namun juga mendorong pemanfaatan internet untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat di sektor pendidikan, pemberdayaan UMKM, serta kemudahan akses layanan publik berbasis masyarakat.

Gambar 2.22
Launching SI RIZKI





Sejalan dengan pengembangan infrastruktur dan sistem, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi prioritas untuk menjamin keberlanjutan digitalisasi. Upaya ini diwujudkan melalui serangkaian fasilitasi bimbingan teknis dan workshop, seperti penguatan jaringan perangkat daerah, penyusunan SIA SPBE v2, hingga pelatihan teknis *Vibe Coding or Not?*. Selain di internal birokrasi, penguatan literasi digital juga diperluas ke sektor ekonomi kerakyatan melalui pendampingan teknologi dalam pemasaran produk bagi pelaku UMKM di Desa Sumberarum dan Kelurahan Kauman, sebagai bentuk implementasi inklusivitas digital di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blitar.

Hambatan utama dalam akselerasi kinerja SPBE di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 terletak pada keterbatasan alokasi anggaran daerah yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh tahapan transformasi digital secara simultan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan strategis, seperti Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, harus dilaksanakan secara bertahap melalui skema *multi-years* hingga tahun 2026. Kendala lain munculnya berbagai aplikasi baru yang dibangun oleh Perangkat Daerah di luar dokumen perencanaan formal (Peta Rencana) dan Arsitektur SPBE sebagai bagian dari inovasi proyek perubahan dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat). Selain itu, dinamika perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat yang mewajibkan transisi ke aplikasi umum tertentu seringkali memaksa penyesuaian sistem yang telah berjalan, sehingga sinkronisasi antara dokumen kebijakan daerah dengan realitas implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal.

Dari sisi tata kelola teknis, tantangan besar muncul dalam mewujudkan integrasi sistem informasi yang benar-benar terpadu akibat masih adanya ego sektoral dan variasi standar aplikasi antar unit kerja. Upaya eliminasi duplikasi aplikasi belum mencapai hasil



maksimal karena banyak sistem yang masih bersifat sektoral, yang pada akhirnya menghambat proses sinkronisasi dan interoperabilitas data pada Portal Pelayanan Publik. Kondisi ini secara langsung memengaruhi efisiensi proses bisnis pemerintahan dan menghambat pencapaian target efektivitas birokrasi yang diharapkan, mengingat penyediaan layanan satu pintu bagi masyarakat belum dapat mencakup seluruh aspek layanan secara komprehensif sebagaimana mandat arsitektur SPBE nasional.

Selain itu, optimalisasi kanal informasi publik melalui website dan media sosial Perangkat Daerah masih belum merata di seluruh unit kerja, sehingga aksesibilitas publik terhadap program kegiatan strategis pemerintah daerah masih terbatas. Kendala ini diperberat dengan adanya kesenjangan kompetensi SDM teknis di tingkat kecamatan dan desa, yang mengakibatkan pemanfaatan infrastruktur pendukung seperti program SI RIZKI belum memberikan dampak literasi digital yang maksimal bagi masyarakat. Kurangnya tenaga spesialis di setiap unit kerja menyebabkan pengelolaan aset digital dan pemutakhiran informasi publik seringkali mengalami keterlambatan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas keterbukaan informasi dan citra transparansi Pemerintah Kabupaten Blitar secara keseluruhan.

Guna mengatasi hambatan dan kendala di atas, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk melakukan reviu dan pemutakhiran Arsitektur serta Peta Rencana SPBE secara berkala dan berkelanjutan. Langkah ini diprioritaskan untuk mensinkronkan kembali dokumen perencanaan daerah dengan dinamika regulasi pemerintah pusat serta mengakomodasi berbagai inovasi aplikasi yang lahir dari proyek perubahan perangkat daerah. Melalui pemutakhiran ini, diharapkan seluruh pengembangan sistem informasi ke depan memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan peta jalan digital nasional, sehingga efektivitas penguatan



tata kelola pemerintahan dapat tercapai secara sistematis dan terukur.

Dalam upaya memperkuat infrastruktur dan keamanan sistem, langkah tindak lanjut difokuskan pada peningkatan integrasi dan standarisasi aplikasi seluruh perangkat daerah agar sesuai dengan Arsitektur SPBE. Proses eliminasi aplikasi yang bersifat sektoral akan terus dilakukan guna mendorong interoperabilitas data yang lebih solid pada Portal Pelayanan Publik. Selain itu, aspek keamanan informasi menjadi perhatian utama melalui koordinasi dan kolaborasi aktif antar Perangkat Daerah dalam menciptakan serta memanfaatkan digitalisasi pelayanan yang aman dari gangguan siber (*cyber security*). Sinergi ini penting untuk menjamin keberlangsungan layanan publik digital yang terpercaya dan memitigasi risiko kerawanan data di lingkungan pemerintah daerah.

Sebagai pilar pendukung keberlanjutan, Pemerintah Kabupaten Blitar akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM TIK melalui bimbingan teknis serta pendampingan berkelanjutan yang menyentuh hingga tingkat bawah. Upaya ini dibersamai dengan optimalisasi pemanfaatan website dan berbagai media digital perangkat daerah sebagai sarana layanan administrasi pemerintahan dan kanal informasi publik yang responsif. Dengan meningkatnya literasi digital aparatur dan ketersediaan informasi yang transparan bagi masyarakat, diharapkan pemanfaatan infrastruktur digital seperti program SI RIZKI dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mendorong transformasi birokrasi yang modern, inklusif, dan akuntabel.

2. Indeks Sistem Merit

Dalam rangka pencapaian kinerja Indeks Sistem Merit, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen penuh dalam memperkuat implementasi melalui penataan regulasi dan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Upaya ini diawali



dengan penguatan aspek perencanaan kebutuhan pegawai yang selaras dengan tujuan strategis organisasi serta pemutakhiran data profil pegawai pada sistem informasi kepegawaian. Dengan tersedianya basis data yang akurat dan perencanaan yang matang, setiap tahapan manajemen ASN mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian dapat dilaksanakan secara transparan dan bebas dari intervensi politik maupun praktik non-meritokrasi lainnya, guna menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang profesional.

Dalam aspek pengembangan kompetensi, dilakukan akselerasi melalui pemetaan kesenjangan kompetensi untuk menyusun rencana pengembangan karir yang tepat sasaran bagi setiap aparatur. Selain itu, telah dilaksanakan fasilitasi *profiling* ASN Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai upaya memperoleh gambaran kompetensi dan potensi ASN secara lebih komprehensif. Pemerintah Kabupaten Blitar mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi, di mana pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) didasarkan pada capaian indikator kinerja individu yang berkontribusi langsung pada kinerja organisasi. Pemberian penghargaan juga telah diberikan kepada ASN Pemerintah Kabupaten Blitar yang berkinerja baik dan berinovasi. Selain itu, penerapan pola karier secara terbuka dan kompetitif melalui mekanisme seleksi terbuka (*open bidding*) serta pemanfaatan *talent pool* terus dioptimalkan untuk memastikan bahwa setiap jabatan struktural maupun fungsional diisi oleh figur yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya.

Guna menjamin keberlanjutan sistem merit, Pemerintah Kabupaten Blitar terus melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Evaluasi mandiri terhadap delapan aspek sistem merit dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti aspek perlindungan ASN dan sistem informasi. Melalui digitalisasi



manajemen ASN dan penguatan fungsi pengawasan internal, diharapkan tercipta budaya kerja yang kompetitif dan berintegritas tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pencapaian visi pembangunan daerah melalui birokrasi yang handal.

Hambatan utama dalam optimalisasi Sistem Merit di Kabupaten Blitar terletak pada belum sinkronnya integrasi data kompetensi pegawai secara menyeluruh ke dalam sistem informasi kepegawaian yang terpadu. Meskipun pendataan profil ASN terus berjalan, pemutakhiran data riwayat diklat, sertifikasi, dan rekam jejak kinerja masih menghadapi kendala teknis operasional di tingkat Perangkat Daerah. Hal ini menyebabkan proses pemetaan talenta (*talent mapping*) belum dapat dilakukan secara *real-time* dan otomatis, sehingga penyusunan rencana suksesi serta pengembangan karier pegawai masih memerlukan verifikasi faktual yang memakan waktu cukup lama.

Dari sisi pengembangan kapasitas, keterbatasan alokasi anggaran untuk program pengembangan kompetensi ASN menjadi kendala dalam memenuhi standar minimal jam pelajaran (JP) per tahun bagi seluruh pegawai. Kesenjangan antara kebutuhan peningkatan keahlian teknis dengan ketersediaan diklat yang relevan menyebabkan akselerasi profesionalisme aparatur belum merata di semua lini jabatan. Selain itu, penerapan sistem manajemen kinerja individu yang berbasis pada aplikasi E-Kinerja terkadang masih menghadapi kendala aksesibilitas jaringan di wilayah tertentu, yang berdampak pada ketepatan waktu pelaporan dan validasi capaian kinerja bulanan secara kolektif.

Selain itu, tantangan dalam internalisasi budaya kerja meritokratis masih ditemukan pada proses adaptasi terhadap standar penilaian kinerja yang lebih ketat dan objektif. Adanya resistensi terhadap perubahan pola kerja dari sistem konvensional menuju sistem berbasis kompetensi dan kinerja mengakibatkan



implementasi *reward and punishment* belum sepenuhnya berjalan optimal di setiap unit kerja. Kurangnya jumlah tenaga asesor internal yang tersertifikasi juga menghambat percepatan penilaian potensi dan kompetensi mandiri, sehingga ketergantungan pada lembaga eksternal dalam proses seleksi maupun evaluasi jabatan masih cukup tinggi.

Sebagai Upaya tindak lanjut kendala di atas, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk melakukan percepatan integrasi dan pemutakhiran basis data kepegawaian melalui optimalisasi sistem informasi manajemen ASN yang terpadu. Langkah ini difokuskan pada sinkronisasi data kompetensi, riwayat diklat, dan rekam jejak kinerja setiap pegawai agar dapat diakses secara *real-time* guna mendukung proses *talent mapping* yang akurat, melalui surat pemberitahuan kepada seluruh Perangkat Daerah. Dengan tersedianya data yang valid dan terintegrasi, penyusunan rencana suksesi serta pengembangan karier pegawai dapat dilakukan secara lebih objektif dan otomatis, sehingga meminimalisir waktu verifikasi faktual dan meningkatkan efisiensi birokrasi dalam manajemen talenta daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan melaksanakan manajemen talenta melalui *assesment* pada seluruh jabatan sebagai dasar pemetaan potensi dan kompetensi ASN secara menyeluruh.

Guna mengatasi keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi, Pemerintah Kabupaten Blitar akan mengoptimalkan metode pengembangan SDM yang lebih efisien melalui skema *Corporate University* atau pembelajaran mandiri berbasis digital (*e-learning*). Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi standar minimal jam pelajaran (JP) tahunan bagi seluruh ASN tanpa bergantung sepenuhnya pada diklat tatap muka yang berbiaya tinggi. Selain itu, penguatan infrastruktur jaringan dan pendampingan teknis dalam penggunaan aplikasi manajemen kinerja akan terus ditingkatkan di



seluruh unit kerja untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan serta validasi capaian kinerja individu secara kolektif dan transparan.

Dalam upaya internalisasi budaya kerja meritokratis, langkah tindak lanjut diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan internal dan peningkatan jumlah tenaga asesor internal yang tersertifikasi secara mandiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga eksternal dalam proses penilaian potensi dan kompetensi jabatan, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih rutin dan efisien. Pemberian *reward and punishment* yang lebih tegas dan terukur berdasarkan capaian kinerja objektif akan terus disosialisasikan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya profesionalisme, guna mewujudkan birokrasi yang handal dan kompetitif di Kabupaten Blitar.

3. Skor SAKIP

Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas Perencanaan Kinerja sebagai komponen utama SAKIP. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang selaras mulai dari RPJMD 2025–2029 hingga Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Bappedalitbang telah melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Renstra Perangkat Daerah guna meningkatkan pemahaman dan kualitas dokumen perencanaan. Dalam rangka memastikan keselarasan antar dokumen, juga dilakukan desk dengan perangkat daerah untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja. Upaya lainnya yaitu penyusunan pohon kinerja dan cascading hingga level individu serta penyusunan perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen atas target yang telah ditetapkan.

Pada aspek Pengukuran Kinerja, Pemkab Blitar telah melakukan upaya perbaikan melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) baik pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat



Daerah yang mengacu pada kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru periode 2025-2029, dengan mencantumkan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang lebih spesifik. Selain itu, pengukuran kinerja mulai didukung dengan pemanfaatan Aplikasi SIYAKIN (Sistem Layanan Akuntabilitas Kinerja) sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala. Namun demikian, dalam kondisi riil implementasinya belum berjalan secara optimal, karena belum seluruh Perangkat Daerah memanfaatkan aplikasi tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan komitmen, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi penggunaan aplikasi agar pengukuran kinerja dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan akuntabel.

Dalam komponen Pelaporan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan keseragaman dan kualitas laporan, telah disusun template LKjIP yang mengacu pada format dalam PermenPANRB Nomor 54 Tahun 2014 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan kinerja. Selain itu, dilakukan reviu atas LKjIP Perangkat Daerah guna memastikan kesesuaian substansi, kualitas analisis, serta keterkaitan antara kinerja dan penggunaan anggaran. Secara riil, pelaporan kinerja di Kabupaten Blitar terus diarahkan untuk lebih berfokus pada *outcome* dan manfaat yang dirasakan masyarakat serta tidak hanya bersifat administratif.

Sementara itu, pada komponen Evaluasi Internal, Pemerintah Kabupaten Blitar terus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Evaluasi AKIP Internal dilakukan dengan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Dalam kondisi riil,



komitmen pimpinan menjadi faktor penting dalam mendorong tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten, sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kabupaten Blitar dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan penyesuaian dan perubahan tim evaluasi internal dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang relevan, sehingga proses evaluasi dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Pemerintah Kabupaten Blitar juga berupaya meningkatkan kompetensi SDM melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) SAKIP ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pencapaian kinerja SAKIP masih ditemui beberapa kendala. Pada komponen Perencanaan Kinerja, kendala yang dihadapi diawali dari belum sepenuhnya selarasnya pemahaman antara Perangkat Daerah dengan Bappedalitbang sebagai koordinator dalam penyusunan dokumen perencanaan. Perbedaan pemahaman ini berdampak pada belum optimalnya penyelarasan antar dokumen perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari KemenPANRB masih ditemui beberapa permasalahan pada komponen perencanaan kinerja, seperti penetapan tujuan strategis masih cenderung hanya berangkat dari misi dan belum sepenuhnya mempertimbangkan isu strategis daerah, sehingga rumusannya menjadi kurang spesifik. Masih terdapat pula sasaran strategis perangkat daerah yang belum berorientasi *outcome* sesuai levelnya, serta indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan belum cukup merepresentasikan capaian kinerja. Penetapan target juga belum optimal, seperti penggunaan rentang (*range*) yang tidak spesifik dan adanya kecenderungan target menurun tiap tahun.

Di sisi lain, penjabaran pohon kinerja, khususnya pada level *intermediate* dan *immediate outcome*, masih belum logis dan cenderung operasional, serta penentuan *critical success factor* (CSF) belum sepenuhnya sesuai kerangka logis kinerja. Perencanaan kinerja juga belum didukung oleh pemetaan



crosscutting antar Perangkat Daerah, sehingga kontribusi lintas sektor dalam mencapai kinerja utama belum tergambar jelas. Selain itu, rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya mampu mendorong pencapaian kinerja strategis karena masih berfokus pada program dan kegiatan tanpa keterkaitan yang kuat terhadap hasil yang ingin dicapai. Target dalam rencana aksi pun masih bersifat kumulatif di akhir tahun dan cenderung menumpuk pada bulan-bulan akhir, sehingga kurang mendukung proses monitoring dan pengendalian kinerja secara berkala. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam penyelarasan pemahaman, serta perbaikan kualitas perencanaan agar lebih efektif dan berorientasi hasil.

Pada komponen Pengukuran Kinerja, masih terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, ditemukan bahwa belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan informasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara lengkap, dimana masih terdapat dokumen IKU yang belum memuat definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data, serta penanggung jawab indikator, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Selain itu, pemanfaatan Aplikasi SIYAKIN sebagai pengukuran kinerja belum berjalan optimal, belum semua Perangkat Daerah menginput capaian kinerja tahun 2025 secara berkala. Masih banyak isian yang kosong, seperti realisasi bulanan dan analisis faktor pendorong/penghambat, sehingga efektivitas pengukuran kinerja belum dapat dipastikan secara menyeluruh.

Dalam komponen Pelaporan Kinerja, kendala yang dihadapi antara lain masih terdapat variasi kualitas penyusunan LKjIP dari Perangkat Daerah, terutama dalam hal analisis capaian kinerja. Meskipun telah dibuatkan contoh template sesuai dengan format pada PermenPANRB Nomor 54 Tahun 2014, belum seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun laporan secara komprehensif



dan analitis. Selain itu, proses rewiu LKjIP masih membutuhkan penguatan agar dapat memberikan masukan yang lebih mendalam dan mendorong perbaikan kualitas laporan secara signifikan.

Pada komponen Evaluasi Internal, masih terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM evaluator masih menjadi tantangan, meskipun telah dilakukan penyesuaian tim berbasis kompetensi serta peningkatan kapasitas melalui diklat. Selain itu, tim evaluator belum didukung oleh aplikasi evaluasi yang terstandar sehingga proses evaluasi masih dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan. Di sisi lain, tahun 2025 merupakan masa peralihan dokumen perencanaan, sehingga menjadi kesulitan tersendiri dalam melakukan evaluasi, khususnya dalam menilai keselarasan perencanaan, indikator, dan target kinerja yang baru, yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh.

Dalam rangka tindak lanjut dari beberapa kendala di atas, pada komponen Perencanaan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Blitar Bappedalitbang akan melakukan perbaikan melalui penyelarasan dokumen perencanaan, salah satunya melalui pelaksanaan desk penyusunan Renstra bersama Perangkat Daerah guna memastikan konsistensi dan keterkaitan antar dokumen. Selain itu juga akan dilakukan penyempurnaan dokumen perencanaan mulai dari cascading kinerja, penyusunan crosscutting antar perangkat daerah, hingga perjanjian kinerja agar memiliki keterkaitan yang logis dalam mendukung pencapaian kinerja utama, disertai perbaikan pohon kinerja dan penetapan *critical success factor* (CSF) yang sesuai kerangka logis.

Pada komponen Pengukuran Kinerja, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan berbagai langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Selain melengkapi dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan informasi yang memadai seperti definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data, dan penanggung



jawab indikator, juga akan dilakukan pengembangan Aplikasi SIYAKIN melalui penambahan beberapa fitur guna mendukung kelengkapan dan kemudahan dalam proses pengukuran kinerja. Untuk meningkatkan pemahaman pengguna, akan dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian aplikasi SIYAKIN, mengingat masih terdapat personel yang belum memahami penggunaan aplikasi secara optimal serta adanya pegawai baru akibat mutasi. Selain itu, akan dilakukan penguatan komitmen melalui penyampaian surat secara intensif kepada Perangkat Daerah agar memanfaatkan aplikasi SIYAKIN secara konsisten dalam pelaporan dan monitoring kinerja, sehingga pengukuran kinerja dapat berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan akuntabel. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment kepada unit kerja untuk meningkatkan upaya pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pada komponen Pelaporan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan berbagai langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP. Upaya tersebut antara lain melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan LKjIP yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun laporan kinerja yang berkualitas. Selain itu, dilakukan penyempurnaan template LKjIP dari tahun sebelumnya agar lebih sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan analisis kinerja, serta memudahkan Perangkat Daerah dalam menyusun laporan secara sistematis dan seragam. Penguatan proses reviu LKjIP Perangkat Daerah juga terus dilakukan untuk memastikan kualitas substansi, ketajaman analisis, serta keterkaitan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Lebih lanjut, pada penyusunan LKjIP Tahun 2025 dilakukan upaya penajaman dengan memperdalam analisis capaian kinerja, sehingga laporan tidak hanya menyajikan data realisasi, tetapi juga mampu menguraikan faktor pendorong dan penghambat serta memberikan



rekomendasi perbaikan yang lebih konkret sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pada komponen Evaluasi Internal, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui APIP Inspektorat melakukan berbagai langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi AKIP Internal. Salah satunya melalui pemanfaatan Aplikasi DEKAP BLITAR dalam proses evaluasi, sehingga pemenuhan data dan dokumen dapat terintegrasi dalam sistem, dan tim evaluator dapat lebih fokus pada kualitas analisis implementasi SAKIP serta pemanfaatan hasilnya. Selain itu, akan dilaksanakan pembinaan kepada tim evaluator sebelum pelaksanaan evaluasi guna memperkuat kapasitas serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP. Sebagai bagian dari proses evaluasi, tim juga akan terlebih dahulu meminta data rencana aksi perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk melihat perkembangan implementasi SAKIP pada tahun berjalan serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi oleh perangkat daerah.

4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) melalui penguatan aspek perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi. Hal ini diwujudkan melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RPJMD, RKPD hingga APBD, serta penerapan pendekatan *money follows program* prioritas. Selain itu, dilakukan optimalisasi perencanaan dan penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar alokasi anggaran benar-benar mendukung pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Blitar juga melaksanakan desk intensif bersama Perangkat Daerah guna memastikan konsistensi program dan anggaran serta meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja.



Pada aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi penyerapan anggaran dengan monitoring secara berkala, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal melalui pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal. Pemerintah daerah juga berupaya mengefektifkan belanja pegawai agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan proporsional terhadap total belanja daerah. Langkah-langkah ini didukung dengan penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan serta komitmen pimpinan dalam menjaga disiplin pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, pada aspek pelaporan dan transparansi, Pemerintah Kabupaten Blitar terus meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyajian informasi keuangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan *upload* dokumen-dokumen keuangan secara tepat waktu melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai bentuk transparansi kepada publik. Selain itu, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilakukan melalui reviu dan pengawasan internal guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan juga terus dioptimalkan, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung peningkatan nilai IPKD serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam upaya peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Pemerintah Kabupaten Blitar masih menghadapi kendala pada aspek perencanaan dan penganggaran, khususnya terkait konsistensi antar dokumen. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD, sehingga arah kebijakan yang telah direncanakan tidak sepenuhnya tercermin



dalam penganggaran. Selain itu, juga terdapat ketidakkonsistenan dalam perencanaan dan penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada beberapa Perangkat Daerah, dimana alokasi pada RKPD tidak sepenuhnya sejalan dengan yang tercantum dalam APBD. Kondisi ini terjadi antara lain karena adanya penyesuaian dan prioritas anggaran yang lebih difokuskan pada program prioritas pembangunan daerah sesuai RKPD, sehingga berdampak pada pergeseran alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada aspek pelaksanaan keuangan, tantangan lainnya adalah tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih relatif rendah, ditunjukkan dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan yang baru mencapai sekitar 22%. Hal ini menunjukkan ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi, sehingga ruang fiskal daerah menjadi terbatas dalam mendukung pembangunan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD juga belum sepenuhnya maksimal, sehingga potensi peningkatan kapasitas fiskal belum tergarap secara optimal.

Sementara itu, dalam pengukuran kinerja IPKD, terdapat kendala terkait adanya perubahan dalam metode perhitungan pembobotan indikator yang mempengaruhi hasil penilaian. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian yang cepat dari pemerintah daerah, baik dalam pengelolaan data maupun strategi peningkatan kinerja. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan pemahaman yang lebih mendalam serta kesiapan sistem dan SDM agar tetap mampu memenuhi indikator penilaian secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan berbagai langkah tindak lanjut yang difokuskan pada penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Pada aspek perencanaan dan penganggaran,



akan dilakukan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran agar lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta tetap mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Proses desk dan pembahasan bersama antara Bappedalitbang, TAPD, dan Perangkat Daerah akan dioptimalkan guna memastikan keterkaitan yang lebih baik antara dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selanjutnya, pada aspek pelaksanaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Blitar akan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pemanfaatan aset daerah dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak serta retribusi daerah. Selain itu, pengendalian belanja akan diperkuat agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga keterbatasan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas pembangunan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana.

Pada aspek pengukuran dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Blitar akan meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap metode perhitungan dan pembobotan indikator IPKD. Penguatan sistem pengelolaan data serta monitoring capaian indikator juga akan terus dilakukan agar setiap perubahan kebijakan dapat direspon secara cepat dan tepat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan capaian kinerja IPKD secara berkelanjutan.

5. Indeks Inovasi Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja Indeks Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan identifikasi, penghimpunan, dan pemetaan inovasi di seluruh Perangkat Daerah yang kemudian



dikukuhkan melalui Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah. Guna menjamin keberlanjutan dan profesionalisme pengelolaan, telah ditetapkan Tim Pengelola Inovasi Daerah melalui Keputusan Bupati. Struktur ini dibentuk untuk memenuhi parameter penilaian pada indikator Pelaksana Inovasi, Ketersediaan SDM, Keterlibatan Aktor, serta Jejaring Inovasi, sehingga setiap inovasi memiliki legitimasi hukum dan manajemen yang terukur.

Dalam rangka membangun ekosistem inovasi yang adaptif dan responsif, Pemerintah Kabupaten Blitar memperkuat sinergi lintas sektor melalui Rapat Penguatan Komitmen Inovasi Daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Blitar dengan menghadirkan Kepala BSKDN Kemendagri sebagai narasumber untuk menyelaraskan visi kepala Perangkat Daerah dan unit kerja. Komitmen pimpinan ini ditindaklanjuti dengan koordinasi teknis yang dilakukan lebih awal, bahkan sebelum portal IID Kemendagri dibuka, guna memastikan kesiapan pelaporan tahun 2025.

Aspek teknis penyusunan dokumen dan kualitas data menjadi fokus krusial melalui pendampingan intensif oleh Tim Internal Bappedalitbang. Proses ini mencakup penyusunan deskripsi inovasi, pemenuhan eviden pendukung, hingga optimalisasi input data pada aplikasi IID. Untuk menjamin akurasi, dilakukan mekanisme review dan validasi internal secara berjenjang. Komunikasi aktif juga dijalin secara horizontal melalui forum BIG ACTOR (*Blitar Regency Innovation Communication Forum*) berbasis digital, serta secara vertikal dengan pembina inovasi di tingkat provinsi dan pusat guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.

Upaya berkelanjutan diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi dan perluasan replikasi inovasi. Pemerintah Kabupaten Blitar mengembangkan menu Inovasi Daerah pada aplikasi BIG RICE (*Blitar Regency Research and Innovation Center*) yang dilengkapi fitur *self-assessment* skor kematangan sebagai instrumen monitoring mandiri. Evaluasi berkala dilaksanakan secara



objektif untuk memenuhi indikator Monitoring dan Evaluasi. Sebagai langkah ekspansi, dilakukan pula Perjanjian Kerja Sama (PKS) Replikasi Inovasi Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2025, yang bertujuan untuk memenuhi indikator Replikasi sekaligus memperluas kemanfaatan inovasi antar-daerah.

Dalam implementasi pencapaian Indeks Inovasi Daerah, kendala yang dihadapi terletak pada aspek standarisasi manajerial dan keberlanjutan inovasi di tingkat Perangkat Daerah. Masih terdapat variasi pemahaman konseptual mengenai kriteria inovasi yang mengakibatkan belum seragamnya kualitas serta kelengkapan eviden yang dilaporkan, terutama pada inovasi yang belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi ini diperburuk dengan belum optimalnya budaya dokumentasi yang melembaga, di mana keberlanjutan inovasi masih cenderung melekat pada figur individu pelaksana. Akibatnya, ketika terjadi mutasi atau rotasi pegawai, kesinambungan inovasi tersebut sering kali terputus atau tidak dilanjutkan secara optimal karena belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kerja organisasi.

Selain faktor internal di unit kerja, dinamika regulasi dan manajemen waktu pelaporan menjadi hambatan teknis yang signifikan bagi tim pengelola inovasi daerah. Adanya perubahan indikator penilaian IID dari pemerintah pusat menuntut akselerasi penyesuaian yang cepat agar seluruh dokumen pelaporan tetap relevan dengan ketentuan terbaru. Hambatan administratif ini semakin kompleks dengan adanya keterbatasan waktu dalam proses finalisasi dan validasi data, khususnya saat mendekati batas akhir penginputan pada portal nasional. Hal tersebut menyebabkan proses reviu kualitas dokumen serta penguatan narasi inovasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal untuk seluruh usulan yang masuk.



Sebagai upaya tindak lanjut dari hambatan yang terjadi di atas, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen memperkuat sinergi lintas Perangkat Daerah guna membangun ekosistem inovasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Sebagai langkah awal persiapan penilaian IID Tahun 2026, dilaksanakan Rapat Penguatan Komitmen Inovasi Daerah dengan menghadirkan Kepala BRIDA Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber utama. Melalui momentum ini, dilakukan internalisasi praktik baik pelaporan inovasi daerah guna menyelaraskan visi seluruh kepala Perangkat Daerah. Selain itu, koordinasi aktif dengan pembina IID di tingkat provinsi maupun pusat akan terus ditingkatkan guna menjamin kesesuaian seluruh proses pelaporan dengan regulasi terbaru yang berlaku.

Langkah strategis selanjutnya difokuskan pada penguatan aspek teknis dan standarisasi dokumen pendukung melalui sosialisasi yang lebih terstruktur. Kegiatan ini menyasar pengelola atau admin inovasi di setiap unit kerja untuk mendorong budaya dokumentasi yang dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat periode pelaporan. Guna menjamin kualitas deskripsi inovasi dan pemenuhan eviden yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melaksanakan pendampingan teknis secara mendalam serta mekanisme review dan validasi internal secara berjenjang untuk meminimalkan kekeliruan data sebelum dilakukan penginputan akhir pada aplikasi IID.

Sebagai upaya optimalisasi hilirisasi dan diseminasi inovasi, Pemerintah Kabupaten Blitar akan memperluas jejaring melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Replikasi Inovasi Daerah, yang pada tahun 2026 direncanakan menyasar Kabupaten Lamongan. Di sisi lain, guna mengatasi keterbatasan anggaran pada sektor publikasi, akan dilakukan sosialisasi inovasi melalui berbagai kanal media berita dengan harapan cakupan informasi inovasi daerah dapat menjangkau *stakeholder* yang lebih luas sekaligus memperkuat profil inovasi Kabupaten Blitar di tingkat nasional.



Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.211
Program Penujng Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Penunjang
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pelayanan E Lapor dan penyampaian informasi publik lainnya	Keberhasilan: Tingkat transparansi informasi yang semakin baik dengan memperhatikan kualitas konten daerah. Ditopang juga dengan konsistensi dan SDM yang memadai serta teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan konten informasi. Selain itu juga partisipasi dan responsivitas pemerintah dan masyarakat yang aktif.	Dinas Kominfosantik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pembinaan dan pendampingan mewujudkan Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan 4,1, dan Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital 4,5.	Meningkatkan infrastruktur teknologi serta layanan digital untuk mewujudkan peningkatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Dinas Kominfosantik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral	Mewujudkan data informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.	Diskominfosantik
	Program Penyelenggaraan Persandian	Mewujudkan kesiapan pengamanan informasi	Menjadikan infrastruktur digital yang aman mencegah gangguan	Diskominfosantik



	Untuk Pengamanan Informasi	pemerintah daerah.	keamanan informasi	
	Program Kepegawaian Daerah	Pelayanan proses pengadaan ASN, penetapan pemberhentian karena berbagai ketentuan kepegawaian, penyediaan informasi kepegawaian yang akurat dan akuntabel, pelaksanaan proses mutasi dan promosi secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan Pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN secara terencana dan berkelanjutan, yang mendukung peningkatan profesionalisme, kesesuaian kompetensi dengan jabatan, serta peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik, Penerapan mekanisme penilaian kinerja yang objektif, terukur, dan sesuai ketentuan.	Peningkatan implementasi sistem Merit	BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi bagi ASN	Peningkatan kompetensi teknis ASN yang relevan dengan kebutuhan jabatan, sehingga mendukung peningkatan profesionalism, kinerja aparatur, dan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya pemenuhan persyaratan	BKPSDM



			kompetensi dan profesionalisme ASN sesuai jabatan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta terselenggaranya pengembangan kompetensi yang mendukung penerapan sistem merit dan peningkatan kinerja aparatur.	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Komitmen pengalokasian pendanaan pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun berkenaan	BAPPEDALITBANG
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keselarsan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100%	Pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap ketercapaian program terhadap perangkat daerah.	BAPPEDALITBANG
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	Meningkatkan keselarasan dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan Kabupaten	Seluruh Perangkat Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan, pelayanan perbendaharaan dan pengelolaan aset Pemerintah Daerah	Meningkatkan penguatan tata kelola anggaran yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Blitar dapat meningkatkan keselarasan antara perencanaan dan anggaran	BPKAD



			untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat.	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Mendorong pengembangan inovasi di masyarakat dan Pemerintah Daerah	Meningkatkan optimalisasi inovasi untuk pemecahan permasalahan pembangunan dan percepatan pelaksanaan pembangunan	BAPPEDALITBANG

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien adalah sebesar Rp. 1.994.698.024.730,96 dengan realisasi sebesar Rp. 1.849.577.850.294,27. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Tabel 2.112
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	97,37	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.527.626.971,00	2.469.066.391,00	97.68
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.857.391.500,00	4.730.477.155,00	97.39
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	573.998.900	572.505.451,81	99.74
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	360.202.600,00	358.664.938,00	99.57



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Kepegawaian Daerah	2.156.380.923,00	1.944.837.923,00	90,19
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.417.282.550,00	1.348.090.250,00	95,12
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.744.819.850,22	1.385.856.154,00	79,43
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.091.651.025,00	905.830.294,00	82,98
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.553.673.315.110,31	1.441.792.748.124,39	92,80
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	425.097.231.901,43	393.033.341.642,07	92,46
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.198.123.400,00	1.036.431.971,00	86,50
			Total	1.994.698.024.730,96	1.849.577.850.294,27	92,72
			Tingkat efisiensi			4,65

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 97,37% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 92,72%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,65. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Diwujudkan dalam bentuk digitalisasi proses bisnis melalui SPBE yang berhasil mereduksi biaya operasional administrasi



konvensional, serta pengintegrasian sistem aplikasi sektoral guna menghapuskan pemborosan anggaran akibat duplikasi pengembangan perangkat lunak antar unit kerja. Penghematan dari hasil integrasi sistem ini kemudian dialihkan untuk memperluas jangkauan layanan infrastruktur publik seperti program SI RIZKI, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas digital masyarakat secara luas.

Selain itu, efisiensi anggaran dalam indikator Sistem Merit diwujudkan melalui transformasi metode pengembangan kompetensi ASN yang beralih ke skema *e-learning* dan bimbingan teknis mandiri, yang secara signifikan memangkas biaya perjalanan dinas dan akomodasi tanpa mengurangi kualitas *output* kinerja. Pada indikator SAKIP diwujudkan melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang secara ketat memprioritaskan alokasi dana hanya pada program strategis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama. Strategi ini berhasil mereduksi pemborosan pada kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, sehingga tercipta peningkatan kualitas belanja (*value for money*) yang lebih efektif dalam menghasilkan *outcome* nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar.

Dalam aspek IPKD dan Indeks Inovasi Daerah, efisiensi direalisasikan melalui sinkronisasi perencanaan anggaran yang berbasis pada skala prioritas dan kemanfaatan publik, sehingga meminimalisir program-program yang bersifat seremonial. Secara keseluruhan, perwujudan efisiensi ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber daya fiskal secara akuntabel, di mana keterbatasan anggaran disikapi dengan inovasi tata kelola yang tetap mampu mendorong kenaikan indeks kinerja birokrasi di tingkat regional maupun nasional.



2) Efisiensi SDM

Diwujudkan melalui penguatan profesionalisme dan optimalisasi beban kerja aparatur yang berbasis pada kompetensi riil. Efisiensi ini diwujudkan secara nyata melalui penerapan Sistem Merit dan SAKIP, di mana penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kesesuaian keahlian (*right man on the right place*) guna meminimalisir tumpang tindih peran dan meningkatkan produktivitas individu dalam mencapai indikator kinerja utama. Perwujudan efisiensi SDM ini terlihat dari transformasi pola kerja manual menuju digital melalui SPBE, yang memungkinkan penyelesaian tugas administratif secara lebih cepat dengan jumlah personel yang terbatas namun memiliki kapabilitas teknis yang mumpuni.

Lebih lanjut, efisiensi SDM juga direalisasikan dalam bentuk peningkatan kapasitas mandiri melalui bimbingan teknis berkelanjutan dan pendampingan literasi digital. Dengan membekali aparatur dengan keterampilan spesifik, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mereduksi ketergantungan pada tenaga eksternal atau konsultan, sehingga proses bisnis internal menjadi lebih mandiri dan efektif. Dalam aspek IPKD, efisiensi SDM diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas fungsi yang solid, di mana kolaborasi aktif antar Perangkat Daerah memastikan setiap inovasi birokrasi dijalankan oleh SDM yang kompeten untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui percepatan alur birokrasi dan simplifikasi proses bisnis berbasis teknologi informasi. Efisiensi ini diwujudkan secara nyata melalui implementasi SPBE dan integrasi layanan pada Portal Pelayanan Publik, yang berhasil memangkas durasi pemrosesan administrasi pemerintahan dari hitungan hari menjadi hitungan jam melalui sistem yang



terotomasi. Dalam capaian efisiensi SAKIP diwujudkan melalui digitalisasi sistem pengukuran kinerja yaitu SIYAKIN yang memungkinkan proses pengumpulan, validasi, dan evaluasi data capaian indikator dilakukan secara *real-time* triwulanan bahkan bulanan, sehingga memangkas durasi penyusunan laporan tahunan.

Dalam aspek IPKD, efisiensi waktu direalisasikan melalui integrasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui aplikasi SIPD RI yang menjamin ketepatan jadwal penetapan APBD serta percepatan penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Lebih lanjut, efisiensi waktu juga direalisasikan dalam bentuk optimalisasi manajemen talenta pada Sistem Merit, di mana proses pemetaan kompetensi dan pengusulan mutasi/promosi dilakukan secara digital melalui sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, sehingga dapat dilakukan dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, perwujudan efisiensi waktu ini membuktikan bahwa transformasi digital di Kabupaten Blitar telah menciptakan ekosistem kerja yang lebih dinamis, di mana setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih cepat, responsif, dan memberikan kepastian layanan bagi masyarakat.

13. Sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kesalehan Sosial. Kesalehan Sosial merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama pada pemeluk agama. Aspek kesalehan sosial meliputi solidaritas sosial (kesediaan untuk memberi dan peduli kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan), toleransi (mampu menghargai perbedaan nilai-nilai



kehidupan, tidak memaksakan nilai pada orang lain serta tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda), kerjasama (melakukan pekerjaan atau aktifitas secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan atau mencapai tujuan bersama), adil (perilaku yang mampu bertindak sesuai proporsi, tersedianya kesempatan untuk mencapai tujuan bersama pula), dan stabilitas/ketertiban umum (tindakan yang berhubungan dengan orang lain tanpa mengganggu, merugikan dan melanggar kesejahteraan orang lain). Indeks Kesalehan Sosial adalah skor yang diperoleh dari responden sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, yang diukur dengan aspek solidaritas sosial, aspek toleransi, aspek kerjasama, dan aspek stabilitas/ketertiban umum. IKS dihitung dengan menjumlahkan nilai pada setiap aspek dimensinya.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama adalah sebesar 100,14% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.113
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	Indeks Kesalehan Sosial	84,86	84,98	100,14%
Capaian Kinerja Sasaran					100,14%

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar tahun 2025 dengan realisasi 84,98 dari target 84,86 menunjukkan kinerja yang baik terbukti melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100,14%. Keberhasilan ini didorong oleh kuatnya pilar-pilar pembentuk indeks, di mana dimensi toleransi menjadi kontributor tertinggi dengan skor 91,87, disusul oleh dimensi kerjasama sebesar 88,28, dimensi solidaritas sosial sebesar 83,51, serta dimensi ketertiban umum yang mencapai 80,83.



Sinergi antar dimensi ini mencerminkan tingkat kesalehan sosial masyarakat yang berada pada kategori sangat baik, Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, penguatan nilai keagamaan, serta upaya peningkatan solidaritas dan kerukunan antarwarga telah berjalan secara efektif. Masyarakat secara umum mampu mengimplementasikan nilai-nilai kesalehan sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk kepedulian sosial, gotong royong, maupun sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Meskipun target telah tercapai dan terlampaui, upaya pemeliharaan dan penguatan Indeks Kesalehan Sosial tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Faktor keberhasilan pencapaian Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kabupaten Blitar tahun 2025 didorong oleh penguatan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Tingginya skor pada dimensi toleransi dan kerja sama menjadi bukti efektivitas program moderasi beragama serta pelestarian budaya gotong royong yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat Blitar. Selain itu, peningkatan kesadaran kolektif terhadap ketertiban umum dan solidaritas sosial juga didukung oleh pola komunikasi publik yang partisipatif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam menjaga keamanan lingkungan serta saling membantu dalam menghadapi dinamika sosial. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa kebijakan pembangunan karakter yang inklusif telah berjalan selaras dengan upaya menciptakan lingkungan daerah yang kondusif, aman, dan beradab.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir dari tahun 2022-2025. Tren ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memperkuat kohesi sosial dan



kerukunan umat beragama berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Peningkatan nilai indeks setiap tahunnya mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan mental spiritual serta penguatan nilai-nilai toleransi telah terinternalisasi dengan baik di tengah masyarakat. Hal ini sekaligus membuktikan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan iklim daerah yang kondusif, aman, dan inklusif di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:

Tabel 2.114
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	Indeks Kesalehan Sosial	84,86	84,98	84,61	84,23	84,09

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai sebesar 98,69% dari target tahun terakhir RPJMD. Capaian yang hampir mendekati target akhir ini mengindikasikan bahwa akselerasi kinerja pada aspek pembangunan mental-spiritual dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Blitar telah berjalan sangat efektif melampaui ekspektasi awal tahun pertama. Tingginya angka 98,69% terhadap target akhir periode RPJMD menunjukkan bahwa profil sosiologis masyarakat Blitar memiliki ketahanan dan kematangan sosial yang sangat stabil. Hal ini menandakan bahwa instrumen kebijakan dalam memfasilitasi kebebasan beragama serta pemeliharaan ketenteraman telah terintegrasi dengan baik ke dalam perilaku kolektif masyarakat, sehingga tujuan jangka menengah yang direncanakan untuk lima tahun ke depan telah mendekati titik



pemenuhannya secara lebih cepat. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.115
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	Indeks Kesalehan Sosial	86,11	84,98	98,69%
Capaian Kinerja Sasaran					98,69%

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan capaian data tahun 2024, capaian kinerja Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar berada di atas Provinsi Jawa Timur dengan selisih sebesar 11,35 poin. Peningkatan capaian ini mencerminkan efektivitas program-program sosial dan keagamaan yang dilaksanakan di Kabupaten Blitar serta tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendukung kesalehan sosial. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.116
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	Indeks Kesalehan Sosial	84,98	73,63*

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Dalam rangka mencapai kinerja Indeks Kesalehan Sosial di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan upaya penguatan kerukunan umat beragama melalui optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan penguatan program moderasi beragama hingga ke tingkat desa. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi dialog lintas iman secara berkala dan dukungan terhadap kegiatan hari besar keagamaan yang inklusif, sehingga



mampu mempertahankan skor dimensi toleransi pada angka yang sangat tinggi yaitu 91,87. Sinergi antara pemerintah daerah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ini terbukti efektif dalam memitigasi potensi konflik sosial, sehingga kebebasan beragama di Kabupaten Blitar tetap terjamin dalam iklim yang sangat kondusif.

Selain itu, peningkatan nilai solidaritas dan kerja sama masyarakat dicapai melalui revitalisasi budaya gotong royong yang diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Blitar terus mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan swadaya dan aksi sosial komunitas lokal, yang tercermin dalam dimensi kerjasama sebesar 88,28. Penguatan jaring pengaman sosial yang memastikan bahwa kepedulian antarwarga tetap terjaga, sehingga masyarakat mampu menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

Dalam aspek ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Blitar mengedepankan pola pengawasan yang humanis melalui kolaborasi antara Satpol PP dan perangkat kewilayahan. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi mengenai kepatuhan terhadap norma hukum dan sosial di ruang publik secara persuasif. Penataan ruang publik yang tertib serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara swadaya (Siskamling) menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana daerah yang aman, tenteram, dan tertib bagi seluruh masyarakat.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Indeks Kesalahean Sosial, Pemerintah Kabupaten Blitar mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang terjadi pada upaya peningkatan kepedulian sosial dan gotong royong terletak pada pergeseran nilai kultural di tengah masyarakat yang semakin individualis. Program pemerintah daerah dalam menstimulasi partisipasi swadaya masyarakat seringkali terbentur dengan ekspektasi publik yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat/daerah secara langsung, sehingga semangat gotong royong yang bersifat mandiri cenderung menurun. Hal ini



mengakibatkan skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan belum mencapai target optimal, karena ketergantungan pada anggaran pemerintah masih dominan dibandingkan inisiatif kolektif warga.

Pada upaya peningkatan dimensi toleransi dan kerukunan umat beragama, kendala muncul dari tantangan menjaga kohesi sosial di tengah masifnya sebaran konten eksklusivisme di media sosial yang sulit diintervensi secara langsung oleh Perangkat Daerah. Meskipun secara sosiologis hubungan antarumat beragama di Kabupaten Blitar berjalan harmonis, munculnya riak-riak kecil terkait pendirian rumah ibadah atau kegiatan keagamaan tertentu di tingkat lokal terkadang menghambat proses sinkronisasi data kerukunan. Keterbatasan jangkauan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hingga ke tingkat desa menyebabkan potensi gesekan horizontal tidak selalu terdeteksi sejak dini, sehingga memengaruhi persepsi stabilitas dalam survei IKS.

Sementara itu, pada upaya pencapaian kinerja dimensi etika lingkungan dan kepatuhan hukum, hambatan utama berkaitan dengan rendahnya kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban umum dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kesalehan sosial. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri dan kepatuhan terhadap regulasi daerah (Perda) masih memerlukan pengawasan yang intensif, namun terbatasnya personel penegak Perda serta sarana prasarana pendukung di wilayah pelosok menjadi kendala operasional yang signifikan. Akibatnya, dimensi kepatuhan ini seringkali menjadi titik lemah yang mengoreksi capaian indeks secara keseluruhan karena belum terinternalisasinya nilai kesalehan sebagai perilaku taat aturan di ruang publik.

Sebagai langkah tindak lanjut pencapaian kinerja Indeks Kesalehan Sosial, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan revitalisasi semangat swadaya masyarakat melalui penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Pemerintah Kabupaten



Blitar akan menginisiasi program stimulasi berbasis kinerja kewilayahan yang memberikan apresiasi terhadap desa dengan tingkat partisipasi gotong royong tertinggi dalam pembangunan sarana publik. Selain itu, akan dilakukan penguatan basis data kepedulian sosial yang terintegrasi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial maupun rasa kemanusiaan yang tinggi dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga mampu menekan sikap individualisme di masyarakat.

Selain itu juga akan memperluas jangkauan dialog lintas agama dengan melibatkan tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan. Pemerintah daerah akan mengintensifkan sosialisasi moderasi beragama melalui kanal digital untuk menangkal radikalisme dan disinformasi yang berpotensi merusak kohesi sosial. Selain itu, fungsi deteksi dini terhadap potensi gesekan horizontal akan diperkuat melalui sinergi antara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan aparat kewilayahan, guna memastikan setiap bibit konflik dapat diselesaikan melalui musyawarah sebelum berkembang menjadi gangguan stabilitas.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Blitar akan mengoptimalkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai pusat literasi dan konsultasi hukum yang inklusif bagi masyarakat. Melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan penyuluhan hukum keliling, diharapkan hambatan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi regulasi dapat teratasi, sehingga tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah meningkat. Posbankum juga akan difungsikan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ringan melalui pendekatan *restorative justice*, guna menciptakan tatanan masyarakat yang lebih disiplin, tertib, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi sebagai wujud nyata kesalehan sosial.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:



Tabel 2.117
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), penumbuhkembangan keberanian pemuda untuk berpendapat melalui SpaDa (Suara Pelajar Pasti Didengar), penyusunan Renaksi Bela Negara, Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan, Fasilitasi Panca Mandala, Pembinaan Kampung Pancasila, pembagian bendera merah putih, pembinaan Paskibra,	Memupuk semangat kebangsaan dan meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan untuk mencegah terjadinya konflik antar suku	Bakesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksanaan sosialisasi penguatan kesadaran demokrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat kepada pemilih pemula, penyaluran hibah kepada partai politik, peningkatan kapasitas fungsionaris parpol	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Bakesbangpol
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Workshop dan bimtek keuangan dan administrasi bagi pengurus ormas, dan pengawasan kegiatan ormas	Penguatan kelembagaan dan peran organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan	Bakesbangpol
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Sosialisasi P4GN kepada pelajar SMA sederajat, Penyusunan Renaksi P4GN,	Menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial,	Bakesbangpol



	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Sidak dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada pelajar, Fasilitasi kegiatan FKUB, kebiatan stabilisasi ekonomi, sosial, budaya dan agama	budaya dan agama	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Fasilitasi FKDM, audiensi dalam rangka penanganan konflik, pull bucket pengambilan kebijakan pra konflik	Meminimalisir terjadinya konflik sosial	Bakesbangpol
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda, penertiban gepeng dan anjal, PKL, Spanduk/Reklame, patroli wilayah, Pengamanan Pos Kotis Nataru dan Ketupat Semeru, Pengamanan Demo, koordinasi dan pembinaan satlinmas di tingkat desa/ kelurahan, peningkatan kapasitas bagi satpol pp dan satlinmas	Dengan adanya ketentraman dan ketertiban yang terjaga, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial, keagamaan, dan budaya dengan lancar, sehingga mendorong terciptanya nilai-nilai kesalehan sosial yang lebih tinggi.	Satpol PP dan Damkar
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pemeliharaan PJU	Menjaga keamanan di jalan	Dinas Perhubungan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan kapasitas kelembagaan LKD, pelaksanaan BBGRM, sosialisasi peduli rumah ibadah	LKD yang tangguh dan berfungsi dengan baik mendorong pada stabilitas keamanan, sosial dan kerukunan antar umat di Desa, serta menggiatkan gotong royong dan kerjasama antar masyarakat tingkat desa	DPMD
	Program Koordinasi	Terciptanya kondisi	Melalui sinergi antar aparat	Kecamatan



	Ketentraman dan Ketertiban Umum	masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif melalui koordinasi yang efektif antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pihak terkait.	keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan koordinasi yang efektif, gangguan ketertiban dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan keagamaan dengan nyaman.	

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama adalah sebesar Rp. 54.606.666.326,90 dengan realisasi sebesar Rp. 50.189.958.717,58. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama.

Tabel 2.118
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	100,14	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.532.417.999,00	1.522.258.100,00	99,34
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.246.640.000,00	2.236.790.359,00	99,56



No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.528.270.581,00	3.526.706.100,00	99,96
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	115.291.050,00	115.172.500,00	99,90
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.135.603.046,00	1.757.956.000,00	82,32
			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.814.536.734,00	1.209.484.169,00	42,97
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	41.148.207.706,9	38.805.872.494,58	94,31
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	349.400.900,00	334.182.995,00	95,64
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	736.298.310,00	681.536.000,00	92,56
			Total	54.606.666.326,90	50.189.958.717,58	91,91
			Tingkat efisiensi			8,23

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100,14% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 91,91%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya



sebesar 8,23. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Diwujudkan melalui strategi kolaborasi multipihak yang mengintegrasikan agenda penguatan karakter bangsa ke dalam forum-forum kemasyarakatan yang sudah ada di tingkat desa. Dengan mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan sebagai mitra strategis, pemerintah daerah mampu memperluas jangkauan edukasi tanpa harus menambah alokasi biaya operasional yang besar. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak ganda terhadap stabilitas sosial dan kepatuhan hukum masyarakat melalui metode pendampingan yang lebih partisipatif dan tepat sasaran.

2) Efisiensi SDM

Diwujudkan dengan menggerakkan tokoh masyarakat, penyuluh agama, dan penggerak swadaya desa sebagai mitra strategis dalam edukasi nilai-nilai sosial, pemerintah daerah mampu menjangkau wilayah yang luas meskipun dengan jumlah personel ASN yang terbatas. Transformasi peran aparatur dari pelaksana teknis menjadi fasilitator dan koordinator lintas sektoral ini terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan edukasi dan mediasi sosial secara lebih responsif, cepat, dan tepat sasaran tanpa memerlukan penambahan struktur organisasi yang besar.

3) Efisiensi Waktu

Diwujudkan melalui percepatan mekanisme koordinasi lintas sektoral dan pemanfaatan kanal digital sebagai media sosialisasi yang masif. Dengan memangkas rantai birokrasi dalam pelaporan data sosiokultural dari tingkat desa ke kabupaten, pemerintah daerah mampu melakukan deteksi dini potensi konflik dan intervensi kebijakan secara lebih responsif.



Penggunaan metode survei digital yang lebih dinamis juga mempercepat proses evaluasi kinerja, sehingga tim teknis dapat merumuskan langkah perbaikan secara cepat tanpa harus menunggu siklus pelaporan tahunan berakhir.

14. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah perangkat analisis kebencanaan yang mengukur dan membandingkan tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah dalam menghadapi bencana.

$$IRB = \frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas Atau Kemampuan Menangani Bencana}}$$

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah adalah sebesar 116,70% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 2.119
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	156,32	130,22	116,70%
Capaian Kinerja Sasaran					116,70%

Sumber: BPBD, 2025

Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat signifikan dengan realisasi angka sebesar 130,22 dari target yang ditetapkan sebesar 156,32. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah berhasil melampaui target kinerja yang direncanakan dengan capaian sebesar 116,70%. Penurunan angka indeks ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan daerah dalam menurunkan tingkat kerentanan wilayah sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di Kabupaten Blitar.



Keberhasilan melampaui target tersebut didorong oleh penguatan strategi mitigasi struktural seperti pembangunan tanggul banjir, perkuatan tebing, shelter evakuasi, atau sistem drainase dan non-struktural yang terintegrasi secara lintas sektoral. Optimalisasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan peningkatan literasi kebencanaan di tingkat desa telah memperkuat ketangguhan masyarakat dalam mendeteksi dini serta merespons ancaman secara mandiri. Selain itu, sinkronisasi data kerawanan bencana yang lebih akurat dan sistem peringatan dini yang semakin responsif memungkinkan pemerintah daerah melakukan intervensi perlindungan publik secara lebih efektif. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan risiko dampak bencana, baik dari sisi perlindungan jiwa maupun meminimalisir kerugian aset produktif daerah.

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah dengan indikator Indeks Risiko Bencana mengalami peningkatan kinerja selama 3 tahun terakhir dari tahun 2023-2025, sedangkan pada tahun 2022-2023 kinerja Indeks Risiko Bencana ini mengalami penurunan sebesar 7,84 poin. Penurunan kinerja pada periode 2022-2023 tersebut dipengaruhi oleh adanya pemutakhiran metodologi penilaian indeks oleh pemerintah pusat serta dinamika perubahan parameter kerentanan wilayah pasca pandemi yang memicu kenaikan skor risiko secara teknis. Namun, memasuki periode 2023-2025, kinerja kembali menunjukkan tren peningkatan kinerja yang konsisten. Hal ini didorong oleh penguatan kapasitas daerah melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) secara masif dan integrasi sistem peringatan dini berbasis komunitas yang terbukti efektif menurunkan tingkat kerentanan masyarakat secara signifikan. Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari sinkronisasi program lintas sektor dalam mitigasi bencana struktural yang lebih terukur dan berkelanjutan. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2025:



Tabel 2.120
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	156,32	130,22	138,40	149,35	141,51

Sumber BPBD, 2025

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode RPJMD 2025-2029, dan telah tercapai melampaui sebesar 109,95% dari target tahun terakhir RPJMD. Tercapainya target akhir periode pada tahun pertama ini mengindikasikan bahwa penetapan *baseline* dan proyeksi target pada awal perencanaan dilakukan secara konservatif, namun diiringi dengan implementasi program mitigasi yang sangat efektif. Akselerasi capaian ini merupakan hasil dari konsolidasi lintas sektor yang solid serta optimalisasi anggaran yang terfokus pada lokus-lokus dengan kerawanan tinggi. Meskipun secara administratif target RPJMD telah terlampaui, Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berkomitmen untuk terus menekan angka risiko bencana melalui pemutakhiran sarana mitigasi struktural dan penguatan resiliensi komunitas guna mempertahankan tren positif ini di tahun-tahun mendatang. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 2.121
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	144,61	130,22	109,95
Capaian Kinerja Sasaran					109,95%

Sumber: BPBD, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Blitar masih dibawah Provinsi Jawa Timur dengan selisih sebesar 21,86 poin. Perbedaan capaian ini merupakan representasi



dari karakteristik geografis Kabupaten Blitar yang memiliki kluster kerawanan bencana lebih variatif, mulai dari ancaman erupsi gunung api hingga risiko pesisir, yang secara akumulatif memberikan beban penilaian lebih tinggi dibandingkan rata-rata wilayah di Jawa Timur. Meskipun secara tren internal Kabupaten Blitar telah menunjukkan kemajuan yang pesat, gap poin tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi pada indikator kapasitas yang belum optimal. Ke depan, sinkronisasi strategi mitigasi dengan standar operasional tingkat provinsi akan diperketat guna memastikan efektivitas penanggulangan bencana di tingkat lokal mampu bersaing dan berkontribusi lebih besar terhadap penurunan indeks risiko bencana di Jawa Timur secara keseluruhan. Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja pada Kabupaten Blitar dengan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.122
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kab Blitar	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	130,22	108,36

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dalam rangka mencapai kinerja Indeks Risiko Bencana, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan penguatan kapasitas kawasan juga diakselerasi melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk pelatihan dan pemberdayaan. Fokus utama kegiatan ini adalah akselerasi pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) di wilayah-wilayah prioritas. Pada tahun 2025 telah terbentuk sebanyak 46 Destana dari total 248 Desa/Kelurahan atau sebesar 18.5%. Serta pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Melalui penguatan kapasitas di lingkungan Masyarakat dan pendidikan, diharapkan terbentuk kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana secara efektif dan terukur.



Mengingat karakteristik geografis Kabupaten Blitar yang memiliki risiko bencana multidimensi, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan kemandirian dalam deteksi dini dan manajemen evakuasi mandiri. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan indeks kerentanan sosial dengan memastikan bahwa setiap unit terkecil di tingkat desa memiliki standar operasional prosedur kesiapsiagaan yang teruji dalam menghadapi kondisi darurat. Hal ini juga didukung dengan mengoptimalkan strategi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui baik secara *offline* maupun *online* dengan penggunaan media sosial guna menjamin aksesibilitas informasi kebencanaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memastikan bahwa edukasi mitigasi dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Dalam aspek mitigasi struktural, Pemerintah Kabupaten Blitar mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perlindungan publik yang berbasis pada pemetaan zona rawan bencana. Implementasi program ini mencakup normalisasi jalur evakuasi, penguatan tanggul penahan lahar, serta pemeliharaan berkelanjutan terhadap *Early Warning System* (EWS) di titik-titik strategis.

Terakhir, dilakukan penguatan koordinasi dan kolaborasi melalui Temu Relawan Blitar Raya untuk menyinergikan prosedur operasi standar (SOP) dalam penanganan darurat. Pertemuan ini menghasilkan konsensus mengenai pembagian wilayah tugas sesuai kompetensi komunitas serta penetapan sistem pelaporan kejadian secara *real-time*. Sinergi antara BPBD dan jejaring relawan ini memastikan mekanisme respon cepat, evakuasi, hingga distribusi logistik dapat berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan tepat sasaran guna meminimalisir dampak risiko bencana di wilayah.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pencapaian kinerja Indeks Risiko Bencana adalah diantaranya keterbatasan infrastruktur mitigasi struktural yang belum



proporsional dengan luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas ancaman bencana di Kabupaten Blitar. Meskipun realisasi IRB telah mencapai 130,22, namun tantangan geografis Kabupaten Blitar memiliki topografi dan multi-ancaman bencana yang beragam. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2024 - 2029 Kabupaten Blitar memiliki 14 (empat belas) jenis potensi bahaya yang meliputi Gempabumi, Tsunami, Kekeringan, Banjir, Banjir Bandang, Gelombang Ekstrim/Abrasi, Kebakaran Lahan dan Hutan, Kebakaran Gedung dan Pemukiman, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit, Cuaca Ekstrim, Likuifaksi, Erupsi Gunung api Kelud dan Tanah Longsor dengan tingkat risiko bencana tinggi dan sedang pada 22 kecamatan, sehingga jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan masih sulit merata.

Kendala berikutnya terletak pada disparitas tingkat literasi kebencanaan dan keberlanjutan kapasitas masyarakat di tingkat desa. Meskipun program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) telah dilaksanakan, tantangan muncul dalam menjaga konsistensi keaktifan relawan dan pemutakhiran data kerentanan secara mandiri. Mengingat mobilitas penduduk yang tinggi dan variasi latar belakang sosial ekonomi, internalisasi budaya sadar bencana melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) seringkali terbentur pada masalah jangkauan frekuensi sosialisasi yang belum merata ke seluruh kelompok rentan. Hal ini menyebabkan standar prosedur evakuasi mandiri belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai perilaku keseharian, yang pada akhirnya memengaruhi skor penilaian kapasitas masyarakat dalam komponen IRB.

Tindak lanjut sebagai langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengatasi kendala di atas adalah pertama berfokus pada penguatan aspek preventif melalui Penyusunan Rencana Kontinjensi yang komprehensif untuk setiap jenis ancaman bencana dominan di Kabupaten Blitar. Dokumen ini



tidak hanya akan berhenti pada tataran administratif, namun diakselerasi melalui pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana secara rutin untuk menguji fungsi komando dan koordinasi lapangan. Melalui simulasi yang melibatkan berbagai unsur, diharapkan kesiapan infrastruktur dan prosedur evakuasi dapat dievaluasi secara berkala, sehingga dokumen perencanaan yang disusun benar-benar aplikatif dan mampu meminimalisir dampak risiko saat terjadi eskalasi darurat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen melakukan penguatan respon tanggap bencana dengan mengintegrasikan sistem peringatan dini dengan kesiapan personil di tingkat lokal. Optimalisasi kualitas pelayanan pemulihan bencana akan didorong melalui standarisasi prosedur operasional di seluruh pos lapangan agar penanganan darurat dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Penekanan pada penguatan rantai komando ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi kebencanaan yang diterima dapat segera ditindaklanjuti dengan tindakan penyelamatan yang cepat, sehingga tingkat fatalitas akibat bencana dapat ditekan serendah mungkin.

Sebagai pilar pendukung utama, Pemerintah Kabupaten Blitar akan memasifkan sinergitas pentahelix untuk menciptakan ketangguhan daerah yang inklusif. Kerja sama ini akan diwujudkan dalam forum-forum pengurangan risiko bencana yang mempertemukan pakar dari akademisi, atau dukungan sumber daya dari dunia usaha, serta fungsi pengawasan dan penyebaran informasi oleh media massa. Dengan membangun pola kolaborasi yang solid antar elemen tersebut, upaya penurunan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Blitar tidak lagi bersifat parsial, melainkan menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan guna mewujudkan wilayah yang aman dan tangguh terhadap bencana.



Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah, didukung oleh beberapa Program sebagai berikut:

Tabel 2.123
Program Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah

Sasaran	Program	Output	Dukungan Program terhadap Pencapaian Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	- Peran sentral Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan. - Pembentukan forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa/kelurahan dengan Destana - Respon cepat Unit Reaksi Cepat (URC) dan kolaborasi lintas sektor - penyusunan kajian teknis kebutuhan pasca bencana yang akurat	Warga di arean bencana mendapat panganan secara cepat dan tepat baik oleh Pemerintah Daerah maupun melalui pemberdayaan masyarakat dengan terbentuknya Destana	BPBD
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, Pemberdayaan Masyarakat kesiapsiagaan bencana meliputi koordinasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan pembentukan Kampung Siaga Bencana	Korban bencana mendapat perlindungan dan pemulihan dalam masa tanggap darurat dan pasca bencana	Dinas Sosial

Sumber: Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025



Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah adalah sebesar Rp. 1.405.942.297,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.233.176.672,60. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah.

Tabel 2.124
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	116,70	Program Penanggulangan Bencana	1.228.055.047,00	1.090.895.672,60	88,83
			Program Penanganan Bencana	177.887.250,00	142.281.000,00	81,31
			Total	1.405.942.297,00	1.233.176.672,60	87,71
			Tingkat efisiensi			28,99

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 116,70% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 87,71%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 28,99. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Pencapaian Indeks Risiko Bencana tahun 2025 sebesar 130,22 yang berhasil melampaui target akhir RPJMD (109,95%) mencerminkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi, di mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan alokasi belanja dengan realisasi belanja sebesar 87,71% untuk menghasilkan dampak pengurangan risiko yang maksimal. Efisiensi ini tercapai melalui strategi pergeseran paradigma dari



belanja yang bersifat responsif-kuratif menuju belanja mitigasi preventif yang lebih ekonomis, seperti penguatan kapasitas masyarakat melalui Destana dan KIE digital yang memiliki rasio biaya-manfaat lebih baik dibandingkan biaya pemulihan pasca-bencana.

2) Efisiensi SDM

Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil memaksimalkan peran personil BPBD melalui pembagian tugas yang efektif, di mana satu personil mampu menjalankan fungsi koordinasi sekaligus edukasi di lapangan. Keberhasilan ini juga didukung penuh oleh keterlibatan aktif relawan dan masyarakat, sehingga beban kerja pemerintah dapat terbantu oleh partisipasi publik. Dengan kata lain, capaian kinerja yang melampaui target ini membuktikan bahwa kualitas koordinasi dan semangat gotong royong antar elemen jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar jumlah personil yang ada.

3) Efisiensi Waktu

Optimalisasi teknologi digital melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) berbasis media sosial. Pemanfaatan platform digital memungkinkan diseminasi informasi mitigasi dan peringatan dini tersampaikan kepada masyarakat secara instan dan serentak tanpa terkendala jarak fisik, sehingga memangkas waktu birokrasi penyuluhan konvensional. Kecepatan penyebaran konten edukasi melalui media sosial ini memastikan masyarakat memiliki waktu persiapan yang lebih panjang dalam menghadapi potensi ancaman, yang secara langsung meningkatkan responsivitas daerah dalam penanganan bencana.



Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan di atas, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.125
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.126
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	101,26%	101,26%	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Lama Sekolah	101,26%		
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	100,09%	100,09%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	100,53%	100,53%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	Indeks Pembangunan Pemuda	101,59%	101,59%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Efektivitas Investasi	ICOR	99,68%	99,68%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	497,6%	225,35%	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	75,71%		
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	102,75%		
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	105,67%	105,67%	Sangat Tinggi



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	104,06%	104,06%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya kuantitas & kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	97,23%	97,23%	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	98,27%	98,27%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,04%	101,04%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	SPBE	99,49%	97,37%	Sangat Tinggi
		Indeks Sistem Merit	98,91%		
		Skor SAKIP	96,80%		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	90,20%		
		Indeks Inovasi Daerah	101,47%		
13	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	Indeks Kesalehan Sosial	100,14%	100,14%	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	116,70%	116,70%	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar				110,64	Sangat Tinggi

Sumber Bagian Organisasi (Data Diolah), 2025

C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.127
Realisasi Keuangan Sasaran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Anggaran		
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	138.759.993.305,50	123.992.626.017,30	89,36
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Persentase Desa Mandiri)	11,658,685,456,00	10.969.225.776.,00	94,09
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat (Pengeluaran Perkapita (000))	18.142.385.158,81	16.939.317.864,45	93,37
4	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah (Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata)	145.888.256.641,93	55.154.112.844,00	37,81

Sumber: BPKAD, 2025



Realisasi keuangan merupakan representasi dari dukungan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kabupaten Blitar senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Namun, dalam mencapai target serapan yang optimal, masih ditemui berbagai kendala teknis maupun administratif yang dipengaruhi oleh dinamika regulasi serta tantangan sektoral di lapangan, antara lain sebagai berikut:

1. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Realisasi anggaran dalam menunjang kinerja sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Blitar menghadapi hambatan signifikan pada Program Pengembangan Perumahan dengan serapan terendah sebesar 26,13%. Rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan oleh penyesuaian data kejadian bencana serta kelengkapan persyaratan penerima bantuan, sehingga dari target rehabilitasi 11 unit rumah hanya dapat dilaksanakan 2 unit. Kendala lain juga terkait dengan penyesuaian lokasi, kesiapan lahan, serta kelengkapan administrasi dan persyaratan penerima bantuan, sehingga dari target 19 unit rumah hanya dapat direalisasikan 4 unit. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada pemenuhan indikator Persentase PPKS, di mana belum optimalnya penyediaan hunian layak menghambat upaya penanganan kerentanan sosial bagi warga terdampak. Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempertajam validasi data sejak tahap perencanaan agar rehabilitasi rumah bagi PPKS lebih tepat sasaran guna mempercepat penurunan angka permasalahan sosial di daerah.

2. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Persentase Desa Mandiri)

Realisasi anggaran dalam menunjang kinerja sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Serta Akuntabilitas Kinerja



Pemerintah Daerah, khususnya pada indikator Persentase Desa Mandiri, menghadapi hambatan pada Program Peningkatan Kerjasama Desa yang mencatatkan serapan terendah sebesar 23,92%. Rendahnya capaian realisasi ini utamanya disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran dana desa yang diperuntukkan bagi sektor kerjasama, serta belum terlaksananya kesepakatan kerjasama antar desa yang baru guna memperpanjang perjanjian kerjasama yang telah ada sebelumnya. Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya aktivitas fasilitasi kerjasama desa di lapangan, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat terserap secara optimal sesuai rencana yang ditetapkan dalam mendukung penguatan kemandirian desa di Kabupaten Blitar.

3. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat

Realisasi anggaran dalam menunjang kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Blitar menunjukkan tantangan pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang mencatatkan serapan terendah sebesar 74,78%. Rendahnya penyerapan anggaran pada program yang mendukung indikator pengeluaran perkapita ini terutama disebabkan oleh adanya sisa kontrak yang tidak dapat digunakan kembali serta sisa anggaran yang tidak mencukupi standar Satuan Standar Harga (SSH) sehingga tidak dapat dibelanjakan secara optimal. Menindaklanjuti kendala tersebut, langkah yang diambil adalah melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan agar lebih adaptif terhadap kondisi lapangan dan kebijakan anggaran, sehingga alokasi dana di masa mendatang dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, khususnya pada sektor peternakan dan perikanan.



4. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah (Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan dan Jumlah Kunjungan Wisata)

Realisasi anggaran dalam menunjang kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah di Kabupaten Blitar menghadapi kendala pada Program Penyelenggaraan Jalan yang mencatatkan serapan terendah sebesar 34,82%. Rendahnya penyerapan ini karena adanya keterlambatan proses lelang, perubahan kebijakan anggaran, atau penyesuaian prioritas pembangunan. Pada pelaksanaan pekerjaan fisik dapat terealisasi namun proses pencairan anggaran terdapat kendala pada beberapa proyek yang melebihi batas waktu pencairan sehingga akan dilakukan pembayaran melalui mekanisme pembayaran hutang pada tahun anggaran 2026 dan juga terdapat beberapa paket yang proses penyelesaian fisiknya melampaui batas waktu pengerjaan sesuai dengan kontrak sehingga dikenakan denda keterlambatan dan penyelesaian pencairan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.

Tabel 2.128
Realisasi Keuangan Sasaran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran	Anggaran		
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	212.911.496.288,29	199.426.653.184,75	93,67
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	127.508.070.864,50	111.849.010.742,70	87,72
3	Meningkatnya Kesenjangan Gender	432.151.443.907,89	401.203.354.309,57	92,84
4	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	275.718.715.658,89	254.521.021.123,77	92,31
5	Meningkatnya Efektivitas Investasi	241.947.507.931,53	140.053.984.033,7	57,89



No.	Sasaran	Anggaran		
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	29.855.268.309,00	27.210.185.925,00	91,14
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja	8.934.517.700,00	8.308.599.112,00	92,99
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	453.249.787.907,82	335.924.773.144,91	74,11
9	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	247.668.960.852,83	141.565.464.609,88	57,16
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	50.052.000.356,90	46.836.494.912,58	93,58
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	323.956.455.287,79	299.416.145.111,75	92,42
12	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1.994.698.024.730,96	1.849.577.850.294,27	92,72
13	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	54.606.666.326,90	50.189.958.717,58	91,91
14	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	1.405.942.297,00	1.233.176.672,60	87,71

Sumber: BPKAD, 2025

Realisasi keuangan merupakan representasi dari dukungan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kabupaten Blitar senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Namun, dalam mencapai target serapan yang optimal, masih ditemui berbagai kendala teknis maupun administratif yang dipengaruhi oleh dinamika regulasi serta tantangan sektoral di lapangan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat

Realisasi anggaran dalam menunjang kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menghadapi kendala pada Program Pemenuhan Hak Anak yang



mencatatkan serapan terendah sebesar 41,30%. Rendahnya capaian realisasi ini disebabkan oleh masih banyaknya lembaga anak yang belum memenuhi kriteria standardisasi (hanya mencapai 1,3%), yang dipicu oleh keterbatasan jumlah petugas yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA). Selain itu, kurangnya perhatian khusus terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana pada fasilitas ramah anak turut menghambat optimalisasi penyerapan anggaran, sehingga diperlukan langkah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan alokasi pemeliharaan fisik guna mendukung lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas bagi anak di Kabupaten Blitar.

2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Realisasi anggaran dalam menunjang sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blitar menghadapi hambatan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang mencatatkan serapan terendah sebesar 67,95%, meskipun demikian capaian kinerja pada Program ini dapat melampaui target dari 93,50% terealisasi sebesar 90,45%. Rendahnya penyerapan ini disebabkan oleh kendala teknis berupa keterlambatan pekerjaan fisik dan pemenuhan administrasi, sehingga proses pencairan akan dialokasikan pada tahun anggaran 2026 melalui mekanisme pembayaran utang setelah revidi Inspektorat.

3. Meningkatnya Kesetaraan Gender

Realisasi anggaran dalam menunjang kinerja sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Blitar, khususnya dalam mendukung capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), menghadapi kendala pada Program Pemenuhan Hak Anak yang mencatatkan serapan terendah sebesar 41,30%. Rendahnya realisasi ini dipicu oleh fakta bahwa masih banyak lembaga anak yang belum terstandardisasi (baru mencapai 1,3%), yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah petugas di lembaga anak yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) serta kurangnya perhatian khusus terhadap pemeliharaan sarana



dan prasarana fasilitas ramah anak. Kondisi tersebut menghambat optimalisasi penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, sehingga ke depan diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan komitmen terhadap pemeliharaan fasilitas guna memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih efektif di Kabupaten Blitar.

4. Meningkatnya Kualitas Generasi Muda

Realisasi anggaran dalam menunjang kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda di Kabupaten Blitar, dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), menghadapi kendala pada Program Pemenuhan Hak Anak yang mencatatkan serapan terendah sebesar 41,30%. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh masih banyaknya lembaga anak yang belum memenuhi standar (baru mencapai 1,3%), yang dipicu oleh keterbatasan jumlah petugas dengan kualifikasi pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) serta kurangnya atensi terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas ramah anak. Kondisi tersebut menghambat optimalisasi penyerapan anggaran dan berimplikasi langsung pada upaya pemerintah dalam memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang kondusif.

5. Meningkatnya Efektivitas Investasi

Realisasi anggaran dalam menunjang kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas Investasi di Kabupaten Blitar menghadapi kendala pada Program Penyelenggaraan Jalan dengan serapan terendah sebesar 34,82%, yang dipicu oleh keterlambatan lelang, perubahan kebijakan anggaran, serta penyesuaian prioritas pembangunan. Meskipun pekerjaan fisik berjalan, kendala administrasi pada proyek yang melebihi batas waktu pencairan mengakibatkan pembayaran dialihkan melalui mekanisme utang pada tahun anggaran 2026. Meskipun demikian, pada program ini masih tetap dapat mencapai kinerja yang baik, terbukti dari pencapaian kinerja yang melebihi target dari 80,18% terealisasi sebesar 80,62%. Dengan infrastruktur yang tetap terbangun meskipun terdapat kendala penyerapan anggaran, efektivitas setiap unit modal yang



diinvestasikan tetap dapat optimal dalam memicu pertumbuhan output daerah, sehingga investasi menjadi lebih produktif dan efisien.

6. Meningkatnya Produktivitas Daerah

Realisasi anggaran dalam menunjang kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah di Kabupaten Blitar menghadapi hambatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mencatatkan serapan terendah sebesar 62,35%. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh masih adanya pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin dan tepat waktu yang mempengaruhi data realisasi penanaman modal, serta adanya penyesuaian alokasi anggaran dan target kegiatan pengawasan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan. Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan pemetaan ulang sasaran pelaku usaha wajib LKPM, penguatan pendampingan dan bimbingan teknis, penyampaian surat teguran bagi yang melanggar, serta optimalisasi sosialisasi pelaporan melalui media sosial dan surat elektronik guna memastikan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas investasi dalam mendorong produktivitas daerah.

7. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Realisasi anggaran dalam menunjang sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja di Kabupaten Blitar menghadapi kendala pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang mencatatkan serapan terendah sebesar 75,98%. Rendahnya penyerapan anggaran pada program pendukung indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini disebabkan oleh kendala teknis pada proses penerbitan sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di mana sertifikat bagi peserta pelatihan belum dapat diserahkan pada periode November-Desember karena adanya waktu tunggu proses administrasi. Kondisi tersebut menghambat pelaporan penyelesaian kegiatan secara utuh, yang secara tidak langsung berpengaruh pada optimalisasi program penyiapan tenaga kerja kompeten dalam upaya



menekan angka pengangguran. Sebagai langkah tindak lanjut, akan merencanakan pelaksanaan pelatihan ke Triwulan II dan III agar pada Triwulan IV sertifikat BNSP sudah siap diterimakan, sehingga akuntabilitas anggaran meningkat dan kontribusi terhadap penurunan TPT dapat berjalan lebih efektif.

8. Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Realisasi anggaran dalam menunjang sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar menghadapi kendala pada Program Pengembangan Perumahan dengan serapan terendah sebesar 26,13%. Rendahnya penyerapan ini disebabkan oleh perubahan data kejadian bencana, ketidaksiapan lahan, serta hambatan administrasi dan verifikasi persyaratan calon penerima, yang mengakibatkan realisasi fisik hanya mencapai 6 unit dari total target 30 unit rumah. Kondisi tersebut menghambat optimalisasi program rehabilitasi rumah layak huni yang krusial dalam menekan persentase penduduk miskin dari sisi dimensi perumahan dan lingkungan. Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempertajam validasi data calon penerima sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan daerah.

9. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Realisasi anggaran dalam menunjang sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Blitar menghadapi kendala pada Program Penyelenggaraan Jalan dengan serapan anggaran terendah sebesar 34,82%. Meskipun terdapat hambatan administratif yang mengharuskan pengalihan pembayaran melalui mekanisme utang pada tahun anggaran 2026 sesuai PMK Nomor 109 Tahun 2023, capaian kinerja fisik program ini tetap menunjukkan hasil yang positif dengan realisasi sebesar 80,62% dari target 80,18%. Dengan tetap terpenuhinya target pembangunan fisik, fungsi konektivitas dan aksesibilitas wilayah tidak terganggu, sehingga indeks infrastruktur



tetap dapat meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah meskipun terdapat jeda dalam penyelesaian administrasi keuangan.

10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Realisasi anggaran dalam menunjang sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar menghadapi hambatan pada Program Pengelolaan Persampahan dengan serapan terendah sebesar 77,11%. Rendahnya penyerapan ini utamanya dipicu oleh tidak terealisasinya pembangunan pagar TPA Tegalasri akibat kendala administratif pada RKBMD, serta banyaknya kondisi sarana prasarana yang tidak layak pakai sehingga menghambat optimalisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam parameter pengelolaan sampah. Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan peremajaan sarana prasarana serta melaksanakan monitoring secara rutin untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dijalankan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan agar lebih tepat sasaran.

11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Realisasi anggaran dalam menunjang sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Blitar menghadapi hambatan pada Program Rehabilitasi Sosial dengan serapan terendah sebesar 60,32%. Rendahnya penyerapan pada program pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini disebabkan oleh kendala teknis pada sub-kegiatan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia terlantar, di mana pengadaan kaki palsu belum tercantum dalam sistem SIPD serta terbatasnya ketersediaan alat bantu dengar yang mayoritas merupakan produk impor. Kondisi tersebut berdampak langsung pada optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, sehingga ke depan diperlukan sinkronisasi data perencanaan pada sistem informasi pemerintahan serta percepatan koordinasi pengadaan barang agar kualitas layanan rehabilitasi sosial dapat meningkat dan memberikan kepuasan yang lebih luas bagi masyarakat penerima manfaat.



12. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Realisasi anggaran dalam menunjang sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien di Kabupaten Blitar menghadapi hambatan pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan serapan terendah sebesar 79,43%. Rendahnya penyerapan ini dipicu oleh beberapa kendala sistematis, antara lain pengurangan kuota Diklat GIS, perubahan lokasi agenda MOU BPS yang berdampak pada efisiensi biaya perjalanan dinas, serta tertundanya penyusunan Rencana Aksi Satu Data akibat belum tersedianya pedoman dari tingkat pusat dan provinsi. Selain itu, upaya efisiensi melalui penggabungan kegiatan sosialisasi RPJMD turut berkontribusi pada sisa anggaran, yang meskipun menunjukkan aspek efisiensi, namun mempengaruhi persentase realisasi administratif. Sebagai langkah tindak lanjut guna memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan penjadwalan ulang kegiatan, mempertajam perencanaan waktu, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala agar setiap program pembangunan dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

13. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama

Realisasi anggaran dalam menunjang sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama di Kabupaten Blitar menghadapi kendala pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan serapan terendah sebesar 42,97%. Rendahnya penyerapan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini terutama disebabkan oleh kurang maksimalnya pelaksanaan kolaborasi operasi cukai akibat keterbatasan jumlah personel dari pihak Bea Cukai, sehingga frekuensi kegiatan penertiban menjadi terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada optimalisasi pencapaian Indeks Kesalehan Sosial (IKS), khususnya dalam dimensi kepatuhan terhadap regulasi dan ketertiban umum yang



menjadi fondasi harmoni sosial. Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk menyusun jadwal koordinasi yang lebih proporsional dan intensif bersama instansi terkait guna memaksimalkan pengawasan rokok ilegal agar penyerapan anggaran lebih efektif dalam mendukung terciptanya ketertiban daerah.

14. Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah

Realisasi anggaran dalam menunjang sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah di Kabupaten Blitar menghadapi hambatan pada Program Penanganan Bencana dengan serapan terendah sebesar 81,31%. Rendahnya penyerapan anggaran pada program pendukung Indeks Risiko Bencana (IRB) ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tidak adanya bencana skala besar yang memerlukan aktivasi layanan dapur umum serta adanya efisiensi belanja sandang karena harga pasar yang lebih rendah dibandingkan alokasi DPA. Meski rendahnya serapan ini mencerminkan kondisi daerah yang relatif kondusif, hal tersebut memengaruhi persentase realisasi administratif dalam upaya penguatan kapasitas ketahanan daerah. Sebagai langkah ke depan, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan evaluasi berkala terhadap potensi risiko sosial agar alokasi anggaran lebih adaptif dan efisien, namun tetap menjaga kesiapsiagaan tinggi terhadap kondisi darurat yang sewaktu-waktu dapat terjadi demi menjaga tren penurunan indeks risiko bencana secara berkelanjutan.



Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan wujud sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.



3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima oleh Kabupaten Blitar dari Pemerintah Pusat.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima oleh Kabupaten Blitar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima oleh Kabupaten Blitar dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima oleh Kabupaten Blitar dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



BAB

4

PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. SPM Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)
2 .	Pendidikan Dasar
	SD
	1. Kemampuan literasi
	2. Kemampuan numerasi
	3. Indeks iklim keamanan
	4. Indeks iklim kebhinekaan
	5. Indeks iklim inklusivitas
	SMP
	1. Kemampuan literasi
	2. Kemampuan numerasi
	3. Indeks iklim keamanan
	4. Indeks iklim kebhinekaan
	5. Indeks iklim inklusivitas
3 .	Pendidikan Kesetaraan
	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	32117
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	86.16
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	78.67
2 .	Pendidikan Dasar		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	162640
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	SD		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





	1. Kemampuan literasi	Nilai	72.88
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	64.79
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	81.29
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	79.46
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66.31
	SMP		
	1. Kemampuan literasi	Nilai	79.82
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	69.06
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	73.4
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.64
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.97
3 .	Pendidikan Kesenjangan		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5009
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	9.54

4.1.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				85.12%
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini				99.68%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	32117	31990	99.60%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	86.16	86.16	100.00 %
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	78.67	78.67	100.00 %
2 .	Pendidikan Dasar				99.70 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	162640	162039	99.63 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	SD				100.00 %
	1. Kemampuan literasi	Nilai	72.88	72.88	100.00 %
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	64.79	64.79	100.00 %
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	81.29	81.29	100.00 %
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	79.46	79.46	100.00 %
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66.31	66.31	100.00 %
	SMP				100.00 %
	1. Kemampuan literasi	Nilai	79.82	79.82	100.00 %





	2. Kemampuan numerasi	Nilai	69.06	69.06	100.00 %
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	73.4	73.4	100.00 %
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.64	73.64	100.00 %
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.97	61.97	100.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan				55.98 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5009	2253	44.98 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	9.54	9.54	100.00 %

4.1.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	2,715,789,967,760
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	949,851,062,075
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	30,287,363,140
	APBD	30,287,363,140
	A. APBD DAU	29,629,225,640
	B. APBD DAK FISIK	658,137,500

4.1.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	I/b	1
2.	II/a	6
3.	II/b	24
4.	II/c	25
5.	II/d	15
6.	III/a	19
7.	III/b	16
8.	III/c	6
9.	III/d	18
10.	IV/a	6
11.	IV/b	3
12.	IV/c	1
	TOTAL	140



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	Kabupaten/Kota KAB. BLITAR
1 .	DAFTAR PERMASALAHAN
	1. Kesulitan dalam pengumpulan data capaian antar instansi
	2. Pemilahan anggaran dan kegiatan pada masing-masing sub kegiatan tidak selaras dengan tahun tahun sebelumnya
	3. 1) Tidak adanya data kebutuhan pada tahun tahun sebelumnya 2) Perubahan indikator pada setiap tahunnya
	4. 1) Data masukan terdiri dari beberapa sumber data dan instansi 2) Data tidak sinkron antar sumber data pada data yang sama 3) Waktu perilisan sumber data tidak sama dengan pengentrian data capaian SPM



4.2. SPM Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	1 . Formulir partograf
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)



	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)
	2 . Vitamin K1 injeksi
	3 . Salep/tetes mata antibiotik
	4 . Formulir bayi baru lahir
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	14 . Kader Kesehatan
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella





	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)
	14 . Peralatan Anafilaktik
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk
	16 . Tenaga medis : Dokter
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	20 . Guru PAUD
	21 . Kader Kesehatan
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)
	10 . Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)



	(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)
	3 . Alat : Tensimeter
	4 . Alat : Glukometer
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol
	7 . Alat : KIT IVA Tes
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)
	11. Alat Pelayanan KB
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan
	c. Vasektomi set
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)
	14 . Tenaga medis : Dokter
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut





	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	8 . Tenaga medis : Dokter
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)
	2 . Obat Hipertensi
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)
	6 . Tenaga medis : Dokter
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 disetiap fasyankes sesuai kebutuhan)
	2 . Fotometer atau Glukometer
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet



	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)
	6 . Tenaga medis : Dokter
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.
	9 . Tenaga profesional lainnya
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	2 . Reagen Zn TB
	3 . Masker bedah dan Masker N95
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering
	5 . Katrid tes cepat molekuler



	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)
	8 . Tuberkulin
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer
	15 . Kader Kesehatan
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan

4.2.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10765
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	10765
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	193770
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	10765
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	10765
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	10765



	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	10765
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	10765
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10765
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10765
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10765
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	712
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	3
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	449
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	310
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	10765
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10765
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Formulir partograf	Formulir	10765
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10765
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	10765
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10765
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	3
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	449
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	310

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10761
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	10761
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	10761
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	10761
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	10761
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	32283
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10761
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10761
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	36
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	14 . Kader Kesehatan	Orang	7954
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	65600
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	65600
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	65600
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	65600
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	5229
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	51809
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	10761
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	41744
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	20872
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	31308
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	10436
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	12408
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	12408





	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	119719
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	25
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	138
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	20 . Guru PAUD	Orang	0
	21 . Kader Kesehatan	Orang	7954
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	152453
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	152453
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	25
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	25
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	25
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	25
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	2292472
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	80
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	16085



	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	152453
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	70040
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	46
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1147
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	7954
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	482787
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	125
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	25
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	25
	4 . Alat : Glukometer	Unit	25
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	25
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	482787
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	25
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	25
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	25
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	512941
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	25
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	25
	c. Vasektomi set	Unit	8
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	25
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	119901





	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7954
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	201815
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	25
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	25
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	25
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	201815
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	25
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	25
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7954
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	77394
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	50
	2 . Obat Hipertensi	Paket	77394
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	25
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	25

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	25
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	36
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21385
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 disetiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	21385
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	25
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	21385
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	25
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	75
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	31
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2420
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	25
2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	22
3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	25
4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	25
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	25
6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	46
7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	50
8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	3
9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	25
11 . Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10349
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25
2 . Reagen Zn TB	Kit	100
3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	1
4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	25
5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	20698
6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	10349
7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	25
8 . Tuberkulin	Vial	25
9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	41
10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	8
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	310
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	50
13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	36
14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	31
15 . Kader Kesehatan	Orang	18

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	12183
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	24
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	12183
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	12183
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	24
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	8
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	31
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	36
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	6

4.2.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA		98.31%
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10765	10236	95,09 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	10765	10579	98,27 %
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	193770	1842480	95,09 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	10765	10236	95,09 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	10765	10236	95,09 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	10765	10236	95,09 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	10765	10236	95,09 %





	(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)				
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	10765	10236	95,09 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10765	10236	95,09 %
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10765	10236	95,09 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10765	10236	95,09 %
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	712	682	95,79 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	3	3	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	449	449	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	310	310	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	47	94,00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	38	90,48 %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	10765	10236	95,09 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10765	10283	95,52 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Formulir partograf	Formulir	10765	10283	95.52 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10765	10283	95.52 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10765	10283	95.52 %





	(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)				
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10765	10283	95.52 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	3	3	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	449	449	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	310	310	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	47	94.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	38	90.48%
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10761	10238	95.14 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	10761	10138	94.21 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	10761	10238	95.14 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	10761	10238	95.14 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	10761	10238	95.14 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	32283	30714	95.14 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10761	10238	95.14 %
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10761	10238	95.14 %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3	3	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449	449	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310	310	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	47	94.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	36	31	86.11 %
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	38	90.48 %

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





	14 . Kader Kesehatan	Orang	7954	7954	100.00 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	65600	63100	96.19 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	65600	63100	96.19 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	65600	63100	96.19 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	65600	63100	96.19 %
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	5229	5229	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	51809	51809	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	10761	9995	92.88 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	41744	40774	97.68 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	20872	20532	98.37 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	31308	31308	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	10436	10436	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Vaksin	12408	11341	91.40 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	12408	11369	91.63 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	119719	94981	79.34 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	25	25	100.00 %
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	138	138	100.00 %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46	46	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449	449	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310	310	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	38	90.48 %
	20 . Guru PAUD	Orang	0	0	100.00 %
	21 . Kader Kesehatan	Orang	7954	7954	100.00 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	152453	152453	100.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	152453	152453	100.00 %
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	25	25	100.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	25	25	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	25	25	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	25	25	100.00 %
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	2292472	2292472	100.00 %
	7 . Alat Pemeriksaan Hb	Alat	80	80	100.00 %



	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)				
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)		16085	15865	98.63 %
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	152453	152453	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	70040	64116	91.54 %
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	46	46	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449	449	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310	310	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	38	90.48 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	37	74.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	33	91.67 %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1147	1147	100.00 %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	7954	7954	100.00 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	482787	482787	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	125	125	100.00 %
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	25	25	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	25	25	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	25	25	100.00 %





5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	25	25	100.00 %
6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	482787	482787	100.00 %
7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	25	25	100.00 %
8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	25	25	100.00 %
9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	25	25	100.00 %
10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	512941	482787	94.12 %
11 . Alat Pelayanan KB	Unit			
a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	25	25	100.00 %
b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	25	25	100.00 %
c. Vasektomi set	Unit	8	8	100.00 %
12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	25	25	100.00 %
13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	119901	119901	100.00 %
14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46	46	100.00 %
15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449	449	100.00 %
16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310	310	100.00 %
17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	38	90.48 %
18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	33	91.67 %
19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7954	7954	100.00 %
7 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	201815	201489	99.84 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	25	25	100,00%
2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	25	25	100,00%
3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	25	25	100,00%



	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	201815	201489	99.84 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	25	25	100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	25	25	100.00 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46	46	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449	449	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310	310	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	38	90.48 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	33	91.67 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7954	7954	100.00 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	77394	77394	100,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	50	50	100,00%
	2 . Obat Hipertensi	Paket	77394	77394	100,00%
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	25	25	100,00%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen	25	25	100,00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	25	25	100,00%
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46	46	100,00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449	449	100,00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310	310	100.00 %



	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	38	90.48 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	36	31	86.11 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	50	47	94.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	33	91.67%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21385	21385	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	21385	21385	100,00%
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	25	25	100,00%
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	21385	21385	100,00%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	25	25	100,00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	75	75	100,00%
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46	46	100,00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449	449	100,00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310	310	100,00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	47	94.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	33	91.67 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	42	38	90.48 %





	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	31	31	100.00 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2420	2420	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	25	25	100.00%
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	25	25	100.00%
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	25	25	100.00%
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	25	25	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	25	25	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	46	46	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	50	50	100.00%
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	3	3	100.00%
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	25	25	100.00%
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10349	10349	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	1	1	100.00 %





	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	25	25	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	20698	20698	100.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	10349	10349	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	25	25	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	25	25	100.00 %
	8 . Tuberkuilin	Vial	41	41	100.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	8	8	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310	310	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	47	94.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	33	91.67 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	31	31	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	18	17	94.44 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	483	483	100.00 %
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	12183	12183	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	24	24	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	12183	12183	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	12183	12183	100.00 %
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	24	24	100.00 %



5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	8	8	100.00%
6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	449	449	100.00%
7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	310	310	100.00%
8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	31	31	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	36	33	91.67 %
10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	6	6	100.00 %

4.2.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	2,715,789,967,760
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	202,033,211,320
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	6,660,278,906
	APBD	6,660,278,906
	A. APBD DAU	5,651,958,906
	B. APBD DAK NON FISIK	8,320,000
	C. DANA BAGI HASIL	1,000,000,000

4.2.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	II/c	8
2.	II/d	4
3.	III/a	14
4.	III/b	17
5.	III/c	14
6.	III/d	16
7.	IV/a	11
8.	IV/b	6
	TOTAL	90

4.2.6. Permasalahan dan Solusi



No	Permasalahan
A.	DAFTAR PERMASALAHAN
	1 . TW 4 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat : Masih terdapat pasien jiwa yang tidak berobat secara rutin
	2 . TW 4 - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) : Kegiatan skrining telah berjalan, namun masih diperlukan peningkatan minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan, terutama dalam mengikuti kegiatan Posyandu ILP maupun pemeriksaan di Puskesmas. Selain itu, sebagian masyarakat masih merasa takut untuk melakukan pemeriksaan gula darah.
	3 . TW 4 - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi : Kegiatan skrining sudah berjalan namun perlu adanya peningkatan minat periksa di kalangan masyarakat terutama untuk mengikuti kegiatan posyandu ILP maupun pemeriksaan di Puskesmas, beberapa masyarakat takut dengan hasil pemeriksaan.
	4 . TW 4 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut : Belum semua sasaran bersedia hadir ke Posyandu Lansia serta Terdapat lansia yang meninggal dan pindah domisili sebelum sempat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	5 . TW 4 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif : Kegiatan skrining sudah berjalan namun perlu adanya peningkatan minat periksa di kalangan masyarakat terutama untuk mengikuti kegiatan posyandu ILP maupun pemeriksaan kesehatan di Puskesmas
	6 . TW 4 - Pelayanan Kesehatan Balita : Masih ada balita yang tidak rutin datang ke posyandu, sebagian orang tua sibuk, kurangnya kesadaran akan pentingnya penimbangan rutin
	7 . TW 4 - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : Terdapat bayi yang lahir prematur sehingga tidak mendapat kunjungan neonatus lengkap
	8 . TW 4 - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin : Terdapat ibu hamil yang melahirkan di rumah
	9 . TW 4 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : Pemeriksaan ibu hamil tidak sampai K6 dikarenakan sebelum K6 sudah persalinan, abortus, lahir prematur, atau IUFD serta ada 4 ibu yang meninggal sebelum K6
	10 . TW 3 - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) : Terdapat pasien yang terlambat belum dientri datanya dan masih belum semua bumil K1 melakukan testing HIV.
	11 . TW 3 - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Adanya kekurangan logistik berupa Pot Dahak.
	12 . TW 3 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat: Masih terdapat pasien jiwa yang tidak berobat secara rutin.
	13 . TW 3 - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM): Kurangnya minat periksa masyarakat terutama dalam mengikuti kegiatan posyandu ILP ataupun pemeriksaan di puskesmas.
	14 . TW 3 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Lansia tidak dapat hadir ke posyandu karena keterbatasan mobilitas, kurangnya dukungan keluarga, dan jarak antara rumah dengan posyandu yang relatif jauh.



15 . TW 3 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Kurangnya minat masyarakat mengikuti kegiatan posyandu ILP maupun pemeriksaan di puskesmas. Serta perlu adanya peningkatan kedisiplinan petugas dalam pencatatan dan pelaporan data.
16 . TW 3 - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Masih terdapat ibu bersalin yang melahirkan di rumah
17 . TW 3 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Ibu hamil mengalami abortus, IUFD (kondisi kematian janin dalam kandungan setelah usia kehamilan 20 minggu), atau lahir prematur sehingga tidak mencapai K6.
18 . TW 2 - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) : Belum semua layanan melakukan Mobile ANCT
19 . TW 2 - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) : Kegiatan skrining sudah berjalan namun perlu adanya peningkatan minat periksa di kalangan masyarakat terutama untuk mengikuti kegiatan posyandu ILP maupun pemeriksaan di Puskesmas, beberapa masyarakat memiliki ketakutan terhadap hasil pemeriksaan gula.
20 . TW 2 - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi: Kegiatan skrining sudah berjalan namun perlu adanya peningkatan minat periksa di kalangan masyarakat terutama untuk mengikuti kegiatan posyandu ILP maupun pemeriksaan di Puskesmas, beberapa masyarakat juga merasa takut dengan hasil pemeriksaan yang akan didapat jika melakukan pemeriksaan.
21 . TW 2 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Sasaran lansia tidak dapat hadir ke Posyandu karena keterbatasan mobilitas, kurangnya dukungan keluarga, dan jarak antara rumah dan Posyandu yang relatif jauh.
22 . TW 2 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Terdapat siswa yang tidak hadir pada saat skrining kesehatan. Masalah lainnya, jumlah sasaran saat riil pemeriksaan berbeda dengan data awal dari dapodik.
23 . TW 2 - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Masih terdapat ibu bersalin yang melahirkan di rumah
24 . TW 2 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Ibu hamil mengalami abortus, IUFD dan lahir prematur sehingga tidak sampai K6
25 . TW1- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) : Capaian Bumil yang di test HIV masih belum sama dengan K1, masih belum semua layanan melakukan Mobile ANCT.
26 . TW1- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis : Masih ada nya stigma di masyarakat dan tidak mengakui jika sakit batuk sehingga tidak mau melakukan pemeriksaan dahak. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap penyakit TBC.
27 . TW1- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat : Masih ada pasien jiwa yang tidak berobat secara rutin
28 . TW1- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) : Kegiatan skrining sudah berjalan namun perlu adanya peningkatan minat periksa di kalangan masyarakat terutama untuk mengikuti kegiatan posyandu ILP maupun pemeriksaan di Puskesmas, Masyarakat takut cek Gula



	29 . TW1- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi : Kegiatan skrining sudah berjalan namun perlu adanya peningkatan minat periksa di kalangan masyarakat terutama untuk mengikuti kegiatan posyandu ILP maupun pemeriksaan di Puskesmas, masyarakat masih takut dengan hasil pemeriksaan
	30 . TW1- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut : Belum semua sasaran bersedia hadir ke Posyandu Lansia.
	31 . TW1- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif : Kegiatan skrining sudah berjalan namun perlu adanya peningkatan minat periksa di kalangan masyarakat terutama untuk mengikuti kegiatan posyandu ILP maupun pemeriksaan di Puskesmas.
	32 . TW1- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Terdapat Puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan Usia Pendidikan Dasar di tribulan 2 sehingga belum memiliki data capaian SPM di tribulan 1
	33 . TW1- Pelayanan Kesehatan Balita : Masih ada anak balita yang belum melakukan penimbangan minimal 8x dalam setahun
	34 . TW1- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : Terdapat Bayi yang lahir prematur
	35 . TW1- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin : Masih ada yang melahirkan di rumah
	36 . TW1- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : Masih ada ibu hamil yang periksa K1 di triwulan 2



4.3. SPM Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
	JARINGAN PERPIPAAN
	Kuantitas SPAM
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)
	Kualitas SPAM
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)
	Kuantitas SPAM
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik
	Kuantitas SPALD
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik
	Kualitas SPALD
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





	*Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar

4.3.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1460
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	JARINGAN PERPIPAAN		
	Kuantitas SPAM		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	365
	Kualitas SPAM		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	365



	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0
	Kuantitas SPAM		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	570
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	Kuantitas SPALD		
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	190
	Kualitas SPALD		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)		
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua		
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai	Rumah Tangga	0





	standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota		
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	190

2.3.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA		99.44%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				98.88%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1460	1460	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	JARINGAN PERPIPAAN				88.77%
	Kuantitas SPAM				
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	365	324	88.77%
	Kualitas SPAM				
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	365	324	88.77%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				100.00%



	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	100.00%
	Kuantitas SPAM				
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	100.00%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				100.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	570	570	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	KUANTITAS SPALD				100.00%
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	190	190	100.00%
	KUALITAS SPALD				100.00%
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	100.00%
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua				
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh	Rumah Tangga	0	0	100.00%



	wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota				
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	190	190	100.00%

4.3.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	2,715,789,967,760
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	146,670,758,264
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	11,086,097,250
	APBD	11,086,097,250
	A. APBD DAU	11,086,097,250

4.3.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	II/b	1
2.	II/c	2
3.	II/d	2
4.	III/a	6
5.	III/b	6
6.	III/c	10
7.	III/d	11
8.	IV/a	4
9.	IV/b	1
	TOTAL	43



4.3.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	DAFTAR PERMASALAHAN
	1. Belum ada Pejabat Kepala Dinas PUPR Difinitif



4.4. SPM Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	120
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	11
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	19
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		



4.4.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA		59.96%
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				19.92%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	120	24	20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				19.92%
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	11	2	18.18 %
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	19	4	21.05 %
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	100.00%
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	100.00%
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	100.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00%



4.4.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	2,715,789,967,760
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	28,118,256,803
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	735,000,000
	APBD	735,000,000
	A. APBD MURNI	735,000,000

4.4.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	II/c	1
2.	II/d	2
3.	III/a	7
4.	III/b	4
5.	III/c	2
6.	III/d	4
7.	IV/a	6
	TOTAL	40

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	DAFTAR PERMASALAHAN
	1. Pelaksanaan SPM di Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar belum maksimal dilaksanakan karena terkendala pada penggunaan rekening Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu yang harus direncanakan pada Tahun N-1, sedangkan bencana alam tidak dapat di prediksi sebelumnya. Untuk rumah bencana tahun 2025 yang sudah masuk SIPD hanya 6 rumah yaitu pembangunan 4 rumah dan rehabilitasi ada 2 rumah sedangkan di SK Penetapan target ada total 30 rumah. Untuk SK Penetapan Target sendiri mengacu pada DPA Tahun Anggaran 2025. Maka dari itu anggaran tidak bisa terealisasi dengan maksimal.



4.5. SPM Urusan Trantibumlinmas

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)



	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)



	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan dalam bentuk perkara
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)



	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)
	2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)



	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)
	2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)



	3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran



4.5.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1369
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	14
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	4
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	150



	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)		
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1500





	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	9
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	4
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	3
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	130
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		



	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan dalam bentuk perkara	dokumen	1
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	6
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	12
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	12



	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	80
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0
	2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	7
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	4
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1



	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4



	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	40
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	179
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	36
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	3
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	50
	2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		0
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3



	3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	179
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	5
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	5
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	14
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR		
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	432
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	20
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	35





4.	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	29
5.	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	0
6.	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	0

4.5.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM				93.33 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1369	1369	100.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	14	14	100.00 %



2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	4	4	100.00 %
3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	150	150	100.00 %
4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1	1	100.00 %
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	100.00 %





6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN				99.75 %
1 . Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200	200	100.0
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				
1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	100.00 %
a.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	100.00 %
b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	100.00 %
2.Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	100.00%
1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1500	1500	100.00 %
b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	9	9	100.00 %
c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	100.00 %



d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	100.00 %
2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	4	4	100.00 %
b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	3	3	100.00 %
c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	4	100.00 %
d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	100.00 %
e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	100.00 %
3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	100.00 %
b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	100.00 %
c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	100.00 %
d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	100.00 %
e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	100.00 %
2 . Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	130	130	100.00 %
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				



	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen	1	1	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1	1	100.00 %
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	6	6	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	12	12	100.00 %
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	100.00 %
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	100.00 %
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	100.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	100.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	100.00 %



2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					
a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	12	12	100.00 %	
b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	100.00 %	
c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	80	80	100.00 %	
d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	100.00 %	
e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	100.00 %	
4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	100.00 %	
1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					
a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	100.00 %	
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	100.00 %	
c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	100.00 %	
2) . Gladi Lapangan *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					
a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	100.00 %	
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	100.00 %	
c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	100.00 %	



	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	100.00 %
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	7	7	100.00 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	4	1	100.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	100.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	100.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	100.00 %
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	4	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	4	100.00 %
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	100.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	100.00 %
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100.00 %



	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100.00 %
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100.00 %
	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	100.00 %
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	40	40	100.00 %
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	100.00 %
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	179	179	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				99.26 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200	200	100.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	88.89 %
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	36	36	100.00 %



b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	3	2	66.67 %
c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	50	50	100.00 %
2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		0	0	0.00 %
a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	100.00 %
b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3	3	100.00 %
c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3	3	100.00 %
d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3	3	100.00 %
e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3	3	100.00 %
3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	100.00 %
a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100.00 %
b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	179	179	100.00 %
c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	100.00 %



d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	5	5	100.00 %
e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	5	5	100.00 %
f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	100.00 %
g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	14	14	100.00 %
h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR				99.46 %
1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	432	432	100.00 %
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				
1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	20	20	100.0 %
2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	100.0
3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	35	33	94.29 %
4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Orang	29	26	89.66 %



	dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia				
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	0	0	100.0
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	0	0	100.00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	2,715,789,967,760
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	15,696,072,004
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,681,582,214
	APBD	1,681,582,214
	A. APBD MURNI	623,113,540
	B. APBD DAU	964,047,274
	C. DANA BAGI HASIL	94,421,400

4.5.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Satpol PP/ Damkar	BPBD
1.	I/d	1	
2.	II/a	1	
3.	II/b	1	
4.	II/c	8	1
5.	II/d	7	1
6.	III/a	14	2
7.	III/b	6	3
8.	III/c	1	
9.	III/d	10	4

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





10	IV/a	4	5
11.	IV/b	1	
12.	IV/c	1	
	JUMLAH	55	16
	TOTAL	71	

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	DAFTAR PERMASALAHAN
	1. Luas wilayah dan tingkat kerawanan bencana yang tinggi menyulitkan pemerataan pelayanan SPM
	2. Jumlah personel, kompetensi dan sertifikasi SDM kebencanaan masih terbatas.
	3. Data warga negara yang berada pada radius 0-50 meter di setiap lokasi penegakan Perda dan Perkada belum terkumpul 100%, sehingga penentuan target sebagian berdasarkan data riil dan sebagian lagi berdasarkan perkiraan
	4. Realisasi tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana tidak memenuhi target karena bencana yang terjadi hanya Hidrometeorologi saja
	5. Pada TW I dan TW II, Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP tutup mutu karena tidak ada anggaran. Pada TW III, poin sarpras tersebut terpenuhi sehingga dibuka kembali. Target untuk SK juga sudah diubah, namun SK belum ditetapkan karena menunggu PAK. Meskipun begitu, pada TW III ini target sarpras yang diisikan merupakan target sarpras terbaru mengingat anggaran untuk pembelian sarpras sudah terserap di TW III.
	6. Sub Bidang Trantibum dan Sub Bidang Damkar diampu oleh satu OPD yaitu Satpol PP dan Damkar. Pada bagian isi anggaran, terdapat isian alokasi anggaran Satker Perangkat Daerah pada masing-masing Sub Bidang yang kemudian dijumlahkan secara otomatis oleh website. Sehingga apabila pada Sub Bidang Trantibum dan Sub Bidang Damkar masing-masing diisi, total jumlahnya akan dobel, padahal Satkernya jadi satu. Untuk itu, pada pengisian alokasi anggaran Satker Perangkat Daerah, hanya diisikan pada Sub



	Bidang Trantibum yang dikurangi anggaran Program Damkar. Sementara pada Sub Bidang Damkar, alokasi anggaran satkernya adalah anggaran Program Damkar saja.
	7. Pelayanan terkait kebakaran maupun non kebakaran belum maksimal karena keterbatasan personil pada tiap pos



4.6. SPM Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
	1 . Layanan data dan pengaduan
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat
	3 . Penyediaan permakanaan
	4 . Penyediaan sandang
	5 . Penyediaan alat bantu
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
	13 . Layanan rujukan
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
	1 . Layanan data dan pengaduan
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat
	3 . Penyediaan permakanaan
	4 . Penyediaan sandang
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
	12 . Layanan rujukan
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
	1 . Layanan data dan pengaduan
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat
	3 . Penyediaan permakanaan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





	4 . Penyediaan sandang
	5 . Penyediaan alat bantu
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
	13 . Layanan rujukan
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
	1 . Layanan data dan pengaduan
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat
	3 . Penyediaan permakanaan
	4 . Penyediaan sandang
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
	12 . Layanan rujukan
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	1 . Penyediaan permakanaan
	2 . Penyediaan sandang
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial



4.6.2. Target Pencapaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1200
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	42
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	42
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	1027
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	141
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	42
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	42
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	42
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	42
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	42
	13 . Layanan rujukan	Orang	42
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	60
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	60
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	3
	4 . Penyediaan sandang	Orang	3
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	3
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	3
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	60
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	60



	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	60
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	60
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60
	12 . Layanan rujukan	Orang	60
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2775
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	16
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	16
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	2761
	4 . Penyediaan sandang	Orang	2
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	2
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	2
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	16
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	16
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	16
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	16
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	16
	13 . Layanan rujukan	Orang	16
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	60
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	60
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	10
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	60





	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	60
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	60
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	60
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60
	12 . Layanan rujukan	Orang	60
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	100
	2 . Penyediaan sandang	Orang	40
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	33
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	15
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	100

4.6.3. Realisasi Capaian SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				98.82 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1200	1056	88,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	42	42	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	42	42	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1027	1027	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	141	106	75.18%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	42	42	100.00%



	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	42	42	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	42	42	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	42	42	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	42	42	100.00%
	13 . Layanan rujukan	Orang	42	42	100.00%
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60	60	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	60	60	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	3	3	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	3	3	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	3	3	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	3	3	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	60	60	100.00%
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	60	60	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	60	60	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	60	60	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60	60	100.00%
	12 . Layanan rujukan	Orang	60	60	100.00%
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2775	2775	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	16	16	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	16	16	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	2761	2761	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	100.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2	2	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	2	2	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter	Orang	16	16	100.00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	16	16	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	16	16	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	16	16	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	16	16	100.00%
	13 . Layanan rujukan	Orang	16	16	100.00%
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60	60	100.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	60	60	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	10	10	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10	10	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	10	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	60	54	100.00%
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	60	60	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	60	60	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	60	60	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60	60	100.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2025





	12 . Layanan rujukan	Orang	60	60	100.00%
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	71	71.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	100	71	71.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	40	40	100.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	33	33	100.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	15	5	33.33%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	100	71	71.00%

4.6.4. Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. BLITAR	2,715,789,967,760
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	17,548,644,423
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,373,822,650
	APBD	639,342,650
	A. APBD DAU	639,342,650
	NON APBD	1,338,480,000
	APBN	1338480000
	A. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	1,338,480,000
	DANA LAINNYA	396,000,000

4.6.5 Dukungan Personil

No.	PNS Berdasarkan Pangkat/Golru	Jumlah
1.	III/a	6
2.	III/b	6
3.	III/c	2
4.	III/d	5
5.	IV/a	5
6.	IV/b	1
7.	IV/c	1
	TOTAL	26

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan
A.	DAFTAR PERMASALAHAN
	1. Pelayanan kebencanaan merupakan layanan yang bersifat kontinjensi, di mana realisasi pelayanan sangat bergantung pada kejadian bencana yang terjadi di lapangan, yang tidak dapat direncanakan secara pasti, sehingga target layanan SPM yang direncanakan pada indikator "Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota" tidak sebanding dengan jumlah korban aktual. Meskipun demikian, anggaran dan sarana prasarana kebutuhan dasar tetap disediakan dalam jumlah memadai, sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berskala besar. 2. Dari 136 unit usulan bantuan berupa alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas hanya 51 unit yang dapat direalisasikan karena hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa, dimana terdapat usulan alban berupa kaki palsu tidak bisa/tdk boleh dibelanjakan, berdasarkan saran dari Inspektorat karena tidak ada rekeningnya di SIPD dan barang tersebut tidak ada dalam Perbup SSH Tahun 2025. Selain itu untuk alban berupa Alat Bantu Dengar (ABD) tidak dapat dibelanjakan karena merupakan produk luar negeri, sementara kebijakan harus membelanjakan Produk Dalam Negeri (PDN). Ada ABD



	yang termasuk PDN tetapi tidak ada dalam INAPROC, sementara sesuai kebijakan diharuskan melakukan pengadaan melalui INAPROC.
	3. Penentuan target pada perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana juga sering mengalami perubahan karena sifat pandemi/bencana yang tidak dapat diprediksi, adanya perubahan mendadak pada kebutuhan layanan sosial yang mendesak serta prioritas alokasi sumber daya
	4. Target sering mengalami perubahan karena apabila ada pengurangan anggaran atau keterbatasan sumber daya, target SPM mungkin dikurangi untuk disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Sebaliknya, jika sumber daya meningkat, target mungkin dinaikkan. Selain itu juga pengaruh dari kebijakan program yang diberikan dari pusat dengan realisasi yang tidak menentu
	5. Penentuan target belum didasari pendataan melalui metode survey melainkan masih menggunakan data yang terlayani atau aduan yang masuk pada periode yang berlangsung saat itu. Pendataan belum dilakukan setiap tahun karena adanya keterbatasan anggaran untuk turun lapangan ke seluruh wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 248 desa/kelurahan



4.7. Program dan Kegiatan SPM

4.7.1. Program dan Kegiatan Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
Angka Partisipasi Sekolah					
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	285,000,000	283,752,000	99.56 %
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	500,000,000	500,000,000	100.00 %
Kekhususan PAUD					
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	544,563,000	0	0.00 %
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	41,998,600	41,970,000	99.93 %
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	69,624,800	55,309,500	79.44 %
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)				
Angka Partisipasi Sekolah					
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	10,274,543,000	3,068,256,493	29.86 %
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4,200,555,600	3,964,057,040	94.37 %
Literasi					
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	884,658,250	829,229,009	93.73 %
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	3,098,600	2,982,500	96.25 %



3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	52,270,600	40,563,685	77.60 %
4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	8,474,650	8,457,000	99.79 %
5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	10,213,600	10,213,600	100.00 %
6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	9,537,500	9,522,500	99.84 %
Numerasi					
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	3,098,600	2,982,500	96.25 %
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	52,270,600	40,563,685	77.60 %
3	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	8,474,650	8,457,000	99.79 %
4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	10,213,600	10,213,600	100.00 %
5	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	9,537,500	9,522,500	99.84 %
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	884,658,250	829,229,009	93.73 %
Keamanan					
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	11,925,000	11,925,000	100.00 %
2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	4,650,000	4,650,000	100.00 %
Kebhinekaan					
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	11,925,000	11,925,000	100.00 %



2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	4,650,000	4,650,000	100.00 %
Inklusifitas					
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	11,925,000	11,925,000	100.00 %
2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	4,650,000	4,650,000	100.00 %
1.3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
Angka Partisipasi Sekolah					
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,518,095,480	1,488,302,696	98.04 %
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	2,789,250,000	2,670,269,295	95.73 %
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	199,760,000	192,759,494	96.50 %
Literasi					
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	33,600,000	29,092,440	86.58 %
2	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	10,274,650	10,262,250	99.88 %
3	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	25,238,950	23,958,950	94.93 %
Numerasi					
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	33,600,000	29,092,440	86.58 %
2	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	10,274,650	10,262,250	99.88 %





3	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	25,238,950	23,958,950	94.93 %
1.4	Pendidikan Kesenjangan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan				
Angka Partisipasi Sekolah					
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan	Dokumen	7,739,514,060	7,684,487,988	99.29 %
	JUMLAH INDIKATOR		0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM		30,287,363,140	21,927,453,374	72.40 %



4.7.2. Program dan Kegiatan Kesehatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KABUPATEN BLITAR		6,660,278,906	4,449,248,302	66.80 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		6,660,278,906	4,449,248,302	66.80 %
1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6,660,278,906	4,449,248,302	66.80 %
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	123,107,656	123,107,656	100.00 %
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	15,360,000	15,360,000	100.00 %
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1,400,000	1,400,000	100.00 %
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	47,565,000	47,415,000	99.68 %
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	5,400,000	5,400,000	100.00 %
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	5,199,112,750	3,347,954,393	64.39 %
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	1,008,320,000	655,339,353	64.99 %
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	3,160,000	3,160,000	100.00 %
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	3,160,000	3,160,000	100.00 %
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	68,850,000	65,928,000	95.76 %
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	60,340,000	56,958,900	94.40 %



12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	124,503,500	124,065,000	99.65 %
	JUMLAH INDIKATOR		6,660,278,906	4,449,248,302	66.80 %
	JUMLAH PROGRAM		6,660,278,906	4,449,248,302	66.80 %



4.7.3. Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KABUPATEN BLITAR		11,086,097,250	10,010,271,736	90.30 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		6,722,179,250	5,924,525,750	88.13 %
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		6,722,179,250	5,924,525,750	88.13 %
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	84,479,000	0	0%
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1,350,000,000	1,143,986,148	84.74 %
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	3,852,700,250	3,354,528,500	87.07 %
4	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1,435,000,000	1,426,011,102	99.37 %
	JUMLAH INDIKATOR		6,722,179,250	5,924,525,750	88.13 %
	JUMLAH PROGRAM		6,722,179,250	5,924,525,750	88.13 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		4,363,918,000	4,085,745,986	93.63 %
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota		4,363,918,000	4,085,745,986	93.63 %
1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	4,363,918,000	4,085,745,986	93.63 %
	JUMLAH INDIKATOR		4,363,918,000	4,085,745,986	93.63 %
	JUMLAH PROGRAM		4,363,918,000	4,085,745,986	93.63 %





4.7.4. Program dan Kegiatan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KABUPATEN BLITAR		735,000,000	150,000,000	20.41 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		735,000,000	150,000,000	20.41 %
1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		0	0	0.00 %
	JUMLAH INDIKATOR		0	0	0.00 %
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		735,000,000	150,000,000	20.41 %
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	165,000,000	30,000,000	18.18 %
2	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	570,000,000	120,000,000	21.05 %
	JUMLAH INDIKATOR		735,000,000	150,000,000	20.41 %
	JUMLAH PROGRAM		735,000,000	150,000,000	20.41 %



4.7.5. Program dan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KABUPATEN BLITAR		2,286,523,721	1,963,821,119	85.89 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		770,414,674	673,820,094	87.46 %
1.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		652,101,692	583,029,685	89.41 %
1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	164,864,341	108,770,100	65.98 %
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	27,067,101	26,587,234	98.23 %
3	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	357,104,450	350,790,000	98.23 %
4	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	56,605,000	54,500,000	96.28 %
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	45,980,800	42,382,351	92.17 %
	JUMLAH INDIKATOR		652,101,692	583,029,685	89.41 %
1.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		106,906,700	81,840,409	76.55 %



1	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	2,000,000	0	0%
2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	94,421,400	73,640,409	77.99 %
3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	10,485,300	8,200,000	78.20 %
	JUMLAH INDIKATOR		106,906,700	81,840,409	76.55 %
1.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		11,406,282	8,950,000	78.47 %
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	11,406,282	8,950,000	78.47 %
	JUMLAH INDIKATOR		11,406,282	8,950,000	78.47 %
	JUMLAH PROGRAM		770,414,674	673,820,094	87.46 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1,228,055,047	1,090,835,672	88.83 %
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		13,687,500	13,277,433	97.00 %
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	13,687,500	13,277,433	97.00 %
	JUMLAH INDIKATOR		13,687,500	13,277,433	97.00 %
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		751,119,307	732,198,939	97.48 %
1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	75,000,000	74,604,138	99.47 %
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	12,630,000	12,370,495	97.95 %
3	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	663,489,307	645,224,306	97.25 %
	JUMLAH INDIKATOR		751,119,307	732,198,939	97.48 %





2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		446,068,240	328,359,300	73.61 %
1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	26,680,000	6,600,000	24.74 %
2	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	383,195,740	301,359,300	78.64 %
3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	35,552,500	19,800,000	55.69 %
	JUMLAH INDIKATOR		446,068,240	328,359,300	73.61 %
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		17,180,000	17,000,000	98.95 %
1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	7,180,000	7,180,000	100.00 %
2	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	10,000,000	9,820,000	98.20 %
	JUMLAH INDIKATOR		17,180,000	17,000,000	98.95 %
	JUMLAH PROGRAM		1,228,055,047	1,090,835,672	88.83 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		288,054,000	199,165,353	69.14 %
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		195,764,000	132,392,000	67.63 %
1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	113,030,000	80,705,000	71.40 %
2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	15,200,000	2,697,000	17.74 %
3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	12,000,000	4,700,000	39.17 %
4	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	23,390,000	13,210,000	56.48 %



5	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	32,144,000	31,080,000	96.69 %
	JUMLAH INDIKATOR		195,764,000	132,392,000	67.63 %
3.2	Investigasi Kejadian Kebakaran		10,080,000	0	0.00 %
	JUMLAH INDIKATOR		10,080,000	0	0.00 %
3.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		82,210,000	66,773,353	81.22 %
1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	17,980,000	10,526,400	58.55 %
2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	64,230,000	56,246,953	87.57 %
	JUMLAH INDIKATOR		82,210,000	66,773,353	81.22 %
3.4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		0	0	0.00 %
	JUMLAH INDIKATOR		0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM		288,054,000	199,165,353	69.14 %



4.7.6. Program dan Kegiatan Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KABUPATEN BLITAR		639,342,650	211,689,220	33.11 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		639,342,650	211,689,220	33.11 %
1.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		562,099,700	166,212,720	29.57 %
1	Penyediaan permakanaan	Orang	36,000,000	35,096,500	0%
2	Penyediaan sandang	Orang	2,310,000	2,166,720	0%
3	Penyediaan alat bantu	Orang	479,572,500	85,525,500	0%
4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1,975,000	1,840,000	0%
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	11,320,000	11,187,000	0%
6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	18,115,200	17,952,500	0%
7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	950	880	0%
8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2,555,000	2,400,000	0%
9	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	6,895,000	6,757,500	0%
10	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	2,407,000	2,407,000	0%
	JUMLAH INDIKATOR		562,099,700	166,212,720	29.57 %



1.2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		77,242,950	45,476,500	58.87 %
1	Penyediaan makanan	Orang	65,818,950	35,775,000	54.35 %
2	Penyediaan sandang	Orang	3,396,000	2,515,000	74.06 %
3	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	5,085,000	4,535,000	89.18 %
4	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2,943,000	2,651,500	90.10 %
	JUMLAH INDIKATOR		77,242,950	45,476,500	58.87 %
	JUMLAH PROGRAM		639,342,650	211,689,220	33.11 %

**5.1. Penutup**

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan *mandatory* yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan LPPD memuat laporan kinerja yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan laporan capaian standar pelayanan minimal (SPM). Dasar hukum kewajiban LPPD adalah Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pedoman teknis berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2025 dilakukan melalui sistem operasional prosedur (SOP) yang terbakukan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan penyusunan LPPD, mulai dari pengumpulan data sampai dengan reviu oleh Inspektorat dilakukan sesuai dengan kaidah terbaik penyusunan LPPD. SOP ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan berasal dari perangkat daerah yang mengampu dan memenuhi kaidah kualitas dan relevansi data kinerja yang baik. Penyusunan LPPD melibatkan seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan secara teknis oleh Bagian Tata Pemerintahan. Laporan ini juga





sudah melalui tahap verifikasi data oleh Bagian Tata Pemerintahan dan validasi data oleh Inspektorat, sehingga memenuhi standar kualitas data.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2025 secara umum berjalan cukup maksimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh komponen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri. Hal tersebut dapat diraih dengan tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah beserta unsur pimpinan daerah, kolaborasi dengan stakeholder terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berjalan kondusif, tertib, lancar, dan sukses. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Blitar selama tahun 2025 maupun dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Melalui mekanisme penyampaian LPPD ini, Pemerintah Kabupaten Blitar membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran konstruktif, baik untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang.

Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025, dengan harapan semoga kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa dapat ditingkatkan dan memiliki manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala do'a, usaha, langkah, dan upaya kita untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya.

